Nurasiah FaqihSutan Hrp

ISLAM
Dan
POLITIK
DI RUSIA

Nurasiah FaqihSutan Hrp

ISLAM Dan POLITIK DI RUSIA

CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008-8209 (0813-6106-0465)
Email: cv.pusdikramitrajaya@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Yang Diatur Dan Diubah Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002
Bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **i** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **c**, huruf **d,** huruf **f,** dan/atau huruf **h** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **a**, huruf **b**, huruf **e**, dan/atau huruf **g** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Islam Dan Politik Di Rusia

Cet. 1. – Medan CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022
Januari. 203 hlm, 25 Cm.
Bibiografi. 205
Hak Cipta Pada, Penulis Dan Penerbit
Januari 2022

Karya
Nurasiah FaqihSutan Hrp

Diterbitkan Oleh:
CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008 - 8209 (0813-6106-0465)
Email: cv.pusdikramitrajaya@gmail.com

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia)
IKAPI. No. 049/SUT/2020
Dicetak Oleh CV.Pusdikra Mitra Jaya.
PMJ. NO. 08/ B.1/PMJ/ ISBN/I/ 2022

Copyright © 2022 - CV. Pusdikra Mitra Jaya

Cetakan Pertama Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang. Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Atau Seluruh Isi Buku Ini Dengan Cara Apapun, Termasuk Dengan Cara. Penggunaan Mesin Foto Copi, Tanpa Izin Sah Dari Penerbit.

ISBN: 978-623-6853-92-4

KATA PENGANTAR

Sampai saat ini di Indonesia, berita apapun tentang Rusia, jangankan tentang umat Muslim dan konfigurasi perpolitikan mereka, adalah sesuatu yang sulit dijangkau dan minim pula. Atas alasan ini, apa yang dihadirkan buku ini benar-benar tidak dapat diabaikan.

Buku ini berasal dari kerja penelitian penulis dalam tugas mata kuliah S3 "ISLAM DAN POLITIK DI BERBAGAI NEGARA" di bawah asuhan bapak Prof. Dr. Din Syamsuddin. Kendala yang sudah penulis bayangkan akhirnya benar-benar membuat pengerjaan tulisan ini stuck. Tetapi, penulis tidak patah semangat dan malah bertambah penasaran untuk menyelesaikannya. Dengan bantuan referensi dari teman-teman yang sedang berada di luar negeri, akhirnya tugas tersebut selesai.

Harus diinformasikan bahwa buku ini, terutama pada pembahasan intinya tentang struktur dan infrastruktur politik masyarakat Muslim Rusia, utamanya bersandar pada karya Shireen T. Hunter (*Islam in Russia – The Politics of Identity and Security*), merupakan hasil kerja penelitian yang mendalam dan serius. Dengan kredibilitas tersebut, buku ini dapat memenuhi kebutuhan referensi bagi jurusan-jurusan Politik Islam pada perguruan-perguruan tinggi Islam khususnya, dan matakuliah-matakuliah terkait Islam dan Politik umumnya. Di samping itu, buku ini dapat juga diminati oleh masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi tentang negara Rusia dan masyarakat Muslim Rusia.

Akhirnya, bagaimanapun buku ini bukan suatu kata akhir tentang masalah ini. Data-data tambahan dan masukan akan terus dbituhkan untuk kesempurnaan pembahasan topik Islam dan Politik di Rusia Masa Putin.

Medan, Januari 2021

Hormat Penulis

Nurasiah FaqihSutan Hrp MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 6

D. Asumsi Penelitian 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II : GAMBARAN PROFIL (Islam di Rusia Pasca Uni Soviet . 11

A. Sejarah 12

B. Demografi 15

C. Geografi 17

D. Pendidikan 19

E. Ekonomi 26

F. Politik dan Pemerintahan 29

BAB III : NASIONALISME DAN IDENTITAS NASIONAL DI NEGARA FEDERASI RUSIA (Antara Basis Etnis dan Agama 31

A. Evolusi Identitas Nasional Rusia Pasca Keruntuhan Uni Soviet 32

B. Pandangan dan Visi Putin tentang Nasionalisme dan Identitas Nasional Rusia 47

BAB IV : FAKTOR ISLAM DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN 59

A. Kebijakan Dalam Negeri 60

1. Pemikiran Politik Monosentris dan Intoleran Bangsa Rusia 60

2. Sejarah Rusia dalam Sistem Otoritarian 63
3. Momentum Desentralisasi dan Kebijakan Resentralisasi di Rusia 64
B. Kebijakan Luar Negeri 95
1. Doktrin Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia 95
2. Konsep-Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia Pasca Soviet 106
C. Kesimpulan 121
BAB V : KEHIDUPAN DAN AKTIFITAS POLITIK UMAT ISLAM RUSIA FEDERAL 123
A. Infrastruktur dan Mobilisasi Aktifitas Politik Umat Islam Rusia 124
1. Momentum Mobilisasi Politik Umat Islam 125
2. Badan-Badan Keagamaan dan Spiritual Pusat Rusia: CSBM dan RCM 152
3 Badan-Badan Spiritual Regional Utama 157
B. Pemikiran Politik Islam di Rusia 164
C. Bayang-Bayang Ekstrimis dan Militansi Islam di Rusia 183
1. Faktor-Faktor Berkembangnya Militansi Islam Rusia 186
2. Prospek Ekstrimisme Rusia *vis a vis* Respon dan Kebijakan Federal 192
3. Kesimpulan 195
BAB VI : KESIMPULAN 197
REFERENSI 201

❖❖❖

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberpihakan Rusia terhadap Iran dalam isu pengayaan nuklir di negeri itu, yang tengah sangat mengusik dan diributkan Amerika saat ini, memperlihatkan betapa kehidupan politik Rusia masih mempertimbangkan dan bergantung pada bangsa-bangsa muslim di sekitarnya. Asumsi ini lebih terbukti lagi pada tindakan Rusia mendekati dan meminta dimasukkan sebagai anggota OKI, sebuah organisasi negara muslim sedunia yang paling berpengaruh. Dan yang menjadi catatan dalam konteks pembahasan makalah ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintahan Rusia—sekarang dipegang presiden Vladimir Putin—yang mendekati negara-negara muslim tersebut kontradiktif dengan tindakan militerismenya yang bahkan sudah mencapai tahap *annihilated* dalam mengatasi konflik dengan warga muslimnya sendiri, seperti suku Chechen di Chechnya.

Melihat kontradiksi antara kebijakan luar dan dalam negeri presiden Putin terkait dengan umat muslim tersebut maka adalah menarik untuk mempertanyakan dan meneliti apakah tindakan-tindakan politiknya itu adalah merupakan bagian dan kelanjutan ceritera dari sebuah episode panjang dan berkelanjutan lakon antagonistis bangsa Rusia terhadap kelompok muslim di negeri tersebut, yang pastinya merefleksikan kekacauan orientasi politik Rusia terhadap umat Islam juga kebingungan jati diri dan identitas kebangsaan negara Rusia sendiri.

Seperti dilaporkan sejarah, kontak Islam dan masyarakat muslim dengan Rusia telah melewati masa satu milenium. Dan selama masa itu, hubungan yang tercipta antara kedua pihak dapat dikatakan seluruhnya berbentuk negatif dan permusuhan. Shireen Hunter, seorang ahli Islam kawasan Rusia dan Asia Tengah, mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah mereka bangsa Rusia telah membentuk persepsi terhadap masyarakat muslim dalam 500 abad pertama sebagai "*the hostile others*" dan 500 abad berikutnya sebagai "*the non-civilized conquested*". (Hunter, 2004; 3-4)

Sebelum menguasai sepenuhnya negeri Rusia pada abad 13 M, sejak abad 10 M Islam dan kaum muslim bagi bangsa Rusia hanyalah sebagai tetangga jauh dan lawan kompetisi yang walaupun dipandang negatif dan dicurigai tetapi belum terukir sebagai mimpi buruk. Diawali ketika dinasti Mongol menginvasi negara tradisional Rusia masa Kievan di abad 13 M, apalagi kemudian dilakukannya pengIslaman Golden-Horde awal abad 14 oleh Ozbek Khan, persepsi Islam sebagai agresor, penakluk dan opresor tumbuh dan seterusnya mengakar dalam benak bangsa Rusia. Islam dan masyarakat muslim diasosiasikan dengan imperialis dan ekspansionis Mongol, yang dianggap telah mendesakkan nilai-nilai budaya dan gaya hidup yang asing dan rendah kepada bangsa Rusia. Bangsa Rusia bahkan mengkambing-hitamkan semua prilaku politik buruk penguasa Rusia sendiri sebagai pengaruh dari budaya Mongol Islam, yang dicap tiranik, despotis, memunculkan perbudakan dan ketidakbebasan. Dapat diduga yang muncul sebagai implikasinya adalah gap budaya dan proyeksi diri yang terpisah dari segala identitas Islam dan masyarakat muslim. Masyarakat muslim adalah 'bangsa asing yang merupakan musuh' sehingga bangsa Rusia harus berjuang menundukkannya dan menutup diri rapat-rapat dari segala pengaruhnya. Dengan persepsi begini bangsa Rusia bergerak membalas ekspansi ke tanah-tanah kekuasaan muslim dan akhirnya berhasil merebut kedaulatannya sambil mencengkeramkan kekuasaannya atas wilayah-wilayah muslim, diawali dengan ditundukkannya dinasti Khan Kazan tahun 1552. (Hunter, 2004;5)

Dengan kemenangan Rusia tersebut, hubungan Rusia-Muslim pun memasuki pola '*The Conqueror*' dan '*The Conquested*'. Selama 5 abad belakangan, bangsa Rusia telah melewati sejarah kenegaraan mereka dengan sistem, ideologi dan model kemimpinan yang terus berganti dan berbeda. Namun, semuanya sama dalam kebijakan non-akomodatif dan represif terhadap warga muslimnya. Pertama di bawah sistem Kekaisaran atau masa kekuasaan para Tsar (*Czar*) yang berlangsung sejak abad 16 M sampai awal abad 20 M, dimulai ketika terbentuknya Rusia sebagai *statehood* setelah mengalahkan dinasti Khan Kazan. Kekaisaran Rusia yang menganut feodalisme tersebut menetapkan agama Kristen ortodoks sebagai ideologi pemerintahan. Tentunya banyak dipengaruhi oleh kebencian dan persepsi buruk mereka terhadap Islam selama di bawah pemerintahan kaum muslim

Mongol, para kaisar ini telah mengidentifikasi jatidiri dan kebangsaan Rusia kepada nilai dan peradaban 'Eropa' ketimbang 'Asia' maupun 'Mixed Euro-Asia'. Pendiri kekaisaran Rusia memilih untuk mewarisi ideologi kekaisaran Bizantium yang mempersatukan agama dengan kekuasaan politik. Bahkan, seakan ingin mencetak sejarah tersendiri dalam menunjukkan superioritas peradaban dan kebenaran kristen ortodoks, kekaisaran Rusia memperketat ideologinya dengan menyatupadukan agama, negara dan juga etnis. Artinya, menjadi seorang Rusia berarti adalah menganut kristen ortodoks dan berasal dari suku Slavian. Jadi selama 4 abad masa Kekaisaran, ideologi yang mengarahkan kepemimpinan sentralistik dan konservatif di Rusia serta politik represif, diskriminatif, eksklusifitas dan bahkan *annihilated* (pemusnahan) terhadap Islam dan kaum muslim adalah ideologi 'Rusiafikasi' (identitas ke-Rusia-an) yang bermuatkan paham etnis-keagamaan.

Mulai awal abad 20 tepatnya tahun 1917, kebijakan represif dan politik asimilatif juga *annihilated* (pemusnahan) tersebut dijalankan atas nama ideologi sosialis yang didasarkan pada nilai-nilai materialis-sekuler. Ditandai dengan revolusi Rusia tahun 1905, rejim Tsar kehilangan dukungannya dan akhirnya resmi tumbang digantikan kekuatan politik Bolshevik (komunis) yang memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan atas pemerintahan transisi (provisional). Negeri Rusia lalu dikendalikan pemerintahan Sovyet Bersatu (Uni Sovyet) yang menjalankan politik otoritarian dan 'tangan besi', dan menghendaki unifikasi ketat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat atau dengan kata lain, pelumpuhan total atas pluralitas nilai-nilai tradisi dan kultural masyarakat terutama agama. Pemerintahan komunis Uni Sovyet pun mengidentifikasi sosialisme sebagai jati diri dan identitas kebangsaan Sovyet seperti ketika Kekaisaran Rusia menetapkan kristen ortodoks dan Slavianisme sebagai identitas bangsa Rusia. Untuk tujuan itu, diberlakukan program 'Sovyetisasi' yaitu penciptaan manusia Sovyet (Sovyet Man) terhadap seluruh penghuni negara Uni-Sovyet, dengan strategi utamanya yaitu memutuskan orang dari ikatan tradisi dan nilai-nilai masa lalu mereka kemudian memaksanya hidup dalam dunia dan cita-cita sosialis seutuhnya. Karena Islam dipandang sebagai agama paling resisten sekaligus paling kukuh membentuk identitas kaum muslim, praktis program anti-agama di negeri ini dominan terarah

kepada Islam. Bahkan tidak cukup dengan itu, kebencian dan ketakutan para pemimpin komunis Sovyet terhadap Islam disosialisasikan lagi melalui program khusus kampanye anti-Islam. Ringkasnya, terlepas dari janji universalitas dan kesamarataan yang ditawarkan sistem dan ideologi sosialis, kehidupan umat Islam pasca pemerintahan Tsar justru jauh lebih buruk di semua aspek. Selama lebih dari 6 dekade kampanye anti Islam yang secara estafet dijalankan semua pemimpin Bolshevik, termasuk Gorbachev yang memunculkan ide dan program keterbukaan (Glasnost) dan restrukturisasi (Prestroika), Rusia hampir berhasil melakukan penghancuran total terhadap Islam dan umat Islam; secara institusional dan intelektual, relijiusitas dan kultural. (Hunter, 2004; 17-29)

Ternyata, rezim Uni Sovyet menemui kegagalannya dan satu lagi rejim di Rusia runtuh. Kejatuhan Uni Sovyet ini menjadi peristiwa yang paling tragedis dan traumatis dalam sejarah Rusia karena telah memporak-porandakan dan merubah semua aspek kehidupan rakyat Rusia, situasi geopolitis Rusia serta status dan percaturan politik negeri ini di kancah internasional. Negara Rusia mengalami krisis dan disorientasi total yang hanya dapat dibandingkan dengan keruntuhan Rusia masa Kievan akibat serangan Mongol, yang mengakibatkan arah perkembangan baru negara dan peradaban Rusia. Persoalan paling mendasar adalah terkoyak-koyaknya identitas nasional dan kebutuhan akan pencarian identitas baru bangsa.

Rusia akhirnya tergiring memilih sistem Republik Federal untuk menyelamatkan dirinya sebagai bangsa. Setelah terpaksa harus melepaskan sejumlah wilayahnya yang berhasil berdiri sendiri, kini Rusia disibukkan dengan gejolak *euphoria* kebebasan dan liberalisasi politik yang melanda semua kelompok masyarakatnya khususnya kelompok penduduk muslim yang selama ini paling tertekan. Dengan latar belakang sejarah perpolitikan Rusia terhadap umat Islam tersebut maka cukup banyak alasan untuk meneliti bagaimana Rusia yang kini memasuki era demokratisasi—pertama kali sepanjang sejarahnya—memandang dan menempatkan kelompok masyarakat muslim dalam pembentukan jatidiri baru bangsa Rusia dan dalam kehidupan politik di negeri tersebut. Di pihak lain bagaimana pula umat Islam Rusia mengekspresikan eksistensi dan kepentingan politik mereka. Benarkah

mereka telah mendapatkan demokratisasi dan otonomisasi yang diamanahkan dalam ideologi Rusia baru tersebut.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan politik pemimpin Rusia Federal terhadap umat Islam serta kehidupan politik umat Islam masa Rusia Federal ini akan disoroti dalam konteks dua peristiwa aktual yang menginternasional tindakan kontradiktif presiden Putin; pertama, pengusulan Rusia menjadi anggota OKI dan kedua, penarikan keputusan pemberian otonomi diikuti dengan pembantaian babak kedua penduduk muslim Chechnya.

Jelasnya, pertanyaan yang berusaha dijawab oleh makalah ini yaitu :

1. Bagaimana Putin mengkonsepsi nasionalisme Rusia dan bagaimana kedudukan unsur-unsur etnis dan agama, dalam hal ini Islam, dalam identitas kebangsaan negara Rusia yang baru tersebut.
2. Apa yang merupakan dasar-dasar kebijakan politik dalam dan luar negeri Putin dan bagaimana faktor-faktor Islam dan kepentingan umat Islam terkait dalam kebijakan-kebijakannya tersebut; apakah kebijakan luar negeri Rusia merangkul negeri-negeri muslim dunia merupakan perealisasian kepentingan penduduk muslim Rusia ?
3. Kepentingan politik apa yang sedang diperjuangkan umat Islam Rusia dan bagaimana umat Islam Rusia mengekspresikan kepentingan politik mereka dan merespon kebijakan-kebijakan pemerintah non-muslim mereka ?
4. Pemikiran politik Islam apa yang berkembang dalam masyarakat Rusia dan bagaimana bentuk-bentuk gerakan politik masyarakat muslim Rusia tersebut ?
5. Mengapa potensi ekstrimitas berkembang dalam masyarakat Rusia dan sejauh mana ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian makalah ini adalah

1. Untuk mengetahui konsepsi ideologis dan strategis pemerintahan Rusia Federal berkenaan dengan penduduk muslim negeri tersebut.

2. Untuk menggambarkan dilema hubungan pemerintah Rusia dengan umat Islam.
3. Untuk mengetahui perkembangan kehidupan sosial politik masyarakat muslim Rusia khususnya dalam hal faktor-faktor sosial-politik dan ideologis dalam gerakan dan reaksi-reaksi politik umat Islam Rusia dalam pemerintahan non-muslim mereka.

Signifikansi penelitian ini adalah dalam hal pemenuhan informasi yang hampir tidak ada tentang masyarakat muslim Rusia dan kehidupan sosial-politik mereka, akibat kebijakan politik isolasi yang harus mereka jalani selama berabad-abad. Informasi tentang eksistensi dan perjuangan umat Islam Rusia ini akan menyadarkan dan menggugah perhatian pembaca bahwa kenyataan beratus-ratus abad di bawah tekanan, penindasan dan permusuhan penguasa mereka tidak membuat sejarah Islam di Rusia, tidak seperti sejarah Islam di Spanyol, terhapus dan lenyap melainkan masih tetap hidup bahkan sekarang sedang menemukan momentumnya untuk bangkit dan mengukir kembali wajahnya di *landscape* peradaban umat Islam dunia.

D. Asumsi Penelitian

Pemimpin Federal Rusiapun tampaknya belum sepenuhnya *concerned* dan *committed* untuk melakukan demokratisasi dan otonomi terhadap kelompok muslim. Kenyataan bahwa mereka adalah produk dari ideologi Sovyet-Uni kentara dalam kebijakan dan tindakan-tindakannya; Boris Yeltsin akhirnya memutuskan untuk menghentikan desentralisasi sementara Putin kemudian menetapkan penarikan keputusan pemberian otonomi kepada umat Islam Chechnya. Putin yang memang merupakan penyusun skenario dan aktor utama operasi pembantaian terhadap gerakan perlawanan Chechnya sejak masa Boris Yeltsin, kini pada masa pemerintahannya melakukan pembantaian jilid II yang jauh lebih beringas dan membabi-buta. Sementara kepada penduduk muslim yang tidak memberontak, Putin bersikap akomodatif secara tarik ulur dan memberikan kebebasan tetapi dengan penuh kecurigaan. Dan menariknya, kebijaksanaan dalam negeri Putin ini dilakukan seiring semakin gencarnya beliau membangun hubungan eksternalnya dengan negara-negara muslim sekitarnya dan seluruh dunia.

Kebijakan pembantaian dan sikap antagonistis Putin terhadap penduduk muslim yang memberontak diasumsikan sebagai manifestasi karakter otoritarian yang masih kental pada diri pemimpin Rusia Federal. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan akomodatif Putin berkenaan dengan umat Islam yang tidak memberontak maupun hubungan yang dibangun dengan negeri-negeri muslim di seluruh dunia adalah berpijak pada kepentingan kekuasaan negara yaitu: untuk mengukuhkan pengakuan penduduk muslim dalam negeri akan kedaulatan pemerintah; dan mencari dukungan dunia muslim internasional akan kekuasaan dan ideologi sentralisasi Putin.

Di pihak lain, melihat dramatisasi simbol-simbol Islam dalam perjuangan kaum muslim Chechnya akhir-akhir ini dan terjadinya perubahan isu dan orientasi dalam misi perjuangan penduduk Chechnya, maka asumsi telah menyusupnya ideologi fundamentalisme atau terlibatnya kelompok fundamentalisme Islam eksternal dalam perjuangan kemerdekaan penduduk Chechnya semakin mendapatkan dukungannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis karena akan meneliti praktek politik rejim Rusia dan kehidupan sosial politik masyarakat muslim Rusia. Sementara untuk menguji pengaruh ide-ide dan pemikiran politik tertentu terhadap prilaku politik umat Islam Rusia digunakan pendekatan fenomenologi. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya untuk menggambarkan, menjelaskan secara sistematis dan akurat dan menentukan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya yang relevan dalam hal kebijakan politik pemerintahan Rusia berkenaan dengan umat Islam dan bentuk-bentuk ideologi serta respon politik umat Islam Rusia.

Data penelitian ini akan dikumpulkan melalui metode kepustakaan, internet, dan dokumen resmi. Seluruh data selanjutnya akan diklasifikasi berdasarkan masalah yang dibahas. Lalu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif atau kerangka analisa "Faktor-Faktor Penentu" (Determinant Factors), "Konflik Kepentingan" serta "Teori Kebijakan Luar negeri".

F. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
4. Asumsi Penelitian
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Pembahasan

BAB II. Islam di Rusia Pasca Uni Sovyet : Gambaran Profil
1. Sejarah : a. Sejarah Singkat Rusia
   b. Sejarah singkat umat Islam Rusia
2. Demografi : a. Penduduk Rusia
   b. Penduduk muslim Rusia
3. Geografi : a. Geografi Negara Rusia
   b. Distribusi Geografis Umat Islam Rusia
4. Pendidikan : a. Pendidikan di Negara Rusia
   b. Infrastruktur Pendidikan Islamdi Rusia
5. Ekonomi : a. Ekonomi Rusia
   b. Ekonomi Masyarakat Muslim Rusia
6. Politik & Pemerintahan : a. Negara Rusia
   b. Umat Islam Rusia

BAB III. Nasionalisme dan Identitas Nasional di Negara Federasi Rusia: antara basis etnis dan agama
1. Evolusi Identitas Nasional Rusia Pasca Keruntuhan Uni Soviet
2. Pandangan dan Visi Putin tentang nasionalisme dan identitas nasional Rusia

BAB IV. Faktor Islam dalam kebijakan-kebijakan Presiden Vladimir Putin
1. Kebijakan dalam negeri
2. Kebijakan luar negeri

BAB V. Kehidupan dan Aktifitas Politik Umat Islam Rusia Federal

1. Infrastruktur dan mobilisasi aktifitas politik umat Islam Rusia
2. Pemikiran Politik Islam di Rusia
3. Bayang-Bayang ekstrimis dan militansi Islam di Rusia

BAB VI. Kesimpulan

❖❖❖

BAB II

GAMBARAN PROFIL
(Islam di Rusia Pasca Uni Soviet)

BAB II
GAMBARAN PROFIL
(Islam di Rusia pasca Uni Soviet)

A. Sejarah

1. Sejarah Singkat Rusia

Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang luas mulai dari sebelah Timur Eropa sampai Utara Asia. Dengan luas 17.075.400 km/sup2 negara ini menjadi negara terbesar di dunia yaitu lebih dua kali wilayah Cina/Tiongkok, Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menempati peringkat ke 7 terbanyak setelah Cina, India, Amerika, Indonesia, Brazil dan Pakistan.

Negara Rusia sekarang dahulunya adalah negara bagian terbesar dari Pemerintahan Uni Sovyet yang telah runtuh. Rusia adalah ahli waris utama Uni Sovyet. Negara ini mewarisi 50 % jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50 % aset-aset ekonomi dan persentajaannya. Saat ini Rusia berusaha keras meraih status sebagai negara adidaya lagi tetapi meskipun tetap menjadi negara penting sampai sekarang Rusia belum bisa mencapai kebesaran status Uni Sovyet dahulu.

Sejarah Rusia diawali dengan perpindahan bangsa-bangsa Skandanavia yaitu bangsa Varangian dipimpin oleh tokoh semi-legendaris, Rurik. Dengan menyeberangi Laut Baltik Rurik memasuki kota Novogrod dan pada tahun 862 M memerintah di sana. Pada tahun 882 Rurik menguasai Kiev, kota Slavia yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandanavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989 Vladimir I meluaskan kekuasaan wilayah Kiev hingga Kaukasus dan Laut Hitam serta mengambil ajaran gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan cucu Jengiz Khan.

Bangsa Mongol dikalahkan pertama kali oleh Dimitri Donskoy tahun 1380 dengan kemenangan di Kulikovo. Selanjutnya raja-raja Rusia terus melakukan konsolidasi dan menyatukan daerah Rusia yang tercerai berai dan pada puncaknya di tangan raja Ivan IV berhasil melenyapkan kekuasaan Dinasti Mongol di Rusia setelah beliau berhasil menaklukkan dinasti Khan Kazan (1552), Astrakhan (1516) serta Siberia. Pemerintahan

Rusia dilanjutkan oleh penerus Ivan IV yang dikenal dengan "Ivan the terrible", hingga saatnya wangsa Romanov naik tahta diawali dengan diangkatnya Michael Romanov sebagai Tsar (1613), dan lalu menjadikan negeri ini sebagai dinasti Romanov sampai selama 304 tahun berakhir pada tahun 1917 dengan Tsar Nicholas II sebagai Tsar terakhir. Setelah kekuasaan Tsar berakhir, pada bulan Pebruari 1917 dibentuk pemerintahan provinsi di bawah pimpinan pangeran Lylov dan Alexander Kerensky hingga 25 Oktober 1917. Setelah itu muncul pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir Ilych Lenin. Kekuasaan Lenin dilanjutkan oleh Josef Stalin (1922) yang membidani pemerintahan diktator Uni Soviet (Dewan Tunggal) dan merangkul negara-negara sekitar Rusia ke dalam satu kekuasaan Rusia. Pemerintahan Uni Sovyet berakhir setelah pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Michael Gorbachev mengundurkan diri dan kemudian berkibarlah bendera tiga warna Rusia di Kremlin. Pemerintahan Federal Rusia terbentuk menggantikan pemerintahan Uni Sovyet, dengan Boris Yeltsin sebagai presiden pertama dilanjutkan oleh Vladimir Putin yang masih memegang kekuasaan tersebut hingga sekarang.[1]

2. Kaum Muslim di Rusia

Keberadaan Islam dan kaum muslim di Rusia merupakan rangkaian dari sejarah keberhasilan penyebaran dan ekspansi Islam ke benua Eropa sejak abad ke 7 M. Kaum muslim sudah hadir di benua Eropa sejak pertama kali Islam datang terutama melalui perdagangan dan diplomasi. Bahkan selama kekuasaan khalifah di Madina pasukan muslim sudah mulai melakukan penetrasi ke tanah Rusia. Pada tahun 642 M misalnya, Azerbaizan telah berada di bawah kekuasaan Muslim. Apalagi setelah kaum muslim menaklukkan Kaukasia bagian timur, Islam dengan cepat menyebar tanpa hambatan di negeri ini. Penetrasi ini terus berlangsung hingga abad 10 dan pada masa ini Islam menjadi agama dominan dan populer di seluruh Asia Tengah. Wilayah ini juga menjadi sebuah pemerintahan Islam yang jaya seperti halnya di Turki, Iran dan Afganistan serta menjadi penyebar kebudayaan dan peradaban Islam hingga ribuan tahun di daerah-daerah benua ini.[2]

[1] http://www.rand.org/publications/IP/IP229.pdf
[2] Harian Republika, 9 juli 2004.

Membekasnya Islam di berbagai negeri Eropa tersebut sampai masa kita sekarang awalnya disebabkan oleh gelombang penguasaan Islam atas benua ini, yang dapat dibagi kepada empat periode : [3]

Periode I; Kekuasaan kekhalifahan Islam di Spanyol sejak abad 7 M

Periode II; Kekuasaan dinasti muslim Mongol abad 13 yang berpusat di Sungai Volga

Periode III; Kekuasaan kekhalifahan Turki Usmani yang berekspansi ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah sekitar abad 14 dan 15.

Periode IV; Periode kedatangan imigran muslim di Eropa Barat setelah perang dunia II yaitu ke negara-negara Perancis, Jerman dan Inggris. Juga ke negeri-negeri Eropa Selatan seperti Belanda, Belgia, dan Skandanavia walaupun dalam jumlah yang lebih kecil.

Terlihat bahwa keberadaan Islam dan masyarakat muslim di Rusia awalnya adalah hasil pengIslaman dan peninggalan kekuasaan dinasti Islam Mongol. Selain masyarakat hasil pengIslaman masa dinasti Mongol ini—yang mereka ini telah menjadi warganegara Rusia sejak awal negeri ini terbentuk yaitu setelah menaklukkan dinasti Mongol muslim Khan di Kazan dan Astrakhan—,penduduk muslim Rusia lainnya adalah masyarakat muslim di negeri-negeri Asia Tengah yang terintegrasi ke negara Rusia belakangan yaitu abad 17-18, kemudian masyarakat muslim di negeri-negeri Kaukasus yang ditaklukkan Rusia sekitar abad 19. Ketika Uni Sovyet runtuh, negeri-negeri muslim Asia Tengah mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari Rusia dan masing-masing membentuk negara yang berdaulat. Dengan demikian, penduduk muslim Rusia tinggal terdiri dari penduduk di belahan Eropa negara Rusia yang merupakan wilayah asli negeri Rusia sejak terbentuknya; Sungai Volga dan pegunungan Ural, kemudian penduduk di negeri-negeri Kaukasus Utara.[4] Sekarang ini negeri-negeri wilayah Kaukasus Utara sedang dilanda gejolak disintegrasi eskalasi tinggi dan sedang pada titik sangat rawan kekacauan sosial dan perang saudara.

---

[3] Prof. Dr. Taufik Abdullah (Ketua Editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) bahagian 6, hal. 272-274

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia

B. Demografi

1. Jumlah penduduk Rusia

Dari sensus nasional tahun 2003, total penduduk Rusia mencapai 144.526.378 dengan kepadatan 9 jiwa per km2. Dan tahun 2004 dilaporkan jumlah penduduk Rusia telah mencapai 150 juta orang. Akan tetapi, jumlah yang terakhir ini tampaknya hanya prakiraan dan bukan hasil sensus resmi. Angka yang terakhir ini bisa diragukan karena tingkat kenaikan 4.5 % dalam setahun seperti yang disebutkan tidak sesuai dengan isu yang menghangat di Rusia belakangan tentang krisis penurunan jumlah penduduk yang sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Bahkan presiden Putin sendiri telah mengungkapkan kekhawatirannya akan penurunan drastis tingkat kelahiran di negara tersebut.[5]

2. Jumlah penduduk muslim Rusia

Laporan jumlah penduduk muslim Rusia berbeda antara satu institusi dengan institusi yang lain. Angka yang dilaporkan bervariasi antara 3 sampai 30 juta. Bervariasinya angka tersebut dan juga kesulitan dalam menentukan angka resmi jumlah penduduk muslim di Rusia adalah disebabkan oleh beberapa faktor berikut :[6]

a. Tidak adanya data sensus nasional Rusia berkenaan dengan afiliasi agama warga negara
b. Terjadinya perbedaan pendapat tentang kriteria menentukan afiliasi agama seseorang, apakah berdasarkan pelaksanaan ajaran agama, afinitas budaya atau identifikasi pribadi individu sendiri.
c. Terjadinya manipulasi data dan permainan politik dalam masalah jumlah penduduk muslim tersebut. Pihak muslim sengaja membesar-besarkan angka penduduk muslim dengan tujuan mengekspos pengaruh politik masyarakat muslim. Di lain pihak, masyarakat Rusia non-muslim juga mengeluarkan statemen tentang tingginya jumlah penduduk muslim tetapi dengan tujuan politis

[5] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia : The Politik of Identity and Security* (London: M.E. Sharpe, 2004), hal. 45

[6] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 43

menyebarkan ketakutan dan ancaman akan terjadinya ketidakseimbangan demografis dan politik serta munculnya kekuasaan kaum muslim di Rusia.

Angka terendah atau 3 juta di atas dikeluarkan oleh *Center for Public Opinion* tahun 1993, yang membuat kriteria 'beragama Islam' berdasarkan dilaksanakannya ajaran dan ibadah Islam. Dari badan yang sama pada tahun 2000 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 7.7 juta jiwa atau 5 % dari jumlah penduduk Rusia. Data dari institut *Socio-Political Studies* pada akademi sains Rusia menetapkan angka 8.7 juta. Adapun dari Komite Statistik Nasional Rusia yang juga dikutip oleh sebuah kelompok ahli Sosiologi Rusia adalah sebanyak 13.17 juta atau sekitar 9 %. Angka tertinggi dari badan semi-resmi Rusia adalah 16 sampai 16.5 juta. Adapun dari pihak kaum muslim misalnya dari Dewan Ulama Rusia (RCM) yang diketuai oleh Mufti Ravil Gainuddin menyebutkan angka 23 juta, yang didasarkan pada jumlah quota haji Rusia tahun 2006 dan ini dikonfirmasi oleh Duta Besar Saudi Arabia. Sementara angka 50 juta dikemukakan oleh peneliti-peneliti independen misalnya oleh Yevgeny Bendersly. Angka ini bisa diterima karena dia memberikan kriteria yang longgar berdasarkan pengakuan individu dan melalui afinitas etnis juga. Dan dia menggarisbawahi bahwa lebih dari separuh yang mengaku muslim tersebut tidak bisa sama sekali melaksanakan ibadah agama mereka yang merupakan dampak dari kebijakan anti agama masa pemerintahan sebelumnya.[7]

Dari data berbagai pihak di atas, dapat ditetapkan bahwa jumlah rasional penduduk muslim Rusia sekarang adalah 18 sampai 20 juta atau 12 sampai 13.8 % dari sekitar 145 juta penduduk di Rusia Federal. Dari jumlah ini dilaporkan bahwa suku Tatar mendominasi antara 6.5 hingga 7 juta jiwa. Selain itu ada etnik Bashkiriya dengan jumlah 1.5 juta, suku pegunungan dan daratan Dagestan 2 juta, suku avaria 600 ribu. Kemudian bangsa Chechnya yang terdiri dari suku-suku Lezgina, Dargina, Kumika dan Laksia yang secara kumulatif mencapai jumlah satu juta jiwa. Selanjutnya etnik Ingushetia berjumlah 237 ribu serta suku

[7] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 43-44; Lihat juga http://www.danielpipes.org/blog_trackback/495

Osetia, Kabardino, Adegia, Cherkesia dan sebagainya dengan jumlah hampir 1 juta jiwa. Sisanya adalah suku bangsa keturunan Turki yang mendiami wilayah-wilayah perbatasan Selatan Rusia.[8]

Kontroversi tentang jumlah penduduk muslim Rusia ini tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini karena selain masalah ini telah berkembang menjadi isu politik, sampai tahun 2002 sensus penduduk Rusia— kali pertama sejak keruntuhan Uni Sovyet—tetap saja tidak memasukkan daftar pertanyaan tentang afiliasi agama seseorang, yang ada malah pertanyaan tentang afiliasi suku dan etnis. Dan terlepas dari kontroversi ini, berbagai ahli kependudukan Rusia di antaranya seorang spesialis etnis minoritas Rusia *Paul Goble, yang telah 25 tahun bekerja pada pemerintah Uni Sovyet—mengatakan bahwa dengan pertumbuhan penduduk seperti sekarang, dalam 30 tahun Rusia akan menjadi negara berpenduduk mayoritas muslim dan asumsi Eropa Barat atau Amerika bahwa Moskow akan berperan sebagai sebuah 'negara Eropa' yang superpower tidak lagi dapat dipertahankan.*[9]

C. Geografi

1. Grografi Rusia

Wilayah Rusia, mulai dari arah barat laut berlawanan arah jarum jam, berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia, dengan negara-negara Baltik yakni Estonia dan Latvia kemudian Belarus, Ukraina, Laut Hitam, Georgia dan Azerbaijan. Lalu laut Kaspia, Kazakhstan, Cina, Mongolia, dan Korea Utara. Samudra Pasifik Utara meliputi Jepang, laut Okhotsk dan Selat Bering. Di sebelah Utara dengan Samudra Arktika. Memiliki daerah khusus Kaliningrad dengan ibukota Kaliningrad yang berbatasan dengan Polandia dan Lithuania serta Laut Baltik.

Geografi Rusia masuk dalam Benua Eropa khususnya Eropa Timur dan juga benua Asia di mana pegunungan Ural di Rusia merupakan batas dari kedua benua. Wilayah paling luas adalah Siberia yang umumnya

[8] Wan Jamaluddin Z, "Dinamika Perkembangan Islam di Rusia Modern", *Jurnal Analisis* (Pusat Penelitian IAIN Raden Lampung), vol. 4 no. 1 (Juli 2004)

[9] http://www.voanews.com/english/archive/2006-02

beriklim tundra. Karena letaknya di belahan bumi paling utara maka wilayah perairan Rusia umumnya tertutupi es dan hanya beberapa yang bebas es yakni Laut Barents, Laut White, Laut Kara, Laut Laptev serta Laut Siberia Timur yang merupakan bagian dari Arktika atau kutub utara. Juga ada Laut Bering, Laut Okhotsk dan Laut Jepang yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Pulau-pulaunya antara lain Novaya Zemlya, daratan Franz-Josef, kepulauan New Siberian dan pulau Wrangel di Samudra Arktika, kepulauan Kuril dan Sakhalin (yang dipersengketakan dengan Jepang). Rusia memiliki sungai terkenal di antaranya Sungai Dnephr (berbatasan dengan Ukraina) dan sungai Volga. Lalu ada Laut Kaspia dan Laut Hitam yang berbatasan dengan Turki. Melalui selat Bosphorus dan selat Dardanela, kapal-kapal Rusia dari Laut Hitam dapat berlayar menuju Laut Tengah dan Terusan Suez.[10]

2. Distribusi Geografi Penduduk Muslim Rusia

Komunitas muslim terdapat di seluruh teritori Federasi Rusia yang berjumlah 89 buah, bahkan juga di wilayah-wilayah sangat terpencil seperti semenanjung Kamchatka yang memiliki sekitar 30.000 penduduk muslim. Akan tetapi, mayoritas kaum muslim Rusia terkonsentrasi pada dua daerah; pertama di lembah sungai Volga dan Pegunungan Ural dan lainnya di provinsi-provinsi Kaukasus Utara atau Rusia bagian Selatan. Kaum muslim yang tinggal di wilayah Sungai Volga dan Pegunungan Ural terdiri dari orang-orang Tatarstan, Bashkorostan, Udmurts dan Chuvas. Adapun yang tinggal di wilayah antara Laut Kaspian dan Laut Hitam atau disebut wilayah Kaukasus tersebut adalah orang-orang Adygakhs, Balkars, Chechens, Cherkess, Ingush, Kabardins, Karachy dan suku-suku yang ada di Dagestani. Menurut Data dari Akademi Pelayanan Sipil Rusia, jumlah kaum muslim di Kaukasus Utara kira-kira 1 juta 285 ribu orang. Inipun tanpa memasukkan kelompok-kelompok etnis muslim minoritas di Dagestan. Sementara jumlah kaum muslim di dua wilayah daerah Sungai Volga saja mencapai sekitar 4 juta orang. Selain itu, antara 2 sampai 3 juta jiwa kaum muslim tinggal di sekitar kota Moskow dan St. Petersburg. Artinya separuh dari penduduk

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia

muslim Rusia tinggal di wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi pusat serta jantung kota Rusia.

Penduduk Muslim Rusia mendominasi 7 dari 89 wilayah bagian Rusia yaitu republik Tatarstan, Bashkortostan, Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, dan Karachevo-Cherkessia. Wilayah lainnya yang juga menjadi konsentrasi pendudukan kaum muslim adalah Siberia dan Timur Jauh yaitu di kota-kota Omsk, Tyumen, Tobolsk, Novosibirsk, Vladivostok, Khabarovsk dan Urengoi.[11]

D. Pendidikan

1. Pendidikan di negara Rusia federal

Sistem pendidikan di Rusia meliputi playgroup sejak umur bayi 1 tahun dan taman kanak-kanak sejak umur 3 tahun, sekolah menengah sejak umur 7 tahun, yang terdiri dari 3 tahun sekolah dasar, 6 tahun sekolah menengah utama dan 2 tahun sekolah menengah penuh. Selain sekolah menengah umum ada sekolah menengah khusus di mana mata pelajaran tertentu diutamakan misalnya matematika, bahasa, fisika atau lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan perguruan tinggi yang secara umum tidak mengikuti sistem Barat yaitu tanpa gelar BA atau MA. Para tamatan diberi kualifikasi keahlian saja misalnya guru sekolah, penterjemah, insinyur dan lain-lain dengan masa belajar 5-6 tahun. Jumlah universitas negeri pada tahun 1994 lebih dari 40 buah, ada pula 80 universitas kejuruan dan kemudian 30 universitas swasta. Pendidikan di semua tingkat bebas biaya kecuali di perguruan swasta.[12]

2. Infrastruktur Keagamaan dan Pendidikan Islam di Rusia

Pemerintahan masa Tsar dan Uni Sovyet telah menghancurkan infrastruktur intelektual dan fisik keagamaan masyarakat muslim di negeri tersebut. Begitupun, dari ribuan mesjid dan madrasah yang dihancurkan di beberapa daerah terutama di republik Tatarstan

[11] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia-The Politik Identity and Security,* hal. 45-46

[12] http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia.07112005

sejumlah mesjid yang bernilai sejarah ada yang terselamatkan. Tercatat ada 22 mesjid peninggalan abad 18 dan 19 dan hanya satu peninggalan abad 16 yaitu mesjid Kul Syarif yang telah berdiri pada masa dinasti Mongol muslim Khan Kazan. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2002 perhatian telah difokuskan kepada perenovasian dan perbaikan kembali mesjid-mesjid bersejarah ini yang terletak di kota-kota pusat pemukiman muslim seperti Kazan, Naberezhnie Chelny, Tatarstan, Kshkar, Ufa, Bashkortostan, dan Desa Abalyamovo.

Efek paling mengenaskan dari penghancuran mesjid-mesjid di Rusia bukanlah kerugian dari segi aset-aset fisik dan material umat Islam yang dalam sekejap bisa digantikan akan tetapi ikut tercerabutnya akar fondasi intelektual Islam yang harganya tidak ternilai sebab pendidikan Islam tingkat dasar dan intermediate terafiliasi ke mesjid dan dikelola oleh pengurus-pengurus mesjid. Penanaman kembali nilai-nilai Islam di Rusia serta memupuk kembali bibit-bibit figur agama dan pemimpin-pemimpin muslim yang tangguh dan *qualified* akan jauh lebih sulit, membutuhkan kerja keras dan waktu sangat lama untuk mendapatkannya kembali.

Sejak diberlakukannya liberalisasi dan keterbukaan oleh Michael Gorbachev, jumlah mesjid di Rusia meningkat tajam dari 94 buah sisa pada akhir pemerintahan Uni Sovyet tahun 1990, bertambah menjadi 870 tahun 1991 dan melonjak menjadi 7000 buah pada tahun 2000. Dari 7000 bangunan mesjid tersebut lebih separuhnya berada di dua titik kantong masyarakat muslim yaitu 2255 buah di Kaukasus Utara dan 2403 di wilayah sungai Volga dan Siberia. Sementara dari 2255 mesjid yang ada di seluruh republik Kaukasus Utara, 1505 di antaranya terdapat di republik Dagestan.[13] Pengakuan terhadap keberadaan Islam di Rusia ditandai dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang pengembalian tanah-tanah mesjid dan gedung-gedung mesjid yang diambil negara kepada organisasi keagamaan, pemberian bantuan untuk renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah serta gedung-gedung untuk kegiatan keagamaan. Begitupun, bantuan dana dari pemerintah

[13] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia-The Politik Identity and Security,* hal. 64.

itu terhitung sangat kecil dan penyandang dana utama bagi pembangunan mesjid, sekolah dan institusi-institusi keagamaan di Rusia adalah organisasi-organisasi masyarakat muslim serta negara-negara muslim sekitarnya terutama negara-negara Timur Tengah.[14]

Terlepas dari sinyal hijau pemerintah tersebut, kaum muslim tetap saja masih mendapatkan banyak rintangan dan jalan berliku untuk membangun mesjid-mesjid yang disebabkan persaingan agama maupun gagasan politik. Secara umum, bangunan mesjid-mesjid di Rusia adalah berukuran kecil dan sedang dan dengan menara berukuran sedang atau tanpa menara. Pembangunan mesjid yang agak megah dengan menara berukuran tinggi selalu menuai protes dari berbagai kelompok non-muslim dan menimbulkan pertentangan sosial yang melibatkan pejabat pemerintah bahkan Presiden Rusia sendiri. Dari sederetan panjang sengketa pembangunan mesjid di Rusia di antara yang paling besar dan mengundang perhatian misalnya pembangunan mesjid di Murmansk, Kamchatka, Taganrof, Karelia, Vologda, dan kota lainnya. Sebagian berhasil dinegosiasi tetapi banyak juga yang terpaksa dihentikan karena kekalahan lobi umat Islam kepada pemerintah daerah tersebut seperti halnya di kota Murmansk, Kamchatka, atau Karelia. Pembangunan mesjid di kota Taganrof di daerah Rostov pada tahun 2000 diprotes kelompok gereja ortodoks dan masyarakat komunis dengan alasan akan menjadi sarang penyebaran ajaran ekstrimis. Protes tersebut pertama-tama berhasil dilawan oleh umat Islam dengan mengajukan pengaduan kepada perwakilan presiden Distrik Selatan Rusia. Menteri dalam negeri Rusia Vladimir Rushailo turun ke lokasi dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa hingga akhirnya tercapai kesepakatan dan izin untuk pembangunan mesjid dimaksud. Akan tetapi berselang 3 bulan keluar keputusan pengadilan Rostov bahwa mesjid yang sedang dibangun tersebut harus diruntuhkan dengan alasan kaum muslim sudah memulai pembangunan sebelum keluar surat izin resmi. Tetapi akhirnya setelah dua tahun kemudian umat Islam di kota ini berhasil juga mendirikan mesjid tersebut.[15]

---

[14] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 66
[15] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 68-69

Pembangunan mesjid di Vologda, kota yang berjarak sekitar 500 km arah timur laut kota Moskow, lebih sulit lagi sampai melibatkan presiden Vladimir Putin. Mesjid yang telah selesai dibangun tahun 1997 dengan melibatkan arsitek dari beberapa kota tersebut diperintahkan oleh pengadilan kota itu untuk dipindahkan. Maka pada tahun 2000 ketua dewan ulama Rusia mufti Ravil Gainuddin menyurati presiden Putin dan menyatakan keberatannya atas keputusan pengadilan tersebut yang dikatakannya didasarkan pada sentimen-sentimen Islamophobia. Tetapi kontroversi terus berlangsung dan Gainuddin akhirnya mengerahkan tekanan massa serta menghadap langsung kepada presiden Putin. Baru setelah 2 tahun kemudian presiden Putin di bawah tekanan massa memerintahkan pemerintahan wilayah tersebut untuk menyetujui berdirinya mesjid dimaksud.[16]

Seiring dengan protes yang selalu mereka terima, umat Islam Rusia terus saja melakukan usaha pembangunan mesjid-mesjid. Dan sepanjang tahun 2002—2003 mereka akhirnya berhasil untuk pertama kalinya mendirikan 2 mesjid di jalan utama kota. Yang satu di perempatan jalan layang yang menghubungkan Moskow-Ufa dan Mamadysh-Kazan. Yang lainnya di bandara Domodedovo di kota Moskow.[17]

3. Pendidikan dan Sekolah-sekolah Islam

Ketakutan akan menyebarnya doktrin militansi Islam dijadikan salah satu alasan dalam protes masyarakat non-muslim Rusia terhadap pembangunan mesjid-mesjid. Dan hal ini dapat dimengerti karena memang mesjid dalam masyarakat Rusia berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Hampir semua mesjid, melalui pengurusnya, mengelola dan membawahi pendidikan Islam tingkat dasar yang disebut mekteb, dan sebagian juga mengelola madrasah bahkan pendidikan tinggi Islam seperti mesjid Sobornaya dan Lya Lya Tyulpan di republik Bashkortostan. Dan untuk menghindar dari tuduhan-tuduhan konservatif dan militan

[16] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 69
[17] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 70

sekolah-sekolah Islam tersebut mulai mengikuti tuntutan pemerintah untuk memasukkan mata kuliah umum dalam kurikulum mereka.

Seperti umumnya pendidikan tradisional Islam di negara lainnya, di Rusia pendidikan tersebut dimulai dengan tingkat dasar yang disebut mekteb dilanjutkan dengan madrasah, yang terbagi kepada madrasah tingkat intermediate dan tingkat atas, kemudian jenjang pendidikan tinggi yang disebut institut dan juga universitas. Pendidikan tingkat dasar ini di Indonesia dapat disamakan dengan sekolah diniyah yang khusus mengajarkan pelajaran agama dasar dan praktek-praktek ibadah agama Islam seperti membaca al-qur'an, shalat, dan sebagainya. Pendidikan dasar ini umumnya dikelola oleh mesjid dan terletak berdampingan dengan mesjid. Adapun pada tingkat madrasah dan institut pelajarannya ditambah dengan bidang studi umum dan dirancang untuk keahlian bekerja di badan-badan keagamaan maupun pemerintahan. Bahkan pada tahun-tahun pertama pelajaran umum menempati persentase sampai 75 %.[18]

Karena berafiliasi kepada mesjid, jumlah pendidikan dasar ini tumbuh marak seiring maraknya pembangunan mesjid itu sendiri. Tetapi hal ini tidak diikuti dengan pertumbuhan pembangunan tingkat madrasah dan pendidikan tinggi. Dari sejumlah wilayah bagian atau republik muslim, hanya di Dagestan terdapat jumlah madrasah dan perguruan tinggi Islam yang mendekati proporsional jumlah pendidikan dasarnya. Dalam 1500 mesjid yang ada di republik ini beroperasi sekitar 1000 maktab, kemudian terdapat 132 madrasah tingkat intermediate, 17 buah institut negeri dan ada 45 buah institut yang menjadi anak cabang dari ke 17 institut negeri tersebut. Di antara ke 17 perguruan tinggi tersebut tercatat universitas Muhammad Arif yang terletak di Makhachkala dianggap paling megah dan modern. Dikatakan demikian karena universitas ini mengajarkan Islam dalam dua mazhab; Hanafi dan Syafi'i, kemudian diajarkan bahasa-bahasa asing dan pemakaian literatur-literatur asing. Perkembangan terbaru yaitu dibukanya jurusan atau departemen 'kewanitaan' yang sepertinya tidak dapat disamakan dengan 'women studies' karena yang diajarkan di dalamnya adalah

[18] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 71

pengetahuan keperawatan, obat-obatan dan desain busana selain tentunya bidang studi keagamaan.

Sementara di republik Tatarstan yang juga merupakan salah satu pusat peradaban Islam utama, terdapat hanya dua perguruan tinggi Islam yaitu di Kazan dan di Naberezhny Chelny. Di Kazan juga ada dua madrasah tingkat atas yang bernama Madrasah Muhammadiyah dan Madrasah peringatan 1000 tahun Islam, lalu ada empat madrasah tingkat intermediate masing-masing; madrasah tsanawiyah 'Yulduz' dan 'Aq Mechet' di Naberezhny Chelny; madrasah tsanawiyah 'risalliyya' di kota Nizhnekamsk; madrasah tsanawiyah 'Rizaeddin Fahreddin' di kota Almeteyevsk'. Selain yang tersebut di atas, beberapa madrasah juga dapat dijumpai di kota-kota Buinks dan Nurlat. Di kota Moskow sendiri memang telah terdapat sedikitnya 4 buah perguruan tinggi Islam yang terkenal yaitu 'Moscow Islamic College', 'The Moscow Islamic University', 'The Rasul Akram Islamic College', dan 'The Islamiyya School'.[19] Di republik-republik muslim selebihnya rata-rata tidak memiliki atau memiliki hanya satu perguruan tinggi.

Dipengaruhi oleh isu dan bayang-bayang ekstrimis Islam yang diekspos secara besar-besaran oleh non-muslim dan juga pemerintah, alim ulama di Dagestan mengeluarkan keputusan bahwa para pelajar atau mahasiswa tidak dibolehkan studi ataupun melanjutkan studi ke luar negeri sebelum menyelesaikan pendidikan tertentu yang ditetapkan pemerintahan muslim Dagestan. Keputusan resmi ini sangat berlawanan dengan fenomena tahun 90-an dimana para pelajar dan mahasiswa dikirim sebanyak-banyaknya melanjutkan studi ke luar negeri. Dewan ulama Dagestan berusaha memberikan alasan-alasan akademik dan materil bahwa mereka banyak tidak puas dengan kualitas dan hasil pendidikan luar tersebut, selain itu banyak pelajar yang berubah tujuan dengan tidak menyelesaikan studinya tetapi bekerja dan tinggal di negeri tersebut. Akan tetapi, masyarakat umumnya paham bahwa alasan yang paling mendasar adalah kepentingan politis pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh agama di Dagestan. Mereka tidak ingin dituduh ikut andil

[19] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 71-72

mempersiapkan bibit-bibit ekstrimis bila ternyata nanti ada pelajar atau mahasiswa yang terpengaruh dengan ide-ide militan dan menjadi seorang fundamentalis.[20]

Sehubungan dengan isu ekstrimis Islam tersebut, Pemerintah Rusia di bawah Presiden Putin memang sedang gencar-gencarnya melakukan pengontrolan ketat terhadap pendidikan Islam di Rusia dengan memberlakukan kebijakan unifikasi pendidikan dan metodologi pengajaran di seluruh negara bagian Rusia. Selain tindakan-tindakan intervensi yang bersifat fisik reaktif, pemerintah Rusia juga menjalankan proyek 'Rusianisasi Islam' yang bertujuan melahirkan pemikiran keIslaman dan bentuk-bentuk keIslaman yang khas Rusia serta untuk memoderasi atau malah mengeliminasi identitas keIslaman kaum muslim Rusia. Cara paling awal tentunya melalui jalur bahasa yang merupakan unsur identitas Islam yang utama. Pemerintah melalui aktor-aktor intelektual program tersebut; Sergei Kirienko, Sergei Gradirovsky, Pyotr Schedrovitsky dan Nizhny Novgorod, sejak tahun 2002 mewajibkan pengajaran Islam baik di sekolah-sekolah, di mesjid atau di organisasi-organisasi diberikan dalam bahasa Rusia. Begitu juga semua buku-buku agama Islam, penerbitan-penerbitan Islam dan tafsir-tafsir al-qur'an ditulis menggunakan bahasa Rusia. Kitab al-Qur'an disosialisasikan dalam versi terjemahan bahasa Rusia dan bahkan yang lebih intimidatif ibadah-ibadah keagamaan di mesjid juga diprogram untuk memakai bahasa Rusia. Kebijakan program ini ternyata juga diprotes oleh kaum ortodoks Rusia yang tentunya dengan alasan berbeda dari protes yang datang dari kaum muslim. Kaum muslim mudah dipahami merasa terhina atas program yang akan mengintervensi kebenaran dan menginjak-nginjak kesakralan agama mereka tersebut sedangkan kaum kristen ortodoks tidak rela bahwa identitas etnis Rusia yang mereka anggap identik dengan kristen ortodoks diwarnai dengan nuansa dan aroma keagamaan Islam.[21]

---

[20] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 73
[21] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 74

E. Ekonomi

1. Perokonomian negara Rusia

Di bidang ekonomi, Rusia memiliki perindustrian yang cukup maju yang merupakan warisan dari masa pemerintahan Stalin. Seperti disebutkan di atas Rusia mewarisi 50 % aset-aset ekonomi dan persenjataan Uni Sovyet, antara lain yang terkenal adalah industri perlengkapan dan peralatan militer seperti pesawat tempur; MiG, Sukhoi dan Helikopter; pesawat terbang, rudal dan juga tank-tank. Selain itu juga ada industri berat, pertambangan mineral, batubara dan minyak bumi. Rusia juga pernah terkenal dengan sistem pertanian kolektifnya. Akan tetapi, sekalipun masih tergabung dalam negara industri G8, Rusia saat ini sedang berusaha mengatasi masalah ekonominya agar kembali menjadi negara adikuasa seperti ketika masa Uni Sovyet.[22]

2. Perekonomian Umat Islam Rusia

Secara perekonomian, penduduk muslim Rusia berada dalam posisi dan kondisi yang paling tidak menguntungkan dibanding semua kelompok penduduk di seluruh wilayah Rusia. Hal ini sama terjadi pada masyarakat muslim yang tinggal di daerah-daerah pertanian terpencil dan tidak maju maupun pada masyarakat muslim yang kebetulan wilayahnya memiliki sumber daya mineral atau tempat berdirinya industri-industri. Umat Islam Rusia belum lagi terlepas dari imbas dan buntut intimidatif dan eksploitatif sistem perekonomian rejim Uni Sovyet lalu, dan sekarang mereka terperangkap lagi dalam situasi perpolitikan yang menghambat perkembangan perekonomian dan kesejateraan mereka.

Sistem sosialis dan perekonomian terpusat Uni Sovyet telah menguras kekayaan alam dan potensi-potensi ekonomi suatu wilayah tertentu umat Islam untuk keperluan memenuhi kebutuhan seluruh negeri. Dan wilayah itu sendiri tidak diberi kesempatan untuk maju dan berkembang melalui potensi ekonomi regionalnya. Selain itu, pembagian wilayah pemerintahan republik muslim dilakukan dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi di daerah bagian

[22] http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia.19072005

tersebut serta kesamaan potensi ekonomi antar wilayah. Dengan kata lain, pembagian kekuasaan politis antara republik muslim tidak mengarah kepada upaya membangkitkan dan mengembangkan kehidupan perekonomian wilayah bagian tersebut.[23]

Selain kebijakan geopolitik yang tidak menguntungkan tersebut umat Islam juga dijerat dengan pemiskinan secara struktural. Jabatan-jabatan manajerial dan posisi-posisi tekhnis strategis untuk mengelola sumber-sumber ekonomi di republik muslim sendiri diberikan kepada orang-orang Rusia dan suku-suku Slavia lainnya sedangkan penduduk muslimnya sendiri ditempatkan di bagian-bagian pekerjaan kasar dengan gaji yang rendah. Orang-Orang Rusia juga menggarap pertanian hasil-hasil bumi perdagangan yang membutuhkan investasi skala besar sedangkan kaum muslim diberikan lahan sekedarnya untuk menggarap tanaman-tanaman dapur seperti sayur dan sejenisnya. Adapun mereka yang mendapat kesempatan bekerja di pabrik dan perusahaan-perusahaan mendapatkan upah minimum yang lebih rendah dari upah minimum rata-rata nasional. Semua situasi ini otomatis menciptakan jurang kesejahteraan yang sangat tajam antara penduduk Rusia dengan penduduk muslim.[24]

Seperti dapat dilihat pada data sensus ekonomi akhir 1998, dilaporkan bahwa pendapatan rata-rata seorang warga negara Rusia adalah 900 rubel sedangkan penduduk negeri-negeri Kaukasus Utara berkisar antara 300 sampai 600 rubel. Angka 600 rubel itupun berasal dari penduduk negeri Krasnodar dan Rostov Oblasts yang merupakan pusat pemukiman orang Rusia di teritori Kaukasus Utara. Angka pendapatan terendah terdapat di daerah Dagestan, Ingushetia dan Karachaevo-Cherkessia, yaitu republik mayoritas dan dominasi muslim paling solid. Adapun upah minimum rata-rata di daerah Kaukasus Utara (Distrik Selatan Rusia) adalah 2.382 rubel—dengan pengecualian di tiga wilayah mayoritas warga Rusia yang memiliki angka lebih tinggi—yaitu setengah dari upah minimum rata-rata di Distrik Tenggara sebesar 4.060 rubel dan jauh di bawah upah minimum rata-rata Distrik Pusat sebesar

[23] <http://www.iea.ras.ru/lib/neotl/07112002061822.htm>
[24] Ibid.

3.646 rubel. Dari seluruh republik muslim hanya penduduk Bashkortostan dan Tatarstan—diketahui sebagai daerah sumber mineral dan salah satu pusat industri di Rusia—yang menikmati upah hampir mendekati upah minimum nasional 3.578 rubel yaitu masing-masing 3.134 dan 3.080, angka ini jauh melebihi angka upah minimum republik-republik muslim lainnya di Distrik Federasi Volga tersebut yaitu sebesar 2.768.[25]

Transformasi politik Rusia pasca Uni Sovyet tetap saja belum memperbaiki situasi ekonomi wilayah-wilayah berpenduduk muslim. Bahkan akibat dari keputusan peperangan terhadap Chechnya jilid dua, kondisi ekonomi di seluruh wilayah muslim Kaukasus Utara tambah lebih terpuruk. Satu sumber menyebutkan bahwa sampai tahun 2001, jumlah pengangguran di Kaukasus Utara mencapai 70 % dan merupakan angka tertinggi di seluruh negeri Rusia. Sementara Kementerian tenaga kerja dan sosial Rusia melansir angka pengangguran di Dagestan meningkat dari 30 % jumlah penduduk republik tersebut pada tahun 1999 menjadi 56 % tahun 2001. Peningkatan ini merata terjadi di seluruh republik muslim lainnya. Harus diakui bahwa pasca keruntuhan Uni Sovyet Rusia secara nasional memang sedang mengalami permasalahan ekonomi dan kita tidak mendapat data perbandingan tingkat kemiskinan dan pengangguran di republik-republik muslim ini dengan republik-republik Rusia non-muslim lainnya. Akan tetapi semua sumber; pemerintah dan non pemerintah, muslim dan non muslim, memberikan keterangan sama bahwa Distrik Selatan Rusia yaitu daerah Kaukasus Utara yang nota bene adalah republik-republik muslim berada pada kondisi kemiskinan paling parah yang beresiko tinggi bagi meluasnya instabilitas, kekacauan sosial dan akhirnya gerakan disintegrasi.[26]

Sementara di daerah-daerah muslim yang tidak terjadi pemberontakan di mana penduduknya dapat bergerak di bidang-bidang usaha dan perdagangan komoditas lokal mereka masih merasakan streotipe kelompok kelas dua yang ditanamkan rejim Uni Sovyet

---

[25] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia-The Politik Identity and Security*, hal. 97-98

[26] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 99-100

sehingga mereka terganjal untuk mengembangkan sayap. Selain itu, mereka harus pula menghadapi kenyataan ketertinggalan dari segi sumber daya dan intelektualitas dan terutama sekali modal untuk mampu ambil bagian dan bersaing dalam sistem ekonomi baru Rusia yang kapitaslis.

F. Politik dan Pemerintahan Rusia

Sampai tahun 1917 Rusia merupakan kerajaan atau kekaisaran dengan Tsar sebagai kepala Dinasti. Sewaktu zaman kekaisaran terutama semasa dinasti Rumanov, Rusia mengalami persinggungan politik dengan negara-negara Eropa di antaranya Napoleon Bonaparte; Krisis Balkan karena menginginkan pelabuhan yang bebas dari es di Eropa yang dinamakan dengan politik Air Hangat; Penyatuan Pan Slavia serta sering mengalami pertempuran dengan Turki Usmani dalam memperebutkan wilayah Kaukasus; Pertempuran dengan Austria-Hongaria dalam perang dunia I. Akibat politik air hangat ini pula terjadi pertempuran dengan Jepang dan intervensi terhadap Cina. Masa selanjutnya politik Rusia dilebur dengan kepentingan Uni Sovyet di mana Rusia menjadi anggota intinya. Rusia mengambil sikap menentang ketika terjadinya penggulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Genandy Yanayev menjelang keruntuhan Uni Sovyet yang diprakarsai oleh Boris Yeltsin.

Pemerintahan Rusia sekarang dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen namun peranannya sangat terbatas dibandingkan Presiden. Sejak pembangkangan wakil presiden Aleksander Ruskoi dan ketua parlemen asal Chechnya Ruslan Khasbulatov, lembaga wakil presiden dihapus. Parlemen memiliki dua kamar yakni Majelis Federal (Federal Assembly) yang merupakan majlis tinggi dan DUMA yang merupakan majlis rendah.

Sekarang ini Rusia terancam atas perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur dan kekhawatiran atas pemilihan umum di Ukraina. Dari dalam negeri, Rusia menghadapi persoalan keragaman etnis warganya, yang akhirnya terjebak dalam krisis berlarut-larut menghadapi etnis-etnis muslim yang ingin memisahkan diri seperti Chechnya dan Ingushetia. Sepertinya Rusia memang tidak bisa lepas dari tradisi dan budaya sentralisasi sehingga pilihan dan program demokratisasi yang

coba diproklamirkannya malah mempertontonkan otoritarianisme dan menimbulkan berbagai gejolak dan krisis berkepanjangan.[27]

1. Gerakan Politik Umat Islam Rusia

Sebelum pemerintahan Federal, umat Islam pernah dua kali berkesempatan membentuk organisasi politik yang menyatukan aspirasi seluruh umat Islam di negeri itu agar diberi peran politik yang lebih besar, hak untuk eksis dan berekspresi, bahkan juga kemerdekaan. Pertama tahun 1905-1907, yang kemudian ditumpas oleh otoriter Tsar lalu pada tahun 1917 yang diredam oleh totaliter Komunis Sovyet. Setelah keruntuhan Uni Sovyet, umat Islam kembali berusaha menghimpun diri dan menyatukan suara untuk kepentingan mereka. Akan tetapi, sampai sekarang umat Islam Rusia belum dapat memunculkan satu organisasi politik yang mampu menyuarakan diri sebagai partai umat Islam dan benar-benar solid memperjuangkan kepentingan umat Islam Rusia. Bahkan terakhir, partai Islam yang telah terbentuk dan mulai hunjuk gigi akhirnya melepaskan karakter Islamnya dan merubah namanya menjadi Partai Eurasian dan berkoalisi dengan partai "Kesatuan Patriot Rusia." Apa yang terjadi ? Faktor-faktor apa, dalam konteks Islam dan konteks Rusia, yang menghalangi konsolidasi perjuangan politik umat Islam Rusia ? Dan bagaimana kekuasaan serta visi politik Putin terlibat dalam mengembangkan dan menghambat perjuangan politik umat Islam. Permasalahan ini yang akan menjadi pembahasan bab-bab selanjutnya pada buku ini.

❖❖❖

[27] http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia.19072005

BAB III

NASIONALISME DAN IDENTITAS NASIONAL DI NEGARA FEDERASI RUSIA (Antara Basis Etnis dan Agama)

BAB III

NASIONALISME DAN IDENTITAS NASIONAL DI NEGARA FEDERASI RUSIA (Antara Basis Etnis Dan Agama)

A. Evolusi Identitas Nasional Rusia Pasca Keruntuhan Uni Soviet

Faktor Islam

Identitas nasional adalah karakter atau jatidiri suatu kelompok (*collective self)* yang merekat sekumpulan individu menjadi satu kelompok dan mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok tersebut. Identitas kelompok ini bisa berasal dari entitas etnis atau agama. Identitas kelompok ini sendiri dapat memunculkan kelompok budaya saja (*ethnic nation*) tetapi juga dapat berkembang menjadi kelompok bangsa atau unit politik (*political nation*).[1] Menurut aliran primordialis negara hanyalah hasil proses alamiah dari suatu komunitas etnis diperkuat dengan kesamaan bahasa atau agama dalam satu teritori tertentu.[2] Ikatan etnis ini diperkuat lagi dengan mitos kesamaan keturunan dan perjuangan melawan 'musuh bersama' (*hostile others*). Pada gilirannya, mitos dan simbol-simbol kebersamaan serta tradisi yang tumbuh dari kebersamaan tersebut akan berfungsi mempertahankan juga menciptakan identitas dan arah tujuan bersama.

Adapun nasionalisme adalah ekspresi dari kesadaran akan identitas kelompok. Nasionalisme tumbuh ketika identitas kelompok

---

[1] Wayne Allensworth, *The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post Communist Rusia* (Lanham, MD : Rowman and Littlefield, 1998), hal. 1

[2] Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Basil Blackwell, 1986), hal. 12. Hal ini berbeda dengan aliran modern yang menyatakan bahwa negara bangsa adalah hasil bentukan masyarakat yang merupakan konsekwensi dari kemajuan organisasional manusia dan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan praktis keduniaan manusia. Lebih jauh lagi ada yang mengatakan bahwa negara adalah akibat dari kemunculan kapitalisme yang ditujukan untuk menyahuti kepentingan-kepentingan ekonomis dan kekuasaan kelompok elit ketimbang tujuan-tujuan kultural manusia. Lihat Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Oxford: Blackwell, 1990).

ini memunculkan rasa keterbedaan yang mendalam berhadapan dengan kelompok lainnya hingga membawa kepada rasa kebangsaaan dan penegasan eksistensi diri dalam bentuk kekuasaan politik, dengan menciptakan negara di wilayah teritori tertentu. Berdasarkan perbedaan entitas identitas kelompok tersebut maka pandangan tentang nasionalisme juga terbagi ke dalam berbagai tipe. Pertama adalah pandangan Barat yang mendasarkan nasionalisme pada 'hukum dan prinsip kewarganegaraan (*citizenship*)' atau disebut *civic nationalism*. Tipe kedua merupakan perspektif benua Timur yang menyatakan bahwa elemen etnik adalah dasar dari nasionalisme. Tipe ketiga yaitu perspektif benua Selatan yang menyebutkan bahwa agama adalah basis dari identitas nasional dan pendorong utama nasionalisme. Akan tetapi, masih ada satu aliran lagi yang tidak membatasi dasar nasionalisme kepada satu elemen mutlak melainkan mengkaitkannya kepada semua elemen di atas yaitu civic, etnis dan agama. Pengalaman di banyak negara memang menunjukkan bahwa nasionalisme civic juga mengandung elemen etnik sementara nasionalisme etnosentris mengandung unsur civic. Begitu juga dalam negara yang paling agamis sekalipun di mana agama adalah unsur pengikat dan identitas, faktor etnik memainkan peran penting. Ringkasnya, menurut aliran ini, identitas nasional dan pada gilirannya nasionalisme adalah fenomena yang terbentuk dari kesadaran dan fanatisme berbagai unsur; etnik, agama dan kewarganegaraan.[3]

Dalam kasus Rusia, identitas nasional dan akhirnya nasionalisme masyarakatnya uniknya terdiri dari dua tipe yang terpisah dan kompleks. Pertama, nasionalisme dengan basis gabungan antara etnik dan agama dan kedua, nasionalisme civic. Selama 4 abad pertama sejarahnya, masyarakat Rusia adalah masyarakat yang homogen dengan ikatan kesamaan etnik dan agama; Slavia dan kristen ortodoks. Belakangan, Rusia era Soviet menjadi negara yang multietnik dan lalu harus membangun nasionalisme yang berbasis kewarganegaraan. Akan tetapi,

[3] Uri Ra'anan, "The Nation-State Fallacy," dalam *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies,* ed. Joseph V. Montville (Lexington, MA: Lexington Books, 1991), hal. 5-20.

Rusia Soviet gagal mensosialisasikan nasionalisme civic tersebut sementara mereka sudah tidak memiliki kekuasaan untuk melestarikan fanatisme etnik dan agamanya. Apa yang terjadi kemudian adalah warga Rusia mengalami kekaburan jatidiri kelompok dan akhirnya kekacauan nasionalisme.

Evolusi identitas nasional Rusia tersebut secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Dalam seluruh sejarahnya—dimulai pada akhir abad 14—sampai sebelum revolusi Bolshevik abad 20, Rusia adalah negara yang homogen secara etnis dan agama. Dinasti Muscovite (abad 14-16) dilanjutkan dengan Dinasti Tsar (abad 17-20) yang memerintah Rusia selepas kekuasaan Mongolia telah membentuk mitos bahwa Rusia adalah kelompok masyarakat bangsa Slavia dan pewaris pusat agama kristen ortodoks dari Byzantium. Mitos ini dikembangkan dengan idealisasi dan simbolisasi kejayaan dan kebesaran bangsa Rusia Kievan abad 10 yang membangun kekuasaan di tanah bangsa Slavia dan memilih untuk berkiblat kepada ajaran agama dari Byzantium—walaupun pemilihannya tersebut dipercaya karena faktor-faktor praktis dan pragmatis.[4] Kekaisaran Rusia Kievan dirujuk sebagai nenek moyang dan jejak awal kelahiran bangsa Rusia serta terciptanya negara Rusia. Walaupun secara historis sejarah Rusia telah diinterval dengan 2 abad kekuasaan Mongol yang berhasil meruntuhkan kekaisaran Kievan tersebut, namun dinasti Muscovite dan Tsar Rusia yang terbentuk setelah kekuasaan Mongol menutup mata rapat-rapat akan pengaruh-pengaruh kultural maupun politik dari dinasti Mongol terhadap Rusia[5]

---

[4] John M. Thompson, *Russia and the Soviet Union: An Historical Introduction from the Kievan State to the Present.* 3rd Edition (Boulder, CO : Westview Press, 1994), hal. 17

[5] Hal ini terlepas dari perdebatan sejumlah sejarawan dan budayawan bahwa Rusia mau tidak mau pasti terkena sentuhan Mongolia dalam satu atau lain aspek kehidupan mereka. Mulai tahun 1920-an di Rusia muncul sebuah aliran pemikiran yang disebut kelompok Eurasian, yang mereka ini berusaha mengangkat aspek-aspek positif dari Mongolia bagi bangsa Rusia dan memberikan perimbangan atau merevisi pandangan sangat buruk orang-orang Rusia terhadap bangsa Mongol. Kelompok ini mengumandangkan peran politik Mongolia terhadap dinasti Rusia sesudah keruntuhannya; Muscovite dan Tsar.

dan sebaliknya mengklaim kontinuitas budaya, sosial dan politik yang murni antara Rusia Kievan dengan Rusia Muscovite. Maka dalam hal ini, era kekaisaran Kievan Rusia dengan kebesaran pangeran-pangerannya menjadi referensi mitos bagi identitas kelompok dan nasionalisme bangsa Rusia. Etnis Slavia Rusia serta tradisi kristen ortodoks yang menjadi elemen dan karakteristik identitas nasional Rusia tersebut lalu diperkuat dengan penciptaan 'pihak asing yang merupakan musuh' (*the hostile others*) bagi bangsa Rusia, dalam hal ini bangsa Mongol. Sebagaimana pernyataan Hunter bahwa dalam kesadaran bangsa Rusia, Mongol adalah 'orang asing yang menjadi musuh' (*as the hostile other*) dan dipersepsi dengan buruk, setidaknya dalam tiga hal berikut :[6]

Mereka bahkan berani mengatakan bahwa kedua dinasti ini meneruskan sistem dan gaya politik Mongolia. Dalam versi orang-orang Rusia bangsa Mongol memang telah memberikan suatu pengaruh tetapi pengaruh itu adalah semua hal-hal buruk yang mencemari kebesaran kebudayaan Rusia dan kemuliaan karakter bangsa Rusia. Misalnya sifat kediktatoran Uni Sovyet malah dipandang sebagai peninggalan bangsa Mongol. Sementara kelompok revisionis Eurasian menyatakan bahwa Mongol telah berperan banyak merubah bangsa Rusia yang sebelumnya lemah dan terpisah-pisah menjadi negara otokrasi yang bersatu, disiplin dan kuat. Tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga bentuk-bentuk institusi, norma hukum dan psychologi dinasti Muscovite dikatakan oleh kelompok Eurasian mendapat pengaruh dari Jengis Khan. Trend pemikiran ini semakin marak dengan bergiatnya para intelektual Tatar meneliti pengaruh-pengaruh Mongol terhadap politik dan kebudayaan bangsa Rusia. Salah satu pernyataan mereka adalah bahwa kekuasaan Mongol telah berjasa tidak hanya dalam terwujudnya dinasti Muscovite tetapi juga dalam membantu Rusia mempertahankan dirinya dari tekanan Jerman dan Lithuania. Komentar lainnya adalah, "...keberadaan Mongol di Rusia telah melindungi Rusia dari invasi Barat ...dan meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya suatu negara baru sebab bersatunya wilayah-wilayah di sekitar Moskow adalah berkat terjadinya peristiwa Golden Horde. Nicholas V. Riasanovsky, *Ibid.,* hal. 75; Rafael Khakimov, "Russia and Tatarstan at a Crossroad of History," dalam jurnal *Anthropology and Archeology of Eurasia* 37 no. 1 (Summer 1998): hal. 30-71;

[6] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia-The Politik of Identity and Security*, hal. 144

1. Bahwa invasi Mongol dilanjutkan dengan pendudukan Tatar Mongol telah menguras potensi Rusia hingga membawa Rusia pada keterbelakangan.
2. Penguasaan Mongol Tatar atas Rusia membuat Rusia terpisah dari Barat selama berabad-abad dan akibatnya Rusia tidak terkena imbas kemajuan ekonomi dan pengetahuan yang telah mentransformasi Eropa mulai zaman Renaissance.
3. Rusia terkena pengaruh sifat-sifat otoriter dan diktator orang-orang Mongol sehingga iklim demokrasi tidak tumbuh di Rusia.

Lalu, karena raja Mongol Ozbek Khan (1312-1343) masuk Islam orang Rusia pun mengkaitkan imej Mongol kepada agama Islam dan Islam akhirnya ditempatkan sebagai 'pihak asing yang merupakan musuh' (*as the hostile other*) juga, yang hal ini menciptakan momentum bagi konsolidasi Gereja Ortodoks dan pendalaman keyakinan kristen di antara orang-orang Rusia. Kedua unsur inilah; Slavianisme dan kristen ortodoks, yang selanjutnya membentuk identitas orang Rusia dan nasionalisme bangsa Rusia sepanjang sejarah mereka bahkan sampai era pemerintahan Soviet. Orang-orang Rusia dari generasi ke generasi sangat kukuh memelihara patron Rusia Kievan dan begitu dalam menghayati identitas Rusia Kievan dalam diri mereka.

Terlepas dari ideologi sosialis dan internasionalisme yang dianut pemerintahan Bolshevik, pemimpin-pemimpin Soviet kenyataannya justru melanggengkan dan malah memperketat fanatisme dan proses Rusiafikasi yang telah berlangsung sejak zaman dinasti Muscovite. Pemerintahan Soviet mengidentifikasi negara Soviet dengan etnis Slavia Rusia walaupun unsur kristen ortodoks kemudian diganti dengan ideologi komunisme. Begitu juga kelompok muslim walaupun bukan sebagai musuh sebagaimana dalam imej sebelumnya, tetapi tetap sebagai pihak asing yang menjadi unsur pembeda dan objek dari kekuasaan dan dominasi etnis Rusia. Hanya di awal-awal revolusi Bolshevik, sekitar 15 tahun pertama, para pemimpin Rusia memperlakukan minoritas muslim Rusia secara simpatik. Mereka mendukung perjuangan kaum muslim memprotes despotisme dinasti Tsar Rusia. Lalu kelompok revolusi ini merangkul gerakan-gerakan muslim untuk membantu mereka memenangkan perebutan kekuasaan

melawan pemerintahan transisi di akhir era dinasti Tsar. Tetapi sesudah itu, kaum muslim menghadapi diskriminasi dan peminggiran yang jauh lebih parah dan hebat dari yang mereka terima pada era kekuasaan dinasti-dinasti klasik Rusia. Hingga akhirnya pemerintahan Soviet runtuh, dan warga etnis Rusia yang sudah berabad-abad hidup dalam kebesaran dunia dan tradisi mereka akhirnya kelimpungan, terasing bahkan tercekam ketakutan di negerinya sendiri.

Saat ini, persoalan identitas nasional masih menggayuti pemerintahan Rusia dan harus menjadi agenda prioritas sebelum Rusia dapat melangkah mengembalikan kebesaran masa lalunya. Termasuk para sarjana, pengamat dan pelaku politik negeri ini sepakat tentang fenomena krisis identitas nasional yang sedang melanda masyarakat Rusia sejak kejatuhan pemerintahan Uni Soviet. Artinya, tugas terberat pemimpin Rusia pasca keruntuhan Uni Soviet adalah mensketsa kembali konsep kebangsaan Rusia yang sesuai dengan kondisi dan situasi baru negara Rusia. Kejatuhan pemerintahan Uni Soviet tiba-tiba membuat orang-orang Rusia mengalami disorientasi kolektif, kekaburan konsep diri dan krisis identitas kebangsaan. Menyadari ini, pemerintahan pertama era kepresidenan Rusia Boris Yeltsin lalu membentuk sebuah komisi yang terdiri dari para filosof, sejarawan, ahli bahasa dan para ahli lainnya dan memberi mereka waktu satu tahun untuk menghasilkan ide dan rumusan tentang identitas nasional negara Rusia. Tetapi tim ini gagal melaksanakan tugasnya, sebaliknya mereka malah mempertegas kembali akan kebutuhan Rusia terhadap ide pemersatu bangsa yang akan menjadi platform bagi arah tujuan bangsa Rusia termasuk dalam menentukan hubungan antar lembaga di dalam negeri maupun dengan negara asing. Presiden selanjutnya Vladimir Putin pun memanfaatkan isu ini dalam kampanye kepresidenan beliau tahun 1999. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dan bagaimana krisis identitas tersebut bisa terjadi.

Pengamat politik Rusia menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor dasar terjadinya disorientasi Rusia tersebut adalah sistem pemerintahan totaliter Uni Soviet itu sendiri yang mencabut masyarakat dari akar sejarah dan tradisi mereka. Selain itu adalah sikap pelaku-pelaku pemerintahan Uni Soviet yang tidak konsisten terhadap minoritas etnik serta menciptakan hubungan tidak sejajar bahkan bersifat koloni antara

mayoritas dan minoritas etnik Rusia, dalam hal ini masyarakat-masyarakat muslim. Dua kebijakan pemerintah Soviet awal yaitu ketidakcermatan ekonomis dalam pemilahan wilayah otonomi dan pembentukan negara bagian yang berdasarkan etnis serta cara penanganan akselerasi industrialisasi terhadap negara-negara bagian yang sangat miskin, ditengarai menebarkan bibit keterasingan dan keterpisahan antar etnis, yang nantinya berperan memperberat krisis identitas dan problem nasionalisme pada rakyat etnis Rusia. [7]

Dapat disaksikan bahwa pemerintahan Uni Sovyet memiliki misi mesianistis ekstrim dengan menciptakan masyarakat utopian yang sama rata dan sama arah, tidak membedakan diri dalam kelompok apapun baik itu kelompok ras, agama apalagi kelas ekonomi. Ideologi kesamarataan Soviet ini bahkan sampai kepada program penciptaan manusia baru Soviet (*Homo Sovieticus*) secara biologis dan ideologis, yang dilakukan dengan cara memutuskan akar identitas dan sejarah masa lalu mereka, kemudian membaurkan berbagai golongan masyarakat, dan lalu melebur keluarga hasil asimilasi tersebut ke dalam *worldview* dan gaya kehidupan sosialis yang baru. Akan tetapi, kebijakan ini tidak pernah mencapai hasil yang diharapkan dan malah menimbulkan akibat yang fatal. Pemerintah Uni Sovyet kenyataannya tidak mensosialisasikan ideologi penyamarataan dan program pembauran tersebut dengan pendekatan kultural dan pertimbangan realitas struktur kelompok masyarakat. Alih-alih menciptakan unifikasi manusia Soviet secara biologis dan ideologis, masing-masing kelompok etnis justru menampilkan resistensi yang tinggi terhadap ide pembauran etnis tersebut. Kelompok etnis Rusia yang telah berabad-abad menjadi etnis dominan dan mayoritas dan telah menyimpan sejarah hubungan permusuhan dengan etnis-etnis minoritas muslim tentu takut bahwa identitas kultural dan biologis mereka yang dianggap terhormat dan

[7] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 128-134; Teresa Rakowska-Harmstone, "The Study of Ethnic Politics in the USSR,: dalam *Nationalism in the USSR and Eastern Europe in the Era of Breznev and Kosygin,* ed. George Simmons (Detroit: University of Detroit Press, 1970), hal. 22.

mulia akan tercemar dan terhina. Dan ternyata kaum muslim terlebih lagi, jumlah mereka yang telah sedikit dan kondisi mereka yang menjadi warga kelas bawah dan terpinggirkan justru mengasah kesadaran akan keterbedaan mereka, hingga akhirnya membentuk ikatan yang solid serta memunculkan obsesi untuk memelihara identitas kelompok di antara mereka. Terbukti, ketika Uni Sovyet runtuh identitas kelompok ini menemukan momennya untuk berkibar dan langsung menenggelamkan nasionalisme kewargaan yang selama ini menjadi pengikat mereka dengan negara Uni Sovyet.

Adapun di pihak etnis mayoritas Slavs Rusia, keruntuhan Uni Sovyet membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap ideologi totaliter dan cita-cita utopian Soviet yang sudah mereka tempatkan menyatu dengan identitas etnis mereka. Baik karena dominasi kultural dan ekonomis yang terlalu kuat di pihak etnis Rusia ataupun disebabkan kebijakan dan strategi pemimpin-pemimpin politik Rusia sendiri, yang jelas Soviet gagal secara substansial menerapkan sistem keadilan sosialisnya, apalagi programnya untuk menciptakan manusia soviet (*soviet man*). Dan yang jelas lagi, Soviet akhirnya tergiring melakukan indijeniusasi (pribumisasi) sosialisme. Dan karena etnis Rusia telah mendominasi maka nasionalisasi sosialisme Soviet tersebut adalah berarti Rusiafikasi sosialisme. Bagi warga Rusia sistem komunisme pada dasarnya bukan merupakan tujuan akhir dan pandangan hidup asli (*way of life*) etnis Slavian, mereka mengadopsinya dengan pertimbangan kondisional. Mereka melakukan adaptasi dengan sejumlah nilai-nilai sosialis Soviet terlepas dari ketidakcocokan dalam berbagai aspeknya. Setidaknya sistem tersebut diterima etnis Rusia karena telah memberikan stabilitas, prediktabilitas dan jaminan kebutuhan dasar ekonomi mereka dan oleh karena itu, juga ketenangan secara psikologis. Jadi walaupun mengaku tidak menganutnya, bangsa Rusia setidaknya tidak menentang dan menolak sistem sosialis Soviet tersebut. Bangsa Rusia merumuskan nilai-nilai baru hasil modifikasi sosialisme dengan akar sejarah dan kebudayaan Rusia.[8] Karenanya dapat dimengerti ketika

[8] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 132.

negara Soviet runtuh, warga etnis Rusia berada dalam kebingungan mencari identitas dan ideologi baru kebangsaan mereka.

Lebih dari itu, pribumisasi sosialisme Soviet kepada budaya dan peradaban Rusia ini mengakibatkan warga Rusia dapat lebih menyatu dengan Soviet dan merasa sebagai warga Soviet sesungguhnya, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh kelompok etnis muslim. Mereka juga lebih bebas bergerak ke mana saja di wilayah kekuasaan Soviet dan merasa memiliki serta menganggap sebagai tanah air mereka semua wilayah bagian Soviet termasuk yang dihuni oleh etnis-etnis minoritas. Persepsi ini tentu tidak memberikan akibat buruk kalau saja pemerintah tidak menempatkan etnis Rusia sebagai juragan secara sosial-kultural dan ekonomis serta tidak menciptakan hubungan koloni dengan etnis minoritas muslim lainnya. Yang terjadi, bahasa Rusia dibuat menjadi bahasa resmi dalam berbagai bidang sementara warga Rusia tidak pernah *aware* dan memiliki sensitifitas terhadap keberadaan etnis minoritas lain di negeri tersebut; terhadap bahasa, tradisi dan juga tanah asal mereka. Program industrialisasi di wilayah-wilayah muslim diberikan penanganannya kepada etnis Rusia yang sebelumya telah mendapatkan peluang untuk memiliki kualifikasi secara akademik dan tekhnis, sehingga kedatangan bangsa-bangsa Rusia ke wilayah-wilayah negara bagian muslim untuk menangani industrialisasi lokal tersebut justru mendemonstrasikan stratifikasi ekonomi antar kedua etnis. Pertemuan kedua etnis ini bukan menciptakan kontak dan interaksi sebagaimana diharapkan melainkan kecurigaan, kecemburuan dan permusuhan di pihak penduduk asli. Warga asli daerah tersebut tetap saja menjadi orang desa dan terpinggirkan, dengan pendapatan yang rendah dan gaya hidup tradisional berbeda dengan kondisi dan gaya hidup kelompok etnis Rusia. Lalu, ketika negara Soviet runtuh dan etnis-etnis minoritas ini mengambil kesempatan mengekspresikan eksistensi mereka, menantang dan menuntut tanah negeri mereka, dapat dimengerti kalau kelompok etnis Rusia yang menjadi pendatang di tempat tersebut mengalami perasaan kehilangan rumah dan tanah air mereka. Ada sekitar 25 juta etnis Rusia yang tinggal di luar federal pusat dan mendiami wilayah etnis muslim. Setelah keruntuhan Uni Soviet sebahagian dari mereka kembali ke kota federal pusat tetapi sekitar 18 juta orang atau lebih kurang 12 % dari penduduk Rusia masih berdiam

di tempat-tempat tersebut.[9] Artinya, begitu banyak dari warga Rusia yang dihinggapi perasaan dilanda kehilangan rumah dan tanah air. Pemberontakan kaum muslim di sana sini, terutama insiden Chechnya yang berlarut-larut, semakin membuat mereka merasa tercekam dan kehilangan kepercayaan diri karena kekuatan dan dominasi yang telah mereka pegang selama berabad-abad kini terancam lepas.

Kevakuman ideologi dan kultural : Tantangan dari ideologi Barat dan Islam

Ke arah mana evolusi identitas kebangsaan Rusia berjalan dan bagaimana faktor Islam terlibat dalam perumusan identitas kebangsaan Rusia yang baru ?

Karena sebelumnya telah menjadi negara tandingan dan selalu bersaing dengan negara adidaya Amerika Serikat, tentu merupakan hal yang menyakitkan dan membuat frustasi bagi bangsa Rusia menyaksikan Amerika Serikat sekarang berlenggang sendiri menjadi negara superpower. Yang lebih membuat penasaran juga adalah Amerika sekarang menggantikan tempat Uni Soviet dalam pengaruhnya terhadap negara-negara Pakta Warsawa dan bahkan di negara-negara yang sebelumnya menjadi republik bagian Uni Soviet. Kekesalan ini terus bertambah menyaksikan gelagat negara musuh lainnya, Turki, yang memainkan pengaruh utama di negara-negara eks Uni Soviet. Tidak hanya Turki, negara-negara muslim lainnya sekarang menjadi bebas hilir mudik di wilayah Federasi Rusia mengurus perkembangan kehidupan kaum muslim di negeri tersebut. Ringkasnya, Rusia sekarang bukan hanya tidak menjadi pemain inti di dunia internasional tetapi urusan rakyat dalam negerinya sendiri kini ditangani oleh pihak asing termasuk oleh negara yang telah menjadi musuhnya sepanjang sejarah, Turki.

Dalam kondisi ini, Rusia tentunya terdesak untuk memutuskan persoalan mendasar kebangsaannya agar dapat bangkit kembali menyusun kekuatannya sebagai bangsa yaitu : atas dasar apa dan bagaimana karakter identitas nasional Rusia pasca Uni Soviet akan

[9] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

dibangun, apakah berdasarkan etnis, agama, etnorelijius atau malah civic. Dalam hal ini Rusia dihadapkan pada dua kelompok kultural yang akan mempengaruhinya dalam proses pembentukan identitas barunya tersebut yaitu Barat dan kelompok Islam. Karena dalam prakteknya, identitas diri maupun kelompok akan berkembang dengan pengaruh dari faktor-faktor eksternal maupun internal, dan lagi, seringkali identitas tersebut lebih cepat berkembang dan terkristal ketika mendapat semacam ancaman dan tantangan eksternal maupun internal. Mana di antara dua kelompok kultural tersebut yang menempati faktor internal atau eksternal, dan bagaimana keduanya mempengaruhi, mempercepat dan mempertajam identifikasi dan otentifikasi identitas kelompok dan nasionalisme bangsa Rusia ?

- **Pihak Barat**

Selepas keruntuhan Uni Soviet, kran keterbukaan dan kebebasan yang telah terpasang langsung mengalirkan sistem demokrasi dan liberalisme Barat. Liberalisme Barat, tentu dengan konsekwensi berbagai komponennya yang lain termasuk kapitalisme, privatisasi ataupun materialisme, memang merupakan pilihan yang menarik dan logis dalam kondisi Uni Soviet saat itu. Tetapi ternyata bangsa Rusia dengan cepat merasakan sistem Barat tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Memang, Rusia memiliki ikatan dengan Barat melalui kristianiti walaupun disadari antara kristen ortodoks Rusia dengan kristen katolik atau protestan Barat sendiri sangat berbeda. Tetapi harus diakui bahwa agama kristen adalah dasar doktrinal yang mengabsahkan Rusia untuk dikategorikan sebagai bagian dunia Eropa dan Barat. Selain dasar doktrinal tersebut, secara historis dan politik Rusia juga pernah bergabung kepada dunia Barat sementara dalam ilmu pengetahuan dan budaya Rusia pernah mengikuti dan berlakon menjadi sebuah bangsa Eropa. Pahlawan-pahlawan pendiri negara Rusia pernah memperjuangkan secara serius dan sistematis agar Rusia menjadi bagian dari negara Eropa. Peter the Great (1682-1725) dilanjutkan dengan Chaterine the Great tercatat sebagai pendahulu Rusia yang sangat memuja Barat. Bukti fisik cita-cita Peter tersebut adalah pembangunannya akan sebuah kota model Barat St. Petersburg yang kemudian dibuat menjadi pusat ibukota Rusia. Beliau selanjutnya

merombak seluruh sistem, struktur dan lembaga-lembaga di semua bidang kehidupan bangsa Rusia. Ratu Chaterine melanjutkan Eropanisasi Rusia dengan mempopulerkan budaya Eropa dan ide-ide Pencerahan sambil berupaya mencari basis legitimasi akan keabsahan kedudukannya serta status kekaisaran Rusia sebagai sebuah kekaisaran Eropa klasik.[10] Tetapi sejarah tidak bisa menyembunyikan kegagalan Rusia untuk semua usaha di atas. Sebegitu jauh dan komprehensif kedua pendahulu Rusia di atas mengikuti Barat, semuanya ternyata hanya pembaharuan dan modernisasi pada permukaan dan merupakan peniruan pada bentuk luarnya saja. Rusia harus mengakui ketidakmampuannya untuk terus mengikuti jalan sejarah Eropa, dalam mengadopsi seutuhnya ideologi, dan menerapkan semua aspek karakteristik bangsa Eropa yang membuat bangsa-bangsa dikatakan sebagai bangsa Eropa atau Barat. Batas sejarah dan ideologi tersebut adalah liberalisasi dan demokrasi. Kedua pahlawan Rusia di atas berhenti pada titik ini.

Peter the Great bisa sampai mempreteli ide-ide relijius dalam tradisi Rusia dan meminimalisasi kekuasaan agama yang begitu kental dalam dinasti Muscovite sebelumnya, tetapi ia tidak hendak mengizinkan ide-ide liberalisme dan egalitarianisme memasuki wilayah politik dan kekuasaannya. Sama halnya dengan Peter, Chaterine juga tidak bersedia mengambil ide liberalisme Eropa yang mulai tersebar pada saat itu. Dia malah memunculkan ide cerdasnya tentang "pencerahan absolutisme" yaitu kekuasaan atau otoritas absolut yang didasarkan pada kebenaran iman dan akal. Dengan ini Chaterine lalu mendeklarasikan bahwa Rusia adalah negara Eropa sekaligus negara absolut, berlawanan dengan arah dan cita-cita yang sedang dituju semua negara Eropa pada saat itu yaitu Liberalisme. Upaya-upaya eropanisasi dan westernisasi politik di Rusia tetap tidak berhenti dan terus bereksperimen dengan berbagai teori politik Eropa lainnya terutama Romantisisme, Hegelianisme dan Sosialisme. Hingga satu pendapat menyimpulkan—terkesan anti Barat dan tidak menyukai sistem Soviet—

[10] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 133; 161-162.

bahwa sistem Sosialisme Soviet adalah ekspresi perjuangan maksimal golongan Rusia-western.[11]

Tetapi lagi, Rusia menyaksikan kegagalan eksperimen demokrasi Barat. Sistem demokrasi ini dinilai tidak membawa kemajuan bagi kondisi keterpurukan Rusia pasca Soviet saat itu. Perekonomian Rusia semakin kacau, kesejahteraan penduduk semakin menurun. Liberalisme ekonomi dan kapitalisme yang merupakan paket dari sistem demokrasi Barat tersebut membuat industri Rusia semakin mundur dan memunculkan elit-elit kapital yang melalui spekulasi mata uang mengambil alih aset-aset negara. Negara tidak lagi membiayai kebutuhan dasar masyarakat dan ini membuat masyarakat 'shock' karena mereka telah terbiasa dengan persepsi akan fungsi kontrak negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kemerosotan di bidang moral dan budaya juga menjadi perhatian. Masyarakat mendeteksi fenomena konsumerisme dan materialisme pada prilaku pemimpin-pemimpin dan juga generasi muda mereka. Kebebasan media kini menawarkan sajian-sajian kekerasan, kejahatan, seks dan pornografi. Dan terakhir yang paling penting, kehidupan politik Rusia juga tidak membuat demokrasi tersebut tumbuh sebagaimana seharusnya. Maksudnya, di Rusia tidak terbangun perangkat-perangkat untuk demokrasi tersebut bisa berkembang seutuhnya. Partai tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan masih berada di bawah kamuflase penguasa. Pada akhirnya, politik di Rusia masih sangat berpusat pada individu dan memunculkan sistem kekuasaan eksekutif diktator. Jelasnya, pemerintahan Rusia mengarah kepada 'otoriterisme presidensial' (kepresidenan yang otoriter). Inilah yang jelas-jelas diperankan oleh presiden Rusia Borist Yeltsin dan, terlihat akhir-akhir ini, diikuti Vladimir Putin.[12]

Kondisi ini beserta beberapa pengalaman sejarah sebelumnya semakin meyakinkan bangsa Rusia akan ketidakcocokan nilai dan

---

[11] Di antaranya dikemukakan oleh Nicholas Berdyaev, dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 168.

[12] Shireen T. Hunter, *Ibid*., hal. 132-134; 161-162.

peradaban Barat terhadap mereka, yang kemudian mengkondisikan mereka untuk melakukan apresiasi, refleksi dan intensifikasi jatidiri dan nilai-nilai tradisi mereka. Tetapi laiknya dua sisi mata pisau, kemunculan kesadaran akan jatidiri tradisi ini dibarengi dengan kedalaman kebencian, sinisme dan permusuhan terhadap Barat. Bangsa Rusia lalu mempersepsi agama kristen mereka lebih benar dan iman kristen Barat telah tercemar dengan paham rasionalisme yang membuka jalan bagi sekularisme, individualisme dan materialisme, berbeda dengan nilai tradisi Rusia yang memegang teguh keyakinan iman dan ikatan komunal serta tidak terlalu menekankan materialisme. Bangsa Rusia juga akhirnya me-*recall* sejarah permusuhan politik dan persaingan tekhnologi serta ilmu pengetahuan mereka dengan Barat. Peperangan bangsa mereka dengan Inggris pada awal sejarah negeri mereka dan dengan Jerman pada perang dunia kedua, lalu diikuti dengan 5 abad kompetisi ketat dalam segala segi dengan Barat menorehkan kesan tersendiri dalam jiwa kolektif bangsa Rusia. Ringkasnya, kehadiran Barat dan unsur-unsurnya di hadapan mereka telah memacu bangsa Rusia untuk membangun dan mendapatkan kembali rasa keterikatan dan persatuan mereka dari nilai-nilai budaya mereka yang asli, yang sekarang sedang pudar dan hilang. Barat bagi Rusia adalah pesaing dan penantang yang memaksa Rusia untuk menunjukkan keunggulan dan keunikan mereka dan menghapus imej mereka sebagai *'Uncivilized Asiatic'* serta 'tidak berguna' di mata Barat.[13]

■ Pihak Muslim

Berbeda dengan Barat, di hadapan Islam Rusia tidak merasa inferior dan tersaingi baik secara budaya maupun agama. Bahkan sebaliknya, selama berabad-abad mulai sejak penundukan Mongol, Rusia bertindak sebagai penguasa dan mendominasi kelompok Islam dan melihat Islam dan kaum muslim sebagai bangsa yang terbelakang dan tidak berbudaya. Namun sejak keruntuhan Uni Soviet, konteks relasi dan persepsi Rusia terhadap umat Islam semakin kompleks dan rumit. Di satu sisi, perbedaan yang dirasakan bangsa Rusia terhadap kelompok

[13] Shireen T. Hunter, *Ibid*., hal. 162

etnis dan agama Islam sangat besar dan jauh seakan tidak ada celah dan kemungkinan bagi mereka bergabung apalagi menjadi bagian dari dunianya. Permusuhan yang telah begitu lama sekarang bertambah dengan ancaman kebangkitan nasionalisme etnis-etnis umat Islam. Penempatan Rusia sebagai musuh kelompok oleh kaum muslim justru melahirkan semangat mempertahankan harga diri dan hunjuk kekuatan di pihak kelompok etnis Rusia. Bangsa Rusia juga semakin meyakini kebutuhan mereka terhadap kekuasaan personal yang kharismatik dan kuat serta efektifitas sistem pemerintahan yang terpusat dan diktator.

Awalnya, perjuangan warga Chechen yang menuntut pembebasan dari kekuasaan bangsa Rusia sekedar menimbulkan sentimen rasis bangsa Rusia terhadap warga wilayah Kaukasus. Tetapi seiring waktu warga Chechen semakin intens menggunakan Islam dan simbol-simbol Islam hingga pihak Rusia juga langsung merespon perlawanan mereka dengan jargon dan simbol-simbol kristen. Pelibatan Islam dalam nuansa perjuangan warga Chechen akhirnya memperlebar batas kecurigaan dan permusuhan bangsa Rusia kepada umat Islam di semua wilayah. Insiden pemberontakan Chechen semakin mempertebal kesadaran kolektif bangsa Rusia akan kesatupaduan etnis, agama dan budaya mereka. Lebih dari itu, perjuangan warga Chechen yang semakin solid membuat bangsa Rusia menempatkan Islam dan umat Islam sebagai ancaman keamanan dan kekuasaan politik mereka.

Tetapi di sisi lain, bangsa Rusia dihadapkan pula pada kelompok muslim Rusia yang tidak memberontak, yang mereka ini juga mendukung—setidaknya terbelah pendapat—dan ikut membantu negara meredam perlawanan warga Chechen. Kalaulah perbedaan dari segala segi tidak memungkinkan Rusia menerima dan berinteraksi dengan kaum muslim, bagaimanapun, terhadap kelompok ini bangsa Rusia juga tidak mungkin menafikan dan menolak keberadaannya karena kelompok muslim non-Slavia yang tersebut ini adalah warga asli negeri Rusia yang patuh dan tunduk kepada pemerintahan Rusia, mereka berdiam di pusat wilayah negeri Rusia yang menjadi bagian integral negara Rusia sejak awal, dan telah hidup di tempat tersebut lama sebelum Rusia terbentuk dan dibangun. Mereka adalah kelompok Muslim wilayah Volga.

Dengan demikian, Rusia mutlak harus merumus ulang sikap dan persepsi mereka terhadap Islam dan umat Islam. Kebijakan Rusia dalam mengatasi insiden pemberontakan warga Chechen yang muslim akan sangat mempengaruhi dan menentukan perkembangan hubungan mereka dengan warga muslim Rusia di Volga. Diinformasikan bahwa saat-saat ini juga telah bermunculan suara untuk mengumpulkan kekuatan persatuan kelompok muslim Volga. Untuk ini, mereka mengajukan faktor kesamaan keturunan etnis Turki dan Islam sebagai identitas, dengan simbol mitos sebagai berikut; 1. Jumlah mereka yang cukup signifikan untuk membentuk suara serta keberadaan mereka yang cukup lama di wilayah tersebut jauh sebelum bangsa Rusia menjadikannya negara mereka; 2. Kesamaan pandangan akan aspek-aspek positif peradaban Mongolia dan sumbangsih positif Mongolia terhadap Rusia; 3. Kesadaran bersama akan sejarah penindasan bangsa Rusia terhadap kaum muslim serta batas waktu dan momentum bagi perjuangan kesejahteraan mereka; dan 4. Kesamaan persepsi tentang tindakan eksploitasi bangsa Rusia terhadap daerah dan etnis mereka.[14] Apapun jadinya, yang pasti penguatan simbol mitos tandingan ini nantinya akan sangat berbahaya dan merugikan bagi kedua belah pihak warga etnis Rusia dan juga Turki muslim tersebut.

B. Pandangan dan Visi Putin tentang nasionalisme dan identitas Nasional Rusia.

Sebelum mengajukan pandangan dan visi presiden Rusia saat ini, Putin, tentang nasionalisme dan identitas nasional Rusia, berikut akan diberikan peta ataupun spektrum pemikiran nasionalisme yang sedang berkembang di Rusia. Semua pihak di Rusia sepakat bahwa Rusia membutuhkan identitas nasional yang baru. Dan hampir semua pemikiran menekankan persyaratan bahwa identitas Rusia yang baru harus disandarkan pada kultur dan budaya dan pengalaman sejarah warga etnis Rusia. Selain itu, semua juga cenderung bahwa Rusia memiliki karakter monoetnis. Artinya, pemikiran politik Rusia

[14] Shireen T. Hunter, *Ibid*., hal. 159

didominasi oleh ide etnosentris serta menolak adanya dualitas dan sintesis budaya. Perbedaan di antara mereka terjadi hanya pada tingkat ekstrimitas penolakannya terhadap minoritas-minoritas etnis tersebut.

Aliran pemikiran tersebut yaitu :[15]

1. **Christian Nationalists**

Menurut kelompok ini, agama kristen ortodoks yang menyatu dengan etnis Rusia adalah elemen pokok bagi identitas nasional Rusia dan memiliki peran fundamental dalam menumbuhkan semangat nasionalisme Rusia. Kelompok ini terbagi dalam metode pencapaian tujuan mereka. Yang satu menyerukan sentimen anti-minoritas dan yang lainnya atau Christian Nationalis Democrat bersikap lebih demokrasi dan toleran terhadap agama lain.

2. **Communist Nationalists**

Kelompok ini berusaha membangkitkan kembali status Rusia sebagai negara superpower masa Uni Soviet. Mereka mengembangkan ide bahwa kejatuhan Uni Soviet bukan karena kesalahan sistem yang telah dibuat menyatu dengan budaya Rusia tetapi karena konspirasi internal dan eksternal orang-orang yang membenci dan melawan Rusia yaitu kelompok pengikut ide internasional, kosmopolitanisme serta para pencari keuntungan. Kelompok *Communist Nationalists* ini berusaha mengembangkan filosofi dasar dari komunisme yaitu semangat spiritualis dan immaterialis, yang dari karakteristik ini tampaknya bisa berkomunikasi dengan Islam. Kelompok ini juga mencoba mengangkat aspek-aspek kesamaan dengan Islam untuk membangun afinitas antara Rusia dan negara-negara Islam dalam rangka kepentingan tujuan Rusia melawan Barat yang menurut mereka merupakan ancaman bagi Rusia.

3. **Geopolitical Nationalists**

Menurut kelompok ini faktor geopolitik; susunan wilayah, iklim, dsb—sangat fundamental dalam membentuk dan menciptakan budaya dan karakteristik suatu negara. Dalam hubungannya dengan Islam, pandangan tentang faktor-faktor geopolitik ini terbagi tiga;

---

[15] Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 176-190

Pertama, berpandangan negatif terhadap Islam. Bahwa secara geografis Rusia dikelilingi oleh negara yang diisi dengan penduduk yang berjiwa perang dan terbelakang karena Islam adalah agama perang. Hal ini turut membentuk visi dan misi Rusia sebagai mesianis, yaitu tugas melakukan penaklukan dan menghilangkan ancaman guna menyelamatkan kehidupan baik penduduk Rusia dan juga penduduk negara-negara muslim itu sendiri. Juga untuk mengelola dengan baik dan memanfaatkan aset kekayaan alam dan aset-aset manusia yang ada di negeri-negeri muslim tersebut.

Kedua, berpandangan positif terhadap Islam dan bersikap sentimen terhadap Barat (Eurasist). Bahwa secara geografis negara terdiri dari susunan 'continental' dan 'island'. Contoh negara 'island' adalah Inggris dan Amerika Serikat. Peradaban dan ideologi yang terlahir dari negara 'island' yaitu instabilitas, tidak mengakar dan materialisme. Adapun negara continental mengembangkan budaya integratif, spiritual, dan peradaban *non-exploitatif*. Kedua model negara ini berkompetisi sejak zaman kuno. Rusia termasuk tipikal *continental* dan Islam memiliki kesamaan dengan Rusia sebagai negara Eastern dan *continental*. Untuk konteks Rusia ideologi ini disebut Eurasianism. Karena itu, Rusia dapat bekerjasama dengan Islam untuk mengalahkan negara-negara 'island'.

Ketiga, berpandangan ko-eksistensi dan keseimbangan antara etnisitas dan geografis (Neo-Eurasist). Bahwa Rusia memiliki dua identitas. Secara kultur dan budaya, Rusia terikat kepada peradaban Eropa kristen bagian Timur dan secara geografis, Rusia terletak di wilayah Eropa yang berperadaban Barat. Stabilitas identitas tersebut, menurut kelompok ini, hanya terbangun melalui kesatu-paduan politik dan kultur antara Slavianisme, Finno-Ugrian dan Turkisme. Rusia harus menyeimbangkan diri agar tidak terlepas dari akar budaya Eropa tetapi juga tidak mengambil seluruhnya budaya Eropa sehingga menjadi pengabdi dan pengekor Barat, yang pada gilirannya akan dilemahkan secara geo-politik. Pada dasarnya ideologi kelompok ini adalah eropanisasi Rusia dengan tetap berusaha menempati posisi dominan di antara negara-negara Eropa, apalagi di antara etnis-kultural dalam negeri Rusia.

4. Fringe-Nationalism (RNU)

Kelompok ini mengajukan kesatuan identitas nasional Rusia dan hak ekslusif etnis Rusia. Pandangan kelompok ini adalah nasionalisme etnosentris yang mengarah kepada rasisme dan sistem ideologi mirip Nazisme. Mereka meyakini bahwa hanya dengan diisi oleh ras Rusia murni dan membersihkan diri dari semua unsur budaya etnis luar Rusia yang dapat membuat Rusia tumbuh lagi menjadi sebuah kekaisaran yang perkasa. Kekaisaran Rusia inilah yang akan dapat menciptakan tata-dunia yang adil dan menjamin keamanan di bumi. Walaupun ternyata keadilan bagi kelompok RNU bukan berarti persamaan dan kesamaan kesempatan.

Dalam jangka pendek, kelompok ini memperjuangkan bahwa hanya etnis Rusia yang sama sekali tidak tercampur atau tidak memiliki pertalian dengan etnis lain yang dapat menduduki jabatan kenegaraan. Konsekwensinya adalah penyingkiran warganegara naturalisasi dan warganegara keturunan Kaukasus. Kelompok rasial ini sekarang sudah banyak pendukungnya dan terorganisasi dengan baik dan sering melancarkan aksinya melakukan penyerangan kepada keturunan etnis Turki dan Kaukasus. Melihat kasus penyerangan yang terus meningkat membuat sejumlah pengamat menyimpulkan bahwa kelompok ini mendapat dukungan dari orang pemerintahan. Pihak polisi dan bahkan agen rahasia Rusia dipercaya mendukung dan membantu gerakan kelompok ini. Dan harus diketahui bahwa ternyata kelompok rasis ini jelas-jelas mendapat banyak dukungan dari generasi muda Rusia. Sebuah survei menyebutkan bahwa dari 4 sampai 6 % generasi muda yang tertarik di bidang politik separuhnya yaitu 2-4 % tertarik pada ide ultranasionalis neo-Nazi dan Facisme tersebut.

5. Reformist Liberal Nationalism

Kelompok ini tidak melakukan aktifitas gerakan tetapi sekedar gerakan pemikiran yang menyebarkan ide harmonisasi antara realitas budaya dan sejarah Rusia dengan kebutuhan modernisasi ekonomi, politik dan sosial. Tujuan utamanya adalah cita-cita modernisasi dan pembaharuan Rusia yang sejalan dengan dan diarahkan kepada penguatan negara, pemulihan dan pengembalian status super-power Rusia serta pemeliharaan keunikan dan kekhasan budaya bangsa Rusia.

Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap kerusakan yang diakibatkan revolusi Gorbachev. Konsep nasionalisme kelompok ini adalah penekanan pada sentralitas Rusia dan tujuan untuk mencapai Rusia yang kuat dan integral, independen dari Barat dan makmur. Dalam hal ini, semua masalah fanatisme dan mitos-mitos kebangsaan Rusia tidak begitu penting dan hanya dipertimbangkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan praktis dimaksud. Visi yang dibutuhkan untuk tujuan fundamental negara tersebut yaitu :

- Rasa memiliki dan keterikatan yang melahirkan patriotisme warga
- Kemandirian dan Menghargai Diri Sendiri
- Pragmatis dan tidak berkutat pada Ideologis
- Mementingkan kontinuitas sejarah
- Peran sentral dari Militer

Terlihat bahwa poin-poin visi ini mengarah kepada etnosentris yang moderat dan tidak ekslusif, membuka kesempatan etnik-etnik non-Rusia untuk menjadi anggota penuh negara bangsa Rusia. Berkenaan dengan agama, kelompok ini juga bersifat *middle off the road.* Mereka meyakini bahwa Rusia pada dasarnya merupakan negeri kristen ortodoks tetapi mereka tidak menutup mata akan keberadaan agama-agama lain di Rusia. Ada dua pendapat terkait dengan metode yang akan dijalankan; 1). yang cenderung kepada ide dan metode Barat tetapi pengimplementasiannya harus dengan 'mentalitas Rusia' dan 'akar sejarah bangsa Rusia'; 2). yang cenderung menghindar dari cara-cara Barat demi menjaga ketat kepentingan nasional, identitas nasional dan harga diri bangsa Rusia.

Dengan demikian, kecuali yang terakhir, tidak satupun usulan yang berkembang tentang ideologi nasional bangsa Rusia yang menghendaki kenyataan pluralis etnis dan agama di Rusia. Semuanya berangkat dan berorientasi kepada jatidiri asal etnis mayoritas Slavic. Bisa dibayangkan jadinya, semua ideologi ini tentunya akan menutup mata, jangankan memberi perhatian, terhadap keberadaan kelompok minoritas. Kelompok minoritas, termasuk Islam yang merupakan minoritas etnis dan agama terbesar, akan seterusnya dianggap sebagai pendatang yang menumpang. Kalaupun ada pemikiran yang

mempertimbangkan geografis Turki sebagai unsur jatidiri bangsa Rusia, harus dipahami bahwa teori ini tidak bermaksud mengikutkan aspek kelslaman dari Turkisme tersebut. Adapun teori yang tersebut terakhir, sementara mereka tidak monosentris mereka sebenarnya bukan juga etnosentris murni. Dengan karakter dan orientasi pragmatisnya, jangankan kepentingan minoritas bahkan sentimen-sentimen etnisitas mayoritas pun akan dikorbankan untuk tujuan liberalnya. Secara mendasar, ideologi ini memandang kelompok minoritas hanyalah merupakan pelengkap, pewarna dan kemudian tumbal dalam figura kebangsaan Rusia.

6. Pandangan Presiden Vladimir Putin

Masyarakat dan media mencatat ketidak-konsistenan Putin terkait dengan wacana identitas nasional dan karakter nasionalisme negara Rusia. Hal ini karena pada masa kampanye kepresidenannya, Putin mengakui bahwa belum ada konsep yang menyatukan Rusia baru sebagai bangsa dan karenanya akan merupakan salah satu prioritas beliau. Tetapi setelah menjabat, Putin tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan Borist Yelsin membentuk komisi untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Dan ketika didesak pendapatnya, beliau membuat pernyataan yang berbeda bahwa, "...Rusia tidak perlu membuat sesuatu yang baru. Memperkenalkan ide nasionalisme yang baru menurut saya adalah suatu petualangan dan usaha yang sama sekali tidak ada gunanya. Ide nasionalisme tidak dapat ditemukan begitu saja sebab nilai-nilai etika dan moral bangsa berkembang dalam waktu berabad-abad..., dan saya melihat kalau garis besar ideologi nasional sekarang ini sudah terbentuk."[16] Dengan ketidaktegasannya menetapkan identitas nasional Rusia maka para pengamat mencoba menelusuri visi nasionalisme Putin melalui tindakan-tindakan dan kebijakan politiknya. Tetapi orang harus cermat dalam menyimpulkannya karena, lagi-lagi, Putin selalu menampilkan tindakan, sikap dan juga pernyataan yang berubah-ubah dan saling berbeda.

---

[16] Ajay Goyal, "Democracy Irreversible, Putin says,"http://www.2.russiajournal.com/weekly/article.shtml?ad=3650>

Petunjuk pertama yang mengungkapkan pandangan Putin tentang nasionalisme Rusia adalah penanganannya terhadap persoalan pemberontakan Chechnya. Harus digarisbawahi bahwa Putin adalah pemeran utama dalam penarikan keputusan pemberian otonomi bagi Chechnya, artinya, penyerangan kembali negeri Chechnya, tindakan yang kenyataannya justru membuatnya populer dan menghantarkannya ke kursi kepresidenan. Putin mengungkapkan sendiri bahwa,"...Chechnya tidak akan menjadi negara independen di luar Rusia."[17] Sentimen Chechnya Putin tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak main-main dengan visi kesatuan wilayah teritorial Rusia. Dari segi ini berarti nasionalisme Putin terutama sekali berbasis teritorial, yang dalam istilah beliau disebut 'Patriotisme'. Tindakan mempertahankan Chechnya dengan segala pengorbanan dikatakannya memiliki tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mencegah efek disintegrasi yang akan ditularkan insiden Chechnya ke negeri wilayah bagian lainnya.

Putin menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan Patriotisme tersebut yaitu, "...kecintaan pada kampung halaman, kepada masyarakat sendiri, nilai-nilai agama dan budaya sendiri serta semua yang menjadi fondasi kehidupan kita, semua yang membuat kita menjadi sebuah bangsa, yang menjadi ciri khas kita, semua yang membuat kita bangga. Inilah yang merupakan ide nasionalisme yang kamu pertanyakan." Dalam kesempatan lain diterangkannya, "...patriotisme adalah sumber keberanian, kesetiaan dan kekuatan masyarakat kita. Kalau kita kehilangan patriotisme, kebanggaan nasional dan harga diri sebagai bangsa maka kita akan kehilangan bangsa kita, jangankan untuk mencapai sebuah kebesaran."[18]

Putin memang menekankan pada tujuan pengembalian kejayaan masa lalu Rusia. Dalam konteks ini terlihat pemikiran Putin mengikuti ide nasionalisme kelompok 'nasionalis liberal reformis'. Penekanan pada pencapaian kejayaan Rusia mensyaratkan sikap praktikal dan

[17] Ajay Goyal , *Ibid*.
[18] Ajay Goyal, *Ibid*.

pragmatisme. Dalam hal ini, ide-ide fanatisme etnis dan nilai-nilai tradisional menjadi tidak terlalu penting atau setidaknya menempati urutan kedua. Putin, misalnya, menunjukkan ketidak-tertarikannya untuk mengikuti aspirasi mayoritas masyarakat dan politikus di sekelilingnya agar memprioritaskan integrasi negara-negara satu etnis dengan Rusia, seperti Ukraine dan Belarus, dalam rangka memperkuat basis etnis Slavia di Rusia. Dia disebutkan tidak ingin mengalihkan pemikirannya dan mengorbankan kerja yang lebih penting yaitu perbaikan ekonomi Rusia disebabkan mengikuti skema atau strategi etnisitas tersebut. Putin juga lebih terbuka kepada Barat dan berusaha mempertahankan hubungannya dengan Amerika dan Eropa saat ini.[19]

Selain bersikap pragmatis dan berpikir praktis, Putin menjalankan gaya otoritarian dalam merealisasikan visi teritorialnya tersebut. Terlepas dari pernyataannya bahwa beliau mendukung demokrasi dan tidak akan menciptakan sistem totalitarianisme dan kediktatoran, ternyata pengamat politik sepakat bahwa tindakan-tindakan dan kebijakannya mendemonstrasikan dirinya sebagai seorang negarawan yang kekar. Dan ungkapan beliau sendiri memang menjelaskan tindakannya tersebut, "...bahwa Rusia membutuhkan dan harus memiliki kekuasaan negara yang kokoh dan kuat. Rusia juga tidak akan pernah mengekor kepada Amerika atau Inggris untuk melaksanakan tradisi politik liberalisme mereka yang usianya sudah berabad-abad."[20] Selain apa yang dilakukannya terhadap pemberontak Chechnya, tindakan otoriter Putin antara lain menutup media-media independen yang bersuara keras seperti televisi NTV, harian *Segodya* dan mingguan *Itogi.* Dapat dikatakan bahwa yang penting bagi Putin sekarang adalah perjuangan integritas teritorial negara, penguatan kekuasaan negara dan revitalisasi ekonomi. Artinya, sesuai dengan konsep modernisasi kelompok liberal reformis, dalam mengupayakan kemajuan dan

[19] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 194.

[20] Sebagaimana dikutip Shireen T. Hunter, *Ibid*., hal. 193

revitalisasi ekonomi tersebut Putin tetap dalam koridor dan memakai sistem, karakter, dan gaya politik Rusia.[21]

Tetapi setelah di satu sisi menampilkan sikap yang pragmatis, mengakui nilai-nilai universal dan kedudukan multietnis di Rusia, ternyata Putin menunjukkan lagi sisi lain visinya. Di sini Putin malah memperlihatkan tendensi etnosentris dalam nasionalisme Rusia. Beliau menyatakan bahwa selain nilai-nilai universal yang melekat dalam sistem demokrasi, nilai-nilai tradisional Rusia akan sangat efektif menyatukan masyarakat. Media massa menyebutkan pemikiran Putin retak terbelah ketika dia mengatakan keharusan mengadopsi lagu kebangsaan Uni Soviet, dengan beberapa perubahan sedikit, sebagai lagu kebangsaan Rusia Federal. Beliau mengajukan alasannya yaitu untuk mengobati luka masa lalu bangsa dan untuk melebur dan menyambungkan era sejarah Uni Soviet kepada ribuan tahun sejarah bangsa Rusia. Putin memperlihatkan bahwa bangsa Rusia tidak bisa menolak sejarah Uni Soviet sebagai bagian dari sejarah bangsa Rusia karena, menurutnya, hal itu berarti jiwa dan hidup ibu dan bapak mereka akan sia-sia, tidak berguna dan bahkan disesalkan adanya. Beliau menyatakan, "Tidak sedikitpun di hati dan kepala saya hendak menolak masa lalu negeri ini, masa lalu yang berisikan kemenangan rakyat Rusia dalam peperangan patriotisme melawan Facisme."[22] Upaya Putin untuk tidak menenggelamkan kebesaran Rusia masa lalu pada puncaknya terlihat ketika dirinya memprakarsai diadakannya di Rusia peringatan 50 tahun kemenangan Dunia atas Nazisme. Pada momen peringatan tersebut, terlepas dari tujuan-tujuan dan makna moral dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya, Putin mempersaksikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Rusialah yang memegang peran kunci dalam sejarah kemenangan tersebut, yang dikatakannya menyimbolkan kemenangan peradaban dan moral manusia di muka bumi.

---

[21] Michael McFaul, "Putin Shows His Colors," <www.hoover.stanford.edu/publications/digest—mcfaul.html>

[22] Denis Petrov, "News from Rusia," <www.fordinstitute.org/news.petrov/newsdp012601.htm>

Tindakan etnosentris Putin lainnya seperti disetujuinya aturan untuk mengadopsi bendera 3 warna komunis; simbol burung berkepala dua yang berasal dari dinasti Rumanov sebagai lambang negara; dan panji-panji kemenangan tentara merah menjadi panji resmi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dengan simbol-simbol ini Putin terlihat berusaha menggabungkan kejayaan-kejayaan selama 3 fase Rusia; masa kristen ortodoks (Era Muscovite dan Tsar), masa Uni Soviet dan masa demokrasi baru, sebagai identitas nasional Rusia pasca Soviet. Tentunya tidak ada yang salah dengan tindakan Putin mengenang kebesaran masa lalu dan jasa para pahlawan bangsa. Persoalannya adalah simbol-simbol tersebut menggemakan karakter monoetnis dan monoagama Rusia dan mengkristalisasi komponen etnis Slavia dan agama kristen ortodoks. Dan ini akan merisihkan umat Islam Rusia. Yang lebih mengganggu umat Islam lagi adalah bahwa masa-masa yang dirasakan sebagai fase kejayaan bangsa Rusia tersebut justru adalah merupakan fase penenggelaman identitas dan ketertindasan kaum muslim Rusia sendiri.[23]

Begitupun, terlepas dari semua yang telah dilakukannya di atas untuk mengangkat dan mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisional bangsa Rusia, Putin ternyata tetap menuai kecurigaan dan klaim pragmatisme terkait dengan faktor etnis dan nilai-nilai tradisi bangsa Rusia dalam visi nasionalismenya. Jadi, sementara dia jelas-jelas bukan seorang rasis 'Slavianisme', Putin juga bukan seorang Eurasist murni, yang menekankan bahwa semangat keutuhan teritorialisme terbangun dari satu kesatuan antara letak dan keutuhan geografis negara dengan keutuhan eksistensi etnis-etnis dan tradisi yang ada di teritori suatu negara tersebut. Hal ini terlihat pada tindakan-tindakan Putin yang tidak mempertimbangkan kepentingan kelompok etnis Turki, yang bagi aliran 'Eurasist' dipandang sebagai bagian dari kesatuan budaya dan politik Rusia. Jadi adalah tepat kesimpulan Hunter bahwa Putin lebih

---

[23] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 195

[24] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

sebagai seorang nasionalis liberal yang berorientasi western dan cenderung ke Barat.[24] Terkait dengan Islam, sisi 'westernized' Putin ini terekspresi dalam sentimennya yang berlebihan melihat Islam sebagai ancaman dan sikapnya yang menempatkan Islam sebagai pihak dan aliran yang tidak memiliki ikatan spiritual dengan kristen ortodoks. Putin terbukti melakukan kontrol ketat juga terhadap kaum muslim di wilayah yang tidak memberontak, membatasi perkembangan lembaga-lembaga Islam dan aktifitas sarjana-sarjana muslim yang kritis dan independen. Kalau tindakan pembantaian dan *annihilisme*nya terhadap pemberontak Chechnya mungkin relevan dengan obsesi teritorialismenya, maka ketakutan Putin terhadap ekstrimis Islam yang menjadi alasannya untuk mengontrol kaum muslim yang sejak dulu tunduk kepada pemerintah non-muslim mereka jelas adalah merupakan ekspresi *Islamo-phobia* dan ketidak-sensitifannya terhadap rakyat muslim-nya sendiri.

Tetapi lagi-lagi, sisi pragmatis dari orientasi western Putin tersebut tentu tidak menghalanginya untuk melakukan taktik kerjasama dengan kelompok negara-negara muslim. Putin juga selalu menetralisir pandangan miring dirinya terkait dengan umat Islam, dengan pernyataan-pernyataannya misalnya,"...memang mayoritas penduduk Rusia adalah Kristen ortodoks. Kristen ortodoks adalah kristen dari belahan dunia Timur, dengan begitu kami memiliki banyak kesamaan dengan Islam." Dia juga mengatakan bahwa sebagai salah satu agama penduduk Rusia, Islam juga akan didukung oleh pemerintah.[25]

Akhirnya, karena tindakannya yang saling berbeda begitu juga pernyataan-pernyataannya, sejumlah analis menyimpulkan karakter eklektik dalam visi nasionalisme Putin. Dia dikatakan tidak menunjukkan konsepnya yang konkrit, dan demi mendapatkan dukungan bagi kekuasaannya dia terpaksa melayani semua kelompok termasuk aspirasi dan ideologi yang berbeda-beda, mulai dari pihak yang berpandangan politik otoriter sampai golongan paling liberal. Pihak yang memahami dan mendukung sikap Putin tersebut menjelaskan bahwa itu adalah

[25] Berita dari harian Reuters, 24 Desember 2001, dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid.,* hal. 197

konsekwensi dari realitas kondisi Rusia saat ini, di mana kebutuhan Rusia untuk modernisasi dan mengikuti tren Barat dihadapkan pada nilai dan tradisi-tradisi budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat.[26] Kesimpulannya, visi nasionalisme Putin tercermin dalam apa yang dilakukannya sekarang yaitu pembangunan ekonomi dan kemajuan yang berorientasi ke Barat dilakukan dengan tendensi tradisi politik Rusia yaitu 'kekuatan kekuasaan' dan 'represif.'

❖❖❖

[26] Lilia Shevtsova, "From Yeltsin to Putin: The Evolution of Presidential Power" dalam *Gorbachev, yeltsin and Putin: Political Leadership in Rusia's Transition,* ed. Archie Brown dan Lilia Shevtsova (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2001), hal. 99

BAB IV

FAKTOR ISLAM DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN

BAB IV
FAKTOR ISLAM DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN

A. Kebijakan Dalam Negeri

Sejak awal kepemimpinannya presiden Putin memang telah siap dengan programnya untuk mengembalikan dan mempertegas kekuatan dan kemutlakan kekuasaan negara. Hal paling pertama dan utama yang dilakukan Putin setelah pengangkatannya sebagai presiden adalah perombakan total dan pengorganisasian kembali sistem negara bagian (federasi) di Rusia. Hanya seminggu setelah pengangkatannya pada bulan Mei tahun 2000, Putin langsung mengeluarkan surat keputusan presiden yang berisikan program merealisasikan kekuasaan konstitusional presiden dan meningkatkan efektifitas kerja-kerja dari lembaga-lembaga kekuasaan negara. Tentu saja Putin bukan orang pertama yang menarik kebijakan desentralisasi dan mengembalikan otoriterisme di Rusia. Kelompok Bolsheviks sebelumnya juga kembali memasukkan negeri-negeri bagian Rusia ke dalam sebuah pemerintahan yang benar-benar kokoh dan terpusat, tidak lama setelah mereka memegang kekuasaan dan tidak lama pula sejak mereka berjuang dan berkampanye menumbangkan otoriterisme—kekaisaran Rusia—itu sendiri. Hanya saja otoriterisme pemerintahan Putin seakan menjadi stempel bagi kultur politik otoritarian Rusia. Pemerintahan Putin adalah presentasi sempurna model demokrasi dan sistem presidensial dalam kultur otoritarian Rusia. Sekali lagi, pemerintahan Putin menjadi bukti terakhir bahwa pengalaman sejarah dan pandangan hidup bangsa Rusia meyakini bahwa keteraturan hidup bangsa harus disandarkan pada kepemimpinan dan kekuasaan personal. Pernyataan di atas ingin menegaskan bahwa kalaupun ada faktor Islam terlibat dan berperan dalam kebijakan sentralisme dan karakter otoriterisme Putin, dan oleh karena itu Rusia, itu hanya terjadi belakangan sekali dan tidak bersifat konsekuensial maupun substansial. Argumen ini akan diurai berikut ini.

1. Pemikiran Politik *Monosentris* dan *Intoleran* bangsa Rusia

Seorang intelektual abad 19 dari kelompok Slavic, Nikolai Danilevsky, menegaskan bahwa bangsa Rusia membutuhkan suatu sistem monarki untuk menjaga keharmonisan sosial mereka, dengan

meyakini bahwa kepentingan individu berada di bawah kepentingan orang banyak. Sebagai manifestasinya, Rusia tidak mementingkan peran partai politik, yang dalam sistem lainnya merupakan media yang mutlak dan prinsipil untuk menjamin kepentingan masyarakat banyak. Jelasnya, bangsa Rusia tidak menghendaki dan tidak memiliki ide tentang partai politik.[1] Dia jelaskan lagi bahwa pandangan ini didasarkan pada premis bahwa masyarakat harus berusaha mencapai satu kebenaran transendental ataupun visi bersama yang lebih mulia dan penting kedudukannya dari sekedar persoalan hak kewarganegaraan dan kepentingan keseharian seorang individu. Konsekwensinya, pandangan ini mendukung keseragaman politik dan mencela pluralisme termasuk partai-partai politik yang membawa kepada persaingan dan perpecahan masyarakat. Seorang pemikir rekan Danilevsky, Aleksei Khomyakov, mengargumentasikan bahwa demokrasi plural ditolak karena secara spiritual lebih rendah dari tradisi etnis Slavic Rusia. Intelektual Rusia lainnya menyatakan filosofi mayoritas bangsa Rusia adalah bahwa kebenaran adalah satu dan mutlak dan seseorang atau satu kelompok masyarakat hanya akan mendapatkan tempat dan pengakuan suara di Rusia sepanjang mereka mengikuti satu kebenaran yang diyakini ini. Karenanya, oposisi adalah penyalahan terhadap satu kebenaran yang diyakini dalam bangsa tersebut.[2]

Pemikir dari kelompok konservatif lebih kaku dan tajam dalam mengkritik pluralisme. Pemikiran mereka secara khusus diilustrasikan dalam pernyataan Nikolai Karamzin, tokoh aliran konservatif yang merupakan penasehat Tsar Alexander I. Walaupun beliau menyetujui bahwa kekuasaan Tsar dibatasi oleh institusi tradisi dan gereja namun dia menentang pembatasan kekuasaan otoritarian melalui parlemen ataupun lembaga-lembaga demokrasi liberal lainnya. Beliau mencela keras segala upaya ke arah monarki konstitusional dan mengagetkan Tsar Alexander I dengan pernyataan peringatannya,

"negeri Rusia, belajar dari kekacauan panjang yang pernah dialami, di depan kesaksian altar suci, telah menyerahkan kekuasaan

[1] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Islam in Russia; The Politics of Identity and Security,* hal. 248.

[2] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

otokrasi kepada nenek moyangmu, meminta kepada nenek moyangmu agar memerintah Rusia secara mutlak dan tidak membagi-bagi wewenang. Amanah suci ini adalah dasar dari otoritasmu (Alexander I), kamu tidak punya cara lain. Kamu boleh melakukan apapun, apa saja, tetapi kamu tidak boleh, atas nama hukum, membatasi kekuasaanmu."[3]

Ini pulalah yang diekspresikan pemikir-pemikir konservatif di penghujung abad 19, seperti Konstantin Pobedonostsev yang menyatakan bahwa sistem parlemen demokrasi membagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang yang mencari keuntungan pribadi sedangkan negara otokrasi adalah penjelmaan kebenaran masyarakat dan mempresentasikan kehendak orang banyak. Sistem parlemen menggiring kepada tirani massa dan pengorbanan kemaslahatan masyarakat demi pergulatan ambisi dan kepentingan di antara pihak-pihak tertentu.[4]

Pemikiran otoriterisme ini dikatakan sebagai kultur bangsa Rusia karena bukan saja menjadi ideologi kelompok Slavic dan Konservatif, yang mereka ini tegas-tegas menentang semua ide-ide Barat, melainkan juga diamini dan dilakoni oleh para pemikir liberal lainnya. Contohnya adalah Pyotr Chadaaev, seorang yang mengkampanyekan peniruan terhadap kemajuan Barat, beliau juga menegaskan bahwa penghargaan kepada individu berlaku dalam kerangka pencapaian kebaikan bersama masyarakat, yang artinya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Contoh lainnya adalah Petr Tkachev, seorang anggota gerakan populis radikal, yang merupakan kelanjutan dari gerakan populis sosialis tani abad 19. Beliau teguh menolak pluralisme dan sistem demokrasi parlemen walaupun beliau mengakui hubungan dan saling pengaruh antara politik liberalis dengan kapitalisme di Barat. Beliau menyatakan bahwa keseragaman kebutuhan adalah prasyarat bagi tercapainya suatu masyarakat yang adil dan bahwa kepentingan-kepentingan individu yang melampaui norma-norma yang dianut orang kebanyakan harus ditekan sebab itu akan memunculkan kecenderungan untuk mengorbankan pihak lain dalam memenuhinya. Prinsip yang dipegang adalah bahwa semakin banyak kepentingan bersama yang

[3] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid.*
[4] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 249.

ingin dicapai maka semakin mendesak adanya keseragaman politik dan ditiadakannya perbedaan pandangan. Pluralisme adalah merupakan sistem masyarakat borjuis yang berkutat dalam ketidak-adilan.[5]

Terlihat bahwa seluruh pandangan dari berbagai aliran tersebut intinya menyepakati permusuhan terhadap pluralisme demokratis dan politik multipartai, yang di dalamnya memungkinkan kompromi dan toleransi politik.

2. Sejarah Rusia dalam Sistem Otoritarian

Ideologi otoritarian di atas terurai sepanjang sejarah perpolitikan Rusia, yang selalu kembali terperangkap ke dalam model kekuasaan terpusat dan mewarisi otoritarian ke-Tsar-an Rusia, padahal telah pernah dua kali berkesempatan melakukan perubahan dan demokratisasi; pertama, masa keruntuhan Tsar dan kedua, masa keruntuhan rejim Soviet.

Sejak deklarasi Ivan III tahun 1493 bahwa dia menguasai seluruh negeri-negeri di Rusia, sampai kepada dibentuknya kekuasaan totalitarian Soviet oleh Bolsheviks hingga terciptanya sistem pemerintahan demokrasi federal Rusia, semua rejim yang memerintah melaksanakan sistem politik otoritarian. Ivan 'Terrible' menjalankan metode terror menggunakan serdadu polisinya (*oprichniki*) untuk mencegah timbulnya oposisi dan memperkokoh kekuatan otoriternya. Bahkan pangeran-pangeran yang berpikiran modern seperti Peter the Great dan Ratu Chaterine, di tangan mereka kekuasaan malah tambah absolut dan absolutisme malah semakin berjaya. Upaya liberalisasi politik tidak pernah ada dalam pemerintahan monarki sampai tiba masa awal abad 19 oleh Alexander II dan, dengan setengah hati, Nicholas II. Begitupun, yang dilakukan hanyalah sedikit perubahan dan tidak sampai memiliki perangkat dan kesempatan untuk terbentuknya sistem perwakilan apalagi partai independen. Hanya setelah revolusi Rusia 1905, partai-partai politik diatur dan parlemen dibentuk. Tetapi ternyata, partai-partai liberal juga tidak mendapat izin apalagi partai yang paling mendapat dukungan rakyat dan paling semangat melakukan revolusi. Mereka langsung dibubarkan disusul kemudian dengan pembubaran

[5] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid.*

parlemen. Setelah kejatuhan Nicholas II, Alexander Kerensky memegang pemerintahan transisi dan melakukan liberalisasisecara agresif. Dia bahkan mengeluarkan izin bagi partai-partai yang sebelumnya dilarang serta mengkampanyekan izin kebebasan berkumpul dan berbicara. Namun, keberhasilan Bolsheviks merebut kekuasaan menghancurkan total proses demokrasi Rusia yang sudah bertunas. Segera setelah menyingkirkan pemerintahan transisi, kelompok Bolsheviks secara berangsur-angsur menutup berbagai celah munculnya kekuasaan alternative terutama sekali Dewan Perwakilan. Selanjutnya pemerintahan Bolsheviks meredam kekuatan-kekuatan anti-Bolsheviks dalam suatu perang sipil Rusia. Sejak itu pula, partai komunis Bolsheviks telah mematikan suara-suara perlawanan dan melanjutkan sejarah otoriterisme Rusia untuk waktu 70 tahun ke depan. Selama waktu itu, kelompok-kelompok gerakan masyarakat dan organisasi-organisasi hak-hak azasi manusia terpaksa bermain di bawah tanah di luar jangkauan pemerintah.

Tidak adanya pengalaman pluralisme politik dalam bentuk partai kemudian menghadapi kegagalan partai komunis yang melakukan lingkaran monopoli dan penindasan membuat rakyat Rusia benar-benar alergi dan curiga terhadap politik berbasis massa, dan sebaliknya semakin merasa membutuhkan dan menyandarkan kehidupan mereka pada kekuasaan personal dan kekuatan terpusat. Inilah agaknya asumsi yang dipegang oleh presiden Rusia pasca Soviet, Boris Yeltsin dan penggantinya, Vladimir Putin. Tetapi bagaimana Putin melakukan politik otoritarian dan sentralisme kekuasaannya, bagaimana dia berbeda dan bagaimana pula Islam dan umat Islam sampai terjebak menjadi target dan kambing hitam otoriterisme Putin. Untuk itu, sebelumnya akan dilihat bandingannya dari apa yang dilakukan pemerintahan Bolsheviks dan pemerintahan pasca Soviet. Nanti akan terlihat bahwa faktor Islam hanya mengemuka dalam kebijakan resentralisasi Rusia ketika di masa pemerintahan Putin.

3. Momentum 'Desentralisasi' dan Kebijakan 'Resentralisasi' di Rusia

3.1. Pembaharuan dan kekuasaan *Centrifugal* Bolsheviks

Setelah mengkonsolidasi kekuasaan mereka, kelompok Bolsheviks melakukan kampanye gencar tentang keharusan menyatukan

kembali wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian kekuasaan kekaisaran Tsar Rusia. Sebagaimana diterangkan, tumbangnya kekuasaan pusat dengan bubarnya dinasti Tsar membuat suara-suara tuntutan otonomi di negara-negara bagian termasuk negara-negara wilayah muslim Rusia semakin nyaring dan ramai. Memasuki tahun 1918, sejumlah wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan Kekaisaran malah berhasil melepaskan diri dari Rusia sedangkan sebahagian lainnya mengklaim otonomi yang lebih besar.

Sebelumnya, kaum Bolsheviks pula yang telah memunculkan momentum desentralisasi melalui hiruk-pikuk nasionalisme etnis. Kaum Bolsheviks dengan vokal menyuarakan perubahan sistem feodal Tsar kepada sistem pemerataan sosialis di Rusia. Dalam melancarkan gerakannya, kaum Bolsheviks merangkul kelompok-kelompok etnis non-Rusia dan menjanjikan kekuasaan otonomi serta pengakuan eksistensi mereka. Awalnya janji itu memang ditepati. Segera setelah kaum Bolsheviks berhasil merebut kekuasaan awal November 1917, mereka mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Azasi warga negara Rusia yang menjamin kebebasan mengekspresikan identitas, nilai dan tradisi masing-masing kelompok etnis. Mereka juga membuat petisi kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan kaum muslim bahwa keyakinan, ibadah, lembaga-lembaga masyarakat dan tradisi agama kaum muslim harus dihargai dan dipandang sakral. Tetapi, setelah kekuatan mereka terkonsolidasi di Moskow dan St. Petersburgh kaum Bolsheviks memaksakan kontrol mereka atas semua wilayah Rusia, yang justru baru mulai menikmati kebebasan. Dan hingga akhir perang sipil Rusia tahun 1921 kelompok Bolsheviks telah dapat menundukkan kembali sebahagian besar negeri-negeri bagian Rusia masa Kekaisaran.[6]

Tetapi kemudian kaum Bolsheviks menghadapi ancaman perpecahan dan instabilitas, dan ini menjadi faktor kondisional bagi mereka melakukan resentralisasi dan kontrol. Gangguan pertama justru datang dari penduduk etnis Rusia sendiri yang mereka ini tidak merelakan sistem kekaisaran tumbang, karena memandang bahwa pemerintahan kekaisaran dan pangeran-pangeran (Tsar) pemimpinnya

[6] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal 207

adalah suci dan mulia. Yang kedua adalah ancaman penyerangan dari Jerman dan Turki selama bulan-bulan terakhir perang dunia pertama.[7]

Namun untuk menutupi tindakan mereka melakukan sentralisasi tersebut—yang tentu bertentangan dengan visi ideologi mereka—dan terutama lagi untuk membedakannya dengan rejim kekaisaran sebelumnya yang didominasi oleh etnis Rusia, pemerintahan Bolsheviks menciptakan struktur pemerintahan federasi yang dikenal dengan negara persatuan Soviet. Secara teori, federasi ini didasarkan pada ide otonomi bagi kebangsaan non-Rusia agar mereka dapat mengembangkan hak eksistensi mereka. Sebagai basisnya, sistem ini dilindungi oleh peraturan hukum 'Pakta Union 1922' yang mengabsahkan berdirinya republik-republik berdasarkan etnis dan dianggap sukarela menggabungkan diri ke dalam kedaulatan Persatuan Soviet. Selanjutnya, di wilayah republik bagian atau yang disebut union ini, diciptakan lagi hirarki otonomi. Pertama adalah 'republik otonomi' yang memiliki otonomi paling besar di bawah 'republik union.' Di bawahnya ada daerah otonomi yang disebut 'Oblasts' dan di bawahnya lagi adalah kabupaten otonomi yang disebut 'Okrugs'. Otonomi yang paling rendah ini diperuntukkan bagi; daerah-daerah etnis yang teritorinya berbatasan dengan negara luar Uni Soviet, daerah-daerah yang jumlah penduduknya sedikit, dan daerah-daerah yang dipandang kurang memiliki kesadaran nasionalisme. Adapun republik bagian Rusia adalah merupakan republik union terbesar yang berisikan 50 % dari daerah otonomi yang ada di seluruh Uni Soviet, dan karenanya mendapat status republik federal, dan diberi nama Republik Sosialis Federal Rusia Soviet (RSFSR).[8]

Pemerintahan Bolsheviks merumuskan undang-undang yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah-daerah republik di bawahnya, bahkan sebelum resmi terbentuknya negara Uni Soviet, misalnya UU tahun 1918. Setelah dapat menarik wilayah-wilayah bagian dibentuklah Pakta Union tahun 1922. Lalu setelah Uni Soviet terbentuk dan benar-benar telah terkonsolidasi pemerintah Bolsheviks mengeluarkan konstitusi baru tahun 1924 sebagai pengganti Pakta

[7] Shireen T. Hunter, *Ibid.*
[8] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

Union 1922. Konstitusi ini menyatakan bahwa Soviet Uni adalah negara persatuan yang terdiri dari republik-republik berdaulat yang diberikan hak untuk memisahkan diri dan hak untuk melaksanakan konstitusinya sendiri. Tahun 1936 Stalin membuat konstitusi baru dan kemudian tahun 1977 diganti lagi oleh Breznev, tetapi sampai sejauh itu kedua konstitusi baru ini masih mendukung hak-hak nasional republik etnis dalam konstitusi 1924. Malah pada amandemen 1944, tercantum hak yang lebih besar lagi yaitu hak untuk mengatur hubungan luar negeri dan menjalin kerjasama langsung dengan negara-negara luar, termasuk pertukaran duta besar.[9]

Akan tetapi, terlepas dari hak-hak yang tertulis secara formal dalam konstitusi tersebut, rejim Soviet juga memformulasi sistem dan struktur politik yang memungkinkan pemimpin negara Soviet mengkonsentrasikan kekuasaan di pemerintahan pusat, yang dimonopoli oleh partai komunis Soviet. Artinya, negara Soviet memiliki sistem aturan politik ganda. Pemerintahan Bolsheviks secara sistematis mengeliminasi pos-pos kekuatan politik daerah. Mereka membubarkan 'majelis perwakilan' hasil kesepakatan daerah republik dan menggantinya dengan 'komisi luar biasa penangkal gerakan anti revolusi dan sabotase' (*Cheka*) dalam rangka mencegah terjadinya sengketa pendapat. Dalam tenggang waktu tahun 1918 sampai 1921 ketika terjadi perang sipil Rusia, kelompok Bolsheviks telah meredam kantong-kantong utama perlawanan kelompok nasionalis dan menciptakan sistem yang komprehensif untuk melakukan represi dan pemaksaan demi mempertahankan dominasi partai komunis Soviet (Communist Party of the Soviet Union, CPSU). Konstitusi Soviet tahun 1977, selain mengakui hak nasional republik-republik Soviet di tempat lain menyatakan monopoli kekuasaan CPSU yang disebutnya sebagai, "...kekuatan yang mengarahkan dan menjadi petunjuk masyarakat Soviet, yang merupakan inti dari sistem politik Soviet. Induk dari semua organisasi politik dan masyarakat adalah partai komunis Soviet Bersatu."[10]

---

[9] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 208.
[10] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 208-209,

Pemerintahan Bolsheviks juga membangun struktur kepemimpinan partai yang hirarkis dan terpusat. Keputusan pejabat yang di atas mutlak berlaku dan mengikat sampai ke bawah dan perbedaan pendapat tidak diberikan peluang. Begitu juga, partai diorganisir dan berbagai lembaga afiliasinya dibentuk, dari mulai republik pusat sampai daerah tingkat paling bawah, guna mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintahan pusat ke seluruh segmen masyarakat. Akhirnya, dengan monopoli partai komunis dikawal dengan kekuasaan terpusat oleh pemimpin partai tersebut membuat sistem dan ide federasi Soviet hanya tinggal bersemayam dalam redaksi-redaksi hukum yang dijadikan tameng bagi praktek otoriterisme dan totalitarianisme Bolsheviks. Ringkasnya, pemerintahan Bolsheviks dikonstruksi secara formal sebagai negara federasi multinasional tetapi dalam prakteknya beroperasi sebagai negara kesatuan uni-nasional dan monoideologis. Pemimpin-pemimpin republik union dan republik otonomi akhirnya hanya memegang kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan pusat Bolsheviks dan dapat bertahan dalam posisinya selama ia loyal dan tunduk kepada pemimpin Soviet di Moskow.[11]

Karakter dualitas pemerintahan Soviet juga beroperasi pada kebijakannya tentang budaya dan identitas kultural penduduk. Uni Soviet melakukan kesimpangsiuran antara cita-cita 'nasionalisme lokal' dan 'internasionalisme sosialis'. Pada tahun-tahun awal, pemerintahan Bolsheviks secara terang-terangan mempromosikan pengembangan identitas dan budaya etnis non-Rusia. Pemimpin-pemimpin Bolsheviks menelurkan program pribumisasi (*korenizatsia*) yang disebutkan untuk menghapus dan menetralkan trauma imperialisme kekaisaran. Penduduk masing-masing republik digerakkan untuk memakai bahasa asli, bukan bahasa Rusia seperti masa kekaisaran, dan melaksanakan tradisi budaya mereka masing-masing. Mereka juga direkrut untuk menjadi pengurus-pengurus inti partai komunis di daerah mereka. Tetapi bersamaan dengan itu pula pemerintah Soviet mengharuskan pemakaian huruf Latin, yang berdampak melemahkan nilai sastra

[11] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 209

bahasa daerah dan menimbulkan banyak kekacauan serta kerancuan makna. Perekrutan menjadi pengurus partai di permukaan memang seakan memberikan hak suara kepada minoritas etnis tetapi dalam perjalanannya dimanfaatkan menjadi media sosialisasi kebijakan partai dan memonitor loyalitas kepada partai dan negara.[12]

Pada tahun 1930, program indegenisasi (*korenizatsia*) dihapuskan tetapi bukan atas dasar kesadaran penghargaan pada budaya etnis minoritas melainkan untuk menggantinya dengan strategi yang lebih efektif memisahkan penduduk etnis minoritas dari akar budaya mereka. Pemerintah Bolsheviks sekarang malah memberlakukan aturan 'Russiafication' atau Rusianisasi sebagai implikasi kebijakan sentralisasi kultural. Setelah gagal menundukkan warga etnis Rusia untuk mengikuti program Sovietisasi sekarang justru ideologi Soviet yang menyerap dan mengadopsi kultur, karakter politik dan tradisi bangsa Rusia. Dengan kata lain kultur dan budaya bangsa Rusia sekarang menyatu dengan misi dan sistem pemerintahan Bolsheviks. Bukan hanya aksaranya (Cyrillic) tetapi juga bahasa Rusia menjadi bahasa wajib di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah di setiap daerah. Yang lebih parah, ide Russiafikasi ini mengandung visi rasis yang berkonsekwensi pada pembersihan partai komunis dari orang-orang non Rusia pada masa Stalin. Stalin lebih jauh lagi memenjarakan bahkan membunuh ribuan orang-orang non Rusia dengan tuduhan tidak nasionalis. Maka sekarang, sentralisasi dan otoriterisme pemerintahan Soviet kembali memakai baju kebangsaan dan kultur Rusia minus kristen ortodoks. Sepanjang pemerintahan mereka, dengan tingkat represi yang dipengaruhi personaliti pemimpinnya, Soviet tetap menjalankan kebijakan anti-relijius untuk digantikan dengan ideologi komunis. Dalam prakteknya, kaum muslim, yang menjadi umat mayoritas dalam kelompok etnis non-Rusia, adalah yang paling serius menanggung kerusakan dan kehancuran sumberdaya intelektual dan institusional dalam kebijakan anti-relijius Soviet tersebut, walaupun secara aqidah Islam masih tetap dapat bertahan.[13]

---

[12] Shireen T. Hunter, *Ibid.*
[13] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 210

3.2. Pembaharuan dan kekuasaan *Centrifugal* Gorbachev

Kalau pemerintahan Bolsheviks melakukan resentralisasi terhadap revolusi desentralisasi yang dilakukannya sendiri, maka latar belakang tindakan sentralisasi Putin harus dirunut kepada insiden pembaharuan yang ditengarai oleh Gorbachev dan diikuti Borist Yeltsin.

Pemerintahan Bolsheviks Soviet dengan ideologi komunisnya relatif tidak tergoyangkan selama lebih kurang 70 tahun sampai akhirnya pada pertengahan 1980-an mencuat suara pembaharuan yang diteriakkan oleh orang dalam partai komunis sendiri, Gorbachev. Sebelumnya, sejumlah kasus perlawanan senjata telah muncul tetapi dapat diredam oleh pemerintahan Soviet, misalnya perjuangan memerdekakan diri dari gerakan nasionalis di Ukraina dan republik-republik Baltik ataupun demonstrasi bangsa Georgian yang memprotes penggantian bahasa daerah mereka dengan bahasa Rusia.[14] Namun, inisiatif pembaharuan dan liberalisasi politik Gorbachev seakan menjadi senjata yang melukai tuannya sendiri, berbalik menyuburkan gerakan-gerakan otonomi dan oposisi-oposisi politik, yang pada akhirnya menghantarkan kepada tumbangnya rejim Uni Soviet.

Inisiatif pembaharuan Gorbachev awalnya adalah untuk memperbaiki kondisi keterpurukan ekonomi atau restrukturisasi ekonomi Soviet (*prestroika*) yang sudah mencapai titik stagnan dan *intolerable.* Lalu untuk mendapat dukungan publik beliau juga mengiringinya dengan pembaharuan politik dengan mengusung ide keterbukaan (*glasnost*) dan demokratisasi terbatas. Beliau menyebarkan opini bahwa pemimpin Soviet yang lalu telah melakukan kesalahan manajemen dan korupsi. Kebebasan media dan perbedaan pendapat juga mulai mewarnai kehidupan negeri Soviet pada masanya. Puncaknya adalah ketika tahun 1990 Gorbachev mengandemen konstitusi Soviet dan menghapus monopoli kekuasaan partai komunis, yang langsung disambut dengan lahirnya berbagai bentuk organisasi dan gerakan kemasyarakatan dan politik termasuk yang berbasis etnis dan agama.[15]

Hanya satu tahun setelah amandemen konstitusi tahun 1990 di atas, ke 15 republik union dalam negara Uni Soviet semuanya

---

[14] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

[15] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 210-211

mendeklarasikan kedaulatan mereka, walaupun makna kedaulatan itu sendiri masih dipahami bervariasi dan belum diuraikan secara resmi tetapi minimal mencakup hak melaksanakan hukum sendiri dan hak keberlakuan hukum lokal di atas hukum federal pusat. Tiga di antara republik ini bahkan mengklaim kemerdekaan penuh. Selain kesibukan menghadapi kelompok-kelompok gerakan nasionalis dan pro-independen ini Gorbachev juga dipusingkan dengan persaingan internal yaitu klash kepentingan dan perebutan pengaruh kekuasaan politik, di dalam partai maupun pemerintahan pusat Soviet sendiri. Disebutkan bahwa sejak tahun 1987, Yegor Ligachev, sekretaris II partai komunis pusat yang tidak setuju dengan perubahan struktur kekuasaan partai, membentuk barisan oposisi kelompok konservatif. Mereka bergabung dan mendapat dukungan dari salah satu fraksi di parlemen Soviet yang menuntut penghentian pemberian otoritas penuh kepada republik-republik union.[16]

Kekisruhan di lingkungan pemerintahannya tersebut tentu sangat membuat frustasi Gorbachev sehingga dikatakan mempengaruhi konsentrasinya dalam menghadapi kelompok-kelompok nasionalis dan pro-independen, yang berakibat pada respon-responnya yang sering kacau dan kurang perhitungan. Ketika akhirnya ia dapat melumpuhkan perlawanan barisan konservatif, Gorbachev juga belum dapat bernapas lega karena ia langsung menghadapi oposisi yang lebih kuat dan serius dari pemimpin republik union Rusia (RSFSR), Boris Yeltsin. Berdasarkan kenyataan ini, beberapa pengamat menyimpulkan bahwa keruntuhan Uni Soviet pada dasarnya dan utamanya adalah disebabkan oleh pertentangan internal pemimpin-pemimpinnya dan bukan gangguan kelompok pro-independen apalagi mengalamatkannya kepada gerakan etnis muslim saja.[17]

Dalam menghadapi gerakan perlawanan maupun provokasi Boris Yeltsin terhadap republik-republik lainnya, Gorbachev hanya bisa bertahan secara defensif dan tarik ulur. Beliau mengeluarkan kebijakan yang bervariasi untuk menahan suatu republik tetap bergabung dengan Soviet. Misalnya, beliau berusaha meyakinkan akibat dan kemungkinan-

[16] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 212
[17] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 213

kemungkinan buruk yang akan dihadapi oleh Rusia atau republik lainnya bila memisahkan diri dari negara persatuan Soviet. Selain itu, bagi republik yang sudah agak kuat rencananya memisahkan diri, beliau mengeluarkan peraturan mengenai Prosedur Pemisahan Kekuasaan suatu republik dari negara Soviet Uni, yang di dalamnya menguraikan langkah-langkah negosiasi yang dapat ditempuh oleh suatu republik bila hendak memisahkan diri. Peraturan ini juga mengatur dan memberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonomi di bawah suatu republik union yang ingin memerdekakan diri untuk tetap bergabung dengan Uni Soviet. Sementara di pihak lain, Gorbachev juga melakukan tindakan pemaksaan bahkan intervensi militer untuk mempertahankan wilayah tertentu. Beliau, contohnya, melakukan embargo ekonomi terhadap Lithuania, pengerahan militer ke Azerbaijan, republik-republik Baltik dan juga Georgia.[18]

Terlihat bahwa Gorbachev tetap bercita-cita dan berusaha keras mempertahankan eksistensi negara Soviet Uni terlepas dari programnya untuk memperbaharui sistem ekonomi dan politik negara tersebut serta kebijakannya merevisi dan merestrukturisasi hubungan kekuasaan pemerintahan pusat dengan daerah. Perjuangan terakhirnya adalah ketika ia mengusulkan peraturan perjanjian (Union Treaty) November 1990 yang menggantikan peraturan yang dikeluarkan awal tahun 1990, yang isinya merubah sistem pemerintahan terpusat Soviet kepada fungsionalisasi kekuasaan federal. Dan Gorbachev cukup berhasil karena 9 republik Soviet sebelumnya, termasuk 6 republik muslim, setuju menandatangani perjanjian hubungan tersebut dan mau tetap bertahan dalam persatuan negara-negara Soviet. Tetapi malangnya, keberhasilan awalnya ini, sekaligus upaya terakhirnya mempertahankan Uni Soviet tersebut, harus terhenti dipukul tindakan *Coup d'etat* pada Agustus 1991 oleh gerakan garis keras yang marah atas perombakan kekuasaan pusat dan sistem sentralisme Soviet.[19]

Lagi-lagi terlihat jelas kalau Gorbachev selalu dirongrong oleh perpecahan yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya yang membuatnya tidak mampu mewujudkan cita-citanya, juga

---

[18] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 212
[19] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 212-213

mempertahankan Uni Soviet. Kondisi ini menjadi momentum bagi Boris Yeltsin—yang sudah lama menggerakkan perlawanan masyarakat dalam menumbangkan kekuasaan Uni Soviet—untuk memproklamirkan keruntuhan Uni Soviet secara resmi dengan membentuk persatuan negara persemakmuran bersama Ukraina dan Belarus pada 8 Desember 1991. Setelah diikuti dan diperkuat oleh semua negara eks republik Soviet lainnya, minus tiga negara Baltik, persemakmuran ini secara resmi mendeklarasikan,"...bahwa Persatuan Republik Soviet Sosialis, sebagai sebuah negara, secara geopolitik dan hukum internasional dinyatakan dengan ini bubar." Selanjutnya, negara-negara ini mengikrarkan berdirinya 'Persemakmuran Negara-Negara Merdeka Berdaulat' (*Commonwealth of Independent States-CIS*), yang membedakan diri dari Persatuan Republik berbasis etnis pada masa Soviet.[20]

3.3. Desentralisasi dan Sentralisasi Borist Yeltsin

Seperti apa yang terjadi pada Gorbachev, kini saatnya Yeltsin yang terbakar api yang dikobarkannya sendiri. Nasionalisme etnis dan tuntutan kedaulatan yang digaungkan Yeltsin kepada republik-republik union guna meruntuhkan Uni Soviet ikut membangunkan warga di negerinya sendiri, tidak hanya kelompok-kelompok etnis minoritas tetapi juga kelompok etnis Rusia, dan ini seterusnya mengancam dan mengguncang jalan pemerintahannya bahkan sejak paling awal jabatannya. Menghadapi ini, seperti halnya semua pendahulunya, Yeltsin juga akhirnya menghentikan desentralisasi dan kemudian dengan segala cara berupaya memperkuat kekuatan pusat.

Tetapi seperti semua kasus dalam pemerintahan Rusia sebelumnya, kembali terlihat jelas dalam pemerintahan Yeltsin bahwa pemicu utama dan sebab fundamental instabilitas negara, yang pada gilirannya menjadi dasar kebijakan sentralisasi dan kekuasaan terpusat adalah pertentangan internal dalam tubuh pemerintahan pusat itu sendiri. Dalam kasus Yeltsin, ketua Soviet Tertinggi Rusia (Russian Supreme Soviet) Ruslan Khasbulatov dan wakil Yeltsin sendiri adalah pimpinan dari kelompok oposisi tersebut. Jadi, nasionalisme etnis sebagai sebuah faktor hanyalah sebagai perantara sekaligus korban dan

[20] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 213

kambing hitam dari tujuan sentralisme tersebut. Terkait dengan nasionalisme etnis muslim, betapapun diklaim paling keras dan tajam, kenyataannya hanya dua dari seluruh republik muslim yang menuntut pemisahan diri bahkan satunya akhirnya menerima jalan negosiasi.

Setelah terpilih menjadi presiden Rusia pada bulan Mei 1990, Yeltsin semakin gencar memprovokasi sentimen nasionalisme republik-republik union untuk menumbangkan kepemimpinan Gorbachev dan pemerintahan pusat Soviet. Pada bulan yang sama, dia langsung mengumumkan rencananya untuk merumuskan perjanjian khusus dengan republik-republik Baltik yang sudah memisahkan diri dari Soviet dan menegaskan bahwa Rusia tidak akan mendukung tindakan Gorbachev yang melakukan tekanan kepada republik union yang memisahkan diri tersebut. Bulan berikutnya, Juni 1990, dengan desakan Yeltsin, parlemen Rusia pun sepakat mengeluarkan pernyataan kedaulatan Rusia. Tindakan Rusia ini lalu memunculkan parade deklarasi kedaulatan dari sejumlah republik Soviet lainnya. Dan Yeltsin belum juga berhenti dalam aksinya karena pada bulan Desember 1990 dia menggandeng republik lain untuk melakukan deklarasi bersama, lalu pada Januari 1991 dia mengunjungi Estonia untuk menyusun strategi bersama menghadapi kebijakan-kebijakan pusat yang menghambat kemerdekaan republik.[21]

Tentu saja Yeltsin tidak bisa mengabaikan dukungan dari rakyat republik Rusia sendiri. Untuk melegitimasi tindakannya melemahkan kekuasaan Gorbachev serta mendapatkan dukungan rakyat dalam negerinya, Yeltsin mengikutkan hak-hak republik otonomi dan kelompok-kelompok etnis di wilayahnya untuk dicantumkan dalam deklarasi kedaulatan negeri Rusia yang disahkan Parlemen Federal Rusia pada Juni 1990, yaitu,"...bahwa negara Rusia akan menjamin hak setiap individu untuk menyatakan kedaulatan daerah mereka dan mengekspresikan identitas nasional dan budaya mereka." Ditegaskannya lagi dalam pidatonya di Kazan dua bulan berikutnya, "...agar semua pemimpin regional di mana saja mengambil porsi kekuasaan dan merealisasikannya dengan sebesar-besarnya, sedaya mampu mereka."

[21] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 212

Selanjutnya pada tahun 1991 Yeltsin melakukan perubahan struktur administratif hingga semua republik otonomi dinaikkan statusnya dan 4 daerah otonomi (oblasts) menjadi republik otonomi. Tetapi kemudian Yeltsin tentu tidak menghendaki kekuasaannya dilangkahi dan wilayah kekuasaannya terlepas melihat republik-republik etnis tersebut, terutama yang jumlah penduduknya signifikan, mengklaim otoritas dan kedaulatan yang lebih besar lagi, di luar batas yang dia bayangkan. Karenanya, setelah Uni Soviet resmi runtuh Yeltsin pun mengkonsolidasi kekuatannya di dalam negeri. Krisis dalam administrasi pemerintahannya maupun tuntutan dan gejolak-gejolak disintegrasi di negerinya dihadapi dengan cara mulai dari negosiasi sampai kepada kekuatan senjata.[22]

Upaya yang dilakukan Yeltsin sepanjang jabatannya dalam menghentikan desentralisasi dan memperkuat otoritasnya adalah; a. penunjukan langsung pimpinan daerah dan penempatan agen-agennya di daerah-daerah; b. membentuk Peraturan-Peraturan Federal tentang hubungan Pusat dan Daerah; c. memperbaharui konstitusi untuk memperbesar otoritas pemerintahan pusat; d. melakukan negosiasi bilateral mengenai hubungan dan pembagian kekuasaan dengan suatu daerah tertentu; e. menggunakan kekuatan militer.[23]

a. Penempatan Agen

Republik Rusia Soviet yang memerdekakan diri sebagai negara Rusia Federal mewarisi sistem dualitas federasi Soviet, di mana seluruhnya terdiri dari 57 daerah non etnis (52 daerah Oblast, 3 daerah Krais dan 2 kota Federal yaitu Moskow dan St. Petersburgh) dan 32 wilayah asal etnis non Rusia (21 Republik, 1 Oblast dan 10 Okrugs). Penempatan agen-agen politik di daerah sudah mulai dilakukan Yeltsin bahkan sebelum Uni Soviet bubar. Beliau mengeluarkan 2 keputusan, pertama tertanggal Agustus 1990 yang memberikan mandat kepada perwakilan presiden di daerah-daerah itu untuk menjaga dan memonitor pelaksanaan hukum-hukum dan kebijakan federal. Tiga bulan kemudian Yeltsin mengeluarkan Kepres kedua yang menegaskan

[22] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 213-221
[23] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 221-227

haknya untuk memilih dan mencopot gubernur di republik-republik Rusia selain di republik-republik etnis non Rusia termasuk etnis muslim. Tetapi mulai tahun 1995 parlemen federal Rusia mencabut kepres ini dan mengharuskan bahwa pimpinan daerah ditunjuk melalui pemilihan.

Tetapi sejak awal pula kebijakan agen ini secara umum tidak efektif. Pertama-tama, parlemen-parlemen di daerah cukup solid untuk mengalahkan pamor wakil pusat tersebut dan mereka dapat mengklaim membawa suara rakyat apabila hendak menentang tindakan wakil utusan tersebut. Seperti halnya di Tatarstan, pemerintahan Shamiev dapat menolak keberadaan wakil pusat di daerahnya sedangkan di Chechnya, agen presiden di daerah itu sama sekali dibuat tidak berfungsi. Di lain pihak, para wakil federal itu sendiri seringkali tidak cukup komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas mereka. Mereka dapat dengan mudah disogok ataupun berinisiatif sendiri melakukan tindakan pelanggaran peraturan pusat untuk memperkuat kedudukan mereka di daerah. Seperti yang dilakukan Edward Rossel, gubernur utusan di Oblast Sverdovsh tahun 1993, dia membuat peraturan atas nama federal untuk menciptakan republik otonomi Ural.

b. Melalui Perjanjian dan Peraturan

Setelah Rusia menyatakan kemerdekaannya, Yeltsin berusaha menegaskan batas-batas otonomi regionalnya. Awal 1992 dia melakukan diskusi terbuka dengan seluruh pemerintah provinsi untuk merumuskan UU Federal yang akan menjadi basis hukum bagi hubungan antara federal pusat dan negara-negara bagiannya. Pada bulan Maret 1992, Kremlin mencapai kesepakatan dengan 86 provinsi selain Tatarstan dan Chechnya-Ingushetia, walaupun keduanya ini secara formal masih republik Rusia. Peraturan itu menyebutkan bahwa republik-republik etnis tidak memiliki hak untuk memisahkan diri dan bahwa hukum dan UU republik tidak boleh bertentangan dengan UU pemerintah federal. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan kedaulatan dan kekuasaan yang cukup besar seperti untuk melakukan kerjasama perdagangan internasional langsung dengan negara-negara asing dan untuk menentukan struktur lembaga pemerintahan sendiri, walaupun ada pengecualian beberapa wilayah yang tidak mendapatkan hak ini. Dengan begini, Yeltsin berusaha untuk menutupi usaha resentralisasinya dan dapat menjaga dirinya sebagai otoritas tertinggi.

Begitupun Yeltsin berhasil meredakan nasionalisme etnis mereka, tetapi tetap saja masih banyak republik yang melanggar perjanjian. Menurut menteri hukum dan keadilan Rusia, 19 republik etnis telah melaksanakan konstitusi sendiri dan melanggar konstitusi federal. Konstitusi republik Ingushetia misalnya menyatakan bahwa hukum federal berlaku di republik tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum republik Ingushetia. Adapun konstitusi Sakha menetapkan bahwa hukum federal harus diabsahkan oleh parlemen terlebih dahulu sebelum diberlakukan. Beberapa republik lainnya ada yang berani melakukan ekspansi sendiri terhadap wilayah tetangganya dan malah wilayah di luar negeri Rusia seperti halnya yang dilakukan Tyva terhadap teritori Mongolia, juga tekanan nasionalis Osset terhadap pimpinan mereka agar menarik Ossetia Utara bergabung dengan Ossetia Selatan yang bertetangga dengan Georgia.

Sebahagian warga Rusia memang berpandangan bahwa etnis Rusia tidak pantas dan merupakan pengkhianatan untuk melakukan tuntutan kedaulatan. Akan tetapi kenyataannya tendensi menuntut kedaulatan yang lebih besar bahkan sepenuhnya juga terjadi di daerah-daerah etnis Rusia. Mayor daerah Moskow Yuri Luzhkv, dan gubernur daerah Krai Primorsky, Yevgenii Nazdratenko misalnya, secara terang-terangan melanggar hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan peradilan. Sekelompok daerah Rusia berusaha melangkahi federal dan memperluas teritori mereka sendiri, yang lain memperluas teritori pusat Rusia atau Moskow. Sementara pimpinan regional Siberia membentuk Persatuan orang-orang Siberia yang bertujuan mengamankan otonomi politik dan ekonomi bagi sejumlah daerah wilayah Siberia.

Ringkasnya, Yeltsin melihat masih begitu banyak potensi penentangan dan pelanggaran serta belum cukup kuatnya undang-undang yang mengunci dan menjaring penentangan dan pelanggaran tersebut sehingga dia perlu melakukan pembersihan dan perombakan total.

c. Pergantian Konstitusi dan Parlemen

Pada pertengahan 1993, Yeltsin mulai hunjuk kekuatan dan mempergunakan kekerasan. Dia mulai dengan membubarkan parlemen melalui keputusannya sendiri. Ternyata selain gejolak nasionalisme etnis, Yeltsin menghadapi penentangan dan perbedaan pendapat

dengan parlemennya yang karena merupakan hasil pemilihan tahun 1989, sebagian besar berisikan kader-kader partai komunis peninggalan era Soviet. Yeltsin mengerahkan kekuatan bersenjata untuk menumpas demonstrasi yang memprotes tindakannya tersebut dan juga untuk mengusir anggota-anggota parlemen yang masih membandel duduk di parlemen. Selanjutnya dia mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang baru sekaligus referendum membentuk konstitusi baru. Hasilnya, dengan suara 58 % di pihaknya Yeltsin pun menjalankan kekuasaan kepresidenan yang sangat besar serta memangkas begitu banyak hak-hak republik dengan menjadikannya sebagai hak bersama dengan federal.

d. Negosiasi Bilateral

Setelah tindakan bersenjatanya tersebut, Yeltsin mungkin untuk sementara dapat meredam nyali daerah-daerah bagian untuk menentang secara terbuka, walaupun konstitusi barunya tersebut belum dapat berjalan efektif. Sekarang Yeltsin tersita perhatiannya dengan krisis ekonomi berkepanjangan di negerinya selain konflik-konflik dan resistensi pasif yang masih muncul dari golongan nasionalis dan komunis dalam parlemennya juga dari 12 republik yang tidak menerima kemenangan konstitusinya tersebut. Kondisi ini cukup melemahkan kinerja pemerintahan Yeltsin di pusat apalagi kemampuannya untuk mengontrol dan menancapkan otoritas di daerah-daerah bagian yang jumlahnya sangat banyak dan sangat luas tersebut. Maka Yeltsin berusaha mendekati republik-republik dan mensosialisasikan konstitusi barunya melalui strategi negosiasi bilateral.

Upaya negosiasi bilateral yang pertama kali dilakukan Yeltsin adalah kepada republik Tatarstan. Tatarstan adalah republik yang paling alot memperjuangkan kedaulatan setelah Chechnya. Sejak Yeltsin menyebarkan hiruk-pikuk otonomi dan kedaulatan bagi daerah-daerah, kedua daerah ini paling terdepan menolak semua upaya Yeltsin untuk membatasi dan menarik kembali kedaulatan tersebut. Tatarstan menolak penempatan agen pusat di daerahnya sedangkan Chechnya membuat agen pusat di wilayahnya sama sekali tidak berfungsi. Keduanya juga menolak menandatangani peraturan yang disepakati oleh federal dengan seluruh republik dan daerah di Rusia. Bahkan sampai Yeltsin mengadakan pemilihan umum untuk parlemen dan

konstitusi yang baru, keduanya tidak berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Kalau Chechnya dapat sepenuhnya melarang seluruh warganya untuk ikut memilih maka Tatarstan hanya bisa memprovokasi, mengingat hampir 50 % warganya adalah etnis Rusia, tetapi hasilnya cukup menggembirakan mereka karena cuma 15 % penduduknya yang ikut memilih.

Dikarenakan kelemahannya dalam komposisi demografis dan letak geografis ini pula maka dapat dipahami kalau Tatarstan akhirnya memilih untuk melunak dan meladeni kerjasama yang ditawarkan Kremlin. Pemerintahan Uni Soviet dengan sengaja meminimalisasi dominasi etnis Tatar di daerah itu dengan menggerakkan perpindahan dan pembauran warga Rusia ke Tatarstan. Selain itu batas daerahnya dipersempit dan digeser sehingga tidak berbatasan dengan negeri luar Soviet untuk memperlemah potensi perlawanannya dan mencegahnya berhubungan dengan negara luar. Terlepas dari ketegangan yang selalu terjadi antara keduanya, pemerintahan Yeltsin dan Shaimiev beberapa kali berusaha melakukan pembicaraan dalam masalah-masalah kepentingan negara mereka berdua, kebanyakan menyangkut bidang ekonomi. Sejak Maret 1992 sampai akhir 1993, pemerintahan Kremlin telah mencapai kesepakatan tentang masalah kepemilikan ladang minyak, industri pertahanan di republik Tatarstan, masalah lingkungan, pengembangan budaya dan sistem pendidikan. Yang paling anyar dan paling komprehensif adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada Februari 1994.

Dalam perjanjian ini terlihat Kremlin cukup sukses membujuk Tatarstan mengakomodasi keinginan-keinginan Kremlin. Shaimiev setuju bahwa Tatarstan menjadi negara anggota federasi Rusia dengan status '*united*' dan bukan hanya '*associated*' seperti tersebut dalam konstitusi Tatarstan. Dalam perjanjian tersebut juga tidak terdapat kata-kata berdaulat ataupun hak untuk memisahkan diri bagi Tatarstan sebagaimana terdapat dalam konstitusi Tatarstan. Untuk ini Tatarstan diberikan hak-hak yang tercantum dalam konstitusi Federal, sama seperti yang diberikan kepada pemerintahan pusat Rusia. Hak-hak tersebut yaitu antara lain hak untuk melakukan hubungan dagang dan ekonomi dengan negara asing dan di tingkat internasional, hak untuk menentukan kebijakan pajak dan anggaran belanja, hak mengadakan

bentuk-bentuk layanan publik sebagai kompensasi dari tugas wajib militer bagi rakyat Tatarstan.

Perjanjian kerjasama bilateral Tatarstan ini kemudian menjadi model dan dilakukan Kremlin kepada republik-republik lain. Sampai akhir 1998, Yeltsin telah merumuskan sejumlah 42 dokumen kerjasama yang dilakukan bersama 46 daerah bagian termasuk republik-republik muslim tentunya. Dan untuk sementara waktu, Yeltsin telah menciptakan suasana yang relatif stabil dan aman dari gejolak perlawanan yang frontal. Lagipula, Yeltsin menemukan momentum untuk mengalihkan dan menyatukan perhatian rakyatnya kepada efek destruktif dan strategi menghadapi konflik dan pemberontakan Chechnya yang terus meningkat dan semakin panas di masa-masa ini.

e. Pengerahan Senjata

Dengan melembagakan model negosiasi ini mau tidak mau berarti pemerintahan federal Rusia tetap menyetujui desentralisasi, walau pada tingkat yang seminimal mungkin. Tetapi bagaimanapun, kebijakan desentralisasi tersebut adalah dalam kerangka kepentingan pusat, karenanya terlihat bahwa hak-hak dan konsesi yang diberikan tidak sama antara tiap-tiap daerah tergantung dari sejauh mana pusat diuntungkan dan bagaimana posisi dan daya tawar daerah tersebut terhadap pusat. Negosiasi dengan Bashkortostan misalnya menghasilkan persetujuan Kremlin untuk mengakui republik tersebut sebagai 'negara berdaulat di dalam federasi Rusia' (*sovereign state within the Russian Federation*), yang merupakan satu-satunya dari 46 daerah yang diberikan kata berdaulat. Adapun republik Ossetia Utara hanya disebut sebagai 'republik sepenuhnya di bawah federasi Rusia' (*full subject of the Russian Federation*). Sedangkan Udmurtia dinamakan dengan republik saja tanpa embel-embel bahkan ditegaskan bahwa hubungan federal dengan Udmurtia diatur berdasarkan konstitusi federal. Perbedaan-perbedaan ini tidak terkecuali bagi republik-republik etnis Rusia. Daerah yang mendapat pos-pos kebebasan paling banyak dan penting adalah Oblasts Sverdlovsk seperti; otoritas untuk mengadakan layanan publik sendiri, memberhentikan pejabat-pejabat utusan federal, atau menunda pemberlakuan suatu peraturan pemerintah. Sementara ada juga daerah yang sama sekali tidak diberikan hak tambahan kecuali yang tercantum dalam konstitusi Rusia dan bahkan ada yang tidak pernah diajak

bernegosiasi. Karena didasarkan pada kepentingan federal, maka ketika daerah tidak bersedia menegosiasikan kepentingan federal di daerahnya, pihak Kremlin pun tak urung untuk melakukan intervensi militer.

Opsi militer ini kembali diperlihatkan Yeltsin ketika ia tidak dapat menundukkan Chechnya untuk menerima jalan negosiasi.[24]

Berbagai faktor diajukan sebagai penyebab gagalnya upaya negosiasi, dan tidak terelakkannya perang, antara kedua pihak tersebut tetapi jelas tidak ada pendapat yang bisa mengklaim secara pasti dan lengkapnya. Namun, secara garis besarnya setidaknya ada 4 faktor yang umum diajukan yaitu[25] : a. Faktor ekonomi; b. Faktor politik dan ancaman kekuasaan; c. Faktor ideologi dan dendam sejarah; d. Faktor permusuhan pribadi.

- **Faktor Ekonomi**

Faktor yang paling mendasar bagi Rusia untuk mempertahankan Chechnya adalah pertimbangan potensi ekonomi Chechnya. Selama

[24] Ketegangan Chechen-Rusia memuncak di awal-awal tahun 1994, masa di mana Rusia dan Tatarstan justru mencapai kesepakatan sempurna. Sebelum ketegangan puncak ini, Rusia dan Chechnya telah pernah membuka pembicaraan yaitu tepatnya pada Desember 1992, setahun setelah Yeltsin gagal melakukan penyingkiran paksa atas presiden Chechnya, Dudaev. Pertemuan itu menghasilkan draft esepakatan tentang pemisahan kekuasaan dan otoritas antara lembaga pemerintahan Rusia Federal dan lembaga pemerintahan republik Chechnya. Tetapi kesepakatan itu kemudian gagal dilaksanakan karena Chechnya menolak pertemuan selanjutnya yaitu Januari 1993 untuk mematangkan kesepakatan tersebut. Disebutkan bahwa alasan penolakan Chechnya adalah karena selama pertemuan, Yeltsin mencoba bermain mata dengan rival Dudaev untuk menurunkan pamor dan legitimasi Dudaev. Setahun setelah kegagalan pertemuan itu atau pada Januari 1994 Dudaev mendeklarasikan pembentukan republik bangsa Chechen dengan nama Republik Ichkeria—nama pegunungan di wilayah Shatoi dan Vedeno dengan tujuan menarik dukungan dari penduduk pegunungan Chechnya tersebut, yang sepanjang sejarah termasuk paling menolak pemerintahan Moskow. Sebulan kemudian, ketika memberikan pidatonya di depan parlemen Rusia, Yeltsin menyatakan pemerintahan Dudaev tidak sah dan pemisahan republik Chechnya harus dihalangi. Lihat laporan berita ini dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 220

[25] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 226-227

berabad-abad Chechnya telah menjadi salah satu sumber kehidupan ekonomi Rusia. Dengan kandungan minyak dan gas aslinya, Chechnya menjadi sumber bahan mentah terbesar bagi Rusia. Pada masa perang dingin, pihak komunis Rusia mendapatkan segala keperluan bahan mentahnya dengan harga yang begitu murah dari Chechnya. Selain itu, Chechnya adalah jalan transportasi utama yang menghubungkan Rusia dengan wilayah Kaukasus Selatan, baik melalui perhubungan kereta api, jalan layang dan terutama menjadi jalur lewatnya saluran pipa-pipa minyak raksasa Rusia. Sampai tahun 2000 Chechnya menjadi pangkalan utama yang menghubungkan pipa-pipa minyak dari Rusia dan Laut minyak Caspian menuju pasar internasional dan Laut hitam Afrika. Rusia menuduh adanya permainan dan kepentingan ekonomi internasional dibalik perlawanan ganas Chechnya akhir-akhir ini yaitu agar jalur penyaluran minyak melalui Rusia terganggu dan tidak berfungsi. Dugaan Yeltsin tersebut dikaitkan dengan proposal yang diajukan Turki untuk memindahkan jalur penyaluran minyak Rusia yaitu melalui rute Baku-Tbilisi-Ceyhan, berhenti di pelabuhan Mediterranian Turki Ceyhan. Pemindahan jalur alternatif ini akhirnya terlaksana pada tahun 2000 karena Rusia gagal menundukkan Chechnya pada perang 1994-1996. Di pihak Chechnya sendiri, tampaknya saat ini telah berbulat tekad dan menemukan momentum untuk menghentikan eksploitasi dan diskriminasi Rusia yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang telah pernah coba dilawan dan dihentikan oleh nenek moyang mereka, Syekh Shamil.

• Faktor Politik dan Ancaman Kekuasaan

Selain faktor ekonomi ini, Yeltsin mengangkat isu ancaman Pan-Islamisme dan ekstrimis untuk mengabsahkan tindakan pembantaiannya terhadap Chechnya. Dia melihat Chechnya berpotensi besar untuk menyebarkan pengaruh nasionalisme dan sentimen anti-Rusia kepada republik-republik dan kelompok-kelompok etnis muslim di belahan Kaukasus Utara, yang kalau ini terjadi tentu akan sangat merepotkan Rusia karena harus menghadapi pemberontakan atau malah kehilangan seperempat lebih luas wilayahnya. Tidak sampai disitu saja, Rusia membayangkan bahwa sentimen anti Rusia dari 19 republik-republik muslim tersebut berkembang menjadi persatuan keIslaman dan menjelmakan negara muslim di wilayah Kaukasus. Bagi Rusia, ini

tentu akan menjadi momok dan ancaman sepanjang keberadaannya. Tetapi sejumlah pengamat menyatakan bahwa alasan dan ketakutan ini sangat mengada-ada karena negara-negara Kaukasus sendiri juga ketakutan dan tidak menginginkan kekacauan di negeri Chechnya menyebar ke negeri mereka. Tetapi memang Rusia setidaknya dapat mendasarkan ketakutannya tersebut kepada ucapan Dudaev ketika beliau diwawancarai tahun 2004, yang dirilis dalam sebuah harian di Turki,

"...rencana saya ke depan adalah menciptakan negeri-negeri Kaukasus yang bersama-sama berjuang menentang imperialisme Rusia. Tujuan utama kami adalah mencapai kemerdekaan dan kebebasan, berjuang bersama-sama dengan republik-republik Kaukasus yang telah ditindas oleh Rusia selama lebih dari 300 tahun."

• Faktor Dendam Sejarah

Bangsa Chechen telah memendam sejarah pahit yang panjang terhadap Rusia. Penolakan mereka terhadap kekuasaan Rusia tidak putus-putusnya sejak langkah pertama Rusia mengekspansi negeri ini pada akhir abad 18. Chechnya telah mengabadikan begitu banyak pahlawan-pahlawan tangguhnya yang tewas melawan Rusia. Perjuangan mereka ini telah membentuk visi dan mental anak-anak bangsa Chechnya serta menjadi komponen dasar identitas nasional bangsa Chechnya sendiri. Pemberontakan bangsa Chechen yang berkelanjutan, balasan-balasan yang dilancarkan Rusia dan tragedi deportasi serta pembersihan etnis yang dilakukan oleh Stalin tahun 1944 yang menghabiskan sepertiga jumlah warga Chechen—dan terus berlanjut pada sejumlah periode berikutnya—telah meng-*absurd*-kan keinginan Rusia untuk tetap menggenggam Chechnya dan, di sisi lain, mempertebal tekad Chechnya untuk terus menentang Rusia.

• Faktor Permusuhan Pribadi

Permusuhan panjang antar bangsa ini menjadi sempurna dan tak terbendung lagi ledakannya ketika menyatu dengan dendam pribadi antara kedua individu penguasanya. Presiden Chechnya, Dudaev, adalah orang yang dibesarkan dengan dendam terhadap Rusia karena ikut merasakan hidup di kamp pengungsian akibat pengusiran Stalin. Bagi Yeltsin sendiri, tindakan Dudaev melakukan *coup d'etat* lalu mencaplok

aset-aset pemerintah republik Chechnya dan kemudian secara lantang mengadakan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan Chechnya yang terpisah dari Kremlin jelas telah melangkahi dan menantang kekuasaan dan harga dirinya. Sebenarnya presiden Chechnya yang dijatuhkan Dudaev yaitu Doku Zavgaev juga bukan orang yang dikehendaki Yeltsin karena berasal dari kelompok anti-pembaharuan yang menentang Yeltsin. Karenanya, dalam kondisi yang terdesak oleh oposisi dari berbagai arah inilah, Yeltsin lalu memanfaatkan dukungan kelompok garis keras yang menamakan dirinya 'partai perang' yang menggunakan kekuatan senjata demi mempertahankan kekuasaan. Pertama-tama Yeltsin meredam penentang dari dalam pemerintahannya yaitu kelompok komunis dan nasionalis yang mengerahkan massa untuk memprotes tindakannya membentuk parlemen dan konstitusi baru dengan pemilihan umum bulan Desember 1993. Tahun berikutnya, Desember 1994, Yeltsin membantai penentangnya dari luar yang jauh lebih keras dan militan, yaitu Dudaev dan rakyatnya di Chechnya.

3.4. Sentralisasi Putin

Perang Chechen-Rusia memunculkan setidaknya 3 konsekwensi : Pertama, lahirnya benih-benih mental ekstrimis dan militansi dan terbentuknya kelompok-kelompok ekstrimis baik di Chechnya maupun di daerah-daerah Kaukasus Utara lainnya; Kedua, mempertajam anti-muslim dan anti orang Kaukasus serta melahirkan ketakutan terhadap Islam di kalangan orang Rusia; dan akhirnya Ketiga, memunculkan dukungan bagi penguatan otoritas dan penggunaan kekuatan senjata oleh pemerintah.[26]

Artinya, terjadi pergeseran kondisi dan faktor-faktor yang mengiringi politik sentralisasi Rusia pada masa Putin. Kalau pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dikondisikan dengan oposisi dari berbagai arah yaitu; dari tubuh pemerintahan, dari rakyat Rusia serta dari etnis-etnis minoritas, 'salah satunya' masyarakat muslim, maka masa Putin terfokus kepada perlawanan Chechnya. Artinya, kini Putin dapat mengumbar Chechnya, dan konsekwensinya Islam, sebagai

[26] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 228

faktor dominan bagi tindakan-tindakannya walaupun kenyataannya sentralisasi dan model pendekatan kekuasaan tersebut telah menjadi sejarah, tradisi dan karakter dari politik bangsa Rusia sendiri. Hasilnya, Putin pun leluasa mengkonsentrasikan kekuasaan dengan dukungan rakyat Rusia, berbeda halnya dengan Yeltsin yang menuai protes dari mayoritas rakyatnya. Seperti dilaporkan survei, pada awal-awal tahun 1999, ketika Rusia melakukan pengepungan ke Dagestan sementara Chechnya melakukan aksi lempar bom ke berbagai tempat di kota Moskow, 60 % masyarakat Rusia menyetujui dilakukannya pengeluaran paksa warga Chechnya dari Moskow. Adapun suara yang menyerukan dilakukannya penyerangan saat itu juga meningkat dramatis. Pada survei bulan Juli 1999, satu bulan sebelum Chechnya melakukan serbuan ke Dagestan—menurut pihak Chechnya untuk membebaskan Dagestan atas permintaan rakyat Dagestan sendiri sementara sumber Rusia menyebutnya sebagai tindakan ekspansi para ekstrimis untuk menjadikan Dagestan sebagai negara Islam—82 % rakyat Rusia menerima agar Chechnya dilepaskan saja dari wilayah Rusia. Tetapi 3 bulan kemudian, suara ini berbalik mendukung keputusan pemerintah menaklukkan separatis Chechnya, dengan cara apapun juga.[27]

Setelah kekalahannya tahun 1996 Rusia bukannya menyerah dan berhenti melainkan semakin ambisius untuk menaklukkan kembali Chechnya dan membalas kekalahannya. Di bawah perdana menteri yang baru Vladimir Putin, Rusia melakukan konsolidasi dan selalu pada titik siaga menunggu mangsanya, menggunakan berbagai umpan agar mangsanya dapat diterkam. Tetapi di luar dugaan, rakyat Chechen malah bergerak mendatangi Rusia ke Dagestan sehingga Rusia berkilah bahwa tindakannya menggempur Chechnya adalah untuk melakukan pembalasan,—tentunya setelah memukul mundur militer Chechnya dari Dagestan. Maka perang babak kedua pun pecah tanggal 2 Agustus 1999.

Walaupun Rusia selalu mengatasnamakan serbuan Chechnya ke Dagestan sebagai dasar inisiasinya menyerang Chechnya, tetapi terdapat bukti kalau Kremlin telah merencanakan matang penguasaan kembali Chechnya ke dalam otoritas Rusia. Pengerahan militer yang lengkap dan besar-besaran, dengan 80.000 tentara dalam rombongan pertama, serta

[27] Shireen T. Hunter, *Ibid.*

sistem penyerangan yang membabi-buta dan menghancurkan jelas memperlihatkan tujuan dan ambisi Rusia tersebut. Karenanya mungkin tidak mengejutkan, juga tidak terlalu penting, ketika sumber dari dalam pemerintahan sendiri akhirnya menginformasikan kebenaran persiapan tersebut. Sergei Stepashin, mantan direktur FSB dan menjabat perdana menteri pada pemerintahan Putin, mengatakan bahwa dia telah melihat persiapan tersebut sejak sekitar bulan April 1999. Setelah terjadinya penculikan wakil pemerintah Rusia atas Chechnya, pemerintahan Yeltsin dimana Putin sebagai pengatur skenarionya, menyusun rencana akan menguasai pertigaan wilayah Chechnya belahan Utara (yaitu daerah dataran Utara sungai Terek), menutup perbatasan-perbatasan negeri Chechnya, dan menghancurkan kamp-kamp pelatihan tentara gerilya dan ekstrimis. Tetapi sebelum Rusia bergerak melaksanakan rencananya tersebut, mereka terpaksa disibukkan dengan upaya mengusir militer Chechnya dari Dagestan dan menguasai beberapa daerah Dagestan.[28] Jelasnya, pemerintahan Yeltsin di bawah komando Putin, dalam jabatannya sebagai direktur FSB dan sekretaris Dewan Pertahanan Keamanan, telah merencanakan pengerahan militer untuk memaksakan otoritas Rusia atas daerah-daerah Chechnya. Yang lebih penting dan menarik adalah bahwa hunjuk kekerasan dan militerisasi yang diatur dan dilakukan Putin tersebut justru mengangkat popularitasnya di mata warga Rusia dan menghantarkannya menjadi orang yang dipercaya dapat memberi keamanan dan mengembalikan kekuasaan Rusia.

Ø *Reorganisasi dan Restrukturisasi Wilayah Negara Oleh Putin*

Selain pemberlakuan militerisme dan konsentrasi kekuasaan presiden Putin juga melakukan perombakan sistem administrasi dan struktur kekuasaan pemerintah untuk memastikan terealisasinya kekuasaan pusat di daerah-daerah. Sistem baru ini disebutnya dengan 'tangga vertikal kekuasaan eksekutif' (*vertikal vlasti* atau *vertical of power*) dan dia populerkan serta sosialisasikan melalui media-media. Tepatnya pada bulan Mei 2000 atau 2 bulan setelah pengangkatannya menjadi presiden, Putin merombak pembagian wilayah negara yang lama, yang seluruhnya berjumlah 57 buah dan terbagi kepada daerah

[28] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 229

teritori (dengan status kota federal, oblasts dan krais) dan daerah etnis asal (dengan status republik, oblasts otonomi dan okrugs otonomi), lalu menggantinya dengan 7 buah wilayah distrik yang masing-masingnya membawahi 89 daerah federasi. Setelah itu Putin menunjuk seorang pejabat perwakilan presiden untuk setiap distrik dengan tugas memantau pemerintahan daerah-daerah dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan federal di daerah federasi. Mereka ini menggantikan sistem agen pada masa Yeltsin yang waktu itu ditempatkan di setiap daerah. Pada masa Putin, perwakilan presiden ini diberikan wewenang yang jauh lebih besar dan dibekali dengan dasar hukum yang kuat dan tegas. Mereka juga sangat kompeten dan berwenang dalam tugasnya karena semuanya bekas pejabat dari satuan militer, kementerian dalam negeri ataupun keamanan negara.[29]

Setelah penempatan orang-orang yang sangat kuat sebagai wakilnya tersebut, Putin selanjutnya mengeluarkan peraturan demi peraturan yang secara sistematis melemahkan kedudukan dan otoritas pemimpin-pemimpin daerah bagian. Peraturan-peraturan tersebut yaitu : 1. melarang pejabat-pejabat daerah menjadi anggota parlemen tinggi atau Dewan Federal; 2. memberikan presiden otoritas untuk membekukan legislatif daerah yang menciptakan hukum-hukum yang melanggar aturan-aturan hukum federal serta untuk memberhentikan pimpinan-pimpinan daerah yang terlibat dalam kejahatan terhadap negara; 3. mengeluarkan undang-undang pajak baru yang mengurangi proporsi bagian daerah dan mewajibkan menyetor pendapatan dan hasil-hasil daerah ke pusat sampai sebesar 70 %; 4. memperbesar otoritas presiden dalam bidang hukum seperti hak untuk menunjuk dan memberhentikan penegak-penegak hukum di daerah yang tidak dapat bekerjasama dengan presiden dan untuk mengintervensi keputusan-keputusan peradilan daerah. Sebagai tindak lanjut dan konsekwensi dari peraturan-peraturan ini maka Putin pun tentunya harus mengotak-atik untuk selanjutnya membatalkan 'perjanjian pembagian kekuasaan' yang pernah dibuat oleh sejumlah daerah dengan Yeltsin.[30]

---

[29] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 229-230
[30] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 231

Sistem distrik Putin di atas berakibat, dan memang dimaksudkan, menghapus atau setidaknya mengurangi jumlah daerah-daerah etnis dan akhirnya, dominasi suatu etnis di satu daerah. Sementara itu, pengurangan otoritas pemimpin-pemimpin daerah, yang mereka ini adalah merupakan putra daerah dan karenanya memiliki basis massa dan ikatan emosional dengan rakyatnya, akan berakibat dan memang dimaksudkan juga untuk menciptakan jarak pemimpin-pemimpin daerah tersebut dengan masyarakatnya dan mengurangi wibawa mereka di mata rakyatnya. Mudah dipahami kalau daerah-daerah etnis muslim adalah yang paling banyak menerima konsekwensi dari pembaharuan Putin tersebut, dan karenanya yang paling sulit menerimanya. Dan seperti yang diduga, hanya beberapa bulan kemudian sejumlah republik muslim seperti Adygea, Bashkortostan dan Ingushetia, sudah terkena sanksi pembatalan berbagai undang-undang dan poin-poin konstitusi pemerintahan mereka. Begitu juga Putin langsung membentuk komisi untuk merealisasikan penghapusan 'perjanjian pembagian kekuasaan' yang mereka terima dari presiden Yeltsin. Tetapi selain protes dari republik muslim, ternyata sejumlah pengamat dan pejabat politik Rusia sendiri juga mendeteksi resiko dan keburukan dari kebijakan 'oversentralisasi' dan 'disfungsi pimpinan daerah di republik-republik etnis' tersebut bagi masa depan politik Rusia. Seorang penasehat presiden Yeltsin sebelumnya, Emil Pain misalnya, mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan Putin akan meningkatkan kebencian terhadap warga dan kebangsaan Rusia dan menimbulkan reaksi balik dari warga minoritas. Begitu juga wakil perdana menteri Rusia sebelumnya, Sergei Sakhrai, mengklaim bahwa sistem federasi model Putin sangat tidak baik dan akan tumbang sebelum mencapai bentuknya yang utuh.[31]

Namun lagi-lagi terlihat kalau Putin memang sedang diandalkan rakyat Rusia untuk mengamankan negeri dan melindungi mereka sebab pembaharuan Putin tersebut nyatanya mendapat dukungan dari mayoritas warga Rusia, yang mengisyaratkan bagaimana warga Rusia saat ini merasa begitu terancam dan anti-pati dengan Chechnya, dan

[31] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 232

akhirnya dengan Islam 'Chechnya'. Pada survei bulan Mei tahun 2000 diketahui 60 % masyarakat Rusia mendukung kebijakan sistem federasi Putin yang baru, dan hanya 20 % yang menolak. Begitu juga 51 % setuju bahwa presiden harus memegang kontrol sepenuhnya atas parlemen dan para gubernur daerah. Hingga dalam prakteknya, sejumlah pimpinan daerah dengan cepat menindaklanjuti keputusan presiden tersebut dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan mereka. Segera setelah presiden membentuk komisi guna mendefinisikan kembali materi 'perjanjian pembagian kekuasaan' di tiga republik muslim tersebut di atas, sejumlah republik lainnya langsung membatalkan sendiri perjanjian milik mereka. Menurut komisi ini, sampai Juni 2002 sebanyak 42 perjanjian mengaku sudah dibatalkan. Bukti dukungan lainnya, para gubernur mencoba membangun wacana mensosialisasikan ide sentralisasi. Gubernur oblasts Bryansk dan Kursk menyarankan bahwa pimpinan daerah tidak diangkat melalui pemilihan tetapi melalui penunjukan presiden saja, namun ide ini belum terlaksana karena masih diperdebatkan di badan perwakilan rakyat tingkat rendah, DUMA. Adapun gubernur oblasts Vologda dan Saratov melemparkan ide untuk mengurangi jumlah daerah bagian dengan melakukan merger antara beberapa daerah, tentunya untuk mengurangi jumlah pejabat otoritas dan dominasi kelompok etnis di daerah. Ide ini cukup efektif untuk menggertak para gubernur agar menandatangani persetujuan mengikuti dan menyesuaikan kebijakan mereka dengan peraturan federal, karena takut daerahnya dibubarkan atau menjadi sasaran merger, contohnya gubernur Eduard Rossel yang sebelumnya terkenal selalu menentang pusat.[32]

Ø *Nasib Republik-Republik Muslim Dalam Sistem Federasi Putin*

Kekhawatiran masyarakat muslim terhadap kebijakan federasi Putin sangat beralasan karena memang arah kebijakan tersebut jelas-jelas mempreteli banyak kebebasan yang baru saja diraih republik-republik muslim dari pemerintahan Yeltsin. Hanya dalam hitungan bulan setelah pelantikan jabatannya sebagai presiden Putin mengeluarkan 2 keputusan peradilan, yang membuat status republik-republik etnis jadi

[32] Lihat laporan data dalam Shireen T. Hunter, *Ibid.*

mengambang. Pada Juni 2000 peradilan konstitusi Rusia menetapkan bahwa deklarasi kedaulatan yang dibuat oleh republik mana saja adalah tidak sah sebab bertentangan dengan bunyi konstitusi Rusia, "... tidak dibenarkan adanya kedaulatan apapun selain kedaulatan federasi Rusia." Bulan berikutnya ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi ke enam republik (kecuali Komi semuanya adalah republik daerah muslim) telah melanggar Undang-Undang misalnya ketentuan yang berbunyi bahwa; hukum republik mereka berada di atas hukum federal; bahwa republik mereka adalah anggota negara internasional; dan bahwa republik menguasai sepenuhnya tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah teritorinya. Setelah keluarnya ketetapan peradilan ini, para pejabat pemerintahan Putin mulai mempertanyakan legitimasi negara nasional serta status khusus republik-republik etnis lainnya. Pada April 2001 misalnya, wakil menteri urusan negara bagian Valery Kirpichnikov memutuskan bahwa ke 10 daerah otonomi okrugs adalah peninggalan sistem Soviet yang bertentangan dengan sistem federal Rusia dan harus dilakukan merger antara daerah-daerah okrugs tersebut. Bahkan, empat bulan kemudian atasan Valery sendiri yaitu menteri Aleksander Blokhin juga mempersoalkan status otonomi dari republik. Dikatakannya kenapa ia menolak pembentukan kembali republik otonomi Jerman, yang dibubarkan Stalin tahun 1941, sebab menurutnya suatu daerah tidak dapat diberikan status otonomi kecuali bila dihuni atau terdapat satu etnis mayoritas di dalamnya. Jika pendapat menteri ini nantinya menjadi Undang-Undang maka berarti 15 dari 21 republik otonomi di Rusia akan bubar ataupun berubah status. Yang harus digarisbawahi bahwa semua republik muslim kecuali Chechnya termasuk di dalam jumlah 15 tersebut. Memperkuat sentimen ini, Vladimir Zhirinovsky, pemimpin partai Demokrat Liberal Rusia dan juru bicara majelis DUMA, menegaskan dalam acara konferensi tahunan partainya bahwa sistem federasi seharusnya dihapus dan Rusia hendaknya menjadi negara kesatuan.[33]

Melihat sinyal-sinyal dan atmosfir permusuhan terhadap upaya-upaya nasionalisme etnis itu—berlawanan arah dengan situasi ketika

[33] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 233

Yeltsin justru mengibarkan dan memprovokasi nasionalisme etnis semua masyarakat Rusia tanpa kecuali—wilayah-wilayah etnis Rusia secepatnya mengambil tindakan penyesuaian diri. Republik-republik ini mengandemen konstitusi mereka dengan membuang klaim-klaim berdaulat dan redaksi-redaksi yang menyatakan status otonomi. Sebagian republik bahkan melakukan langkah luar biasa dengan secara terbuka mengumumkan pembatalan deklarasi kedaulatan yang dikeluarkan pada awal tahun 90-an. Sejumlah daerah otonomi okrugs juga berinisiatif melakukan merger dengan wilayah Rusia lainnya. Ringkasnya sekarang ini di Rusia terasa sekali fenomena dukungan terhadap segala kebijakan Putin. Setidaknya, selain republik muslim dan tiga republik Rusia, tidak ada republik yang melemparkan suara protes apalagi suatu aksi, sendiri atau bersama-sama. Tetapi tidak demikian halnya dengan republik-republik muslim, mereka ini menunjukkan perlawanan baik pasif seperti Tatarstan dan Bashkortostan serta aktif seperti Chechnya.

Ø *Kebijakan Sentralisme Putin di Republik Yang Resisten*

Sementara gugatan ketiga republik Rusia; Adygea, Chuvashia, dan Sakha, dengan mudah dipatahkan oleh Kremlin, tidak demikian halnya dengan tiga republik muslim Chechnya, Tatarstan dan Bashkortostan.

Chechnya[34]

Peperangan dengan Chechnya telah memasuki tahun ke 6 tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa keduanya akan menemukan jalan negosiasi. Pemerintah Putin tetap konsisten menolak mengakhiri kontak senjata seperti yang dilakukan Khasavyurt tahun 1996. Sambil terus meladeni serangan Chechnya, pemerintahan Putin melakukan strateginya untuk bisa membangun supremasi dan menanamkan kontrolnya di Chehnya. Kali ini Putin menjalankan ide yang dinamakan strategi 'chechenization' atau memanfaatkan orang Chechen sendiri sebagai perpanjangan tangannya di Chechnya. Dengan strategi ini Putin menciptakan jajaran pemimpin Chechnya serta angkatan bersenjata Chechnya yang baru yang pro dan loyal kepada Moskow, yang mereka

[34] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 234-235

ini adalah warga Chechen sendiri. Dalam rangka ini Putin memilih mufti Chechen Ahmad Kadyrov untuk menjadi kepala pemerintahan Chechnya. Pemilihan seorang yang berjabatan mufti, walaupun Kadyrov telah melepaskan jabatannya tersebut ketika Putin menunjuknya, merupakan upaya Putin untuk melegitimasi pemerintahan bentukannya. Untuk mendapatkan simpati masyarakat Chechnya, Putin berusaha membesar-besarkan status Kadyrov sebagai pemimpin agama Chechnya, yang sekarang telah menarik dukungannya terhadap kelompok separatis dan bersedia bekerjasama dengan Kremlin.

Setelah menunjuk Kadyrov sebagai pelaksana pemerintahan selanjutnya Kremlin merancang dilakukannya referendum di republik tersebut guna menyepakati suatu Undang-Undang yang menuntut dibentuknya pemerintahan yang baru dengan konstitusi baru, dan karenanya Chechnya harus mengadakan pemilihan umum. Hal ini tentunya diarahkan untuk mencabut legitimasi pemerintahan Maskhadov, presiden separatis Chechnya, dan mengukuhkan kedudukan Kadyrov. Selain itu tentunya untuk mengganti konstitusi negara Islam yang diprogramkan Maskhadov dengan konstitusi pemerintahan sekuler, yang isinya tentunya menolak separatisme atau bahwa teritori republik Chechen adalah bersatu dan tidak terpisah serta menjadi bagian yang tak-terpisahkan dari federasi Rusia. Dalam konstitusi baru tersebut, Putin juga menjanjikan otonomi yang cukup luas kepada pemerintahan rakyat Chechen yang baru nanti walaupun tetap saja dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu yang menjadi hak mutlak federal serta hak-hak bersama antara federal dan pemerintahan Chechnya. Tetapi ternyata, sampai menjelang hari pemilihan, strategi 'Chechenization' Putin tersebut tidak mampu menarik rakyat Chechen untuk mendukung pemerintahan bentukan Kremlin. Survei yang diadakan pemerintahan Kadyrov awal 2003 menginformasikan bahwa 36.6 % warga Chechen menginginkan kandidat dari pilihan rakyat Chechen sendiri, 19,5 % memilih dari etnis Rusia dan hanya 16.5 % yang memilih Kadyrov. Selain itu, diketahui pula bahwa mayoritas masyarakat Chechen ternyata tidak percaya kepada pemerintahan pusat yaitu 62.5 % rakyat Chechen menyalahkan pemerintahan Rusia berkenaan dengan peristiwa tragis Chechnya; hanya 14.6 % yang mengkambing-hitamkan kelompok wahabi serta 9.1 % menuduh separatis bangsa Chechen. Begitupun, dan Kremlin patut gembira, ternyata cuma 1 % warga

Chechnya yang akan memilih pemimpin dari kelompok separatis. Sedikitnya suara yang mendukung pemimpin yang ditawarkan Kremlin tersebut, terlepas dari posisinya sebagai mantan mufti, mengindikasikan tipisnya harapan terbentuknya pemerintahan yang stabil dan permanen di Chechnya, yaitu pemerintahan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, Chechnya dan Rusia.

Akhirnya ditengah atmosfir saling curiga ini, masyarakat Chechen melaksanakan referendum yang dirancang oleh Moskow tersebut. Jadi, walaupun dipengaruhi dengan gencar oleh separatis agar memboikot referendum itu 90 % bangsa Chechen memberikan suara mereka. Hal ini memperlihatkan keinginan bangsa Chechen untuk di satu sisi, keluar dari kemelut yang melanda negeri mereka dan di sisi lain tetap tidak ingin di bawah pengaruh Moskow. Namun Moskow tidak berhenti memasang jaring pengikat mereka. Pertama, sesaat setelah referendum usai Putin mengumumkan rencana untuk negosiasi kesepakatan 'pembagian kekuasaan' dengan Chechnya, yang akan memberikan otonomi yang besar bagi republik tersebut serta amnesti bagi tentara gerilya yang bersedia menghentikan permusuhan terhadap tentara Rusia. Lalu pada Mei 2003 Putin menandatangani suatu panitia kerja yang terdiri dari perwakilan federal dan bangsa Chechen untuk merumuskan proposal perjanjian 'power-sharing' tersebut yang direncanakan diadakan pada bulan Oktober. Sebulan kemudian, Juni 2003, parlemen Rusia mengeluarkan peraturan yang mengizinkan kelompok pemberontak Chechnya yang tidak melakukan kejahatan besar seperti pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan upaya pembunuhan terhadap personil pemerintahan federal untuk mendapatkan amnesti jika mereka menyerahkan diri. Dengan peraturan-peraturan ini Putin berharap dapat mengisolasi kaum separatis dan menarik dukungan bagi pemerintahan baru, yang dirancang memiliki mekanisme partisipasi dan hubungan kerjasama dengan Kremlin. Putin memang telah bertekad final untuk tetap mempertahankan kekuasaannya terhadap Chechnya, dan konsekwensinya membantai habis kelompok rakyat Chechnya yang menuntut kemerdekaan yang menurutnya adalah bandit pemberontak, sesuai ucapannya,

"...bandit yang beroperasi di Chechnya adalah bagian dari jaringan teroris internasional...tidak ada gunanya berupaya bekerjasama dengan

mereka. Mereka harus diseret keluar dari bawah tanah dan gua-gua persembunyian mereka dan lalu dihancurkan."

Dan sikap final Putin ini dibalas dengan tekad final pula dari pihak separatis. Seakan memamerkan penolakan mereka, kelompok ini sengaja meledakkan bom-bom teror di setiap kali Putin mengumumkan rencana-rencananya tentang Chechnya termasuk yang paling berkesan bom bunuh diri oleh seorang wanita yang diduga berumur 20 tahun sehari setelah Putin menandatangani rencana pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan, pernyataan sikap Putin di atas pun dibalas pula dengan pernyataan tegas langsung oleh Maskhadov,

"...Kami tidak akan mendengar semua omong-kosong mereka tentang amnesti, pemilihan umum atau referendum...referendum atau amnesti apapun tidak akan menghentikan peperangan ini. Perang hanya akan berhenti jika kami sudah membersihkan negeri ini dari bangsa Rusia si penjajah...Tidak akan ada jalan apapun untuk damai."

Tatarstan dan Bashkortostan[35]

Bagi republik-republik muslim yang resistensinya belum berbentuk gerakan, Putin menggunakan ancaman-ancaman hukuman melalui berbagai lapisan peraturan pemerintah. Sejak April 2001, peradilan tinggi Rusia telah menetapkan bahwa pemerintahan federal berhak mengenakan sanksi langsung tanpa melalui proses peradilan terhadap republik-republik yang menolak membuang klaim-klaim atau redaksi-redaksi 'berdaulat' dari konstitusi mereka. Tidak lama setelah pengesahan ketentuan ini, perwakilan presiden untuk distrik bagian Volga, Sergei Kirienko, secara luas mengumumkan bahwa beberapa klausa dalam konstitusi republik Tatarstan dan Bashkortostan harus segera dibuang. Pada Juni 2002, keluar lagi keputusan federal bahwa 37 klausa lainnya dalam konstitusi dua negara tersebut bertentangan dengan peraturan federal dan karenanya menjadi batal. Baru 6 bulan kemudian Bashkortostan akhirnya menyerah kepada tekanan pusat ini dan mengganti konstitusi mereka dengan yang baru.

Di Tatarstan, pemerintahan Putin membidik cara lain untuk memecah kekuatan dan dominasi etnisnya. Beliau mengeluarkan

[35] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 236-237

peraturan sensus baru yang disahkan oleh majelis DUMA pada November 2001. Dalam sensus tersebut kebangsaan Tatar dipecah kepada 7 kelompok etnis yaitu Tatar asli, Tatar Kazan, Tatar Siberia, Tatar Crimean, Tatar Astrakhan, Tatar Mishar dan Tatar Kryashen atau Tatar Kristen. Pembedaan suku bangsa Tatar ini akan memunculkan pluralitas di republik Tatarstan dan menghilangkan dominasi Tatar sebagai satu kelompok. Hal ini selanjutnya secara dramatis mengubah komposisi demografi di Tatarstan sehingga bangsa Tatar tidak bisa lagi mengklaim otonomi etnis karena telah dipilah-pilah secara politis. Hal lainnya, Putin tidak mengizinkan adanya keterpisahan kewarganegaraan atau dwi-kewarganegaraan bagi rakyat Rusia, mis. kewarganegaraan republik dan kewarganegaraan Rusia. Bersamaan dengan pelarangan ini, majelis DUMA juga telah mengeluarkan himbauan bahwa penduduk etnis Tatarstan harus menggunakan aksara Cyrillic dalam bahasa daerah mereka.

Bagaimana efektifitas dan masa depan peraturan-peraturan dan ancaman-ancaman ini bagi tujuan kontrol kekuasaan Putin akan sangat bergantung pada bagaimana penduduk etnis muslim memelihara dan memobilisasi nasionalisme etnis mereka tersebut untuk mencapai tujuan mereka, yang hal ini kembali lagi tergantung dari bagaimana Putin menyikapi mereka, melindungi hak-hak fundamental mereka dan memberikan ruang gerak yang cukup untuk mereka menyatakan dan menyalurkan keinginan-keinginan dan pemikiran mereka.

B. Kebijakan Luar Negeri

1. Doktrin Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia

Krisis ekonomi yang melanda Soviet memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang arah kebijakan politik di negeri itu. Di dalam negeri, sebagaimana diterangkan di atas, kebijakan baru tersebut tersimpul dalam konsep 'Prestroika' dan 'Glasnosts' yang tanpa diduga memunculkan tragedi keruntuhan Uni Soviet. Rusia—sebagai pewaris pemerintahan Soviet tersebut—lalu mengambil pelajaran dan memfokuskan diri mengembalikan sistem kekuasaan terpusat dan mempertahankan integritas teritorial, bahkan dengan segala cara dan harga termasuk mempertaruhkan citra dan hubungannya dengan

negara-negara muslim di seluruh dunia dan juga masyarakat muslim di negerinya sendiri.

Sementara ke luar negeri, Rusia meninggalkan pandangan hubungan dunia yang berdasarkan ideologis dan mengandalkan kekuatan militerisme.

Pengamat politik Rusia, Hunter, menjelaskan bahwa pemikiran baru tentang kebijakan luar negeri Rusia dilatarbelakangi oleh realitas, pertama; bahwa Uni Soviet telah kehilangan kemampuan secara ekonomi untuk menjalankan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi tingkat global dan internasional dan untuk melakukan kompetisi total dengan Barat. Kedua; terjadinya kegagalan tindakan-tindakan politik Uni Soviet selama masa tahun 1980-an seperti dalam peperangan di Afganistan, salah kalkulasi tentang arah dan hasil revolusi Islam Iran yang diduga akan menjadi agen komunisme, serta kerugian-kerugian dalam berbagai investasi di dunia ketiga begitu juga akibat-akibat buruk lainnya dari kebijakan luar negeri sistem komunis. Kondisi-Kondisi ini menjadi alasan telak bagi Soviet untuk merubah doktrin hubungan luar negerinya tidak lagi berorientasi ideologis dan mengandalkan kekuatan militer. Tetapi bagaimana doktrin baru ini dirumuskan atau bagaimana konsep dan format operasionalnya ? Sebelum masuk kepada konsep dan format, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan konsep dimaksud. Hunter menjelaskan setidaknya ada 8 faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan bagi perumusan konsep kebijakan luar negeri suatu negara yaitu Posisi Geografi, Pengalaman Sejarah, Identitas Nasional, Sistem Nilai/Ideologi, Kondisi Politik dan Sikap Publik Dalam Negeri, Tujuan dan Target serta Kondisi Politik Global.[36] Berikut akan dianalisis posisi Rusia dalam konteks faktor-faktor tersebut.

Posisi Geografis : Posisi geografis suatu negara sangat besar pengaruhnya dalam membentuk budaya, konsep diri bangsa dan selanjutnya pandangan hidup (*world wiew*) bangsa tersebut. Begitu juga posisi geografis ini menentukan bagaimana dan siapa tetangga suatu negara serta karakter keamanan dan ancaman yang dirasakannya.

[36] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 282-288

Negeri yang dikelilingi batas daratan saja akan memiliki perbedaan rasa keamanan dan strategi pertahanan dari negeri yang berbatasan dengan pantai saja. Dalam kasus Rusia, posisi geografisnya yang sangat luas bahkan berukuran benua memberikan Rusia status dan psikologis sebagai bangsawan dan penguasa. Secara geografis pula Rusia tidak bisa menampik kenyataan keberadaan wilayahnya di benua Asia terlepas dari segala keinginannya untuk mengintegrasikan Rusia kepada Bangsa Barat secara politis dan kultural. Begitu pula Rusia tidak bisa mengingkari bahwa negerinya dikelilingi oleh negeri-negeri muslim, yang artinya Rusia tidak boleh mengacuhkan fungsi strategis wilayah bagian Selatan, Asia Tengah, Kaukasus Utara dan Timur Tengah. Rusia selayaknya harus mempertimbangkan wilayah-wilayah ini walau umpamanya tidak ada satupun penduduknya yang muslim. Demikian pula kondisi Rusia yang tidak memiliki perairan air hangat, yang konsekwensinya mengharuskannya memberi perhatian pada hubungannya dengan negeri-negeri Baltik dan Laut Hitam.

Pengalaman Sejarah : Pengalaman dan kenangan sejarah akan mewarnai keputusan suatu negeri dalam mengambil tindakan dan menyikapi negeri lainnya. Pengalaman dan kenangan sejarah membentuk visi dan etos nasional suatu negara. Dalam kasus Rusia periode Soviet merupakan satu memori yang tidak bisa dilepaskan dalam keputusan-keputusan politik pemerintahan berikutnya negeri itu. Begitu pula hubungan permusuhan Rusia dengan kaum muslim di masa lalu. Memang kenangan sejarah yang merugikan dapat terhapus dengan upaya-upaya dan kondisi tertentu misalnya pengalaman perang dunia II bagi negeri-negeri Eropa dimana rekonsiliasi Jerman-Perancis serta pembentukan NATO menjadi instrumen efektif dalam proses penghapusan pengaruh buruk sejarah masa lalu Eropa. Akan tetapi dalam kasus Rusia terutama di pihak negeri-negeri muslim, mereka belum dapat menghapuskan dan masih menyimpan warisan sejarah yang membentuk pandangan negatif antara bangsa Rusia dan kaum muslim.

Identitas Nasional : Konsep diri suatu bangsa akan mempengaruhi tujuan, aspirasi dan pandangannya terhadap bangsa lain, siapa yang dianggap satu kelompok atau teman dan siapa yang dianggap musuh. Konsep diri tersebut adalah identitas nasional bangsa itu sendiri yang hal ini dipengaruhi juga oleh geografi dan sejarah bangsa

tersebut. Identitas nasional tidak statis dan bisa berubah-ubah, mengalami revitalisasi dan reinterpretasi. Perubahan identitas nasional bangsa Rusia pasca Soviet tentunya akan merubah kebijakan luar negerinya pula.

Ideologi/Sistem Nilai : Runtuhnya Negara Uni Soviet mengakhiri pola politik dunia yang terblok kepada kapitalis dan komunis. Tetapi bukan berarti konflik dan klash sistem nilai berakhir. Terdapat banyak pengikut Huntington yang percaya bahwa konflik peradaban akan menggantikan persaingan ideologis. Kalau ini dianut maka bahayanya akan lebih akut dan melebar karena keyakinan agama akan dimasukkan sebagai pemicu konflik mengingat agama memang mempengaruhi dan membentuk suatu peradaban. Terlepas dari analisis kontroversial Huntington tersebut tidak bisa dibantah bahwa sistem nilai tentu akan mempengaruhi performa dan prilaku suatu negara. Dalam kasus Rusia setelah tumbangnya komunis, terjadi perdebatan tentang ideologi negara dan tampaknya muncul kesepakatan yang mengarah kepada ideologi sekuler. Namun kesepakatan ini masih sangat lemah dan belum dapat dipastikan apakah akan terus bertahan atau berubah lagi dalam waktu dekat.

Konteks Dalam Negeri; Sistem Politik dan Pandangan Publik : F.S Northedge mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki hubungan saling pengaruh dengan kondisi di dalam negeri. Artinya, pertimbangan-pertimbangan politik dalam negeri secara signifikan akan mempengaruhi tindakan pemimpin negara ke luar. Yang membuat sulit adalah ketika terdapat berbagai kepentingan dan pandangan politik yang terkadang saling bersaing di dalam negeri. Kesulitan ini secara khusus dirasakan Rusia karena negara ini baru mengalami perubahan total rejim pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan prioritas dan orientasi dalam kebijakan luar negerinya. Dalam kasus Rusia terdapat kelompok elit baru yang berusaha mempertahankan kekuasaan yang sekarang mereka pegang dan di pihak lain kelompok rejim lama masih terus berusaha membangun kekuatan untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang lepas dari tangan mereka atau setidaknya berusaha untuk tidak lenyap dari panggung perpolitikan. Tarik menarik kepentingan dalam kebijakan luar negeri Rusia misalnya terlihat dalam hubungannya dengan Iran. Ketika kepentingan militer dan industri nuklir Rusia mengandalkan keuntungannya dari penjualan

ke Iran Rusia memprioritaskan hubungannya dengan Negara tersebut. Di saat yang bersamaan kelompok yang pro dengan hubungan Rusia-Israel yaitu dari kalangan bangsawan tertentu dan sejumlah orang-orang Azerbaijan yang berpengaruh, mereka ini mencegah agar hubungan Rusia-Iran tidak terlalu dalam dan akrab. Sementara itu terdapat pula kelompok cukup berpengaruh yang menentang kebijakan menteri luar negeri Rusia terkait dengan negara Azerbaijan. Sekarang ini kondisi militer Rusia mengharuskannya untuk membangun hubungan dengan Barat khususnya Amerika. Bagaimana kepentingan militer ini akan terus berjalan tentunya tergantung dari bagaimana pula kekuatan kelompok militer ini berhadapan dengan kelompok kepentingan lainnya di Rusia. Begitupun, betapapun diakui bahwa faktor kepentingan-kepentingan di dalam negeri akan sangat menentukan kebijakan luar negeri seorang presiden bahkan presiden yang paling berkuasa sekalipun, dalam prakteknya suatu pemerintahan yang sangat otoriter dan presiden dengan kekuasaan terpusat akan menundukkan kepentingan siapapun yang berbeda dan melakukan pembentukan imej dan pandangan publik. Inilah yang tampak berjalan di negara Rusia sekarang dan mungkin untuk beberapa waktu yang akan datang. Sejarah panjang perpolitikan Rusia yang mengandalkan kharismatik sang pemimpin masih terus membekas pada pemerintahan Rusia pasca Soviet. Dengan kata lain, pengaruh kepentingan dan pandangan publik akan tidak terlalu signifikan dalam kebijakan luar negeri Rusia Pasca Soviet, setidaknya untuk saat ini.

Target-Target Negara serta Keterbatasan Kemampuan Negara : Target dan tujuan negara tentunya harus sejalan dengan kekuatan politik, ekonomi dan militer negara tersebut. Negara dengan kemampuan tekhnologi yang tinggi, ekonomi yang kuat serta pengaruh finansial terhadap negara lain akan mudah menggolkan tujuan-tujuannya terhadap negara lain serta dapat menentukan arah dan karakter hubungan negara-negara dunia dan sistem internasional. Negara Rusia pernah memiliki kekuatan internasional tersebut di atas hingga kemudian menjadi rival Amerika dalam menentukan tata politik dunia dan kebijakan negara-negara lain. Tetapi sejak pertengahan 80-an negara Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan kebangkrutan militer yang membuat negara ini harus mengevaluasi prioritas dan target-target luar negerinya. Sekarang ini, Rusia tidak lagi menjadi penentu dominan di kancah internasional. Dan sampai waktu yang dekat

ini tampak bahwa Rusia belum akan bisa lepas dari keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan militernya, dan konsekwensinya negara ini tidak cukup leluasa dan memiliki pilihan banyak dalam target-target hubungan luar negerinya.

Kondisi dan Tata Politik Dunia : Selain semua yang terkait dengan sistem dan subsistem di dalam negeri yang dijelaskan di atas sistem politik internasional, yang hal ini tentunya diciptakan oleh negara-negara berpengaruh, tidak kalah penting dalam mengarahkan pola dan konfigurasi hubungan politik negara-negara di dunia. Selama abad 19 sampai pertengahan abad 20 tata politik dunia didasarkan pada kekuatan dan bersifat menyebar, walaupun memang seluruhnya berpusat di Eropa. Pecahnya perang dunia I memunculkan Amerika sebagai kekuatan besar baru dan tokoh kunci politik internasional. Maka sepanjang abad tersebut negara-negara Eropa dan Amerika mengontrol arah kebijakan dunia dengan politik kolonialismenya maupun dengan pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan negara. Sebagai reaksi atas dominasi Eropa dan Amerika, muncul pula kekuatan baru lainnya yaitu kekaisaran Rusia, yang nantinya menjadi pemain utama dalam persaingan babak baru politik dunia yang berdasarkan ideologis. Amerika merupakan pencetus perang ideologis ini ketika menetapkan dirinya sebagai pilot demokrasi. Usai perang dunia II, terlihat kekuatan politik dunia berkutub pada dua negara yaitu Amerika dan sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet di pihak lain, yang diistilahkan dengan tata hubungan dunia *bi-polar.* Tata politik *bi-polar* ini memanifestasikan persaingan ideologis antara kelompok sosialis Uni Soviet dan kelompok kapitalis Barat atau Amerika. Persaingan Timur-Barat ini menjalar ke seluruh aspek hubungan negara-negara di dunia.

Tetapi dengan kebangkrutan sistem sosialis dimana negara-negara sosialis mengalami krisis ekonomi dan politik yang berujung pada pecahnya negara Soviet bersatu, perang dingin pun berakhir dan dunia dikomandoi dominasi tunggal Amerika atau disebut dengan sistem *unipolar.* Terus merosotnya kehidupan negeri Rusia membuat Amerika leluasa menohokkan kehendaknya ke seluruh dunia. Sekarang ini, negara manapun termasuk sekutu Amerika tidak bisa mengimplementasikan penentangan mereka ketika mereka tidak setuju

dengan Amerika dalam satu dan lain hal. Dalam konfigurasi perpolitikan dunia semacam inilah kini Rusia berjuang merealisasikan kebijakan-kebijakan dan target-target politik luar negerinya. Otomatis hal ini akan membatasi gerak dan pilihan-pilihan hubungan luar negeri Rusia dan juga memaksanya merubah doktrin dan kebijakan luar negerinya.

■ Faktor Islam

Lantas bagaimana jelasnya faktor Islam dalam masalah ini ?

Faktor Islam baik dalam konteks geopolitik dan persoalan domestik juga sangat mempengaruhi format hubungan Rusia dengan negara-negara muslim, Barat dan juga negara-negara pemain kunci lainnya misalnya, Cina. Sebelumnya, faktor Islam hanya terkait dalam hubungan Rusia dengan negara-negara muslim terutama yang berjejer di perbatasan teritorinya. Namun seiring munculnya gerakan politik Islam di panggung internasional dan terbentuknya wajah-wajah ekstrimis dan militan Islam, belakangan Islam turut mewarnai bentuk dan pasang surut hubungan Rusia-Barat. Posisi Islam juga sangat mempengaruhi pendekatan Rusia terhadap negara-negara Balkan.

Dalam penjelasan di awal tentang sejarah keberadaan kaum muslim di Rusia dapat dipahami bahwa Islam telah menjadi faktor pada politik dalam dan luar negeri Rusia sejak abad 16. Sejak masa ini sampai masa pemerintahan Soviet faktor Islam tersebut terjelma dalam dua bentuk;[37] Pertama, menciptakan obsesi misionaris bagi ekspansi-ekspansi politik Rusia. Kedua, berfungsi sebagai objek untuk kepentingan konsolidasi internal maupun persaingan kolonialisme Rusia dengan negara-negara berkuasa lainnya.

Sebagai lahan misionaris, sejak awal ekspansi kekuasaannya ke negeri-negeri muslim yang diawali dengan penundukan Kazan tahun 1552 Rusia telah mengimbuhkan motif-motif keagamaan dan relijius kepada motif-motif keamanan dan kekuasaan teritorialnya. Tujuan relijius dan tugas keagamaan tersebut yaitu untuk menyempurnakan penundukan Konstantinopel dan pembebasannya dari virus bangsa

[37] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 314

muslim yang menguasainya sejak kejatuhan Byzantium melalui tangan khalifah Ottoman Sultan Muhammad II pada 29 Mei 1453. Termasuk tugas keagamaan tersebut adalah peran membudayakan bangsa muslim yang mereka pandang barbar dan tidak beradab. Adapun sebagai objek bagi kekusaan politiknya, semasa pemerintahan Tsar Rusia negeri-negeri muslim selalu menjadi taruhan dan konsesi antara negeri tersebut dengan negara-negara Eropa lainnya. Tetapi ketika negeri-negeri muslim bergerak melakukan revolusi menuntut kemerdekaan, yang didominasi Turki dan Iran di awal abad 20-an, Rusia dengan pemerintahan sosialisnya memanfaatkan situasi negeri-negeri muslim tersebut untuk menyebarkan ideologi mereka dan menancapkan pengaruh dan imej mereka sebagai pelindung bagi negeri-negeri muslim. Dengan menggalang isu anti-kolonialisme, yang artinya propaganda anti Eropa, Rusia merangkul negeri-negeri muslim menjadi massanya dalam melakukan perang ideologis dengan kapitalis Barat. Komunisme, dengan tema-tema keadilan dan pembebasannya, mendapat sambutan dan menyebar di negeri-negeri muslim. Rusia mengeksploitasi kebutuhan dan semangat kebebasan bangsa-bangsa muslim itu hingga mengklaim bahwa revolusi ideologis mereka adalah untuk "pembebasan benua Timur terutama, dan sebagian besarnya adalah, muslim benua Timur." Mereka bahkan berani menyatakan jihad bagi usahanya dan usaha negeri-negeri muslim untuk memerangi negara-negara kapitalis Barat yang menjadi penjajah. Untuk beberapa waktu, Rusia Soviet berhasil tampil sebagai komando penantang Barat hingga menciptakan tata-politik dunia yang *bi-polar.*.

Tetapi tidak lama kemudian terbukti bahwa Rusia Soviet gagal baik secara ideologis maupun politik dan ekonomi menguasai negeri-negeri muslim. Masyarakat muslim dengan segera menyadari keterbedaan fundamental Islam dengan komunisme, begitu juga kaum komunis tidak bisa menyembunyikan watak mereka yang sesungguhnya yang membenci dan menghinakan Islam dan agama lainnya. Karena kini mereka tidak lagi mendapat dukungan bahkan, kembali, memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negeri-negeri muslim, Rusia Soviet pun menghentikan perang ideologisnya dengan Barat. Dalam hal keterlibatan Islam, ada dua peristiwa paling monumental yang secara langsung memaksa Rusia Soviet melakukan perubahan visi dan strategi politik luar negerinya yaitu, 1. Perang Soviet-Afganistan dan 2. Revolusi Iran

- *Jihad melawan Soviet di Afganistan*

Sebagaimana di negeri-negeri muslim lainnya, seperti diterangkan di atas, komunisme juga berkembang luas di Afganistan bahkan sampai kepada puncak kekuatannya ketika partai komunis di negeri tersebut berhasil merebut kekuasaan melalui *coup d'etat* terhadap rejim Jenderal M. Daud Khan yang memerintah sejak 1971. Walaupun Soviet berdalih dan bersikeras tentang ketidakterlibatannya dalam *coup d'etat* itu namun situasi politik memperlihatkan bahwa Soviet sangat membutuhkan pertemanan Afganistan untuk menghadapi Barat dan Daud Khan dipandang tidak akomodatif serta memiliki program tersendiri atas Afganistan. Dan Soviet tidak bisa mengelak dari tuduhan tersebut ketika tidak lama kemudian negara itu muncul di Afganistan untuk mengintervensi kekisruhan di tubuh partai komunis yang sedang berkuasa. Yang ingin diterangkan adalah bahwa peristiwa *coup d'etat* ini, dilanjutkan dengan kedatangan Soviet ke Afganistan tersebut, adalah jejak awal perang berkepanjangan di Afganistan dan menjadi pintu pergeseran nasib pemerintahan Soviet serta tata politik dunia.

Kedatangan pasukan Soviet tersebut membuat rakyat Afganistan, yang telah terpecah suaranya terhadap rejim komunis, mendapatkan alasan dan momentum yang tepat untuk mempertajam perlawanan mereka. Dan pemakaian Islam dalam visi dan simbol-simbol perjuangan mereka, selain dukungan materi dan fisik dari negara-negara saingan Soviet tentunya, terbukti telah membuat perlawanan dan resistensi mereka begitu solid dan bertahan sebegitu lama. Para analis politik menyebutkan ada dua konteks dominan yang menjelmakan perjuangan rakyat Afganistan menjadi perjuangan keIslaman. Pertama, kelemahan manajemen kepemimpinan dan persuasi pemerintahan komunis. Kedua, pengaruh situasi gerakan Islam internasional terutama yang terjadi di Pakistan.[38]

Pada konteks pertama, rejim komunis Afganistan terjebak dalam konflik internal akibat perbedaan golongan dan etnis. Kemudian mereka juga terobsesi dengan komunisme Soviet serta keberhasilan komunis

[38] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 323

Iran di republik Gilan Iran hingga mereka juga *over-acting* menghina Islam dan memberlakukan kebijakan anti-Islam di negeri Pakistan yang mayoritas Islam. Hal ini membuat rakyat Afganistan bahkan yang paling sekuler sekalipun serta masyarakat yang sebelumnya mendukung komunis berbalik menjadi oposisi. Pada konteks kedua, kebangkitan Islam di Pakistan sangat kuat menggemakan gaungnya ke Afganistan. Masa-masa tahun 1960-1970an, dengan bantuan negara Pakistan, di Afganistan menjamur gerakan-gerakan pemuda Islam yang melakukan aktifitas anti-pemerintah. Ketahanan mereka semakin kokoh dengan berkuasanya M. Zia ul-Haq yang menerapkan politik Islamisasi. Penggunaan simbol Islam juga membuat rakyat Afganistan mendapatkan perhatian dan, paling terpenting, bantuan-bantuan materi dari negara-negara Arab terutama Arab Saudi. Di atas semua itu, penggunaan Islam sebagai simbol dan dasar perjuangan diterima luas dan sangat relevan sebagai unsur pemersatu untuk kondisi Afganistan pada waktu itu yang terdiri dari berbagai etnis yang bertentangan.

Seperti diketahui Soviet akhirnya menarik tentaranya. Walaupun ada pendapat bahwa penarikan tersebut adalah akibat perubahan pandangan politik dan strategi internasional Uni Soviet dan bukan merupakan kekalahan mereka menghadapi resistensi rakyat Afganistan, tetapi tidak demikian dengan opini yang terbentuk di masyarakat Afganistan dan juga internasional. Bahkan, bukan hanya dipandang sebagai kekalahan, penarikan pasukan tersebut disimpulkan lebih jauh lagi sebagai kekalahan komunisme dari Islam. Hal ini selanjutnya menciptakan psikologi keterikatan di antara negeri-negeri muslim dunia terutama yang terlibat dan berkepentingan langsung dengan Afganistan seperti Pakistan, Iran dan Arab Saudi. Muncul keyakinan bersama bahwa komunis Soviet adalah rival ideologis dan musuh politik bangsa muslim dan bahwa Islam sebagai ajaran yang benar dapat mengalahkan komunis yang sesat. Artinya, sekarang Soviet harus memasuki peta politik dunia yang baru, terciptanya kelompok musuh baru.

- *Revolusi Iran dan Kecolongan Uni Soviet*

Dalam revolusi Iran, Soviet kembali kecewa karena salah menyimpulkan bahwa Islam Iran akan menjadi pendukung Soviet yang potensial dan progresif untuk melawan apa yang disebut Soviet sebagai

'Imperialisme Global'. Setelah revolusi, Iran ternyata menjaga jarak atau malah dapat dikatakan mengambil sikap bermusuhan. Keyakinan Soviet bahwa revolusi Iran akan menghasilkan sistem sosialisme didasarkan pada pandangan bahwa 1). Tuntutan pembebasan dan revolusi Iran benar-benar berbasis massal dan mengakar rumput. Dan partai komunis Tudeh lah yang memegang kontrol massa ini serta berperan signifikan menggerakkan massa melakukan demonstrasi dan aksi-aksi mogok yang nantinya menumbangkan rejim monarki Iran, walaupun akhirnya bukan mereka yang berhasil memegang puncak kekuasaan Iran. 2). Ide-ide kiri dan revolusi telah menyebar di kalangan kelompok keIslaman Iran bahkan yang paling tradisional sekalipun sehingga terbentuk dua macam kelompok Islam kiri yaitu tradisional dan modern, yang terakhir ini seperti kelompok-kelompok pengikut Imam Khomeini. 3). Revolusi Iran nyata-nyata anti Barat dan mengekspresikan kekecewaan dan penolakan akan sistem kapitalis Barat. 4). Slogan-slogan dan tema-tema yang dilontarkan dalam revolusi, terlepas dalam bahasa atau *vocabulary* keIslaman, menggemakan kerangka pikir dan teori-teori Marxist yaitu pengakuan akan terjadinya imperialisme internasional serta kenyataan munculnya golongan tertindas (*mustazafin*) dan penindas (*mustakbarin*). 5). Kekuatan Islam tidak cukup sempurna atau tidak memiliki format serta tidak menawarkan model alternatif untuk menampung tuntutan rakyat Iran keluar dari ketidak-adilan dan pertentangan kelas yang mengglobal tersebut.

Tetapi ternyata revolusi Iran tidak menghasilkan sistem sosialisme apalagi menjelmakan negara komunis. Seperti yang terjadi di Pakistan, kelompok komunis Iran lemah dalam manajemen persuasi dan tidak peka terhadap masa lalu hubungan Iran-Rusia yang masih melekat dalam di benak rakyat Iran. Sementara masyarakat Iran dan juga pemimpin-pemimpinnya ternyata tetap konsisten dengan keyakinan keIslaman serta kedudukannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka; spiritual, ekonomi dan politik, walaupun dalam operasionalnya terjadi perbedaan metode di mana sebagiannya mengadopsi sosialisme. Rakyat Iran membuktikan Islam sebagai sistem tersendiri, mereka memerangi kapitalisme tetapi juga tidak memilih komunisme. Malah bukan hanya tidak memilih komunisme melainkan menjadikannya sebagai target peperangan sama dengan kapitalisme. Disebutkan bahwa revolusi Iran adalah perjuangan menghancurkan "Western Devil" (kapitalisme) dan

"Eastern Devil" (komunisme).[39] Komentar ini diberikan berdasarkan pernyataan Khomeini bahwa Uni Soviet juga adalah penguasa imperialis yang, walaupun tidak seganas Amerika Serikat, pantas disebut sebagai 'Setan Kecil.'

Harapan Soviet dan partai komunis Iran Tudeh pun pupus, lalu partai Tudeh kehabisan kesabaran dan mengorganisir kekuatan militer untuk merebut kekuasaan dengan cara *coup.* Namun usahanya tersebut, yang mendapat dukungan dari pihak Soviet, tercium hingga mengakibatkan pembersihan anggota dan simpatisan serta pembubaran partai Tudeh, yang sekaligus kematian partai itu di Iran. Akhirnya, revolusi Iran pun menciptakan ketidakjelasan, atau dapat dikatakan, kekacauan hubungan Iran dan Rusia selanjutnya.

Kesimpulan, uraian di atas hendak menegaskan bahwa pertama; sepanjang sejarah jalinan hubungan Uni Soviet dengan bangsa-bangsa muslim selalu dalam konteks negatif dan permusuhan. Adapun kerjasama selama masa-masa perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa muslim tidak dapat dikatakan sebagai hubungan positif dan terjalinnya saling pengertian melainkan karena Uni Soviet berkesempatan memainkan kartu Islam untuk kepentingannya menantang Barat. Saat ini, Rusia pasca Soviet juga kembali memainkan kartu Islam tersebut, dalam hal ini isu-isu ekstrimis dan teroris Islam, kali ini bukan untuk melawan tetapi untuk mendekati Barat. Hal yang sama juga dipraktekkan Rusia dalam jalinan hubungannya, dan dalam segala tindakannya, terhadap negara-negara Asia Tengah, Cina dan India. Jelasnya, sejak menjelang keruntuhan pemerintahan Soviet, Islam kembali diposisikan lebih sebagai ancaman dan penghalang bagi tujuan-tujuan Rusia ketimbang sebagai kawan atau pendukung yang menguntungkan.

2. Konsep-Konsep Kebijakan Luar Negeri Yang Berkembang di Rusia Pasca Soviet

Seperti terlihat, kondisi yang melingkupi Rusia membuatnya tidak lagi memiliki pilihan kecuali melakukan perubahan atas visi hubungan dunianya. Yang paling jelas sekarang, prioritas kebijakan luar negeri

[39] Oleh Alexander Bovin dalam majalah *Survey* (autumn/winter 1983) dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 325

Rusia adalah mengurangi ketegangan dengan Barat sehingga dapat menekan sebesar-besarnya biaya perbelanjaan militer. Dapat dikatakan bahwa inti perubahan kebijakan luar negeri Rusia adalah perubahan karakter hubungan Soviet-Barat. Akan tetapi, kesepakatan tentang perubahan ini tentu hanya merupakan titik tolak dan belum memberikan panduan bagaimana hubungan luar negeri yang baru tersebut dijalankan. Kesadaran bahwa Rusia kini harus menjalin hubungan dengan Barat perlu dijabarkan ke dalam suatu konsep hingga jelas apa dan bagaimana paradigma, format serta target dari hubungan tersebut. Dan untuk ini Rusia ternyata telah menjalani sejumlah eksperimen konsep. Sampai masa presiden Putin, disebabkan perbedaan penekanan di antara berbagai faktor yang diterangkan di atas, sejumlah konsep berbeda telah muncul sebagai dasar kebijakan luar negeri Rusia pasca Soviet yaitu :[40]

a. Konsep *Euro-Atlanticism*

Konsep pertama yang mendapat sambutan luas dan dijalankan adalah yang berasal dari kelompok beraliran Barat yang dicetuskan oleh menteri luar negeri Rusia pertama, Kozyrev. Teori ini berangkat dari paradigma tentang konfrontasi Selatan dan Utara. Menurut teori ini konfrontasi Timur dan Barat telah berganti dengan konfrontasi antara Selatan dan Utara. Dalam konfrontasi ini, benua Utara yang kaya dan maju mulai diancam oleh benua Selatan yang miskin dan liar dengan cara-cara migrasi, terorisme, fundamentalisme Islam dan bahkan agresi. Negara Rusia termasuk negara yang terancam seperti halnya negara-negara Barat karena Rusia mengadopsi nilai-nilai dan mengidentifikasi dirinya dengan Barat. Selanjutnya menurut teori ini Rusia akan memposisikan dirinya sebagai negara paling depan menangkal dan memerangi Islam radikal persis seperti ketika kekaisaran Tsar Rusia menjadi negara garda depan mengawal dan mempertahankan Kristen dari serangan Islam. Dengan argumen ini Rusia ingin menggolkan usulan kerjasama Rusia-Barat. Keinginan ini jelas-jelas disampaikan presiden Boris Yeltsin dalam berbagai kesempatan semasa tahun-tahun madu Rusia-Amerika (1992-1994) misalnya pernyataannya, "*...kami*

[40] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 289-310

mengusulkan dibentuknya sistem politik bersama antara negara-negara industri Utara dan secara khusus dibentuknya sistem pertahanan bersama Amerika Serikat dan Rusia yang diarahkan untuk mengantisipasi ancaman agresor dari Selatan (yaitu Iran, Afganistan dan beberapa Negara Timur Tengah)."[41]

Tentang arah kebijakan luar negeri Rusia, teori ini menyatakan bahwa hubungan eksternal Rusia diarahkan untuk membantu menciptakan kepentingan domestik Rusia untuk menjadi negara yang demokratis, pasar internasional, dan bangsa yang berbudaya dan berperadaban, yang dibuktikan dari kesejahteraan rakyatnya. Menurut konsep euro-atlanticism, untuk tujuan ini Rusia harus mengintegrasikan diri ke kelompok negara-negara dunia yang elit dan sejahtera, menganut nilai-nilai universal yang diakui badan PBB dan berlaku di kancah internasional. Artinya, Rusia harus menganut nilai-nilai Barat secara total dan seutuhnya. Dalam konteks ini, Rusia memandang bahwa negara-negara Selatan, artinya Islam, merupakan satu-satunya ancaman. Selain itu, setelah membaurkan diri di gelanggang dunia internasional, Rusia harus mengambil peran dan melakukan sesuatu agar keberadaannya diperhitungkan. Di sini Rusia memiliki fungsi khas yaitu sebagai jembatan antara Timur dan Barat dan sebagai agen peradaban bagi dunia Timur.

Ø *Kegagalan dan Kelemahan Teori Euro-Atlanticism.*

Terlihat bahwa konsep pertama yang mengemuka di Rusia pasca Soviet adalah konsep yang mengagung-agungkan Barat. Para analis politik menerangkan hal ini wajar karena Rusia di masa-masa ini sedang berada dalam keterpurukan yang parah sehingga terpukau dengan kemajuan dan kemakmuran Barat tanpa memperdulikan perbedaan mendasar antara Rusia dan Barat; secara geografi, sejarah, demografi, dan fakta-fakta psikologis. Pada masa ini Rusia mengharap bahwa dengan mengikuti dan berbaik-baik dengan Barat mereka dapat segera bangkit menjadi negara yang makmur, sejahtera dan modern seperti halnya keadaan Amerika dan Eropa.

[41] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 291

Namun setelah beberapa waktu, nyata bahwa kerjasama Rusia-Amerika mengambang, tidak mengarah kepada hasil yang jelas serta tidak seimbang. Kritik yang diajukan yaitu bahwa cita-cita kesepahaman Rusia-Barat tidak realistis dan naïf. Malah disimpulkan bersifat ideologisme karena tidak mempertimbangkan kepentingan atau interest dan misi khusus masing-masing negara. Terasa pula bahwa Amerika berstandar ganda dalam men-*judge* sebuah tindakan terorisme dan memainkan kartu Islam untuk memperkuat dirinya. Teori ini juga membuat Rusia tidak memperhatikan bahkan meremehkan dunia Selatan yaitu republik-republik bekas bagian Soviet, negara-negara tetangga yang muslim dan dunia Timur seperti Cina. Kritikan tersebut datang dari berbagai pihak mulai dari kelompok nasionalis pragmatis sampai kepada nasionalis fundamentalis. Tetapi kritik yang paling komprehensif hingga diambil menjadi konsep alternatif datang dari kelompok Eurasianis.

b. Konsep *Eurasianis*

Kelompok Eurasianis ini, walaupun namanya sama, memiliki orientasi dan dasar filosofis berbeda dengan kelompok Eurasianis tradisional yang mengajukan teori tentang identitas nasional (melalui tokohnya Alexander Dugin, dijelaskan pada bab II). Tetapi keduanya memang bertolak dari titik yang sama yaitu penekanan pada sejarah dan identitas Rusia sebagai bangsa. Teori Eurasian memiliki paradigma realis dan sejarah kebesaran Rusia. Menurut teori ini posisi geo-politik Rusia adalah suatu kekuatan yang menjadi modal kebesaran Rusia. Artinya, Rusia harus memanfaatkan potensi geopolitiknya tersebut secara maksimal dan menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang dan melingkupi termasuk hubungan dengan Cina, India, Jepang, negara-negara Pasifik-Rim, negara-negara bekas kekuasaan Soviet, negeri-negeri muslim Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. Semuanya harus menjadi perhatian utama Rusia. Dalam istilah menteri luar negeri Rusia Igor Ivanov, Rusia membutuhkan kebijakan luar negeri 'multivector', artinya kebijakan luar negeri 'multidimensional'. Jadi tidak hanya terfokus kepada Amerika dan Eropa.

Pandangan geo-politik ini menolak paradigma konflik antara Timur-Barat serta meletakkan Barat superior atas bagian dunia lainnya termasuk Rusia. Sebaliknya, mereka bahkan meyakini Rusia memiliki

kelebihan atas Barat dari segi dimensi spiritualnya. Begitu juga, dengan kenyataan geo-politiknya tersebut teori ini mengkonsepsi Rusia sebagai pemersatu dan rekonsiliator antara Islam dan Kristen, Timur dan Barat, Utara dan Selatan, yang tentunya merupakan kelebihan Rusia lainnya. Dengan demikian berarti teori ini sama sekali bukan anti Barat.

Tentang arah dan target kebijakan luar negeri, sama dengan kelompok euro-atlanticism, teori ini mengakuinya untuk pembaharuan dan kemajuan internal negara. Namun keduanya berbeda dalam hal prioritas kepentingan domestik tersebut. Tidak seperti euro-atlanticism yang memaksa meleburkan diri ke Barat karena ingin mengejar kemajuan seperti Barat, Eurasian justru memandang pengukuhan status kebangsaan Rusia sebagai jalan untuk meraih kemajuan dan kebesaran Rusia kembali. Hubungan internasional Rusia harus difungsikan dan harus berperan membentuk dan membangun kembali status dan psikologis kebangsaan Rusia. Hal ini karena keruntuhan Uni Soviet telah mematahkan jalan sejarah kebangsaan Rusia sementara Rusia pasca Soviet belum berhasil mengembalikan jiwa kebangsaan yang utuh dan memformulasikan sistem kebutuhan dan kepentingan nasional secara jelas. Menurut teori ini lagi, hubungan internasional, yang memberikan kesempatan untuk menjelajah, membandingkan dan mencari inspirasi, akan membantu Rusia menjadi 'Rusia' dan mengenal kebutuhan-kebutuhannya.

Terkait dengan Islam, kalau teori ini menyatakan bukan anti Barat maka secara inheren teori ini juga bukan anti Islam. Dengan mendudukkan semua wilayah geo-politiknya sama penting dengan Barat dan bahwa prioritas pencapaian Rusia bukanlah aspek materi dan perekonomian melainkan pamor dan kebanggaan geografis Rusia beserta pengaruh geo-politiknya, maka berbeda dari *euro-atlanticism* teori ini tidak memandang Islam sebagai musuh dan ancaman. Begitupun, teori ini juga mendeteksi dan konsern dengan ancaman Islam ekstrimis serta kemungkinan menyebarnya ke wilayah Rusia. Akan tetapi dalam menanganinya, teori ini tidak menunjukkan cara-cara kekerasan dan arogan seperti yang diusulkan konsep *euro-atlanticism* melainkan dengan strategi persuasi dan efektifitas kekuatan geo-politis serta memanfaatkan keterikatan sejarah Rusia dengan dunia Islam. Teori ini percaya bahwa keterikatan Rusia-Muslim lebih prospektif dan potensial ketimbang Rusia-Barat karena Barat telah mencap Rusia sebagai warga

Eropa kelas dua. Rusia harus menyadari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinann Rusia diasingkan Barat dan karenanya, berkaitan dengan Islam Rusia harus memiliki sikap dan kebijakan-kebijakan yang independen dan berwawasan ke depan. Teori ini sudah mulai memengaruhi para pengambil kebijakan di Rusia sejak 1992. Malah, Menteri luar negeri Kozyrev yang mencetuskan konsep *euro-atlanticism* memakai pandangan teori ini dalam kebijakannya menangani organisasi regional CIS (Commonwealth Independent States).

Ø *Kelemahan dan Kegagalan teori Eurasian*

Tetapi seiring waktu nyata pula bahwa tawaran kerjasama regional dan pandangan tentang kesatuan kawasan yang didengungkan Rusia kurang mendapatkan sambutan dan tidak menampakkan hasil yang nyata. Hal ini karena yang dibutuhkan negara-negara tetangganya yang muslim serta negara-negara ex-Soviet adalah pemecahan kesulitan ekonomi serta kompensasi kesalahan dan kerugian-kerugian yang diciptakan Uni Soviet terhadap mereka, sehingga Rusia gagal menerapkan pengaruhnya bahkan di negara-negara bekas wilayahnya. Selain itu, masyarakat muslim ex-Soviet juga belum siap untuk menjalin hubungan mesra dan tulus dengan Rusia akibat pengalaman sejarah mereka yang buruk. Bahkan, gejolak permusuhan dan pemberontakan kaum muslim sudah sangat merusak, contohnya oleh Chechnya, yang membuat Rusia tidak bisa mengakomodir dengan cara-cara yang damai. Kondisi ini membuat skema kesatuan Rusia-Muslim menjadi sama naïf dan muluk-muluknya dengan Rusia-Barat. Di atas semua itu, Barat pun kini telah berani menampakkan belangnya. Mereka justru menikung Rusia menggaet negara-negara muslim dan secara terang-terangan bermesraan dengan negara-negara muslim di wilayah Kaukasus dan Asia Tengah, seperti halnya kolaborasi Amerika-Turki dan Amerika-Pakistan. Hal ini memunculkan kesimpulan yang sulit ditolak, bahkan kecurigaan di pihak Rusia sendiri, bahwa Amerika sengaja menghadirkan diri untuk memperkecil atau malah menghilangkan pengaruh Rusia di wilayah Kaukasus dan Asia Tengah.

Akhirnya disadari bahwa teori ini tidak praktikal, tidak menyentuh perbaikan ekonomi dan membuat Rusia kewalahan. Dengan kesadaran bahwa Rusia tidak bisa mengerjakan sendiri rencananya untuk

menciptakan keseimbangan politik dunia dan membangun kekuatan penyeimbang Amerika, maka Rusia pun mencoba konsep lainnya yang mengemuka, yaitu konsep '*Dunia Multipolar*'.

c. Konsep *Dunia Multipolar*

Untuk menciptakan tujuan menyeimbangkan kekuatan politik dunia, konsep ini tidak melakukannya dengan membangun kekuatan dan kebesaran Rusia sendiri berdasarkan potensi geo-politiknya—yang merupakan strategi Eurasian—melainkan dengan mengusahakan pembentukan poros-poros penyeimbang oleh berbagai negara dan organisasi dunia dari berbagai arah dan tempat.

Teori multipolar berangkat dari argumen bahwa Barat, dalam hal ini Amerika, mengambil kesempatan dari keruntuhan Uni Soviet untuk membangun struktur politik dunia 'Unipolar' setelah sebelumnya berbentuk 'Bipolar'. Struktur ini dianggap sangat berbahaya, rentan kesewenang-wenangan dan instabilitas. Untuk mencegahnya maka mutlak diciptakan kekuatan penyeimbang. Dalam konsep Eurasian, kelompok negara-negara CIS yang dikendalikan Rusia dipandang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Ternyata CIS tidak menampakkan hasil di semua bidang. Melihat kegagalan ini, Primakov sebagai menteri luar negeri Rusia, dengan semangat mempromosikan konsep 'multipolar'—yang idenya sudah menyebar di berbagai kalangan di Rusia termasuk kelompok pro-Barat—sebagai kerangka dasar kebijakan luar negerinya. Konsep ini menetapkan bahwa Rusia harus menjalankan kebijakan yang didasarkan atas interaksi yang seimbang kepada semua negara. Artinya negara-negara di semua letak geografis dipandang sama karena memiliki kans yang sama untuk diajak bekerjasama dan memberi sumbangan terhadap perbaikan negara Rusia dan juga. Jelasnya, teori ini mengkonsepsi tatanan hubungan negara yang saling melengkapi.

Ada 4 target dan strategi dominan dari konsep multipolar. Pertama, menciptakan kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Amerika dan membatasi kemampuan Amerika untuk bertindak sesuka hati menyerang atau membubarkan suatu negara dan pemerintahan. Kedua, membantah keyakinan Barat akan universalitas prinsip dan teori kapitalis dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Ketiga, meningkatkan posisi internasional Rusia dan keterlibatannya dalam menangani masalah-masalah internasional. Keempat, untuk

menciptakan atmosfir yang bersahabat dan fair bagi aktifitas politik dan perdagangan internasional Rusia.

Dalam hal ini, salah satu poros kekuatan yang harus dibentuk adalah dengan menciptakan ikatan dengan Cina dan India. Ikatan ini dirancang menyamai kebesaran Uni Eropa. Selain itu, Rusia juga akan berupaya untuk mengarahkan Uni Eropa menjadi kekuatan penyeimbang lainnya. Begitu seterusnya, Rusia harus mendorong pembentukan kekuatan penyeimbang oleh berbagai organisasi di berbagai tempat.

Ø *Multipolarity dan Islam*

Bagaimana konsep ini memandang peran kelompok Islam. Ternyata pandangan mereka terpecah. Dan pemandangan yang umum, saat ini Rusia enggan melibatkan Iran dalam kerja ini. Terbukti, dalam masa-masa gencarnya sosialisasi konsep tersebut tidak ada pejabat-pejabat tinggi Rusia apalagi setingkat presiden yang melakukan kunjungan sukarela atau kunjungan balasan ke Iran, berbeda dari yang dilakukan terhadap negara-negara lain seperti Cina dan India walaupun 2 presiden Iran telah datang berkunjung ke Rusia. Keengganan Rusia untuk berdekatan dengan Iran dapat dipahami karena negara ini memiliki hubungan permusuhan yang hebat dengan Amerika sehingga Rusia tidak ingin kepentingannya terhadap Amerika terganggu. Demikian juga halnya dengan Iraq. Walaupun Rusia merasa Iraq lebih dapat diajak bekerjasama tetapi dengan kondisi Iraq yang sedang dikerjain Amerika membuat Rusia tidak mungkin masuk dan mensosialisasikan rencananya di sana. Terakhir, kedekatan pemerintahan Rusia pasca Soviet dengan Israel pun menutup jalan negara-negara Islam untuk dilibatkan dalam kaukus politik penyeimbang Amerika tersebut.

Ø *Kelemahan dan Kegagalan Strategi Multipolar*

Konsep *multipolarity* terjungkal bukan dikarenakan kelemahan paradigma dan legitimasi intelektualnya tetapi karena operasionalnya yang tidak ekonomis dan tidak memberikan efek langsung bagi pembangunan domestik Rusia.

Sampai 2 tahun masa kepresidenan Putin, Rusia masih menjalankan konsep multipolar yang disosialisasikan menteri luar

negeri Primakov. Buktinya, pada Juli 2001 Putin masih melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan Sino-Rusia. Beliau juga selalu menyampaikan gagasan multipolarity kemana saja dia melakukan perjalanan kunjungan. Tetapi belakangan Putin mendeteksi kelemahan konsep multipolar. Di permukaan, imej politik internasional Rusia memang mencuat dan berkibar tetapi secara domestik Rusia tidak mengalami perbaikan. Keberatan Putin diekspresikan oleh Sergei Karaganov sebagai berikut,

"Konsep multipolar mengharuskan Rusia untuk terus aktif pada semua kerja dan masalah internasional di segala bidang. Secara global dan untuk jangka panjang hal ini tentunya konsisten dengan kepentingan Rusia. Akan tetapi, kerja-kerja ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan menguras tenaga dan waktu yang sudah sangat minim. Rusia terpaksa mencurahkan perhatian kepada berbagai persoalan politik internasional sementara persoalan di dalam negeri terus menumpuk dan memburuk. Banyak kegiatan internasional Rusia yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan dalam negeri Rusia seperti keterlibatan Rusia dalam konflik di Yugoslavia ataupun manuver politik Rusia di Irak."

Selain ketidak-efektifannya bagi kepentingan dalam negeri Rusia saat ini, strategi multipolar tidak berhasil menekan Amerika dan Barat. Selama 5 tahun pelaksanaan konsep ini, oleh Primakov dilanjutkan oleh Putin, beberapa kegagalan besar terjadi. Misalnya, keberatan Rusia atas ekspansi NATO merekrut anggota baru tidak ditanggapi dan pada bulan Juli 1997 Polandia, Hungaria, dan republic Czech tetap diundang untuk menjadi anggota. Rusia juga tidak berhasil mempengaruhi Barat dalam kebijakan mereka di Yugoslavia. Demikian juga di Timur Tengah, keputusan Rusia untuk memasok sistem antimisil S300 menyebabkan perselisihan antara Turki dan Cyprus. Lalu dengan tekanan Amerika dan Eropa Cyprus tidak berani melanjutkan pembangunan antimisil tersebut, yang mempermalukan Rusia sendiri.

Penyebab tidak efektifnya operasi konsep multipolar ini disimpulkan dikarenakan dua faktor. Pertama, karena sistem internasional pasca perang dingin tidak lagi terbagi ke dalam blok-blok. Hal ini membuat masing-masing negara menjadi lebih independen dan bebas menentukan arah dan target politiknya. Keragaman dan seringkali

pertentangan prioritas kebijakan masing-masing negara membuat upaya kerjasama menciptakan kekuatan bersama menemukan banyak kendala. Di antara negara-negara pemain kunci multipolar yaitu Rusia, Cina dan India sendiri masih memiliki sejumlah interes yang bertentangan dan juga kompetisi pengaruh bahkan berebut perhatian dari Amerika sendiri. Cina misalnya, negara ini mati-matian menentang untuk melakukan konfrontasi terbuka dengan Amerika karena perekonomiannya cukup besar tergantung pada pasar Amerika. Kedua, Kekuatan Amerika yang sudah sangat kuat di semua bidang; ekonomi dan militer, dan menjangkau seluruh bagian dunia sehingga membuat siapa saja yang menentang dan melawannya akan menghadapi ongkos yang sangat besar ketimbang manfaat dan keuntungan.

Satu-satunya isu dan faktor yang dapat menyatukan sejumlah negara secara solid adalah isu Islam ekstrimis. Akan tetapi, pasca peristiwa 11 september 2001 Amerika juga terlibat bahkan menjadi komando dalam pemberantasan teroris dengan intervensi langsung ke Afganistan memusnahkan kelompok Taliban. Yang terjadi akhirnya justru terjalin kesepahaman dan kedekatan Rusia dengan Amerika, yang tentunya merubah rancang bangun strategi multipolar dan berarti konsep multipolar *expired* dengan sendirinya.

Mengalami semua kegagalan dan kondisi yang berkembang, Putin bersama dengan menteri luar negerinya Primakov, sepakat untuk meninggalkan strategi multipolar dan memfokuskan diri pada pandangan Globalisasi dan keuntungannya bagi negara Rusia.

d. Konsep *Pragmatisme* Putin

Strategi politik luar negeri Rusia yang terakhir ini dimulai ketika Rusia kembali mendekati Amerika Serikat dan Eropa dan sepakat bergabung untuk memerangi terorisme internasional, dimulai dengan operasi melawan rejim Taliban dan jaringan teroris al-Qaeda. Begitupun, konsep ini muncul terkait dengan kegagalan Rusia dalam mengatasi krisis Yugoslavia, sebagaimana halnya kegagalan Rusia di Afganistan telah memunculkan visi dan doktrin baru politik luar negeri Rusia. Karena penekanan dan orientasinya pada aspek ekonomi dan keuntungan langsung bagi Rusia maka konsep ini dinamakan dengan ‘Pragmatisme’.

Konsep ini dinamakan konsep pragmatisme Putin karena mengadopsi dan merefleksikan kepribadian dan ide-ide Putin. Dalam pemikiran Putin, hubungan eksternal Rusia tidak seharusnya lagi didasarkan pada ideologi tertentu dan juga tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan-perasaan simpati maupun antipati terkait sejarah masa lalu Rusia. Putin telah mengambil pelajaran bahwa aktifitas utama politik luar negeri Rusia adalah mengambil bagian dalam sebanyak mungkin kegiatan ekonomi internasional terutama dalam organisasi-organisasi perdagangan dunia. Disebutkan bahwa strategi Putin ini diistilahkan dengan ini 'integrationism'.

Ø *Adapun dasar pemikiran serta target pragmatisme Putin ini yaitu*

1. Fundamentalitas Ekonomi

Putin telah menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan ada ambisi dan tujuan yang dapat dicapai Rusia tanpa kondisi ekonomi yang stabil dan membaik terlebih dahulu. Oleh karena itu, target utama diplomasi Rusia adalah untuk menarik investasi asing dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang menguntungkan bagi Rusia. Begitu gencarnya Putin menekankan perekonomian dan mencari investasi ada yang mencibir akan memunculkan imej buruk Rusia. Begitu transparan Putin berkeliling dunia menawarkan bantuan senjata Rusia kepada setiap negara sebagai ganti dari hutang-hutang Rusia terutama kepada negara-negara bekas Soviet, padahal sebenarnya mereka saat ini tidak membutuhkan bantuan dukungan tetapi pengembalian hutang-hutang itu sendiri.

2. Mencapai independensi Rusia

Vladimir Putin sangat kuat memegang konsep independensi dan non-intervensi sebagaimana yang menjadi keputusan PBB. Beliau berusaha menolak siapa saja yang mengatur dan mendikte Rusia dalam hal kebijakan dalam negeri maupun politik luar negerinya. Prinsipnya tersebut pada dasarnya terarah kepada Amerika yang mengkritisi dan meremehkan Rusia berkenaan dengan hubungannya dengan Iran, Iraq, Kuba ataupun Korea Utara. Begitu juga Putin telah mewanti-wanti diri untuk menangkis semua kritikan terkait kebijakan militer Rusia terhadap Chechnya, yang menurutnya tidak berdasar dan merupakan urusan dalam negeri Rusia.

3. Sentralitas Eropa

Kalau Putin terlihat plin-plan, tepatnya bersikap oportunis, berkenaan dengan kedudukan tradisi dan warisan sejarah Rusia bagi identitas nasional Rusia maka beliau sangat tegas dalam memandang Rusia sebagai negara Eropa dan dalam rencananya menjadikan Rusia lebih terikat dan terintegrasi kepada Eropa. Selain faktor-faktor yang bersifat subjektif yaitu pengaruh kehidupan pribadi beliau yang lahir dan hidup di kota St. Petersburgh—merupakan monumen dan simbol dari upaya nenek moyang Rusia menjadikan negeri ini sebagai negara Eropa—serta menimba pendidikan dan pengalaman di negeri-negeri Eropa, Putin tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Eropa adalah partner utama dan merupakan sumber donatur terbesar bagi Rusia. Eropa telah menjadi pasar yang vital bagi minyak dan gas Rusia. Tercatat Jerman sendiri merupakan pengimpor minyak Rusia yang paling tinggi bahkan dibanding negara-negara organisasi OPEC. Lagi pula dalam kenyataannya, Eropa adalah satu-satunya kekuatan politik ke mana Rusia secara riil dan utuh dapat meleburkan diri. Bila diberi kesempatan Rusia dapat menjadi bagian dunia Eropa yang seutuhnya. Selain itu keberadaan Rusia di Eropa tidak akan menempati posisi minor mengingat dunia Eropa belum didominasi oleh kekuatan satu negara atau masih dalam proses konstruksi politis.

Tetapi ada kondisi-kondisi yang menuntut Putin untuk merevisi pandangan politiknya bila ia ingin menjadikan Rusia sebagai negara Eropa. Yang pertama adalah masalah letak geografi dan visi demokrasi bangsa Rusia. Aspek ini adalah sesuatu yang sulit bagi seorang Rusia sekaligus merupakan faktor yang membuat upaya nenek moyang Rusia sebelumnya menemui kegagalan dan jalan buntu. Eropa nyatanya telah terintegrasi kepada nilai-nilai demokrasi Barat yang salah satu konsekwensinya adalah penghargaan kepada hak-hak manusia dan kaum minoritas. Sebagaimana diketahui, Putin adalah seorang yang berkarakter Rusia murni yaitu berpegang pada kepemimpinan kharismatik dan sentralisme. Kedua, kebijakan Rusia membina hubungan baik dengan Amerika setelah peristiwa 11 september 2001. Hal ini dapat mengurangi penilaian Eropa terhadap Rusia sebab pada masa-masa ini Eropa mengalami penurunan hubungan dengan Amerika, walaupun faktor ini sendiri bersifat kondisional.

Ø *Tindakan Pragmatisme Putin*

Ketiga hal tersebut di atas adalah yang merupakan kerangka dasar serta tujuan dari politik luar negeri Putin. Ketiganya mendapat penekanan yang berbeda sesuai urutannya. Artinya, program eropanisasi juga independensi Rusia akan ditundukkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Prioritas ekonomi Rusia, bagaimanapun, membuat Putin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Amerika—di tengah-tengah hubungan dingin Eropa-Amerika—dan tidak hendak melawan arus politik internasional. Demikian pula, di samping pandangannya yang mencurigai Islam dan menempatkan Islam lebih sebagai tantangan dan kendala bagi tujuan luar dan dalam negeri Rusia, Putin tidak akan terhalang untuk tiba-tiba beraksi mendekati bahkan menempatkan diri sebagai bagian dari dunia Islam, seperti permohonannya untuk terlibat dalam organisasi dunia Islam (OKI).

Hubungan Rusia dengan Amerika memang telah mulai membaik sejak Putin menduduki jabatan. Tetapi setelah Januari 2001, pemerintahan Amerika mengambil sikap kritis terhadap Rusia terkait tindakan negara ini terhadap Chechnya. Mengatasinya, Putin melakukan politik persuasi dan akhirnya komunikasi terbuka kembali mulai Juni 2001. Kondisi ini terus mengalami kemajuan apalagi dengan terjadinya peristiwa 11 September 2001, yang memberi kesempatan bagi Rusia dan Amerika membangun format hubungan yang baru dan cara pandang baru satu sama lain. Kini Amerika tidak bisa mengacuhkan lagi ancaman Islam teroris yang selama ini disampaikan Rusia, dan mereka pun sepakat dalam satu proyek pemberantasan terorisme tersebut. Tetapi tidak lama kemudian, Rusia lagi-lagi menemukan ketidak-nyamanan karena tindakan Amerika yang mendominasi dalam proyek tersebut sementara Rusia juga tidak mendapatkan hasil yang memadai dari pasar internasional yang dikomandoi Amerika. Di pihak lain, Amerika mendapatkan keuntungan dominan dari kesuksesan mengalahkan kelompok teroris Taliban Afganistan, antara lain penempatan pasukan keamanan Amerika di Afganistan pasca kekalahan Taliban tersebut. Selain itu, Amerika juga mereguk keuntungan karena kini leluasa untuk malang melintang di negara-negara Asia Tengah dan Kaukasus. Lebih jauh lagi, Amerika dengan angkuh mempertontonkan

pengaruhnya di negara-negara kawasan tersebut bahkan di negara-negara bekas kekuasaan Rusia dengan membuka kerjasama bilateral. Seakan tidak memperdulikan keberadaan Rusia, Amerika sendirian menurunkan pasukan militernya ke negara-negara tetangga sebelah Rusia untuk mencegah masuk dan menyebarnya tentara pemberontak Chechnya dan kelompok militan muslim lainnya ke wilayah tersebut. Semua tindakan Amerika tersebut telah mencaplok dan menggeser pengaruh Rusia di wilayah Asia Tengah dan Kaukasus, dan memperlihatkan kalau Amerika tidak lagi membutuhkan dukungan Rusia artinya, Rusia juga tidak boleh berharap banyak akan dukungan Amerika. Puncaknya adalah pada awal 2002 ketika Amerika kembali mengkritik kebijakan Rusia atas Chechnya.

Tetapi apa reaksi Putin atas tindakan Amerika yang seakan memanfaatkan Rusia hingga dapat masuk ke wilayah Timur dan kemudian meminggirkan pengaruhnya di wilayah tersebut ? Putin masih juga bersikukuh dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan menyadari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bila melakukan konfrontasi. Karenanya, terlihat kalau Rusia tetap mengakomodasi dan bersikap toleran terhadap semua tingkah Amerika dan Barat umumnya. Sampai akhirnya di mana Rusia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya ketika Amerika memutuskan melakukan tindakan militer menumbangkan pemerintahan Saddam Husein di Irak, negara yang telah menjadi sekutu Rusia sejak lama. Dalam masa-masa bersitegang dengan Amerika berkenaan dengan keputusannya tersebut, Rusia pun memanfaatkan momen ini untuk memasukkan diri ke lingkungan dunia Arab dan muslim umumnya. Sejumlah negara-negara Arab yang berpengaruh berhasil diajak berkomunikasi dan menyempatkan diri mengunjungi Rusia. Dalam masa-masa genting tersebut Rusia kebanjiran tamu negara-negara Arab yang ingin membicarakan upaya baru perdamaian Arab-Israel serta solusi bagi krisis di Irak.

Selain pembicaraan politik, kedua pihak juga mengadakan kesepakatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam waktu yang singkat tersebut, Rusia bahkan telah siap dengan proposalnya bagi kerjasama ekonomi antara dunia Arab dan Rusia. Rusia berhasil memikat dan meyakinkan negara-negara Arab akan kedudukannya dalam pemecahan konflik Arab-Israel serta krisis Irak. Kemajuan hubungan

antara Rusia dan dunia Arab dan Islam selanjutnya memberikan Rusia akses ke lembaga dunia Islam paling berpengaruh yaitu OKI (OIC). Kemesraan dimaksud diawali dengan kunjungan sekjen OKI ke Moskow di awal 2003. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya, kali ini OKI tidak menyampaikan kritik apapun dan berusaha meretas semua penghalang komunikasi dengan Rusia, misalnya menyatakan bahwa masalah Chechnya adalah masalah dalam negeri Rusia. OKI juga menjamin tidak adanya bantuan dana dari dunia Arab terhadap pemberontak Chechnya serta mengusulkan bantuan kepada Rusia dalam melakukan rehabilitasi Chechnya pasca konflik.

Untuk lebih mengamankan dan memperkuat kedudukannya, Rusia pun menjual isu keberadaan umat Islam Rusia. Putin melansir bahwa negaranya berkepentingan mempererat hubungan dengan dunia Islam, yang diwakili OKI, agar dapat mengurus kehidupan umat Islam Rusia. Sebagai manifestasinya, pemerintah akan membuka kursi jabatan sejenis duta besar yang khusus menangani masalah umat Islam Rusia dan menghubungkan mereka dengan dunia muslim internasional. Puncak keberhasilan Rusia menggandeng negara-negara Arab saat ini adalah ketika Putin diterima bergabung ke lembaga OKI, walaupun pertama-tama hanya sebagai pengamat.

Tetapi bagaimanapun, hubungan yang dibina Putin dengan dunia Islam tidak akan mengorbankan kerjasamanya dengan Barat dan Amerika khususnya. Walaupun ketegangan dengan Amerika saat itu telah sangat serius dan hampir menimbulkan konfrontasi, namun tidak berapa lama kemudian Rusia dengan segera memperlunak sikap dan berusaha meredakan ketegangan. Putin pun memusnahkan sentimen-sentimen politik pro-Iraqnya dan meyakinkan parlemennya bahwa sikap lunaknya adalah strategi yang akan menguntungkan Rusia. Ringkasnya, politik luar negeri pragmatisme Putin, pada minggu-minggu sebelum pecahnya perang sampai akhir peperangan Iraq, memaksanya untuk bekerja keras menjaga keseimbangan hubungan terhadap Amerika dan dunia Arab, yaitu berusaha mengkonsolidasi hubungan dengan Amerika yang agak terbentur dan di sisi lain, terus menyuburkan kerjasamanya dengan dunia Arab dan muslim. Untuk menjaga citranya di mata Amerika, Rusia tidak lagi secara langsung dan *in toto* mengecam penyerangan terhadap Iraq melainkan dilakukan secara diplomatis

bahwa negaranya juga mendukung pemberlakuan kekuatan militer tersebut jika memang terbukti Iraq terkait dengan jaringan teroris internasional *al-qaeda* ataupun mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, untuk memulihkan sakit hati dunia muslim, usai penggulingan Saddam Husein, Rusia berusaha mengambil jarak dengan Amerika dan mencegah Amerika berkuasa penuh di Iraq dengan pendiriannya bahwa konsolidasi pemerintahan Iraq pasca Saddam Husein harus dilakukan di bawah komando PBB dan harus melibatkan sebanyak mungkin pastisipasi bangsa Iraq sendiri.

C. Kesimpulan

Kalau kebijakan dalam negeri Rusia pasca Soviet akhirnya berwujud pada tindakan resentralisasi serta kekuasaan terpusat maka kebijakan luar negeri Rusia berwujud pada prinsip pragmatisme dan Barat *Oriented*. Kedua kebijakan ini didasari pada kerangka pikir yang sama yaitu perubahan dan persepsi dunia baru, yang dicetuskan oleh Mikhail Gorbachev dan lahir akibat dari krisis ekonomi yang melanda Uni Soviet.

Akhirnya, seperti yang disimpulkan para pengamat Rusia, saat ini Rusia sampai pada kesadaran bahwa secara budaya dan dari segi kebutuhannya, Rusia lebih banyak memiliki persamaan dengan masyarakat kristen Barat ketimbang masyarakat muslim Timur. Kesadaran ini dikatakan mulai muncul setelah apa yang dialami Rusia pada dekade lalu yaitu kegagalan menyatukan, memadukan dan mengharmonisasi budaya Islam dengan budaya Barat serta mengakarnya imej negatif imperial Rusia dalam masyarakat muslim.

Ke depan masih belum bisa diprakirakan bagaimana hasil dan kelanjutan hubungan dan orientasi Rusia terhadap Barat ini. Tetapi seperti yang diterangkan pengamat Rusia, Hunter, yang terlihat saat ini adalah bahwa dinamika dan kebesaran Amerika selalu menenggelamkan peran Rusia dan juga anggota persemakmuran negara-negara eks Soviet atau CIS (Commonwealth of Independent States) di kancah dunia internasional.

Dalam hubungannya dengan negara-negara Islam, ke depan diperkirakan bahwa Rusia maupun Barat terkadang akan bekerjasama dan terkadang akan bersaing dan keduanya tidak selalu bersepakat

dalam berbagai isu, contoh terakhirnya tentu kasus nuklir Iran. Tetapi bagaimanapun, seperti terlihat dalam cara-cara Rusia menjadi mediasi dalam kasus Iran tersebut, situasi dan kondisi Rusia saat ini menghalangi mereka untuk menentang *vis a vis* ataupun menjauh dari Barat. Yang mungkin dilakukan Rusia adalah bergerak dari titik kecenderungan kepada pihak Eropa dan pihak Amerika Serikat dengan tetap berusaha bersikap sebagai teman yang baik bagi keduanya. Kekuasaan global di pihak Amerika seperti yang didemonstrasikannya pada tindakan invasi ke Iraq baru-baru ini, serta kekuatan ekonomi di pihak Eropa ditambah pertimbangan posisi geografisnya terhadap Rusia, memaksa Rusia untuk bersikap baik pada keduanya.

BAB V

KEHIDUPAN DAN AKTIFITAS POLITIK UMAT ISLAM RUSIA FEDERAL

BAB V
KEHIDUPAN DAN AKTIFITAS POLITIK UMAT ISLAM RUSIA FEDERAL

A. Mobilitas dan Infrastruktur Politik Islam Rusia

Uraian dari bab 1 sampai 4 telah menghantarkan kepada pemahaman bahwa Rusia, baik sebagai bangsa maupun individu perorangan tidak memiliki modal kultural dan ideologis untuk menerima kehadiran masyarakat muslim serta tidak memiliki pengalaman sejarah dan *framework* yang membangun dan menciptakan kran-kran politik agar umat Islam dapat hidup sebagai bagian dari bangsa Rusia seutuhnya.

Dalam kondisi di bawah tekanan sepanjang sejarah mereka maka adalah wajar kalau sikap kaum muslim terhadap warga dan bangsa Rusia bersifat reaktif, defensif, dan selalu meneriakkan kebebasan dan otonomi kapan ada kesempatan. Dan pada prakteknya, kaum muslim hanya menunggu dan memanfaatkan kondisi dan situasi politik Rusia untuk dapat melakukan mobilisasi politik.

Untuk memahami infrastruktur dan aktifitas perpolitikan masyarakat muslim Rusia masa kepresidenan Putin sekarang perlu dilihat sekilas apa yang telah dicapai umat Islam sebelumnya hingga dapat mewariskan tradisi politik, badan-badan keorganisasian maupun partai-partai politik yang ada sekarang.

Sampai masa keruntuhan Uni Soviet, kaum muslim sebenarnya pernah memiliki tiga kali kesempatan; pada 1905-1914; 1917; dan 1989-1991, untuk menyatukan kekuatan politik mereka dan untuk mendapatkan otonomi guna menentukan kehidupan politik dan keagamaan mereka bahkan dalam pembentukan dan jalan pemerintahan yang baru atau fase kepresidenan Rusia. Tetapi tiga kali pula kesempatan tersebut gagal, masa pertama oleh kembalinya otoriterisme Tsar, kedua oleh totalitarianisme komunis dan ketiga oleh otoriterisme presidensial. Sementara dari pihak kaum muslim sendiri, perpecahan akibat perbedaan dan keragaman visi dan etnis membuat organisasi politik muslim yang sudah bangkit dan mulai berjaya menjadi lumpuh dan tidak dapat merealisasikan tugasnya sebagai corong

kesatuan suara umat muslim. Sampai masa terakhir, partai politik muslim yang relatif cukup sukses, Refakh, pun akhirnya merubah diri menjadi partai Eurasian dan melepaskan karakter keIslamannya.

1. Momentum Mobilisasi Politik Umat Islam

Momentum tahun 1905-1914

Memasuki abad 20, sebagaimana rakyat Rusia lainnya dari berbagai etnis, aktifitas politik kaum muslim baru muncul secara terang-terangan. Diantara faktor-faktor utama yang memperkuat motivasi gerakan kaum muslim yaitu: 1. Kekalahan Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905; 2. Gerakan-gerakan kebangkitan di negeri-negeri muslim terutama revolusi konstitusional Iran tahun 1905-1906; dan yang paling penting adalah 3. peristiwa-peristiwa dalam negeri Rusia dalam hal ini rentetan demonstrasi kaum tani, mogok kerja kelompok buruh dan aksi-aksi protes dan permusuhan kelompok militer sepanjang tahun 1904-1907, yang berpuncak pada terjadinya apa yang dinamakan sebagai revolusi Rusia 1905. Secara keseluruhan semua peristiwa di atas memaksa Tsar Rusia yang terakhir, Nicholas II, melakukan liberalisasi politik. Umat muslim yang selalu bersiaga dalam tuntutan mereka langsung menangkap momentum ini sehingga menjadi kesempatan pertama dan fundamental bagi kesadaran dan gerakan politik umat Islam Rusia selanjutnya.

Tentu saja awalnya belum terorganisir dan masih berupa pembentukan forum-forum dan persatuan tokoh-tokoh aktifis muslim. Tetapi langkah pertama ini cukup signifikan karena dengannya umat muslim Rusia berhasil menyatukan platform perjuangan yang intinya menuntut hak kebebasan beragama, pembagian lahan tinggal, usaha yang adil serta larangan mengusir dan menjual tanpa izin tanah-tanah kaum muslim. Selanjutnya umat Islam Rusia berhasil menghimpun tokoh muslim seluruh Rusia di bawah satu payung organisasi umat Islam se-Rusia. Salah satu agendanya adalah mengadakan Kongres Umat Islam se-Rusia agar lebih vokal dan dapat mendesakkan implementasi tuntutan mereka. Hasilnya, kongres yang dihadiri 120 utusan ini menggugah Tsar Nicholas II mengeluarkan manifesto berdirinya badan legislatif Rusia (DUMA). Kongres ini juga merumuskan platform politik

umat Islam di atas ke dalam resolusi-resolusi yang terdiri: a. tuntutan persamaan antara masyarakat muslim dengan warga Rusia dalam bidang politik, agama dan kepemilikan; b. penyatuan visi dan misi seluruh warga muslim untuk pembaharuan sosial, ekonomi dan politik; 3. keadilan hukum; 4. kebebasan pers, berkumpul, beragama, dan lainnya; 5. mencegah pencabutan hak kepemilikan pribadi kaum muslim serta pemberian lahan garapan bagi petani-petani yang tidak memiliki tanah.[1]

Kongres Agustus 1905 di kota Nizhny, Novogrod ini menjadi kongres pertama dari 3 kongres yang berhasil dilaksanakan kemudian. Kongres kedua pada 6 bulan berikutnya (13-23 Januari 1906), berlangsung di St. Petersburgh dengan dihadiri 100 orang utusan, mencapai kemajuan yang berarti dengan diresmikannya pembentukan partai politik Islam bernama *Ittifaq al-Muslimin.* Selain capaian ini, kongres kali ini juga menghasilkan kesepakatan yang sangat penting yaitu untuk melakukan kerjasama dan koalisi dengan partai yang termasuk paling liberal di Rusia (Kadets) dalam rangka memenangkan kursi di parlemen (DUMA), badan yang baru pertama kali terbentuk sepanjang sejarah Rusia. Adapun kongres ketiga berhasil dilaksanakan sesuai jadwal pada 16-20 Agustus 1906, malah dengan izin resmi dan dukungan Kaisar pula. Dengan beraliansi kepada partai liberal, aktifis politik muslim memiliki posisi tawar dan dapat melakukan persuasi dan negosiasi terhadap Tsar dengan menjanjikan bahwa kongres akan mensosialisasikan penolakan terhadap gerakan separatis muslim dan gerakan anti Rusia serta jaminan dukungan kepada Tsar. Taktik para aktifis muslim ini sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan kecurigaan dan dapat leluasa berpartisipasi dalam kancah perpolitikan Rusia.[2]

Dukungan pemerintah tersebut otomatis membuat kongres ke 3 ini jauh lebih terorganisir dan bergengsi. Utusan mencapai 800 orang, jadwal acara menjadi lebih padat dan diskusi lebih mendalam dan sistematis melalui kelompok-kelompok kerja dan komisi-komisi khusus.

---

[1] Serge A. Zenkovsky, *Pan Turkism and Islam in Russia,* Russian Research Center studies, no. 36 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960), hal. 41

[2] Serge A. Zenkovsky, *Ibid,* hal. 42

Tetapi ketika membicarakan program, terjadi perdebatan panas mengingat partai Islam sekarang telah bergabung dengan partai liberal. Namun akhirnya kongres sepakat untuk berkomitmen memperjuangkan program khusus partai Ittifaq berkenaan dengan umat Islam, yang selain masalah persamaan hak kaum muslim juga tuntutan jabatan kekuasaan administrasi di tingkat lokal masyarakat muslim serta implementasi pembaharuan pendidikan Islam yang diarahkan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan otonomi dan hak eksis agama dan budaya umat Islam. Terkait dengan tujuan ini berkembang berbagai ide tekhnis yang benar-benar cemerlang dan matang, seperti reorganisasi menyeluruh badan-badan ulama, pemilihan mufti secara langsung oleh umat Islam, dan pendirian lembaga administrasi keagamaan umat Islam yang mengurus masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan umat Islam. Semua ini diarahkan untuk meminimalisasi campur tangan pemerintah terhadap pelaksanaan agama dan keorganisasian umat Islam. Semangat dan semarak kongres ini akhirnya terlihat dari ditetapkannya suatu dewan presidium kongres serta Komite Pusat partai Ittifaq.[3]

Tetapi sungguh di luar harapan, kesuksesan umat Islam secara organisasi dan politik ini tidak berujung kepada implementasi operasionalnya di lapangan, karena pemerintahan Rusia nyatanya tidak rela melepas jatidiri otoritariannya. Kemenangan umat Islam sebanyak 25 kursi di parlemen, sebagai hasil dari koalisinya dengan partai Kadets tersebut, tidak membuahkan apa-apa karena dengan segera Tsar membubarkan parlemen dan partai-partai liberal Rusia. Tsar Rusia tidak hendak mempertarungkan kekuasaannya dengan kelompok-kelompok liberal dan revolusioner yang populer dan mendapat dukungan massa melalui keberadaan mereka di parlemen. Setelah akhirnya negosiasi berjalan kembali Tsar menyetujui pembentukan DUMA kedua dan di sini partai Islam meraih peningkatan kursi. Tetapi DUMA kedua ini juga hanya berjalan selama 4 bulan (Maret-Juni 1907) sebab dibubarkan kembali oleh penguasa. Segera setelah pembubaran DUMA kedua ini, kelumpuhan politik Islam pun terjadi dan menjadi sempurna dengan melemahnya pula kesatuan dan persatuan umat Islam yang disebabkan

[3] Serge A. Zenkovsky, *Ibid,* hal. 49

perbedaan etnis dan ideologi. Pertama, partai *Ittifaq al-Muslimin* bubar dan tidak lama kemudian organisasi umat Islam se-Rusia yang demikian besar dan gagah lenyap hingga kongres ke 4 tidak pernah terlaksana kecuali setelah 7 tahun kemudian—tahun 1914 di St. Petersburgh—dan itupun hanya dihadiri 30 orang utusan. Dilaporkan bahwa kongres ini hanya sekedar tatap muka dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa.[4]

Momentum revolusi 1917

Harus diakui bahwa mobilisasi politik umat Islam paling marak dan intens terjadi pada tahun 1917 di mana sederetan dan beragam organisasi persatuan umat Islam bermunculan sebagai pra-kondisi bagi tujuan dihidupkannya kembali kongres umat Islam Rusia. Segera setelah revolusi pada Februari 1917, yang membawa kepada tumbangnya kekaisaran digantikan pemerintahan transisi di bawah Alexander Kerensky, tokoh-tokoh politik muslim Rusia kembali memanfaatkan hiruk-pikuk demokratisasi di Rusia dengan secepatnya mempersiapkan kongres kembali untuk membicarakan posisi umat Islam dalam pemerintahan yang baru nanti dan memikirkan bagaimana umat Islam dapat mempengaruhi pembentukan pemerintahan Rusia pasca kekaisaran. Ini jelas merupakan cita-cita yang berani dan percaya diri dari masyarakat muslim Rusia.

Keberanian dan kepercayaan diri tokoh-tokoh muslim ini timbul karena mereka membaca slogan-slogan yang dikampanyekan kaum Bolsheviks lebih sesuai dengan Islam dan memberikan harapan mereka dapat lebih diterima. Selain itu, goyahnya tembok otoriterisme Tsar benar-benar menciptakan *euphoria* kebebasan bagi semua kelompok minoritas, sedangkan umat Islam adalah merupakan kelompok minoritas terbesar. Dan di atas semua itu, kelompok muslim merasa ikut menjadi pemain utama dalam pembentukan pemerintahan yang baru karena mereka digandeng oleh kelompok Bolsheviks untuk melawan pemerintahan transisi. Pada masa-masa ini kaum Bolsheviks belum mendeklarasikan permusuhannya kepada agama. Kebijakan pemimpin Bolsheviks pertama, Lenin—diistilahkan dengan legalisasi Lenin—hanya menekankan bahwa agama adalah urusan pribadi dan

[4] Serge A. Zenkovsky, *ibid,* hal. 52

harus dipisahkan dari urusan negara. Pada masa-masa awal ini Lenin bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa kaum sosialis harus membantu pendeta-pendeta ortodox Rusia karena selama pemerintahan Tsar mereka suka bergabung dalam protes-protes menuntut kebebasan. Lenin sangat menyadari potensi psikologis dari bara dendam dan luapan nasionalisme masyarakat-masyarakat non-Rusia terhadap pemerintahan Tsar dan karenanya beliau tidak menekan mereka sekarang melainkan memanfaatkannya sebagai potensi yang efektif untuk membantu melawan pemerintahan transisi. Lenin lalu merangkul kelompok muslim, sebagai masyarakat minoritas terbesar dan paling vocal menyuarakan nasionalisme, dan menjanjikan mereka kebebasan politik dan beragama nantinya. Sejumlah keputusan hukum ataupun deklarasi kebebasan bahkan beliau keluarkan untuk meyakinkan kaum minoritas, dan beberapa di antaranya sengaja ditujukan khusus kepada kaum muslim.[5]

Dan Lenin memang memperoleh apa yang dia harapkan. Selama masa perang sipil (1918-1922) umat Islam dari semua klan di seluruh desa-desa pegunungan Kaukasus Utara turun ke medan perang bersama kelompok komunis di bawah bendera tentara merah. Jadi, sekitar 70 persen anggota tentara merah Turkistan adalah kaum muslim. Sementara dari wilayah Volga-Ural dan Asia Tengah setengahnya mendukung komunis. Sejumlah aktifis muslim banyak yang bergabung dan menjadi anggota komunis dan mendirikan organisasi-organisasi komunis muslim seperti halnya aktifis Tatar terkenal Mirsaid Sultan-Galiev, yang telah aktif melakukan oposisi terhadap Tsar sejak 1905.[6]

Sebelum memutuskan untuk turun ke medan perang berpihak kepada komunis, kaum muslim Rusia sebenarnya telah mengkalkulasi secara matang peta politik dan posisi tawar mereka serta mendesain hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek administratif dan organisasional suatu pemerintahan otonomi yang mereka cita-citakan. Sepanjang tahun 1917, menjelang dan segera setelah revolusi, intensitas kegiatan politik umat Islam mencapai tingkatnya yang tertinggi, yang

[5] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 31

[6] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 32

antara lain diisi dengan parade kongres yang memakan waktu belasan hari bahkan ada yang mencapai waktu satu bulan. Kongres pertama berlangsung pada tanggal 1-11 Mei 1917 di Moskow, dengan menakjubkan menarik 800 orang utusan dan 100 orang peninjau dari berbagai organisasi dan kelompok. Sekarang pembicaraan sudah lebih jelas dan spesifik tentang batas-batas dan persiapan otonomi politik umat muslim. Dan dapat diduga, suasana dipenuhi perdebatan hangat yang mengekspresikan keragaman visi dan persepsi umat tetapi sekaligus keluasan spektrum dan kemajuan pemikiran politik masyarakat muslim Rusia. Semua pemikiran dan aliran politik mengemuka mulai dari 'ide politik kesatuan' (sentralis, yang mengajukan masyarakat Islam Rusia bersatu) sampai 'politik otonomi' (pemisahan menurut kelompok etnis); dari tradisionalis sampai modernis; dari Pan Turkisme ataupun nasionalis etnosentris sampai pan Islamisme.

Tetapi terlepas dari perbedaan dan keragaman ini, akhirnya kongres mencapai kesepakatan dalam masalah-masalah penting yaitu : 1. Bahwa umat muslim Rusia menolak ide separatis dan mendukung negara Rusia bersatu, tetapi dengan sistem pemerintahan federal yang menjamin otonomi nasional, budaya dan politik bagi masyarakat muslim, 2. Menyepakati pembentukan dewan nasional masyarakat muslim seluruh Rusia (milli shura) dengan tugas mengkomandoi dan mengkordinir aksi-aksi masyarakat muslim di seluruh wilayah Rusia, dengan komite eksekutifnya berkedudukan di kota St. Petersburgh, 3. Terakhir, menyepakati tuntutan untuk membentuk tentara muslim yang berada pada resimen tersendiri dan bertugas khusus di area masyarakat muslim. [7]

Kongres ke 2 diadakan 2 bulan berikutnya pada 21 Juli sampai 2 Agustus 1917. Walaupun cuma dihadiri 188 orang bukan berarti masyarakat muslim mulai kekurangan semangat melainkan sebaliknya karena mereka berbagi sibuk pada 2 kongres lainnya yang bersamaan waktu yaitu kongres ke 10 ulama seluruh Rusia (18-26 Juli) dan kongres

[7] A.B. Yunusova dan M.G. Valeeva, "The All-Russia Congresses of Muslims," dalam *The Muslim Dictionary of the Bashkir State University* <http://www.bdxc.ru/encikl/s/siezd_mus.htm>

angkatan bersenjata muslim Rusia (17-26 Juli). Lalu pada tanggal 22 Juli peserta ketiga kongres ini bertemu untuk merumuskan satu kesepakatan dan menghasilkan "Deklarasi Otonomi Nasional Umat Islam Rusia". Untuk merealisasikannya, dibentuklah satu Kollegia yang terdiri dari 12 anggota, berpusat di Ufa Bashkortostan, yang mengawasi pelaksanaan otonomi dimaksud dan mengkordinir persiapan berdirinya majlis nasional yang pertama. Dalam pertemuan akbar tersebut pula langsung diresmikan berdirinya Majlis Nasional (Milliat Mejlesi), yang dimaksudkan sebagai badan legislatif tertinggi muslim Rusia dan menangani terealisasinya rencana pembagian wilayah teritori muslim ke dalam sejumlah kegubernuran, yang masing-masingnya memiliki dewan legislatif tingkat distrik.[8]

Seluruh kegiatan politik umat Islam Rusia masa ini berpuncak pada diadakannya pertemuan Majlis Nasional (Milliat Mejlesi), yang baru diresmikan, dari tanggal 20 November sampai 11 Januari 1918 di Ufa, beberapa minggu setelah Bolsheviks berhasil mengalahkan pemerintahan provisi. Mungkin melihat sekarang momen yang tepat untuk menuntut Bolsheviks menepati janjinya atau malah menganggap kini saatnya semua janji-janji tersebut otomatis efektif dan berlaku, pertemuan majlis nasional muslim Rusia ini mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap serta reklamasi-reklamasi layaknya berasal dari suatu pemerintahan otonomi. Dan kenyataannya, pertemuan kali ini bukanlah lagi suatu kongres dari organisasi dan kelompok-kelompok informal muslim melainkan sebentuk sidang dari badan legislatif tertinggi mayarakat Islam yang telah disahkan. Dalam sidang tersebut keluar pernyataan kritik dari peserta Turki Tatar, yang paling banyak hadir, terhadap pencaplokan kekuasaan Bolsheviks dari pemerintahan provisi serta pernyataan sikap menolak untuk berada di bawah ataupun bergabung dengan Dewan Komisariat Rusia Urusan Masyarakat Minoritas. Selain itu, sidang juga memproklamirkan berdirinya republik otonomi Volga-Ural dan mensahkan konstitusi wilayah otonomi Turki-Tatar Rusia dan Siberia. Selanjutnya yang lebih mendasar yang dihasilkan sidang tersebut adalah pembentukan Dewan Administrasi Nasional Umat Islam (Milli Idara) yang mengurusi administrasi kemasyarakatan

[8] A.B. Yunusova dan M.G. Valeeva, *Ibid.*

umat Islam di berbagai bidangnya; mulai pendidikan, keuangan, agama dan lainnya, dan pada seluruh jenjang wilayah dan departemen. Hal ini dimaksudkan agar semua institusi kemasyarakatan umat Islam lengkap dengan instansi-instansi operasionalnya dalam berbagai bidang dan jenjang diatur sendiri oleh umat Islam secara independen. Ringkasnya, kehidupan kemasyarakatan umat Islam dengan seluruh institusi dan struktur kekuasaannya telah diformat layaknya sebuah pemerintahan tersendiri. Kesan ini dinyatakan juga oleh penulis politik Soviet, Bennigsen dan Broxup, yang menyebutkan bahwa Majlis Nasional Muslim (Milliat Mejlesi) dapat dikarakterisasi sebagai embrio 'Pemerintahan Muslim Rusia'. [9]

Untuk waktu yang sangat singkat kaum muslim memang dapat melaksanakan rencana mereka; memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan atas teritorial mereka, didukung basis kekuatan politik partai komunis muslim dan tentara militer sendiri, sebelum kemudian Lenin disadarkan oleh pemberontakan-pemberontakan kemerdekaan oleh satu kelompok masyarakat muslim. Selain alasan kalkulasi politik untuk menghindarkan bertambahnya musuh serta memanfaatkan kekuatan kaum muslim guna mematahkan pemerintahan provisi, tindakan Lenin yang membiarkan umat Islam sebegitu jauh menyusun strategi dan membentuk sistem kekuasaan mereka tidak terlepas dari kekeliruan persepsi Lenin tentang masyarakat muslim dan kedudukan Islam sebagai identitas pribadi dan kelompok bagi umat Islam. Lenin menduga bahwa umat Islam adalah satu terlepas dari semua keterbedaan daerah, etnis dan bahasa. Atas dasar ini maka menurutnya akan terjadi kesatuan suara politik umat Islam di bawah naungan majlis nasional muslim Rusia, yaitu menentang disintegrasi dan memilih otonomi di bawah kesatuan kekuasaan Rusia. Lenin menyimpulkan bahwa agama, di satu sisi dan pada saat tertentu, sama dengan bentuk identitas nasionalisme lainnya yang dapat berperan sebagai kekuatan progresif sehingga dapat digunakan untuk mendukung kemenangan sosialisme. Dengan kebersatuan umat Islam seluruh Rusia maka akan terbentuk pula kekuatan progresif yang semakin besar dan solid. Lenin tidak menduga bahwa Islam sendiri dapat membentuk ideologi politik

[9] A.B. Yunusova dan M.G. Valeeva, *Ibid.*

berbeda di antara umat Islam. Oleh karena itu di awal-awal pemerintahannya, selain yang disebutkan di atas, Lenin juga, misalnya, menyetujui rencana pendirian republik otonomi Tatar-Bashkir dan republik otonomi wilayah pegunungan yang di dalamnya bergabung bangsa Cherkess, Kabardin, Karachays, Balkars, Ossetians, Abazins, Chechen, dan Ingushetia. Tidak ketinggalan republik otonomi Dagestan.[10]

Tetapi tidak lama kemudian Lenin menyaksikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada umat Islam tersebut justru menyuburkan keragaman interpretasi dan ekspresi politik Islam, dan di antaranya bersifat destruktif bagi kekuasaannya. Masyarakat muslim di Asia Tengah dan Kaukasus Selatan yang telah lelah di bawah penindasan dan sudah tidak percaya kepada bangsa Rusia termasuk janji-janji Lenin, diperkuat dengan perlakuan kontradiksi anak buah Lenin dan masyarakat komunis Rusia terhadap mereka di lapangan, mereka masing-masing melancarkan gerakan kemerdekaan melepaskan diri dari Rusia; Azerbaizan memproklamirkan diri tahun 1918, republik Kazakh, republik Turkistan dan republik rakyat Tatar-Krimean melakukannya pada 1917. Sebagai reaksi atas respon pemerintah Bolsheviks terhadap gerakan etnis-etnis Turki di Asia Tengah dan Kaukasus Selatan ini muncul gerakan bersama berbentuk pemberontakan besar-besaran—dikenal dengan pemberontakan Basmachi (gerakan nasional rakyat Turki Rusia)—yang melebar menjadi perang sipil dan memakan waktu cukup lama bagi Lenin untuk menundukkannya. Sebagai imbasnya, Lenin pun bereaksi terhadap masyarakat-masyarakat muslim yang tidak memberontak. Dia menghapus lembaga pemerintahan republik Volga-Ural dan menangkapi banyak pemimpin dan tokoh-tokoh dari etnis Tatar di wilayah ini. Semakin ketat, dewan administrasi umat Islam pun (milli idara) dihapus dan tahap demi tahap seiring menguatnya pemerintahan Bolsheviks, majlis nasional umat Islam dibubarkan. Kini Lenin menjalankan kebijakan pecah belah menyusul dikalahkannya gerakan-gerakan pemberontakan utama sebab pemberontakan-pemberontakan kecil, gerilya maupun musiman terus berlanjut bahkan sampai satu

[10] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 32-33

dekade kemudian. Setelah penghapusan semua kekuasaan otonomi, kebijakan pecah belah dilakukan Lenin melalui abrasi kultural, pencabutan akar budaya masyarakat muslim seperti melalui pengubahan bahasa dialek ke bahasa tulis, lalu adu domba dilanjutkan dengan tindakan gencar propaganda anti agama. Dan semua strategi ini terlaksana secara total dan sempurna pada masa pemerintahan Stalin.[11]

Momentum Era Pembaharuan Gorbachev

Ketika Gorbachev menaiki kursi kepresidenan Uni Sovyet tahun 1988, kebijakan anti Islam intensif telah berjalan selama 6 dekade dan telah memporakporandakan Islam secara intelektual dan institusional walaupun secara aqidah dan kultural Islam terus bertahan dan mengakar. Selama masa ini pula, aktifitas politik umat Islam lumpuh. Tetapi menjelang kelemahan politik dan ekonomi Uni Sovyet sejak tahun 1980-an politik umat Islam kembali menggeliat. Situasi perpolitikan Islam internasional saat itu mempengaruhi kebangkitan politik kaum muslim Rusia; pertama, peperangan Uni Sovyet-Afganistan telah membuat Uni Sovyet tersudut tidak saja di mata dunia Islam tetapi juga Amerika dan Barat; kedua, perjuangan tentara muslim mujahidin telah merebakkan semangat jihad dan keIslaman kepada kaum muslim Rusia. Mereka berhasil membangun kontak dengan masyarakat muslim Rusia di Asia Tengah dan menarik ratusan anak-anak muda muslim di negeri ini untuk belajar agama sekalian pelatihan militer di kamp-kamp yang didirikan di perbatasan Afganistan-Pakistan, yang dibangun atas dukungan dana dari Arab Saudi; ketiga, resistensi dan ketahanan perlawanan rakyat Afganistan diakhiri dengan penarikan mundur pasukan Soviet ditambah pula peristiwa revolusi Iran telah membentuk opini Islam sebagai agama yang benar dan menang, sebaliknya Uni Sovyet dan komunisme sebagai sesuatu yang salah dan kalah.[12]

Sementara di dalam negeri, setahun setelah mengikrarkan kebijakan pembaharuannya Gorbachev merubah strategi hubungannya dengan kaum muslim Rusia dengan dasar pertimbangan bahwa : -

[11] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 23-26
[12] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 36-37

program pembaharuan tersebut sepertinya tidak akan berhasil tanpa demokratisasi di semua bidang termasuk bidang agama; - beliau tidak bisa menafikan dukungan dari kelompok minoritas terbesar Rusia tersebut yang jumlahnya cukup signifikan; - perlakuan baik terhadap umat Islam akan mengembalikan harga diri Rusia dan dapat menarik simpati dunia Barat. Kebebasan dan keterbukaan politik ini akhirnya membuka pintu hubungan dan meningkatkan kontak antara muslim Sovyet dengan negara-negara muslim dunia yang selanjutnya memungkinkan mereka menerima aliran dana dan bantuan tenaga ulama misalnya dari Turki, Arab Saudi, Pakistan dan juga Iran.[13]

Keadaan ini membuat aktifitas politik masyarakat muslim Rusia kembali semarak. Pertama-tama yang menjamur adalah gerakan-gerakan nasionalis dan partai-partai etnis minoritas. Pada November 1988 salah satu gerakan nasionalis yang paling berpengaruh muncul di negeri Uzbekistan yaitu partai Birlik (gerakan persatuan). Kemudian beberapa bulan kemudian partai-partai nasionalis lainnya bermunculan di empat republik muslim Asia Tengah yaitu Agzybirlik di Turkmenistan, Rastokhis (kebangkitan) di Tajikistan, Askar (Gotong Royong) di Kyrgyzstan dan partai Alash di Kazakhstan, yang merupakan warisan dari partai Alash Orda yang sangat anti-Bolsheviks. Fenomena serupa di Kaukasus ditandai dengan berdirinya organisasi orang Circassian 'Adyge Khase', perserikatan orang-orang Kaukasus, Kongres nasional masyarakat Chechen, dan yang lainnya. Di Dagestan yang sebelumnya relatif tidak termakan isu-isu nasionalisme juga muncul gerakan etnis Lezgin diberi nama Sadval (Persatuan), gerakan nasionalis Kalmyk yaitu Tenglik (Persamaan) dan gerakan nasionalis kaum Avar.[14]

Dari gerakan-gerakan dan organisasi etnis ini berkembang kesadaran dan fanatisme budaya dan agama, yang ditandai dengan pendirian Badan Ulama dan Keagamaan Rusia. Badan ini nantinya yang menjadi wadah dan media aktifitas sosial dan politik informal umat Islam satu-satunya di era pemerintahan Rusia Federal. Badan keagamaan ini menjadi fasilitator bermunculannya sekolah-sekolah agama atau madrasah di seluruh wilayah Asia Tengah, Kaukasus dan daerah Volga.

[13] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 38
[14] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 259

Ini terjadi ketika sentimen kelslaman dan fanatisme etnis menyatu dan saling menguatkan. Tetapi kemudian terdapat kasus-kasus di mana kedua sentimen ini bersaing dan saling menundukkan seperti yang terjadi di Azerbaijan di mana Front Azerbaijan Populer (APF) mengkampanyekan ideologi sekuler dan anti agama mengikut ide Kemal Pasha di Turki. Selanjutnya terjadi penguatan sentimen etnis yang ditandai dengan pembentukan badan-badan ulama dan keagamaan di wilayah etnis masing-masing dan melakukan pemisahan diri dari badan pusat dan menolak campur tangan dan penunjukan kepengurusan bagi badan di daerah. Fenomena ini terlihat sejak pertengahan 1990 di mulai oleh ulama-ulama Kazakh yang membentuk badan ulama dan keagamaan masyarakat Kazakhstan dan memilih Ratbek Nisanbaev sebagai ketuanya sekaligus sebagai mufti Kazakh. Berikutnya, badan ulama wilayah Kaukasus Utara dan Dagestan dibubarkan dan sebagai gantinya diserahkan kepada masing-masing daerah untuk membentuk badan ulama dan keagamaan di daerahnya masing-masing.[15]

Geliat politik Islam pada masa ini juga sampai kepada terbentuknya partai-partai Islam. Pertama sekali terbentuk partai Islam Turkistan di lembah Fergana Asia Tengah tahun 1989. Mereka hunjuk gigi dengan membuka sebuah mesjid yang pengoperasiannya di luar kontrol dan aturan badan keagamaan pemerintah. Bersamaan dengan mesjid tersebut partai ini juga mendirikan madrasah yang memberikan ilmu-ilmu agama tradisional kepada masyarakat umum seluas-luasnya berbeda dengan sekolah agama yang dijalankan pihak pemerintahan yang diprogram untuk menghasilkan sarjana-sarjana agama pegawai pemerintah. Di Dagestan tahun 1990, Abdurrasyid Saridov beserta masyarakat pro-pembaharuan mendirikan Partai Demokrat Islam. Partai ini tidak terlalu radikal dan bertujuan mensintesis antara Islam dan demokrasi. Tujuan utama partai ini untuk menyingkirkan kekuasaan komunis di Dagestan dan mendirikan republik demokratis yang bersandarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam pertarungan politiknya partai ini mendukung Boris Yeltsin karena dianggap menampilkan sikap lebih liberal kepada republik muslim. Partai yang radikal di Dagestan adalah partai Islamiyya, yang menginginkan negara Islam Dagestan

[15] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 260

berdiri sendiri. Sementara partai yang tercatat paling sukses semasa pembaharuan Gorbachev adalah Partai Islam Baru (Islamic Rebirth Partai). Partai ini mengusung perjuangan kebebasan politik dan pembaharuan agama dengan cara damai. Pada awal 1991 partai ini mengklaim anggota sebesar 30.000 yang utamanya tersebar di 3 wilayah muslim; Asia Tengah, Kaukasus dan Daratan Eropa Rusia dan Siberia. Selanjutnya yang termasuk bertahan lama dan terkenal adalah partai Vatan atau Partai Demokrasi Masyarakat Tatar. Partai ini berdiri 3 bulan setelah partai RIP oleh pemimpin-pemimpin politik etnis Tatar yang berjuang untuk membentuk negara Tatar di teritori bersejarah bangsa Khan yaitu Astrakhan, Kazan dan Siberia. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Demokratis dan berjuang juga untuk kepentingan masyarakat muslim seluruh Rusia.[16]

Selain gerakan-gerakan berbasis etnis dan politik, aktifitas budaya dan intelektual juga cukup semarak. Sejumlah institusi dan organisasi sosial keagamaan yang berada di Moskow misalnya Pusat Budaya Islam Rusia yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Vahid Niazov, ada Institut Kebudayaan Islam Moskow, kemudian Pusat Budaya dan Agama 'Medina', dan Badan Gotong-Royong Umat Islam (Oruzba) yang bertempat di daerah Volvograd.[17] Ketika Uni Sovyet runtuh sebagian besar organisasi dan badan-badan ini ikut lenyap sementara sebagiannya lagi berubah bentuk dan mendirikan aktifitas yang baru.

Momentum Era Kepresidenan Rusia

Masa pembaharuan Gorbachev dapat dikatakan sebagai era pembibitan 'civil society' dan 'politik partai' di Rusia setelah dalam seluruh sejarahnya semua institusi profesional, budaya dan kemasyarakatan, yang seharusnya berperan sebagai infrastruktur 'civil society', berada di bawah kontrol pemerintah. Layaknya air bah yang tertahan, hanya setahun setelah Gorbachev mencanangkan keterbukaan langsung berdiri sebanyak 60.000 organisasi dari berbagai bidang dan 100 partai dari berbagai faksi dan aliran di seluruh Rusia. Tetapi memasuki era pemerintahan kepresidenan Rusia, yang menerapkan supremasi kekuasaan presiden dan politik personal, Rusia

[16] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 260-261
[17] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 40

segera kembali menjadi padang tandus bagi kehidupan politik partai dan oposisi.

Dimulai ketika kelompok pro-pembaharuan Yeltsin menguasai percaturan politik Rusia hingga beragam faksi yang ada ketika itu dijaring seperti faksi demokrasi pro-pembaharuan, faksi sosialis demokratis dan faksi komunis garis keras. Yang diloloskan untuk ikut dalam pemilihan umum hanya partai-partai dari faksi demokrasi murni. Setelah itu partai-partai dijerat lagi dengan peraturan-peraturan yang mendiskualifikasi hingga hanya 3 partai yang dapat lolos ke babak pemilihan yaitu partai sosial demokrat, partai demokrasi dan partai demokrasi Kristen Rusia. Tetapi partai-partai kecil lainnya yang tersingkir lalu dimanfaatkan untuk membentuk aliansi termasuk ke dalamnya partai Islam IRP. Partai aliansi ini mendapat nama Partai Demokrasi Rusia, yang akhirnya menjadi kendaraan vital bagi kemenangan Boris Yeltsin tahun 1991. Namun, bersamaan dengan kemenangan demokrasi 'non komunis' Yeltsin serta keruntuhan komunisme dan Uni Sovyet di pihak lain, eksistensi partai demokrasi pun kehilangan fondasi dan rasionalitasnya. Partai demokrasi ini, yang mendapatkan dukungannya melalui visi anti komunisme, bubar ketika tatanan politik bi-polar (persaingan komunis-kapitaslis) terhapus seiring lenyapnya komunisme Rusia di tengah reruntuhan rejim Uni Sovyet. Untuk selanjutnya, aktifitas politik rakyat Rusia berjalan dalam interupsi dan kekangan otoriterisme presiden dan hasilnya, popularitas partai bagi rakyat menurun tajam. Saat pemilihan kursi parlemen tahun 1993 hanya sekitar 22 % rakyat Rusia Federal yang berpartisipasi sebagai pemilih melalui keanggotaan partai sementara jumlah partai yang diloloskan ke babak pemilihan dan yang memenangkan kursi parlemen terus diperketat sepanjang even pemilu.[18]

Masa Yeltsin

Menjelang pemilu parlemen pertama pemerintahannya, Yeltsin mengeluarkan keputusan tentang sistem pemilihan anggota parlemen yang dilakukan melalui dua jalur; jalur partai dan jalur pemilihan kandidat, masing-masing memperebutkan separoh dari jumlah keseluruhan kursi (500 kursi). Pembagian kursi melalui pemilihan partai

[18] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 252-253

memakai sistem proporsional. Semua partai disyaratkan harus mengumpulkan suara 100.000 untuk dapat didaftar sebagai peserta pemilu. Dan jumlah ini terus diperbesar. Kemudian, partai yang memperoleh minimal 5 % dari total jumlah suara, angka ini juga terus membengkak, akan mendapatkan kursi yang akan dibagi secara proporsional menurut perolehan masing-masing partai. Dalam pelaksanaannya, aturan ini tentu saja menjadi bagian dari semua intervensi dan provokasi pemerintah untuk menghambat laju politik oposisi dan melanggengkan sentralisme kekuasaan presiden. Di lapangan, partai-partai, tidak terkecuali partai non Islam, dijegal dalam dan dengan berbagai cara seperti prosedur registrasi-heregistrasi, diskualifikasi dari babak pemilihan sampai eliminasi para kandidat.[19] Begitupun, di era demokrasi Rusia ini, umat Islam beserta sejumah rakyat Rusia lainnya tidak pernah jera untuk memanfaatkan setiap kali momen perjuangan politik pemilu tersebut, sampai ketika umat Islam akhirnya benar-benar dicekal untuk berjuang.

Ø *Pemilu Parlemen 1993* : Keruntuhan Uni Sovyet telah meloloskan cita-cita sejumlah republik muslim, yang menjadi basis-basis utama partai IRP, untuk merdeka dan berdiri sendiri. Konsekwensinya, partai IRP yang terbentuk pada akhir masa Sovyet terpecah dan menghilang mengikuti republik-republik yang memerdekakan diri tersebut, artinya perjuangan dan cita-cita persatuan dan kesatuan geo-politik umat Islam seluruh Rusia berhenti dan berakhir, dilanjutkan dengan perjuangan hak-hak sebagai rakyat yang beragama Islam dalam negara Rusia Federal. Beberapa bekas aktifis partai IRP yang berasal dari wilayah Dagestan, yang tidak ikut memerdekakan diri, lalu mendirikan partai turunan dan diberi nama AR-IRP (Islamic Rebirth Partai All-Rusia) yang tidak mencanangkan tujuan-tujuan separatis. Berbeda dengan pendahulunya, partai ini tidak populer dan cepat tenggelam. Setelah gagal memasuki babak penyisihan pra-pemilihan pada pemilu parlemen 1993 dan kemudian dinyatakan gagal me-*heregistrasi* partainya oleh kementerian kehakiman Rusia, partai inipun langsung menghilang. Seperti halnya partai ARIRP, pada pemilu pertama

[19] Undang-Undang Partai Politik Rusia 1993, dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 263

era kepresidenan ini partai-partai Islam hanya bersifat regional dan tidak ada yang bisa sampai menembus pertarungan tingkat nasional.[20]

Ø *Pemilu Parlemen 1995* : Menjelang pemilihan parlemen Desember 1995 baru tokoh-tokoh politik muslim bergerak lagi mendirikan partai dan menyusun rencana yang lebih matang untuk dapat bersaing secara nasional. Pada Juli 1995 terbentuk partai Komite Islam Rusia dengan ketuanya Geidar Jemal, yang menghadirkan kelompok berpandangan radikal yang menggabungkan visi fundamentalisme Islam dan eurasianis Rusia. Dalam menghadapi pemilu 1995 partai ini berkoalisi dengan partai blok kiri yang menentang pembaharuan Yeltsin, mereka ini terdiri dari pelaku bisnis, kaum industrialis dan buruh. Koalisi dengan blok kiri membuat partai Islam dimaksud menjadi agak populer dan mendapat perhatian.

Selain partai Komite Islam Rusia muncul pula partai Persatuan Muslim Rusia (UMR) dan partai Gerakan Sosial Muslim Rusia yang umum dikenal dengan nama partai Nur. Kedua partai ini menghadirkan imej Islam yang moderat dan menekankan aspek kehidupan kemasyarakatan secara umum seperti pembaharuan sistem ekonomi dan jaminan perlindungan sosial. Partai ini juga tidak bersifat ekslusif dan berusaha menarik dukungan dari kelompok etnis minoritas non-muslim. Karena sejalan kedua partai ini lalu membentuk koalisi. Program utama UMR selain mengupayakan peningkatan investasi federal di daerah-daerah muslim serta membuka hubungan yang lebih luas dengan negeri-negeri muslim juga mengetengahkan perlindungan hak-hak dan kebutuhan ekonomi semua minoritas Rusia. Demikian juga partai Nur, di samping mengkampanyekan perhatian dan penghargaan kepada tradisi umat Islam serta tuntutan penyelesaian konflik Chechnya secara damai juga memiliki platform membela hak-hak ekonomi, budaya dan politik semua kelompok minoritas Rusia.[21]

Akan tetapi usaha-usaha partai Islam ini dalam menggalang dukungan dari kelompok non-muslim maupun dengan bergabung dalam kelompok aliansi, yang sudah dilakukan sejak momentum 1904-1907,

---

[20] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 261, 252-253
[21] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 261-262

tetap tidak membuahkan hasil. Tidak satupun dari ketiga partai Islam yang mendapatkan kursi di parlemen. Partai UMR mendapat hasil paling buruk karena Komisi Pemilihan Pusat Rusia mendiskualifikasi partai ini dengan alasan ketidakberesan dokumen pendaftaran dan gugatannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Akhirnya hanya 2 partai Islam; Nur dan Komite Islam, yang maju ke babak pemilihan, yang satu bertarung secara independen dan satunya berkoalisi. Hasilnya, walaupun menjadi partai Islam satu-satunya yang independen, partai Nur hanya mendapat 1% suara sedangkan Komite Islam sedikit saja lebih baik yaitu 1.6 % sehingga tidak satupun dari 225 kursi parlemen yang dapat diduduki oleh partai Islam.[22]

Ø *Pemilihan Presiden 1996* : Belajar dari kegagalan mereka pada pemilihan parlemen 1995, para aktifis muslim tercambuk untuk menghasilkan partai politik yang lebih solid dan efektif untuk menghadapi pemilihan presiden yang tinggal sebentar lagi. Mereka merencanakan mendirikan blok sendiri dan mengajukan calon tersendiri. Rangkaian usaha tersebut diawali dengan mengadakan pertemuan kongres tokoh-tokoh muslim se-Rusia pada April 1996 di distrik Saratov. Kongres yang dihadiri utusan dari 39 distrik dan republik di Rusia tersebut sepakat membentuk organisasi dan memilih Mukaddas Bibarsov sebagai ketua. Organisasi ini mendapat restu dari ketua dewan mufti Rusia, Ravil Gainuddin, yang membuat organisasi ini menempati posisi sebagai pemersatu kaum muslim Rusia yang bersifat resmi dan menasional. Namun dalam perjalanannya ternyata terdapat banyak kendala untuk merangkul dan menyatukan visi dan suara kaum muslim Rusia yang sangat beragam tradisi dan orientasinya sehingga organisasi ini tidak cukup kuat pengaruhnya di luar daerah Volga-Ural.

Demikian juga dengan usaha partai Nur dan UMR. Pada Mei 1996 kedua partai ini kembali memperbaharui kesepakatan dan komitmen mereka untuk berkoalisi dan membentuk blok muslim Rusia. Mereka melakukan persuasi ke seluruh partai dan gerakan Islam untuk menyatukan suara dukungan ke satu calon tertentu. Akan tetapi usaha dua organisasi ini juga tidak sukses bahkan keduanya pun tidak lama

[22] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 263

kemudian berpisah dan saling bersaing. Sekali lagi terbukti persatuan dan kesatuan politik umat Islam Rusia adalah sebuah cita-cita yang sulit dan belum terarah.[23]

Ø *Pemilu Parlemen 1999* :[24] Setelah gagal menjalankan aksinya menjelang pemilihan presiden 1996, partai Nur dan UMR terus mengalami penurunan kinerja dan kredibilitas hingga akhirnya keduanya tereliminasi untuk mengikuti kompetisi pemilihan anggota parlemen Rusia yang ke-tiga tahun 1999. Partai UMR sebenarnya telah dapat bangkit dan mengukir prestasi setelah ketidaksuksesan mereka pada pemilihan presiden 1996 karena ketua partai ini berhasil menyusul menjadi anggota parlemen karena memenangkan pemilihan langsung calon utusan dari wilayah Dagestan. Tetapi situasi perpolitikan Rusia yang memang tidak bersahabat dan akomodatif dengan umat Islam menempatkan tokoh-tokoh dan aktifis muslim berada dalam lingkaran jebakan masalah serta dibuntuti teror insiden yang menjerumuskan karir mereka. Demikianlah, Nadirsyah Kachileiv bersama adiknya Magomed Kachileiv mengalami insiden pertengkaran dengan polisi yang merazia iring-iringan mobil mereka hingga berbuntut pada bentrokan yang menewaskan beberapa anggota polisi. Nadirsyah pun dicopot dari keanggotaan parlemen dan adiknya ditangkap. Setelahnya, pamor dan dukungan terhadap UMR menurun drastis dan mulai tidak terdengar lagi gaungnya sampai kemudian mereka dinyatakan tidak diterima mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen 1999. Adapun partai Nur didiskualifikasi dengan alasan menunggak biaya kampanye yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap peraturan pelaporan harta kekayaan salah seorang pimpinan partai tersebut.

Partai baru yang dapat meloloskan diri dalam seleksi komisi pemilihan umum pada periode ini adalah partai Kongres Islam Seluruh Rusia (All-Rusia Islamic Congress-ARIC) dan partai REFAKH (Sejahtera). Kedua partai ini cukup bergengsi dan disegani karena di dalamnya terdapat tokoh-tokoh eksponen dan pejabat pemerintahan. Ketua partai ARIC, Aslambek Aslakhanov, seorang dari etnis Chechen yang juga mengetuai Ikatan Masyarakat Chechen Rusia pernah menjadi anggota

[23] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 264
[24] Disarikan dari Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 265-268

parlemen dari utusan wilayah Chechnya. Selain itu Aslakhanov juga adalah pejabat pensiunan dari kantor kementrian dalam negeri dan merupakan direktur Asosiasi Agensi Penegakan Hukum Rusia. Dengan latar belakang karirnya tersebut maka Aslakhanov diyakini akan dapat tampil sebagai pemimpin nasional yang kuat dan sekaligus kredibel sebagai pemimpin umat Islam. Sementara pemimpin partai REFAKH adalah dari etnis Rusia asli yang menjadi muallaf, dengan nama Abdul Vahid Niazov (sebelumnya Vadim Medvedev), juga merupakan tokoh politik yang handal. Beliau adalah pendiri partai UMR dan kepala pusat Budaya Islam Rusia yang bermarkas di Moskow. Partai REFAKH juga memiliki anggota yang merupakan presiden kongres masyarakat Turki, Brontoy Bedurov. Kemudian Ali Polosin, seorang bekas pendeta Kristen Ortodoks yang bekerja sebagai editor harian muslim terkenal *Muslim Gazette.* Ada Ahmet Palankoyev, yaitu ketua Organisasi Pemuda Rusia. Seperti halnya partai-partai muslim sebelumnya, partai REFAKH juga berusaha merangkul dukungan kaum non muslim dengan mengembangkan program politik yang tidak ekslusif seperti—terutama yang menjadi prioritas—perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya, agama dan politik kaum minoritas, peningkatan belanja negara terhadap perbaikan mesjid dan rumah-rumah peribadatan kelompok minoritas lainnya, mempererat hubungan Rusia dengan dunia muslim dan penertiban tayangan program televisi yang melukai ajaran Islam. Partai REFAKH menjadi lebih vokal dan menasional karena berhasil menarik dukungan dari ketua dewan mufti Rusia, Ravil Gainutdin, yang bahkan bersedia mengetuai bidang pengembangan spiritual partai REFAKH. Selain kedua partai ini, partai Komite Islam yang telah berkecimpung sejak 1995 juga tampil kembali dan ikut bertarung.

Pada bulan Juli 1999, masih dalam rangka cita-cita membentuk suatu blok partai muslim—sekaligus persiapan menghadapi pemilihan presiden tahun 2000—partai ARIC dan REFAKH bersedia berkoalisi dan mereka juga mengundang partai Nur dan UMR untuk menggabungkan diri. Leonard Rafikov, pemimpin terpilih partai aliansi ini dikabarkan mengklaim perolehan 8 % suara. Namun lagi-lagi kaum muslim harus menyerah dan kecewa dengan keterbedaan mereka. Kali ini yang menjadi latarbelakang adalah; tindakan insidental sekelompok muslim yang melakukan konvoi ke Dagestan, terjadinya serentetan bom yang menjelajahi kota Moskow dan beberapa kota lainnya, serta keputusan

Putin untuk menarik pengakuan otonomi, dan karenanya, penyerangan babak dua atas Chechnya. Semua peristiwa ini menciptakan isu dan fenomena baru politik dalam negeri Rusia, yang terkristal pada naiknya popularitas Putin dan meluasnya dukungan atas keputusan Putin menundukkan Chechnya dengan cara apapun. Partai-partai Islam terpecah menyikapi fenomena baru ini. Partai REFAKH melihat blok pendukung Putin sebagai alternatif yang lebih pasti menghantarkan mereka ke gedung parlemen dan karenanya mereka bergabung ke partai aliansi 'Unity'. Partai Islam lainnya yang tidak setuju dengan kebijakan Putin sebagian menggabungkan diri ke partai aliansi 'Our Home is Russia' yang diketuai oleh Chernomyrdin, misalnya partai UMR dan juga pimpinan majlis aliansi partai Islam yang gagal berdiri tersebut yaitu Leonard Rafikov. Adapun partai Komite Islam yang prinsipnya didasarkan pada gabungan antara fundamentalisme dan eurasianism, mereka beraliansi ke partai Gerakan Pendukung Militer—pada waktu itu dipimpin oleh Viktor Ilyukhin dan Albert Makashov—yang merupakan pecahan dari partai komunis sayap nasionalis radikal.

Hasilnya, partai REFAKH memperlihatkan kejituan strategi pragmatisnya. Partai aliansi Unity memenangkan suara 23 %, hanya kalah 1 % dari pemenang suara terbanyak partai komunis pimpinan Zyuganov. Dari hasil ini REFAKH kebagian 5 kursi dari 66 kursi yang diberikan kepada Unity, satu diantaranya tentunya diduduki oleh ketua partai REFAKH, Niazov. Kemenangan ini membuat REFAKH sebagai partai Islam pertama dan satu-satunya yang dapat memasuki gedung parlemen, walaupun itu berkat aliansi dengan partai sekuler. Adapun partai lainnya tersingkir sangat jauh, aliansi 'Our Home is Russia' mendapat 1.2 % dan Gerakan Pendukung Militer (Support of the Army) bahkan lebih parah dengan 0.58 % suara. Jumlah 5 kursi umat Islam ini bertambah menjadi 12 karena 7 kursi dimenangkan melalui pemilihan tokoh utusan daerah republik.

Masa Putin

Pada masa Putin, demobilisasi dan pelumpuhan gerakan oposisi dilakukan semakin garang dan sistematis. Hanya dalam 2 tahun sejak ia menjabat Putin telah mengeluarkan 3 ketetapan yang secara langsung meminggirkan sistem multipartai dan mematikan partisipasi kelompok minoritas. Putin dapat mengatur dukungan parlemen karena—

sebagaimana hasil pemilu parlemen 1999—mayoritas anggota parlemen adalah dari blok pendukung Putin. Peraturan tersebut **pertama**, Undang-Undang tentang Partai Politik yang disahkan pada Juli 2001—draftnya diberikan ke parlemen sejak Januari; **kedua**, Undang-Undang tentang Pemilu yang disahkan pada Juni 2002; dan **ketiga**, Undang-Undang tentang Pemberantasan Gerakan Ekstrimis yang disahkan sebulan berikutnya atau Juli 2002.[25] Undang-Undang tentang partai politik mengatur bahwa untuk dapat diakui sebagai partai legal dan berhak mendaftar dalam pemilihan serta mengajukan kandidat anggota parlemen, disyaratkan memiliki anggota minimal 10.000 dan tersebar di sedikitnya 45 wilayah republik untuk partai tingkat nasional, dan minimal 100 orang yang tersebar di sedikitnya 45 daerah distrik di Rusia untuk partai tingkat regional. Kemudian lagi bahwa partai yang telah mendaftarkan diri harus mendaftar ulang setiap dua tahun berikutnya dan memberikan data terbarunya. Masih dalam Undang-Undang ini terdapat aturan larangan mendirikan partai yang berbasis dan bersifat etnis dan agama. Walaupun dalam judulnya peraturan ini ditujukan secara umum kepada semua partai dari semua kelompok, mudah dipahami kalau efeknya secara khusus menimpa partai dan kekuatan politik Islam. Bahkan terdapat banyak indikasi kalau Undang-Undang ini memang dirancang dan diarahkan secara khusus kepada partai umat Islam. Maka sesuai dengan rencana Putin, sejak pemilu parlemen yang pertama pada masa jabatannya, tahun 2003, sudah tidak terdapat lagi partai yang berlabelkan dan menyandang karakter Islam.

Ø *Mobilisasi politik umat Islam menjelang pemilu parlemen 2003*:[26] Kasus didepaknya ketua partai REFAKH, Niazov, dari partai aliansi Unity mengawali rangkaian antipati dan kecurigaan Putin terhadap tokoh-tokoh muslim dan kegiatan politik rakyatnya yang beragama Islam. Terlepas dari usaha dan dedikasi keras Niazov mengkampanyekan Putin kepada umat Islam sebelumnya, nyata kalau partai Unity dan Putin tidak menginginkan bermitra dan berbagi kekuasaan dengan kelompok Islam selepas tercapainya keperluan mereka. Niazov didepak dengan

[25] Central Election Commission of the Russian Federation <www.fci.ru/zakon/zakon95/95fz.htm>

[26] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 268-269

alasan melakukan kesalahan mengatasnamakan partai terkait pernyataan-pernyataannya tentang masalah Timur Tengah dan Dunia Islam lainnya, tentunya merupakan alasan yang dicari-cari. Yang sebenarnya Putin mengkhawatirkan kekuatan yang akan dibangun Niazov bersama Aslakhanov (ketua partai ARIC yang menyusul ke parlemen melalui kemenangan pemilihan langsung utusan wilayah Chechnya) dari dalam gedung parlemen. Sebagaimana dilaporkan, karena merasa tidak bisa vokal dan kurang diperhitungkan di parlemen mengingat jumlah kursi yang mereka duduki sangat sedikit, Niazov dan Aslakhanov kembali menandatangani kesepakatan untuk membentuk lagi blok muslim independen dengan partai baru bernama 'Blagodenstviye'. Mereka juga dapat menarik partai Nur dan UMR untuk bergabung. Melihat gelagat tersebut Putin pun melancarkan aksinya, pertama dengan mendepak Niazov dari partai Unity dan kemudian mengeluarkan undang-undang partai politik tersebut diatas yang melarang keberadaan partai berbasiskan etnis dan agama. Tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah peraturan larangan ini atau justru keterbedaan pendapat dan visi antara organisasi umat Islam itu sendiri yang menyebabkan gagalnya rencana koalisi umat Islam tersebut, yang jelas masing-masing partai Islam ini akhirnya berjalan terpisah dan membuang ide tentang persatuan politik dan blok pemilih umat Islam.

Pada Juni 2001, Niazov memutuskan mendirikan partai yang berorientasikan kepada perjuangan nasionalisme Rusia dengan dasar filosofi Eurasianis. Beliau menyatakan bahwa rakyat Rusia yang berasal dari beragam etnis, tradisi, agama dan ideologi harus bersatu dan akan dapat disatukan melalui tradisi Eurasian yang khas yaitu tradisi dan cara pandang kebangsaan yang muncul dari keberadaan Rusia sebagai suatu bangsa dengan letak geografis politik pada dua benua, yang membedakannya dari tradisi dan wawasan kebangsaan Barat. Sebagai pencetus ide maka Niazov bertindak sebagai komando barisan perjuangan ini dan memberi nama partainya dengan Partai Eurasian Rusia. Partai ini mungkin terealisasi sebab Niazov cukup sukses menarik anggota dari organisasi persatuan masyarakat Kristen dan Kongres Masyarakat Budha Rusia. Dengan *move* politiknya tersebut tentu saja Niazov berharap dapat mengelak dari 'jerat' yang ditebar pemerintah bahkan menargetkan banyak kursi dalam pemilihan parlemen Desember 2003. Terbukti, pada akhir tahun 2002 partai Eurasian Niazov

dapat dengan mulus melewati seleksi dan diterima sebagai partai peserta pemilihan dengan nama partai Persatuan Patriot Rusia. Niazov juga mengklaim memiliki anggota lebih dari 100.000 orang dan akan mendapat urutan ketiga. Slogan kampanye Niazov adalah menjadikan ideologi Eurasianisme sebagai basis terciptanya negara Rusia bersatu menggantikan negara Sovyet bersatu. Untuk lebih melebarkan sayap Niazov beraliansi lagi dengan sejumlah partai lainnya termasuk partai baru "Partai Perdamaian Rusia." Adapun partai ARIC bergabung ke blok Tanah Air Rusia, yang tidak lama kemudian meleburkan diri menjadi anggota partai UNITY pendukung Putin dan merubah nama menjadi Partai Persatuan Rusia (United Rusia). Akhirnya, selain partai NUR dan UMR yang tetap memegang teguh karakter keIslaman mereka tetapi kemudian tercekal untuk maju, partai-partai Islam ini memaksa diri menyembunyikan karakter keIslaman mereka dan melepaskan tema-tema Islam dalam programnya.

Partai Islam Yang Baru

Selain partai-partai di atas, sebuah partai Islam oleh etnis asli Rusia berani juga berdiri di tengah-tengah kontroversi status partai Islam dan dalam kesibukan partai-partai Islam yang ada untuk merubah haluan. Partai ini akan dikemukakan di sini untuk memperjelas bagaimana partai Islam telah cukup berjuang mempertahankan identitas dan akhirnya menyerah dengan otoritarianisme dan '*fobia*' keIslaman pemerintah mereka. Partai baru ini diproklamirkan pada Maret 2001 dengan nama Partai Islam Orang Rusia dan langsung mengumumkan tekadnya untuk ikut dalam pemilihan parlemen yang akan datang. Partai ini juga mengikuti strategi pendahulunya dalam program-program yang bersifat universal dan inklusif dalam rangka menarik dukungan nasional dan kelompok minoritas non-muslim, seperti memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, perlawanan terhadap diskriminasi agama dan ras, reformasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Rusia agar benar-benar menjadi negara federal yang multietnis. Untuk menjadi inklusif, sama dengan partai komite Islam dan partai Refakh sebelumnya, partai ini tidak memiliki pilihan kecuali mendengungkan filosofi Eurasianis dalam visi nasionalismenya. Filosofi ini mengarahkan keterpisahan serta pengurangan ketergantungan dan imitasi kepada Barat, kemudian memunculkan wawasan kebangsaan

Rusia yang tergali dari akar sejarah Rusia sebagai bangsa yang memiliki peradaban besar tersendiri. Filosofi ini menjadikan sejarah dan budaya Rusia sebagai sumber dan inspirasi terciptanya Peradaban Timur yang mengandung jiwa spiritualitas monoteisme. Ideologi ini, menurut mereka, memungkinkan partai Islam tetap dapat menjalankan dan mempertahankan program-program dan tradisi keIslamannya sekaligus dapat merangkul kelompok lain untuk bekerjasama.

Pada kongres ketiganya April 2002, Partai Islam Rusia mengumumkan kalau partainya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ketua partai Muhammad Rajabov menyatakan bahwa partainya telah memiliki cabang di 63 daerah republik dan distrik serta memiliki anggota sebanyak 1.5 juta orang. Dia bahkan dengan percaya diri meramalkan kalau partainya adalah partai Islam pertama yang akan lolos mendaftar dan ambil bagian dalam pertarungan parlemen 2003. Sampai detik itu partai ini tetap bertekad mempertahankan kata Islam pada nama partainya karena menurut Rajabov, mengikuti pendapat Geidar Jemal, bahwa Islam bukan hanya suatu sistem agama melainkan juga sebuah sistem budaya yang dapat menerima dan diterima oleh berbagai kelompok agama dan bangsa. Jadi dalam pendapatnya, aturan larangan mengenai partai yang berbasis agama tidak bisa langsung dikenakan kepada partai yang melekatkan kata Islam, dan karenanya, tidak akan mengenai partainya. Namun semua argumen dan keyakinan Rajabov tidak direspon. Enam bulan setelah kongres ketiganya tersebut, partai ini tidak bisa mengelak dari ultimatum yang ditetapkan pemerintah untuk menghilangkan kata Islam serta membuang identitas keIslaman partainya kalau mau terus berpartisipasi dalam perpolitikan Rusia. Maka pada bulan September 2002 partai ini melakukan pertemuan internal untuk membicarakan perubahan, yang kemudian menyepakati penggantiannya dengan nama baru dan program-program serta visi misi yang baru yaitu Partai Cinta Tanah Air Sejati.[27] Dengan demikian partai ini, bagaimanapun dan mau tidak mau, telah seutuhnya menjadi partai nasional dan sekuler.

[27] RIA News Agency, "Russian Islamic Organization Becomes Party," <http://www.monitor.bbc.co.uk>

Partai-partai Islam memang mungkin saja bermain dengan larangan yang satu ini (tentang partai berbasis agama dan etnis) seperti tidak mencantumkan kata Islam ataupun tidak terang-terangan mereferensi Islam dalam anggaran dasar dan kegiatan organisasi mereka. Akan tetapi syarat bahwa partai harus memiliki anggota 10.000 di 45 wilayah republik dan distrik benar-benar *irrasional* bagi partai yang basis dukungannya adalah kelompok minoritas apalagi minoritas muslim yang secara geografis terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu saja. Dapat dilihat bahwa aturan ini memaksa partai regional untuk menjadi partai nasional, dan karena banyak yang tidak mampu maka otomatis tercapai tujuan berikutnya dari peraturan ini yaitu penciutan jumlah partai dan organisasi. Seperti diinginkan, aturan ini langsung mematikan sejumlah partai nasional dan membubarkan sedikitnya 20 partai regional di dua republik muslim; Bashkortostan dan Tatarstan. Jadi, partai masyarakat Tatarstan saja, yang merupakan etnis muslim paling tersebar, juga memiliki kesulitan untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

Setelah mematikan keberadaan partai-partai nasional dan regional muslim, sebagai mengantisipasi efeknya, Putin pun mengeluarkan peraturan lainnya yaitu undang-undang tentang pemilihan umum yang baru. Salah satu aturannya adalah bahwa anggota parlemen tingkat regional akan direkrut melalui dua jalur, yang sebelumnya hanya melalui pemilihan kandidat langsung kini dibagi dengan jalur partai, sama seperti perekrutan anggota parlemen nasional. Yang terjadi, partai-partai nasional kini menguasai percaturan politik regional. Karena partai-partai nasional ataupun partai-partai berkaliber nasional yang dapat memenuhi persyaratan memiliki cabang di 45 wilayah distrik, maka partai-partai nasional ini pula, tentunya dari beragam faksi dan agama, yang akan ikut dalam persaingan pemilihan dan yang akan memenangkan kursi parlemen regional dan konsekwensinya, yang akan mempengaruhi dan menentukan kebijakan pemerintahan di wilayah muslim.

Semua keterbatasan yang ditimpakan kepada partai muslim di atas dilengkapi lagi dengan undang-undang pemberantasan ekstrimis. Walaupun undang-undang ini asalnya untuk mengantisipasi tindakan kelompok rasis Neo-Nazi, tetapi dengan mencuatnya perhatian Putin

dan masyarakat Rusia terhadap pemberontakan warga Chechen, yang akhirnya menempatkan Islam di tangga pertama ancaman keamanan Rusia, maka partai-partai politik dan organisasi umat Islam kini menjadi target dari undang-undang tersebut, dan karenanya wajar kalau umat Islam merasa paling terganggu dan paling banyak dirugikan oleh undang-undang tersebut.[28]

Kekuatan Politik Islam di Republik Otonomi Muslim

Hiruk pikuk demokratisasi dan kebebasan yang mengiringi keruntuhan US sampai masuknya fase kepresidenan Rusia membuat desentralisasi menjadi efektif dan daerah regional mendapatkan kesempatan membangun kekuasaan yang kuat dan mandiri. Hal ini tidak terkecuali di daerah-daerah muslim. Dominasi relatif penuh yang didapatkan daerah-daerah regional ini akhirnya juga memunculkan demokrasi terpimpin dan sistem politik personal, yang begitu kuatnya hingga terkadang sampai bisa mengacuhkan kekuasaan pemerintahan federal. Para penguasa membangun jaring kekuasaannya di semua level dan pos politik. Pejabat-pejabat eksekutif adalah juga pengusaha-pengusaha yang memegang roda perekonomian, dan pebisnis-pebisnis yang memimpin perusahaan-perusahaan diangkat menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, yang menempatkan mereka secara struktural di bawah kekuasaan pejabat politik, hingga sistem pemerintahan mewajah kepada oligarki kegubernuran. Penguatan kekuasaan juga dilakukan dengan mengacuhkan prinsip pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dilaporkan bahwa antara tahun 1995-1996 sebanyak 332 pejabat kepala daerah dan walikota di republik muslim memenangkan kursi parlemen regional. Di Bashkortostan, ¾ dari 154 anggota perwakilan rakyatnya juga memegang pos-pos pemerintahan sehingga mereka juga adalah bawahan dari presiden republik.[29]

Penguasa-penguasa di republik muslim menduduki jabatan atau meng-*coopt* kekuasaan dalam waktu yang cukup lama. Di Bashkortostan,

---

[28] Central Election Commission of the Russian Federation <www.fci.ru/zakon/zakon95/95fz.htm>

[29] Cameron Ross, "Political Parties and Regional Democracy in Russia," *Fiftieth Annual Conference of the Political Studies Association,* 10-13 April 2000 <http://www.psa.ac.uk/cps/2000/Ross%20Cameron.pdf>

Murtaza Rakhimov memegang kekuasaan di republik tersebut sejak awal 1990an. Setelah memenangkan kursi presiden republik Bashkortostan beliau lalu mengeluarkan konstitusi baru yang memberikannya kekuasaan yang sangat besar termasuk kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah dan kota di republik tersebut. Pada pemilihan umum berikutnya tahun 1998, Rakhimov melalui petugas-petugasnya di komisi pemilihan umum mendiskualifikasi kandidat lainnya yaitu 2 anggota dari DUMA (dewan perwakilan rakyat pusat) dan seorang bekas perdana menterinya sendiri. Dan ketika pengadilan tinggi Rusia menyatakan keputusan diskualifikasi tersebut tidak sah, pemerintah republik Bashkortostan menjawab bahwa peradilan Rusia tidak memiliki kekuasaan peradilan atas republik itu.

Begitu juga di republik Dagestan, Magomedali Magomedov menjadi penguasa yang menyatu dengan tanah Dagestan. Setelah menjabat sebagai wakil Dagestan pada badan perwakilan tinggi Sovyet sejak 1990, pada 1994 beliau terpilih sebagai ketua badan eksekutif Dagestan yang baru dibentuk atau disebut Dewan Pemerintah. Menduduki jabatan tersebut selama 8 tahun, beliau selanjutnya terpilih sebagai presiden republik Dagestan selama 3 periode berturut-turut, terakhir pada Juni 2002. Magomedov memang melakukan manuver politik untuk dapat terus bertahan. Tahun 1994 misalnya, jajaran pemerintahannya menukangi Partai Demokrasi Islam Dagestan yang melakukan oposisi dengan merekayasa penggantian ketuanya kepada Surakat Asiyatilov,—menjabat sebagai kepala komite urusan masyarakat dan agama pada pemerintahan Magomedov. Asiyatilov lalu merubah nama dan haluan partai tersebut menjadi Partai Islam Dagestan tanpa kata 'Demokrasi'. Dua tahun kemudian Magomedov berhasil mempengaruhi parlemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 2 menjadi 4 tahun, lalu pada tahun 1998 mendesak parlemen melakukan amandemen konstitusi guna mencabut larangan bagi presiden menjabat selama dua periode berturut-turut. Lagi pada tahun 2001, Magomedov berhasil mendapatkan persetujuan mutlak dari parlemen untuk mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Pemerintah ketiga kalinya. Di republik-republik Kaukasus Utara juga terjadi monopoli kekuasaan politik oleh presiden. Di Kabardino-Balkaria, Valerii Kokov telah menjabat sebagai presiden sejak tahun 1992. Beliau terpilih kembali dengan 99 % suara pada pemilu 1997 dan 87 % pada pemilu

2002. Di Karachevo-Cherkessia, Vladimir Khubiev mengepalai pemerintahan daerah ini selama 20 tahun dari 1979 sampai 1999. Sama halnya, Aslan Zharimov telah menjabat sebagai presiden Adygea selama 10 tahun dan kemudian dikalahkan dalam pemilihan tahun 2002 oleh seorang milyuner pengusaha tambang emas, Khazret Sovmen.[30]

Pengecualian kondisi di atas adalah yang terjadi di wilayah Tatarstan di mana pemimpin republik Tatarstan tidak melaksanakan aspirasi rakyatnya dan memihak ke Moskow. Sebagai etnis muslim terbesar masyarakat Tatarstan awalnya memiliki kekuatan bargaining yang cukup besar berhadapan dengan Moskow. Sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an yaitu sebelum runtuhnya US, di Tatarstan muncul organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan yang cukup solid menentang Moskow dan menuntut kebebasan. Seorang pejabat politik yang menjadi ketua dewan kementrian di Tatarstan saat itu, Shamiev, melihat kondisi tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat kedudukan politiknya. Dia yang berafiliasi ke partai komunis—merupakan sekretaris utama partai komunis Tatarstan Obkom—lalu melakukan persuasi ke kelompok nasionalis. Partai-partai dan organisasi nasionalis masyarakat Tatarstan dibebaskan melakukan aktifitas dan diberikan akses ke media-media untuk mendapatkan perhatian secara nasional atas tuntutan kebebasan yang digaungkan. Shaimiev juga mengutus wakilnya ketika rakyat Tatarstan kemudian berhasil menyatukan diri dalam satu forum Pusat Masyarakat Tatar Seluruh Rusia (All Tatar Public Center-ATPC). Selanjutnya pada September 1989, yang menjadi puncak upayanya, Shamiev mendudukkan Rafael Khakimov, seorang tokoh paling penting ATPC, sebagai ketua departemen ideologi di organisasi komunis Obkom. Maka hari-hari selanjutnya adalah hubungan mesra antara Shamiev dan massa nasionalis Tatarstan dan artinya, Sahmiev menikmati dukungan dari semua unsur masyarakat Tatarstan; organisasi ATPC, partai Ittifaq, gerakan pemuda Tatarstan Azatlik, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Dengan kekuatan yang sudah terkonsolidasi tersebut, Shamiev pun dengan mudah menggolkan

[30] Cameron Ross, "Political Parties and Regional Democracy in Russia," *Fiftieth Annual Conference of the Political Studies Association,* 10-13 April 2000 <http://www.psa.ac.uk/cps/2000/Ross%20Cameron.pdf>

tuntutan tersebut di parlemen. Pada Agustus 1990, disertai dengan mobilisasi 50.000 massa di luar gedung parlemen, sidang tentang penentuan status Tatarstan menyetujui sebagian besar poin-poin usulan otonomi penuh Tatarstan di antaranya dalam hal pengelolaan sepenuhnya sumber-sumber alam dan industri Tatarstan serta izin membuat dan memiliki konstitusi yang baru. Begitu juga poin yang paling diincar Shamiev yaitu untuk melakukan referendum pemilihan presiden republik Tatarstan yang baru. Maka pada akhir 1990, Shamiev pun terpilih secara bulat sebagai presiden pertama Tatarstan.

Tetapi Shamiev memang benar-benar seorang politikus, yang seluruh tindakannya adalah untuk kepentingan kekuasaannya. Di awal jabatannya, Shamiev memilih untuk tidak berada di bawah kontrol Moskow. Permusuhannya dengan pihak Kremlin semakin memanas karena dia secara terbuka di media massa mendukung *coup d'etat* terhadap Gorbachev, yang membuat Moskow berusaha menurunkannya dari kekuasaan. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil berkat dukungan solid kelompok nasionalis Tatarstan. Ketika utusan Moskow, Sergei Shakhrai, datang ke Tatarstan untuk menurunkan Shamiev, dia disambut massa demonstran yang meneriakkan penghinaan dan makian kepadanya dan kepada bangsa Rusia sebagai imperialis. Dan ketika dia menemui anggota parlemen, parlemen Tatarstan menolak membicarakan penurunan Shamiev dan membantah bahwa Shamiev terlibat dalam gerakan sabotase terhadap Gorbachev. Tetapi selanjutnya Shamiev merasakan bahwa rakyat kelompok nasionalis Tatarstan sangat menentukan perpolitikan Tatarstan dan ini tentunya akan membahayakan kedudukannya. Maka walaupun telah diberikan kekuasaan dan dilindungi oleh kelompok nasionalis sebelumnya, ketika merasa kekuatannya telah kokoh Shaimiev pun mulai meminggirkan partai Ittifaq dan organisasi-organisasi nasionalis lainnya, sebelum mereka dapat menikmati hasil perjuangan mereka dan juga sebelum tujuan puncak mereka tercapai yaitu kemerdekaan. Sewaktu rakyat Tatarstan melakukan aksi protes terhadap Moskow karena menolak pernyataan kemerdekaan Tatarstan oleh rakyat dari kelompok nasionalis tersebut, Shamiev malah ikut-ikutan mengecam tindakan demonstrasi itu dan tidak mendukung keinginan mayoritas rakyat Tatarstan untuk merdeka. Beberapa bulan kemudian atau Oktober 1991, Shamiev lalu merekayasa sebuah referendum untuk menentukan secara

resmi status Tatarstan, yang hasilnya tentu saja tidak sesuai dengan tuntutan mayoritas rakyat Tatarstan dimaksud. Sejak itu, rakyat Tatarstan terpisah dan terus berusaha menggoyang kekuasaan Shamiev, sementara itu Shamiev semakin didekati pula oleh Moskow.

Tindak lanjut perlawanan rakyat Tatarstan adalah dengan membentuk majlis Milli yang difungsikan sebagai parlemen tandingan. Majlis ini diresmikan dalam kongres nasional masyarakat Tatar awal tahun 1992. Shamiev pun tidak tinggal diam dan lalu mempengaruhi parlemen untuk mengeluarkan resolusi menyatakan kongres tidak sah dan majlis Milli tidak diizinkan beraktifitas. Bahkan Shaimiev mengorganisir pula kongres masyarakat Tatarstan sedunia yang dihadiri oleh masyarakat etnis Tatar dari berbagai negara sebagai tandingan. Kongres yang diadakan pada Juni 1992 ini mendeklarasikan persetujuan mereka atas tindakan Shaimiev bernegosiasi dengan Moskow dalam menentukan status Tatarstan serta menolak cara-cara dan keinginan kelompok nasionalis untuk memerdekakan Tatarstan. Tahun-tahun selanjutnya adalah fase permusuhan dan oposisi antara rakyat Tatarstan dan Shaimiev, pemimpin yang sebelumnya mereka naikkan sendiri.

Pemerintahan Shaimiev memulai dengan membatasi dan selanjutnya mematikan aktifitas partai Ittifaq. Media dan publikasi partai ini 'Altyn Urda' dicekal, orang-orang partai Ittifaq yang bekerja di pemerintahan dicopoti, dan puncaknya tahun 1995 pemimpin utama partai Ittifaq Fauzia Bairamova tidak mendapat kursi lagi di parlemen. Sejak itu, organisasi dan partai masyarakat Tatarstan nasionalis (ATPC dan Ittifaq) kehilangan keanggotaannya secara dramatis dan tidak memiliki kekuatan politik yang berarti lagi. Keadaan ini mendorong partai Ittifaq dan kelompok nasionalis yang masih bersemangat untuk menjalankan cara lain dalam menyalurkan aspirasi politik dan mempertahankan eksistensi mereka, yaitu beralih menjadi partai Islam radikal dan bahkan berkoalisi dengan kelompok-kelompok teroris. Pada Juni 1998, partai Ittifaq ikut dalam kongres pembentukan gerakan muslim Tatarstan, yang merupakan aliansi antara kelompok nasionalis dan Badan Spiritual Muslim Tatarstan. Kongres juga memilih Gabdulla Galiluddin, mufti Tatarstan periode sebelumnya, sebagai ketua Gerakan dan menetapkan misi gerakan untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok nasionalis Tatar dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat muslim di republik. Kelompok nasionalis juga terpaksa

mengikuti Undang-Undang ke-Bangsa-an Tatar yang diadopsi Gerakan, yaitu bahwa ke-Bangsa-an Tatar didirikan di atas tiga pilar; identitas Islam, etnis Tatar dan Turkisme.[31] Tetapi gerakan ini kemudian terpecah pada momen pemilihan parlemen di mana kelompok muslimnya bergabung dengan partai komunis Tatarstan—seperti diketahui berafiliasi ke Shaimiev—sedangkan yang lainnya beraliansi membentuk partai Omet (Harapan) dan kembali memilih Galiluddin sebagai ketuanya.

Akan tetapi, semua upaya oposisi yang dilakukan kelompok nasionalis tidak dapat berbuat banyak untuk menjatuhkan Shaimiev karena dia telah begitu kuat mengokohkan kedudukannya. Shaimiev tetap terpilih lagi menjadi presiden dalam pemilihan 1996, setelah dia berhasil mempengaruhi parlemen untuk mengandemen undang-undang yang melarang presiden menjabat dua periode berturut-turut. Bahkan pada 2001, Shaimiev kembali memenangkan pemilu secara mutlak dengan mengantongi 80 % suara. Dan pada pemilihan parlemen yang diadakan setelahnya, dua pertiga atau 78 dari 130 orang anggota parlemen yang terpilih adalah para pejabat pemerintahan, yang artinya merupakan bawahan langsung Shaimiev secara struktural dan psikologis, termasuk perdana menteri Tatarstan, kepala administrasi kepresidenan dan lebih dari 50 kepala distrik dan kepala administrasi daerah di seluruh republik Tatarstan.[32]

Terakhir,—dengan pengecualian wilayah Tatarstan ini—sentralisme yang dibangun di wilayah-wilayah muslim tersebut sebelumnya, bagaimanapun, tentu akan berdampak berbeda kepada mereka dengan sentralisme yang diciptakan pihak Kremlin karena pihak penguasa di daerah regional adalah bagian atau berasal dari kalangan internal rakyat muslimnya. Para pemegang kekuasaan di republik-republik muslim tersebut semuanya adalah tokoh-tokoh masyarakat daerah itu yang telah memimpin sejak sebelum runtuhnya Uni Sovyet dan menyatu dengan masyarakat muslim dalam perjuangan melawan Moskow. Karena itu, penguasa-penguasa ini dapat mengendalikan dan

[31] http://www.tatar.ru/musulmat.html

[32] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 273-275

meredam niat dan potensi oposisi rakyatnya. Dan kini kondisi tersebut akan diubah oleh Putin dengan peraturan undang-undangnya, di mana tokoh luar akan ikut memasuki dan mengatur kekuasaan wilayah regional.

Struktur Sosial-Keagamaan Masyarakat Muslim Rusia Federal.

Selain partai-partai Islam yang diterangkan di atas, gambaran aktifitas politik dan tuntutan otonomi politik masyarakat muslim Rusia juga termanifestasi dalam organisasi sosial keagamaan yang terbentuk. Dikondisikan oleh karakter Islam yang tidak memisahkan antara amal duniawi dan ukhrawi, antara politik dan agama, maka umat Islam Rusia, sebagaimana masyarakat muslim di belahan dunia lainnya, tidak akan bisa dicegah dan dicekal untuk mengarahkan Islam ke ranah politik ataupun sebaliknya memanfaatkan politik untuk misi Islam. Biasanya partai-partai adalah merupakan estafet selanjutnya dari sistem dan struktur sosial-keagamaan umat Islam yang telah terbentuk dan tertata. Karenanya, untuk mengetahui selengkapnya ekspresi politik umat Islam Rusia, perlu dikemukakan sistem dan struktur sosial-keagamaan umat Islam Rusia yang terbangun dan berjalan sampai sekarang, selain tentunya untuk mengenal tokoh-tokoh yang namanya sering hilir mudik di percaturan politik keagamaan Rusia.

2. Badan Keagamaan dan Spiritual Pusat Rusia: CSBM dan RCM

Pada masa Sovyet, kehidupan sosial keagamaan di wilayah-wilayah republik muslim diawasi dan dikelola oleh badan yang dibentuk pemerintah yang terdapat di dua tempat. Pertama, Badan Spiritual Muslim Sovyet bagian Eropa dan Siberia yang berpusat di Ufa, Bashkortostan. Kedua, Badan Spiritual Muslim Sovyet wilayah Kaukasus Utara yang bermarkas di Makhachkala, Dagestan. Sebenarnya wilayah bagian Asia Tengah dan Kazakhstan tidak termasuk dalam pengurusan dua Badan ini dan memiliki badan spiritual tersendiri tetapi pihak Kremlin tidak terlalu menaruh perhatian atau tepatnya tidak kuat pengaruhnya di wilayah ini. Kedua badan spiritual muslim di atas berada di bawah struktur dan pengawasan Dewan Urusan Keagamaan, yang dibentuk Stalin pada tahun 1944 dan terus difungsikan sampai runtuhnya pemerintahan Uni Sovyet.

Setelah periode Uni Sovyet, pengawasan hirarkis dan sentralisme ini berubah drastis di mana merebaknya fenomena desentralisasi dan nasionalisme telah memunculkan fragmentasi institusi dan administrasi keagamaan masyarakat Rusia. Pada tahun 1999 saja, setahun setelah pernyataan resmi prestroika dan glasnost di Rusia, telah terdapat 40 lebih badan spiritual muslim dan pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 60.[33] Setelah masa kepresidenan atau di negara Rusia Federal, independensi terus berlangsung dan masing-masing daerah membentuk badan keagamaan sendiri. Tetapi pada level nasional dan dalam hubungan dengan pihak federal, semua organisasi ini berinduk kepada salah satu organisasi pusat apakah **CSBM** yaitu Badan Spiritual Muslim Pusat Rusia dan Negara-Negara Eks Sovyet atau **RCM** yaitu Dewan Mufti Rusia. Dengan kata lain semua organisasi Islam mayoritas yang ada di Rusia adalah berada di bawah pimpinan, pengelolaan maupun kemitraan salah satu dua organisasi pusat tersebut. Tetapi seiring waktu mulai bermunculan juga organisasi-organisasi dan jamaah-jamaah independen yang tidak mengikatkan diri atau bergabung ke CSBM ataupun RCM. Sebagian besar organisasi independen ini adalah organisasi-organisasi muslim radikal.

1. CSBM [34]

- *Pendirian dan Perkembangan*

Dasar hukum keberadaan CSBM Rusia Federal adalah kelanjutan dari Badan Spiritual Muslim Sovyet bagian Eropa dan Siberia yang ada pada masa Sovyet. Pada tahun 1988, badan ini membawahi 142 kelompok masyarakat muslim kemudian pada era demokratisasi jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Mengambil kesempatan fenomena keterbukaan yang melanda Sovyet, badan ini melakukan konsolidasi organisasi melalui kongresnya yang kelima pada 6-8 Juni 1990. Dalam

[33] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 46-47

[34] R.A Utyabai Karimi dan D.D azamatov, "The Central Spiritual Board of Muslim of Russia and The Europian Countries of CIS," dalam *The Muslim Dictionary of the Bashkir State University* <http://www.bdxc.ru/encikl/s/siezd_mus.htm>

kongres ini—dihadiri 700 peserta dari seluruh Rusia, tamu dari 60 negara Islam dan utusan organisasi Islam internasional—ditetapkan anggaran dasar baru, pemilihan ketua dan penganugrahan gelar Syaikh Islam kepada ketua terpilih kembali Talghat Tazhuddin. Tetapi hanya dalam hitungan bulan terjadi perpecahan dalam badan ini. Puncaknya adalah pemisahan diri kaum muslim Bashkortostan dan Tatarstan serta daerah lainnya yang membentuk badan spiritual sendiri. Mengantisipasi perpecahan lebih lanjut maka pada November 1992 diadakan kongres luar biasa (ke enam) dan menghasilkan kesepakatan dan tekad peserta untuk mempertahankan kelanjutan badan bersejarah ini sebagai badan induk semua organisasi keagamaan masyarakat muslim Rusia. Kemudian dilakukan penyesuaian nama dengan status Rusia yang baru menjadi Badan Spiritual Muslim Rusia dan Negara-Negara Eks Sovyet di Belahan Eropa (CSBM). Selanjutnya badan ini juga mensahkan gelar keagamaan baru yaitu Mufti Agung yang diterima, lagi-lagi, oleh Talghat Tazhuddin. Pada 8 April 1994 badan ini resmi didaftarkan ke kementrian hukum Rusia.

Kembali badan ini mengalami priksi dan perselisihan di antara anggotanya yang memperlihatkan kentalnya unsur politik di dalamnya. Diawali dengan mencuatnya suara ketidakpuasan atas kepemimpinan Tazhuddin maka diadakan kongres pada tanggal 1 November 1994 di Ufa yang memutuskan mencabut gelar mufti dari dirinya dan penggantian jabatan ketua kepada Z. Khairullin yang sekaligus ditempatkan sebagai mufti agung yang baru. Tindakan ini berkonsekwensi kepada perumusan ulang anggaran dasar badan untuk mencabut poin yang menyebutkan bahwa gelar mufti agung adalah untuk seumur hidup. Pendukung Tazhuddin tentu tidak menerima dan lalu menggelar kongres sendiri pada 7 Desember 1994, dan mengeluarkan ketetapan tentang ketidakabsahan kongres sebelumnya dan bahwa harus diadakannya kongres ulang. Mungkin tidak ingin terlibat dalam pertengkaran lebih lanjut, Khairullin secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Mufti Agung. Tazhuddin berhasil dengan sukses mengorganisir kongres ulang tersebut dan mempengaruhi peserta untuk hadir. Hasilnya, kongres ulang pada 17 Januari 1995 dihadiri oleh 2.034 dari total 2494 anggota CSBM dan secara bulat meneguhkan kembali kepemimpinan dan gelar mufti Tazhuddin serta membatalkan semua resolusi kongres November 1994. Terakhir pada Maret 2003, muncul ide dari Tazhuddin untuk menukar

nama badan ini menjadi 'Central Spiritual Board of Muslim Obedient to God of Holy Rus'. Peletakan kata *God of Holy Rus* sangat tendensius memoderatkan wajah organisasi ini dan berorientasi pada keinginan menjaga perdamaian dan ko-eksistensi dengan umat Kristen Rusia.

- *Sifat dan Struktur Organisasi CBSM*

Struktur organisasi CSBM bersifat hirarkis dan kaku di mana distribusi kekuasaan berjalan secara instruksional dari mufti agung ke dewan spiritual regional di jenjang menengah dan terus ke masyarakat muslim di jenjang bawah. Mufti Agung merupakan jabatan seumur hidup dan memiliki kekuasaan sangat luas. Dia menunjuk langsung semua mufti regional (ketua badan spiritual regional dalam jurisdiksinya) dan menentukan persetujuan atas imam yang ditunjuk.

CSBM mengklaim mengurus kepentingan dan mewakili aspirasi masyarakat muslim seluruh Rusia dan di negara-negara eks Sovyet yang tergabung dalam CIS. Walaupun tidak terdapat kesepakatan tentang jumlah organisasi dan jamaah yang dikelolanya—ada yang menyebut 868, 2100 dan 1600—tetapi harus dikatakan bahwa sampai tahun 2001 CSBM adalah organisasi induk terbesar masyarakat muslim di Federasi Rusia.

Pusat-pusat keagamaan penting yang menjadi basis utama CSBM di antaranya St. Petersburgh, Rostov, Ulyanovsk, Kazan, Yekaterinburg, Zelenodolsk, Astrakhan, Chelyabinsk, Penza, Perm, salavat, Izhevsk, Samara, Volgograd, dan Nizhnevartovsk. Untuk mempertahankan dominasinya dalam masyarakat di semua wilayah dimaksud CSBM membuat jaringan komunikasi antar badan tingkat regional. Melihat penyebaran cabangnya yang mencakup seluruh wilayah Rusia—selain Kaukasus Utara, Tatarstan, dan benua Eropa Rusia—maka berarti Tazdhuddin telah mempersatukan ke dalam satu ikatan sekitar 80 % umat Islam Rusia.

2. RCM [35]

- *Pendirian dan Perkembangan*

Dewan Mufti Rusia (The Russian Council of Muftis-RCM) didirikan atas prakarsa mufti Ravil Gainutdin, salah seorang tokoh paling penting

[35] Official Website of the Russian Council of Muftis <http://www.muslim.ru>

dalam masyarakat muslim Rusia bagian Eropa dan merupakan ketua Badan Spiritual Muslim Rusia Belahan Eropa (DUMER). Dewan Mufti Rusia ini diresmikan pada 1 Juli 1996 dalam rapat para ketua badan spiritual muslim wilayah-wilayah Eropa Tengah Rusia dan menunjuk Ravil Gainutdin sebagai ketua pertamanya. Jelasnya, dewan ini awalnya merupakan kumpulan atau asosiasi para ketua badan spiritual muslim yang di luar jurisdiksi atau pimpinan CSBM tetapi selanjutnya melebar dan menarik seluruh anggota badan spiritual dari berbagai daerah sebagai asosiasinya. Secara fungsional, dewan ini diarahkan untuk menangani secara lebih khusus dan terkordinasi persoalan-persoalan keagamaan seluruh jamaah badan spiritual muslim di negara Federasi Rusia. Karena posisinya yang menjadi badan pembantu dan tidak terstruktur secara vertikal maka sejak berdirinya tahun 1996, dewan mufti ini praktis menjadi badan sentral pemersatu penduduk muslim Federasi Rusia.

- *Sifat dan Struktur Organisasi RCM*

Tidak seperti CSBM, kepemimpinan RCM tidak bersifat hirarkis dan vertikal. Organisasi ini tidak membentuk struktur tersendiri melainkan masuk dalam struktur internal masing-masing badan spiritual muslim di wilayah ini. Jelasnya, dewan ini semacam badan pembantu atau badan konsultatif dan tidak bersifat subordinat terhadap badan lain dan bidang lainnya dalam badan-badan tersebut. Dewan Mufti Rusia atau RCM ini menerima keanggotaan dari badan spiritual muslim regional tertentu seperti daerah Tatarstan maupun dari badan koalisi seperti Pusat Kordinasi Badan Spiritual Muslim Kaukasus Utara. Selain itu, dewan mufti ini juga tidak mempersoalkan kalau badan-badan yang menjadi anggotanya juga terikat dan menjadi organisasi bawahan atau subordinat dari satu organisasi atau badan lainnya. Lebih dari itu, perbedaan doktrin dan mazhab juga tidak menjadi persoalan untuk masuk atau menggabungkan diri ke dewan mufti ini. Misalnya, Pusat Kordinasi Badan Spiritual Muslim Wilayah Kaukasus Utara, yang menjadi anggota dewan mufti ini, adalah juga anggota dari Dewan Tertinggi Keagamaan Masyarakat Kaukasus yang pemimpinnya adalah ketua Badan Spiritual Muslim Kaukasus, Syeikh Islam AllahSyukur Pashazade, seorang syiah Azerbaizan.

Komponen utama dari dewan mufti ini tentunya adalah badan spiritual muslim Rusia benua Eropa (DUMER) yang dipimpin langsung

oleh Ravil Gainutdin. Adapun kepengurusan dewan mufti ini ditunjuk melalui pemilihan dan diisi oleh para ketua dari badan-badan spiritual yang mendaftarkan keanggotaannya. Dan momen ini, bagaimanapun dewan ini sangat berorientasi relijius dan bersifat netral, tetap saja dimanfaatkan masyarakat muslim Rusia sebagai ajang ekspresi hasrat politik mereka. Untuk memenangkan calon dari badan spiritual tertentu, badan-badan spiritual suatu daerah memindahkan keanggotaan mereka ke daerah badan spiritual yang akan dimenangkan. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1999 dimana kelompok jamaah dari daerah Penza yang merupakan anggota badan spiritual muslim wilayah Povolzhie berpindah ke badan spiritual DUMER atau dikenal dengan Moskow Muftiyat.

3. Badan-Badan Spiritual Regional Utama Yang di Luar Jurisdiksi atau Tidak Bergabung ke CSBM [36]

a. Badan Spiritual Muslim Rusia Belahan Eropa (DUMER)

Badan ini sebelumnya bernama DUMSTER, didirikan atas inisiatif Ravil Gainutdin pada 29 Januari 1994 dan didaftarkan ke kementrian hukum pada 23 Pebruari 1994. Awalnya menggabungkan diri ke induk organisasi CSBM tetapi kemudian menarik diri dan lalu menjalin kerjasama dengan Dewan Kordinasi Tinggi Badan Spiritual Muslim Rusia. Badan ini merubah nama menjadi DUMER pada 9 Desember 1998 dan membawahi kelompok-kelompok dan jamaah di distrik-distrik otonomi (oblasts) terkemuka yaitu; Moskow, St. Petersburgh, Nizhny Novgorod, Tver, Vologda, Kostroma, Kursk, Vladimir, Ivanovo, Tula, Tambov, Orel, Smolensk, Sochi, Penza, Kaliningrad, dan Yaroslavl. Disebutkan bahwa sampai tahun 2000 badan ini telah memiliki 150 anggota kelompok jamaah.

Sekedar gambaran apa yang dikerjakan badan-badan seperti ini dapat dilihat dari kepengurusan dan divisi organisasi DUMER. Ketua badan adalah eksekutif tertinggi administratif dan menjadi pimpinan dari presidium yang beranggotakan 14 orang tokoh agama dan masyarakat terkemuka. Operasional organisasi terdiri dari sekretariat

[36] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 60-64 .

dan sejumlah divisi yaitu; divisi ilmu pengetahuan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan organisasi agama lainnya, pendidikan Islam dan umum, keorganisasian, keuangan dan pengelolaan sumbangan, seksi editorial, publikasi, ibadah keagamaan, dewan penasehat, penanganan haji, dan distribusi makanan halal.

b. Badan Spiritual Muslim Rusia Belahan Asia

Badan ini didirikan atas inisiatif Nafigulla Asirov pada Agustus 1997 dan didaftar ke kementrian hukum pada 14 Desember 1998. Badan ini sebenarnya mengurus kehidupan keagamaan masyarakat muslim di bagian Timur pegunungan Ural, akan tetapi dalam kenyataannya jumlah masyarakat yang dapat ditangani masih sangat kecil dan merupakan masyarakat yang tertinggal secara ekonomis dan minim fasilitas keagamaan.

c. Badan Spiritual Muslim Tatarstan

Pada Pebruari 1998 presiden Tatarstan Shaimiev mengorganisir kongres yang mempertemukan tokoh-tokoh Islam guna mencari jalan keluar atas perpecahan yang terjadi dalam masyarakat muslim. Kongres lalu meresmikan terbentuknya Badan Spiritual Muslim Tatarstan dan memilih Gusman Iskhakov sebagai ketua dan sekaligus mufti Tatarstan. Dikarenakan etnis Tatar terbilang etnis muslim terbesar di Rusia maka Badan Spiritual Tatarstan memiliki jamaah yang terbanyak di antara Badan Spiritual Regional lainnya yaitu lebih dari 900 kelompok jamaah. Badan Spiritual Muslim Tatarstan tidak mau berinduk ke CSBM melainkan ke RCM, selain karena bermusuhan dengan ketua CSBM Ravil Gainutdin juga karena RCM, terutama ketuanya, berisikan orang-orang keturunan etnis Tatar.

d. Organisasi Keagamaan Muslim Independen di Rusia

Ada sekitar 15 % masyarakat muslim Rusia yang tidak berafiliasi atau masuk menjadi anggota salah satu dua organisasi induk CSBM dan RCM. Mereka ini membentuk organisasi sendiri, ada yang bersifat individu dan ada pula yang terstruktur. Organisasi keagamaan independen ini diantaranya kelompok-kelompok puritan Wahabi, yang berkembang melalui pendakwah-pendakwah Wahabi ataupun literatur asing yang melanda Rusia. Begitu juga badan-badan spiritual independen dan tandingan yang tumbuh subur di belahan Eropa negara

Rusia, wilayah Volga dan Siberia. Yang termasuk organisasi aliran Wahabi misalnya 'Muftiyat' di Oblast Tyumen, 'Pusat Agama Islam' di republik Kalmykia, 'Sayanskiy Kaziyat' di republik Khakassia, 'Kurganskiy Kaziyat' dan 'Baikalskiy Kaziyat' di Oblast Irkutsk. Sementara organisasi non-aliran tetapi tidak tergabung ke dua organisasi induk di atas misalnya disebutkan Asosiasi Mesjid Rusia dan Asosiasi Organisasi Muslim yang dikenal dengan Kazan Muftiyat. Permusuhan terus-menerus antara RCM dan CSBM turut menjadi faktor menyuburnya organisasi-organisasi independen, dan melemahnya kesatuan umat Islam ini selanjutnya menjadi lahan subur bagi masuknya pengaruh-pengaruh kelompok luar dan ideologi ekstrim.

e. Pusat Kordinasi Badan Spiritual Muslim Kaukasus Utara

Badan ini adalah organisasi payung yang menyatukan lebih dari 2000 kelompok jamaah muslim regional di Kaukasus Utara. Didirikan pada 17 Agustus 1998 dalam kongres organisasi muslim regional—diadakan di Nazran ibukota Ingushetia—dan terdaftar secara resmi 3 tahun kemudian atau 31 Januari 2001. Kepemimpinan badan ini digilir di antara mufti-mufti ketua badan spiritual regional menurut prosedur yang telah ditetapkan. Ketua pertama kali adalah mufti Ingushetia Muhammad Albogachiev dan baru berganti pada 2003 kepada Ismail Berdiev, mufti Karachevo-Cherkessia dan Stavropoi Krai. Tujuan utama dari badan ini adalah untuk menyatukan kaum muslim Kaukasus Utara dan untuk melumpuhkan aktifitas organisasi dan orang-orang yang menyebarkan paham ekstrimis, eksklusifisme dan intoleransi. Efektifitas badan ini antara lain dikarenakan kesatuan mazhab anggotanya yaitu mazhab Syafi'i, yang berbeda dengan mazhab kaum muslim Rusia di wilayah lainnya yaitu mazhab Hanafi. Terlepas dari cita-citanya sebagai badan pemersatu, badan ini tetap diwarnai dengan priksi-priksi dalam menentukan daerah mana yang menjadi pemandu dan pemimpin bagi upaya integrasi, interaksi dan komunikasi antar badan spiritual, apakah Ingushetia yang merupakan daerah tempat pendirian atau Dagestan yang merupakan pusat keilmuan dan pengembangan Islam.

f. Dewan Kordinasi Tertinggi Badan Spiritual Muslim Rusia

Pada 30 september 1992, beberapa pemimpin muslim Rusia yang berpengaruh yaitu mufti Gabdulla Galiluddin dari Tatarstan, Nurmuhammed Nigmatullin dari Bashkortostan, Imam Mukaddas

Bibarsov dari Oblast Saratov, mufti Nafigulla Ashirov dari Siberia dan direktur pusat budaya Islam Abdul Vahid Niazov, menyepakati pendirian suatu badan yang hendak mempersatukan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok muslim yang menentang dan berseberangan dengan Talghat Tadzhuddin dan CSBM yang dipimpinnya. Tetapi setelah baru saja berhasil didaftarkan 2 tahun kemudian atau tahun 1994, organisasi ini mulai kehilangan gaungnya dan pada tahun 1996 tokoh-tokoh penting di atas sudah tidak aktif lagi dan meninggalkan organisasi ini. Sekarang organisasi ini hanya tinggal nama dan kepengurusan yang sekedar formalitas, di mana Nafigulla Ashirov dan Abdul Vahid Niazov tetap tercantum sebagai direktur.

Dari penjelasan tentang organisasi serta perhimpunan-perhimpunan sosial-keagamaan masyarakat muslim Rusia didapat gambaran bagaimana umat Islam Rusia terpecah atau terfragmen ke dalam segmen etnis dan ideologi politik. Tetapi di sisi lain terlihat juga upaya yang terus-menerus untuk mengkonsolidasi kesatuan dan persatuan umat Islam seluruh Rusia di tengah-tengah perbedaan tradisi mereka; persaingan antara nasionalisme agama dan nasionalisme etnis; maupun pertentangan dalam ideologi politik.

B. Pemikiran-Pemikiran Politik Islam Di Negara Rusia Federal

Selain faktor persaingan antar individu, kemudian sentimen-sentimen etnisitas dan nasionalisme kedaerahan, upaya persatuan dan kesatuan umat Islam Rusia semakin dimakzulkan oleh faktor yang lebih mendasar yaitu perbedaan ideologi politik keIslaman mereka, maksudnya dalam hal interpretasi dan penekanan aspek siyasah Islam. Sampai saat ini di Rusia berkembang, setidaknya secara garis besar, 5 tren pemikiran politik Islam,[37] yang pastinya berdampak pada respon beragam yang dimunculkan umat Islam Rusia terhadap pemerintah non-muslim mereka.

1. Mazhab Tradisional Hanafi

Fiqh siyasah mazhab Hanafi—yang dalam bidang fiqih juga dikenal lebih rasional—merupakan doktrin utama yang menjadi dasar

[37] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 79-84

pandangan dan sikap politik tradisional muslim Rusia, dalam hal ini baik CSBM maupun RCM. Berbeda dengan mazhab lainnya yang mayoritas memandang pemerintahan sebagai suatu kewajiban agama dan sumber kekuasaan pemerintah adalah bersifat relijius atau sakral, maka pemikir-pemikir mazhab Hanafi (mis. Ali Abdur Raziq (1888-1966), Jamaluddin al-Afgani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905)) menyimpulkannya berdasarkan pendekatan sosiologis dan kenyataan sejarah. Mereka memandang pemerintahan sebagai suatu kewajiban menurut akal sementara sumber kekuasaan adalah rakyat. Dengan demikian, kekuasaan negara bukanlah kekuasaan agama seperti dalam sejarah Kristen dengan kekuasaan gereja-nya, melainkan kekuasaan amanah rakyat untuk mengurus kepentingan bersama mereka, baik yang terkait dengan kehidupan agama maupun dunia.[38]

Masyarakat muslim Rusia pengikut Hanafi secara umum memiliki sikap yang koperatif terhadap pemerintahan non-muslim mereka. Mereka melakukan upaya persuasi untuk mendapatkan pengakuan akan kedudukan Islam sebagai unsur dan bagian dari warisan peradaban Rusia, dan melalui ini mereka memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dua organisasi muslim mayoritas di atas; CSBM dan RCM, mengadopsi komitmen yang sama dalam hal; integrasi politik dan teritori Rusia, karakter sekuler pemerintah, serta prinsip pemisahan agama dan negara. Sebagai buktinya, kedua organisasi tersebut terlihat aktif dan konsisten dalam kegiatan dialog antar agama demi kepentingan *co-existence* dan perdamaian semua agama. Ketika wacana bergulir untuk menjadikan dua agama Islam dan Kristen sebagai agama resmi negara, kedua pimpinan organisasi ini juga sama menolak, yang lebih menegaskan lagi pendirian umat Islam mayoritas tentang *co-existence* dan integrasi negara. Syaikh Ravil Gainutdin dari CSBM menyatakan bahwa menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi dapat melanggar prinsip keadilan pada semua agama dan membuka jalan bagi agama resmi untuk menciderai tujuan harmonisasi dan *coexistence*

[38] Pemikiran siyasah para tokoh sejak zaman klasik, pertengahan dan modern dikumpulkan dan dibandingkan oleh J. Suyuti Pulungan dalam bukunya, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 1999). Adapun al-Raziq pada hal. 304-308, al-Afgani dan M. Abduh hal. 280-290

dengan agama minoritas. Sementara pemimpin RCM menetapkan kerjasama semua agama ini sebagai program dasar organisasinya.[39]

Bahkan, sikap koperatif umat Islam mayoritas ini sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh pemerintah. Ketika ada pemimpin umat Islam yang bereaksi terhadap pernyataan atau kebijakan pemerintah yang sensitif berkenaan dengan Islam ataupun bersikap tegas menuntut keterbukaan hubungan yang lebih luas dengan dunia muslim atau juga menampilkan amalan Islam yang lebih sempurna mereka pun menjadi sasaran tuduhan sebagai ekstrim atau, sedikitnya, simpatisan wahabi. Kondisi sedemikian rupa yang diciptakan pihak federal membuat umat Islam akhirnya terjebak pada sikap mengambil muka kepada pemerintah dan saling menuduh sebagai wahabi.

2. Tradisi Sufi

Sementara di wilayah Kaukasus Utara, tradisi tarikat sufi masih mendominasi kehidupan masyarakatnya walaupun praktek-praktek mistikal Islam sudah mulai berkurang. Dalam bidang fiqh, masyarakat di sini juga berbeda karena memberlakukan mazhab Syafi'i. Tradisi sufi yang homogen dan bertumpu pada otoritas terpusat dan vertikal sang guru telah menciptakan sikap hidup Islam yang ketat dan konservatif. Di wilayah ini, masyarakat menuntut pemberlakuan hukum syari'ah, sama seperti tuntutan masyarakat Chechnya. Orang yang keluar dari mainstream mereka sama sekali tidak ditolerir. Demikian yang terjadi pada pembunuhan atas Said Muhammad Abubakarov yang menyuarakan bahwa pemberlakuan hukum Islam harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan hukum negara Rusia.

Pada dasarnya, tasawuf menekankan aspek ajaran Islam mengenai harmonisasi, kedamaian, kesabaran dan ketenangan, berarti di titik yang berseberangan dengan tendensi kelompok ekstrimis. Akan tetapi, kelompok sufi dapat memunculkan kobaran perlawanan yang lebih masif dan malah permanen ketika sang guru menarik pelatuk instruksionalnya. Hal ini karena kelompok sufi membangun keberadaan

[39] Wawancara Hunter dengan kedua tokoh tersebut, Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 80.

mereka berdasarkan kohesifitas dan doktrin sentral sang guru. Nyatanya, pemerintahan Rusia juga telah mengalami perlawanan paling serius umat Islam yang digerakkan oleh pemimpin sufi, Imam Shamil. Selain itu selama pemerintahan Soviet, tarikat-tarikat sufi inilah yang telah berperan mempertahankan dan menyelamatkan tradisi dan praktek-praktek Islam dari program pengikisan dan pemberangusan oleh pemerintah Soviet. Sekarang ini, keterlibatan dan aktifitas politik pemimpin sufi terus berlangsung, seperti terlihat di republik Dagestan.

3. Aliran Wahabi

Sejak era prestroika Gorbachev, tersebar pandangan-pandangan Islam baru di Rusia yang langsung populer dan menarik minat banyak kaum muslim negeri itu. Salah satu aliran tersebut adalah Wahabiah, yang dikembangkan berdasarkan ajaran Muhammad ibn Abdul Wahhab (1699-1792). Karena kata Wahabi telah mengandung konotasi negatif di Rusia seperti pemberontakan, kekerasan dan semacamnya maka pengikut Wahabi mereka sekarang, untuk mensosialisasikan diri, menamakan kelompoknya sebagai Salafi. Wahabiah pada awalnya adalah suatu paham pemurnian Islam yang lahir di kota Najd yang kala itu di bawah kekuasaan gubernur Muhammad Ibn Sa'ud. Dielaborasi dari pandangan pemurnian Islam abad-abad sebelumnya, terutama oleh Ibn Taimiah (1262-1328), ajaran Wahabi juga mengetengahkan tujuan memurnikan Islam dari praktek-praktek bid'ah dan khurafat dan mengamalkan Islam hanya berdasarkan nash yang sahih yaitu al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dicontohkan oleh kaum salaf. Tentang pengertian Salaf, Wahabiah memiliki posisi tersendiri dan membatasinya hanya pada generasi pertama umat Islam yaitu praktek para sahabat.

Sementara sejumlah paham pemurnian hanya menjadi suatu gerakan pemikiran saja, paham pemurnian Wahabi secara khusus beralih menjadi gerakan politik ketika ia dijadikan doktrin melegitimasi perluasan kekuasaan Ibn Saud, orang yang mewariskan dinasti kerajaan Saudi yang menguasai negara Saudi Arabia. Ide 'Salafiah' yang dikembangkan aliran ini adalah bahwa seluruh umat Islam yang tidak menerima pemurnian Wahabi berarti masih melakukan banyak

penyimpangan agama dan karenanya boleh ditundukkan untuk dipaksa bertobat.[40]

Sebagai suatu gerakan politik, seiring waktu pengembangan ajaran wahabiah oleh pengikutnya semakin mengarah kepada ekslusifisme dan kental dengan nuansa aktifisme dan perlawanan. Doktrin mereka yang sangat unik dan sengaja menciptakan eksklusifisme dapat dibaca misalnya penolakan mutlak terhadap penggunaan akal; penolakan terhadap semua sumber dan metode hukum Islam seperti ijma', qiyas dan sebagainya; pengharaman salawat atas nabi; dan yang paling serius yaitu klaim kafir bagi umat Islam selain pengikut wahabiah.[41]

Aliran wahabi di Rusia disebarkan dari Pakistan oleh suatu gerakan aliran Deobandi. Basis massa aliran wahabi ini adalah di republik Dagestan dan sejumlah daerah di Kaukasus Utara. Tetapi menurut sumber dari DUMER pengikut wahabi tersebar di seluruh wilayah Rusia, bahkan beberapa ulama muslim mainstream mendukung beberapa ajaran wahabi. Pengikut wahabi Rusia juga memiliki interpretasi tentang aspek aktifisme Islam. Bahkan di antara mereka berpendapat bahwa Islam sesungguhnya justru adalah ideologi dan strategi politik itu sendiri. Ketua organisasi wahabi 'Komite Islam Rusia' Geidar Jemal menyatakan keyakinannya tentang, "...ideologi Islam yang sebenarnya dan sejatinya, yaitu Islam sebagaimana dipraktekkan sahabat nabi, adalah Islam militan, Islam politik dalam makna yang sesungguhnya dan sepenuhnya."

4. Aliran Jihadisme

Jihadisme adalah satu bentuk dari paham Islam ekstrim. Paham kelompok ini adalah varian dari prinsip pemberontakan golongan

---

[40] The Oxford Encyclopedia of the Modern Islam, Ed. John L. Esposito, vol. 4 (New York: Oxford University, 1995), hal. 307-308

[41] Sebagaimana dapat dibaca antara lain dalam buku penjelasan atau syarah seorang pengikut wahabiah atas kitab seorang ulama wahabiah, *al-Din al-Khalis* karangan Nawab Bhopal (1832-1890), syarah oleh Muhammad Sidiq Hasan, "The Pure and Undefiled Religion", (Kairo: Maktabat dar al-'Urubah, 1960).

Khawarij. Menurut kelompok ini Islam harus disebarkan dan kebenaran harus ditegakkan, dan itu harus dilakukan dengan tindakan fisik yaitu peperangan suci, yang mereka maknakan dengan jihad. Disebutkan bahwa aliran ini berkembang dari pemikiran seorang Mesir Muhammad Abdul Salam Faraj. Menurut Faraj, jihad adalah rukun Islam keenam tetapi oleh umat Islam belakangan ditanggalkan. Menurutnya lagi, konsep jihad telah didistorsi oleh umat Islam belakangan dengan merubahnya menjadi perlawanan individu manusia atas nafsu rendah masing-masing mereka. Padahal, makna yang sebenarnya sebagaimana dipraktekkan oleh umat Islam awal adalah mengangkat senjata dan menundukkan musuh untuk menerima Islam. Selain itu, jihad bukan hanya tindakan pertahanan atau membela diri melainkan mengandung etos proaktif dan ekspansif dan merupakan instrumen untuk melakukan perubahan. Jihad juga wajib dilakukan tidak hanya kepada musuh luar Islam tetapi juga dari kalangan Islam.

Di negara Rusia, gerakan jihadis mendapatkan dukungan yang signifikan semenjak akhir perang Soviet-Afghan. Seperti disinggung sebelumnya, peperangan ini yang berakhir dengan penarikan mundur tentara Soviet telah memberikan umat Islam Rusia kekuatan psikologis dan juga kepercayaan diri terhadap Islam sebagai agama yang benar, dan karenanya, yang menang. Keyakinan ini kemudian direalisasi dengan meniru tindakan jihad muslim Afganistan, yang memang menamakan diri dengan pasukan mujahidin. Setelah pecahnya Uni Soviet dan terbentuknya republik-republik muslim dalam negara Rusia Federal, tentara-tentara muslim Rusia yang menjadi sukarelawan dalam perang Soviet-Afgan masing-masing kembali ke daerah mereka. Mereka ini cepat terdeteksi karena reaksi frontal mereka dalam konflik-konflik di wilayah mereka. Pemerintah Rusia menuduh kelompok ekstrimis Chechen adalah para personil bekas pejuang dalam perang tersebut, dan dalam pemberontakannya mereka dibantu oleh gerakan jihadis dari luar seperti kelompok Osama bin Laden.

5. Aliran Syahidisme

Syahidisme adalah pecahan dari paham Jihadisme. Gerakan ini lebih frontal lagi dibanding Jihadisme karena anggotanya memuja-muja dan mendambakan mati syahid. Sejumlah peristiwa tragedi pembunuhan massal di Rusia diacu sebagai manifestasi dari ideologi

syahidisme. Dan yang menakutkan pihak Federal adalah frekwensinya yang terus meningkat yang memberikan gambaran semakin meluasnya pengaruh ideologi syahidisme tersebut. Peristiwa yang berlangsung berangkai sebut saja misalnya; pada Oktober 2002-sabotase gedung teater Dubrovka di Moskow, Desember 2002-bom bunuh diri di kantor pemerintah Chechen pro Moskow di Grozny, Mei 2003-bom bunuh diri kamp pemerintah di desa Znamenskoe di distrik Nadterechny sebelah utara Chechnya, Mei 2003- bom bunuh diri pada perayaan agama muslim di desa Ilaskhan-Yurt di distrik Gudermes, Juni 2003-tabrakan bunuh diri sebuah bus terhadap personil militer Rusia di pinggiran kota Mozdok Ossetia Utara, 5 Juli 2003-serangan bunuh diri pada festival rock Krylya di lapangan Tushino dekat Moskow. Semua peristiwa ini telah mengambil korban jiwa sedikitnya 250 orang dan korban luka mencapai ribuan orang.

Fenomena baru dalam serangan pemberontakan di Rusia adalah mengikutsertakan wanita sebagai pelaku, meniru strategi kelompok Palestina dalam perang dengan Israel. Terlihat bahwa sasaran serangan tidak hanya terbatas di wilayah Chechnya melainkan diarahkan ke semua tempat termasuk pemukiman muslim dan pusat pemerintahan Rusia.

6. Aliran Euro-Islam

Setelah ideologi Islam radikal, terdapat pula paham yang berlawanan arah yaitu Islam-Eropa. Paham ini adalah interpretasi baru dan elaborasi lebih jauh lagi pemikiran Jadidisme (pembaharuan) Jamaluddin al-Afgani. Dengan tujuan dasar yang sama paham Eropa-Islam ingin mencapai kemajuan umat Islam melalui pembaharuan dan revitalisasi cara pandang dan sikap hidup umat Islam dari doktrin-doktrin yang menghambat dinamisasi, berorientasi ke belakang dan eksklusif. Akan tetapi, kalau gerakan Jadidisme menempuhnya dengan penggalian nilai-nilai Islam dan substansialisasi budaya Barat hingga berkonsekwensi pada independensi dan kemandirian umat Islam, aliran Euro-Islam melakukan strategi imitasi bahkan adopsi filosofi dan juga prilaku Barat seperti individualisme, premis-premis kreatifisme manusia bahkan termasuk konsep ekonomi pasar dan liberalisasi ekonomi.

Trend pemikiran modern liberal ini di Rusia diusung oleh tokoh terkemukanya Rafael Khakimov, seorang intelektual Tatar dan bekas penasehat presiden Mintimer Shantiev. Tokoh lainnya seperti

Syihabuddin Marjani, Rizauddin Fahreuddin dan Ismail Bey Gaspirali. Menurut Khakimov, pembaharuan Euro-Islam menawarkan konsep Islam-Barat atau istilah lainnya 'konsep Eropa Oriental'. Konsep ini dibangun berdasarkan premis-premis kultural dan mengenyampingkan fungsi dan hakikat Islam sebagai agama dan nilai keimanan. Dengan premis tersebut Khakimov berargumentasi bahwa budaya Tatar dimana Islam telah menjadi subkulturnya berkesesuaian dan dapat disatukan secara padu atau organik dengan liberalisme dan demokrasi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pragmatisme dan dinamisme dalam budaya Tatar sebenarnya menunjukkan kesamaan mentalitas Tatar dengan Eropa ketimbang dengan masyarakat dunia muslim. Selanjutnya kesimpulan melebar dimana Khakimov kemudian menyuarakan bahwa umat Islam Rusia bahkan umat Islam seluruh bangsa, dan bukan hanya masyarakat Tatar, harus mengambil kesempatan dalam peradaban globalisasi dan revolusi informasi yang terjadi pada milenium ke III. Dalam tulisannya yang berjudul "Ke mana Mekkah kita ?" Khakimov menyatakan bahwa untuk dapat ambil bagian dalam kemajuan umat Islam harus mengarahkan diri kepada budaya Barat yang memantik kreatifitas, modernitas dan kompetisi. Khakimov bahkan sampai menafikan signifikansi Bahasa Arab karena bahasa Arab mengandung mentalitas terbelakang sedangkan bahasa-bahasa Eropa dan Barat akan menghantarkan kita mendapatkan berbagai pengetahuan dan karenanya mencapai kemajuan. Selanjutnya dikatakan bahwa dunia modern memunculkan tuntutan-tuntutan baru kepada setiap orang dan masyarakat. Kebenaran terletak pada prilaku berbudaya dan berpendidikan. Untuk mencapai ini maka nilai individualisme Barat adalah prasyarat mutlak. Khakimov tidak mengakui bahwa komunitas Islam global atau *ummah* sebagai suatu yang efektif dan bermanfaat, yang beliau setujui adalah organisasi internasional seluruh bangsa dan aturan-aturan yang disepakati secara universal. Era khalifah sudah lama berlalu dan umat Islam Rusia harus mengikuti cara pandang kebangsaan Rusia, suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah Kristen ortodoks dan di mana syari'ah tidak dikenal dan diakui. Khakimov meyakini bahwa Islam, setidaknya Islam Rusia, tidak bisa mengelak untuk mengadopsi kultur Eropa, artinya Islam akan dapat beradaptasi dengan dunia modern dan melepaskan sisa-sisa budaya masa lalu yang menghambatnya untuk bergerak maju.

Pandangan Khakimov ini merefleksikan respon frustasi umat Islam yang merasa sudah terkekang dan tidak bisa berbuat banyak terhadap arah politik Rusia yang Eropa-sentris dan bersifat sentralisme.

Perpecahan di kalangan Nasionalis Islam

Seperti diterangkan, paham politik nomor pertama di atas adalah merupakan ideologi mainstream umat Islam Rusia, yang dapat disebut ideologi Islam nasionalis. Kelompok nasionalis Islam telah berketetapan untuk tunduk pada pemerintahan mereka yang non-muslim dengan kesadaran bahwa ketundukan mereka tersebut tidak mengkhianati keyakinan teologis mereka dan bahwa mereka tetap dalam kerangka ajaran tradisional Islam sehingga mereka tidak perlu harus merubah-ubah ataupun memformulasi pemahaman Islam yang baru. Ketundukan mereka adalah merupakan pengakuan terhadap kekuasaan politik dan bukan kekuasaan agama yang dengan demikian mereka tetap berhak mempertahankan identitas kelslaman mereka sebagai satu unsur di antara berbagai identitas kelompok lainnya di Rusia. Tekad mereka adalah untuk dapat bertahan dan kemudian memberi warna dan bukannya merubah kehidupan bernegara Rusia, seperti halnya aliran politik Islam yang lainnya. Kulminasi perjuangan mereka sebatas mendapatkan pengakuan akan eksistensi mereka serta menjadi bagian yang integral dan diperhitungkan dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Rusia.

Namun sampai sekarang ini, kelompok ini masih jauh dari cita-cita mereka tersebut. Pertama, secara sosial dan ekonomi mereka masih dalam posisi yang inferior, kemudian karena konflik yang terus berkobar di Chechnya dan imej negatif yang dilekatkan pemerintah terhadap kelompok aliran Islam lainnya telah berimbas pada keterbatasan gerak politik mereka. Akan tetapi di atas semua itu dan yang paling mendasar adalah faktor perpecahan dan konflik internal di kalangan mereka sendiri. Alih-alih menjadi kekuatan penggiring kesatuan umat Islam Rusia, intrik dan perpecahan di kalangan umat Islam *mainstream* (nasionalis Islam) justru telah menyuburkan lahirnya kelompok-kelompok aliran Islam alternatif, yang macamnya telah diterangkan di atas.

Gainutdin Versus Tadzhuddin : Sumber Perselisihan dan Perpecahan Umat Islam Rusia, Perselisihan antara dua tokoh inilah yang menjadi sumber perpecahan dalam tubuh mainstream umat Islam Rusia

yang berimbas pada keseluruhan kehidupan sosial dan keagamaan serta kehidupan bernegara mereka. Konflik internal umat Islam tersebut selain telah melemahkan konsolidasi kekuatan politik umat Islam juga telah mempengaruhi bagaimana Kremlin memandang, memperlakukan, mempermainkan dan akhirnya mengontrol umat Islam.

Awal dari perselisihan ini yang terlihat secara transparan adalah pada peristiwa yang berlangsung September 1994. Waktu itu Tadzhuddin, pemimpin organisasi CSBM, seakan berusaha menggantikan posisi Gainutdin sebagai imam mesjid besar Moskow karena dia bertindak mengambil alih menjadi imam shalat. Akibatnya pada bulan itu juga (23 September 1994), Gainutdin yang merasa ingin disingkirkan mengundurkan diri dari kepengurusan di CSBM—belakangan membentuk dan memimpin organisasi dewan mufti Rusia RCM). Selanjutnya, makin terbuka jalan bagi Tadzhuddin untuk menyudutkan Gainutdin. Dia mengadakan Kongres Umat Islam luar biasa—diadakan di Ufa pada 17 Januari 1995—yang menghadirkan 2500 peserta utusan masyarakat muslim, dan menghasilkan keputusan inti mencabut gelar mufti dari Gainutdin dan melarangnya beraktifitas dalam organisasi kemasyarakatan Islam karena bersalah mendukung aksi perpecahan yang dilancarkan organisasi-organisasi keagamaan dari Arab serta merusak tradisi Islam Rusia. Sejak itu, saling melontarkan cacian dan tuduhan-tuduhan wahabi pun tidak pernah putus dan berlangsung terbuka di antara dua tokoh masyarakat Islam ini. Salah satu yang paling dramatis dan memalukan adalah ketika dua tokoh ini bertengkar dan saling mencela di depan sidang pertemuan Dewan Antar Agama Rusia yang dihadiri tokoh dari berbagai agama dan pihak pemerintah. Ketika itu, keduanya diundang dalam pertemuan resmi kerjasama antar agama dimaksud—merupakan pertemuan keempat pada 22 Maret 2000—, lalu Tazdhuddin memulai mencela dan menentang keikutsertaan organisasi yang dipimpin Gainutdin atau RCM hadir pada pertemuan tingkat internasional tokoh-tokoh agama dunia yang akan diselenggarakan pada Agustus 2000 di New York. Keduanya lalu beradu mulut dan diakhiri dengan kepergian Gainutdin meninggalkan sidang.[42]

---

[42] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 103-104

Poin Perbedaan Tazdhuddin dan Gainutdin

a. Perbedaan Penafsiran Teologis

Aspek ini termasuk faktor mendasar dalam perselisihan dua tokoh dimaksud. Tazdhuddin memiliki pandangan dan menampilkan prilaku keagamaan yang eklektif, inklusif, dan liberal, bahkan dicap heretik atau menyimpang oleh kalangan muslim tradisional. Adapun Gainutdin sebaliknya yaitu masih mengikuti penafsiran teologi sunni tradisional. Contoh pandangan dan perbuatan inklusif dan eklektif dari Tazdhuddin, yang sangat janggal di telinga dan mata masyarakat muslim kebanyakan misalnya; menurutnya, agama pagan orang-orang Turki kuno pra-Islam yaitu penyembahan 'Tengre' adalah bentuk monoteisme yang paling awal. Artinya, nenek moyang bangsa Tatar telah menyembah Allah jauh sebelum kedatangan nabi Ibrahim; menurutnya umat Islam Rusia boleh memiliki situs 'haram' sendiri yaitu tempat suci dan sakral seperti halnya mekkah, dan ini ada di kota kecil Volga Bulgar di republik Tatarstan; Tazdhuddin sering hadir dalam acara-acara keagamaan umat Islam dengan berpakaian jubah pendeta Kristen ortodoks; Tazdhuddin meletakkan ikon-ikon agama Kristen ortodoks di mesjid-mesjid; dsb. Menurut Gainutdin, prilaku aneh Tazdhuddin telah memunculkan keretakan di antara para ulama di Rusia.

Berkenaan dengan wahabi, Tazdhuddin berapi-api menentang penyebaran aliran ini di Rusia sedangkan Gainutdin memberikan reaksi yang tidak tegas dan berbeda-beda antara penerimaan yang setengah-setengah dan sikap tidak setuju dengan cara Kremlin menentang wahabi. Pengamat menyimpulkan bahwa penentangan Tazdhuddin terhadap wahabi memiliki unsur politis juga karena dia tidak takut pengaruhnya dan massanya berkurang. Sejalan dengan sikapnya terhadap kelompok wahabi tersebut, Tazdhuddin juga sangat mendukung tindakan Rusia menundukkan pemberontak di Chechnya yang disetujuinya melibatkan kelompok wahabi. Dia dalam satu kesempatan menegaskan,

> "Rakyat Chechnya tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan gerakan Islamis, yaitu kelompok wahabi atau yang lainnya. Kelompok-kelompok ini telah melakukan kejahatan dengan mencari legitimasi dan memakai topeng keagamaan. Tindakan pemerintah

untuk menghancurkan mereka telah dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum agama dan hukum politik internasional."[43]

Gainutdin di pihak lain bersikap hati-hati dan memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Misalnya, ketika perang Chechnya yang pertama dia berkomentar,

> "...rakyat Chechnya yang minoritas dihadapkan dengan bangsa Rusia yang mayoritas dengan pasukannya yang begitu besar...(maksudnya kondisi yang tidak seimbang). Kita harusnya memahami perjuangan nasionalisme mereka, patriotisme mereka dan usaha mereka melaksanakan ajaran agama mereka."

Tetapi pada perang Chechnya kedua, Gainutdin melontarkan komentar yang tidak mendukung Chechnya dengan kalimatnya,

> "Pada perang Chechnya pertama, mungkin Ahmad Kadyrov memahami invasi Rusia, berdasarkan penafsiran agamanya, sebagai upaya membebaskan rakyat Chechnya. Dan itu terserah kepadanya (karena ternyata pandangannya itu tidak benar). Akan tetapi sekarang situasinya sangat berbeda. Rakyat Chechnya yang dipersenjatai sengaja menginvasi Dagestan. Jadi mereka yang memantik api peperangan terhadap diri mereka sendiri."

Tentang penyebaran doktrin wahabi, di satu waktu Gainutdin memberikan pernyataan yang membela sebagai berikut,

> "Bila kita mengikuti gambaran yang diberikan mass media dan para politikus maka kita pasti akan menilai wahabi negatif. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa wahabi terlanjur dicap sebagai ideologi ekstrimis dan teroris. Padahal, wahabi adalah paham teologi resmi kerajaan Arab Saudi, yang di negara itu sendiri tidak ada terorisme dan ekstrimisme yang dikaitkan dengan kelompok wahabi."

Gainutdin juga mengungkapkan ketidak-khawatirannya tentang penyebaran wahabi di Rusia, "Saya pikir semua omongan tentang ekspansi agama yang dilakukan negara-negara Islam ke Rusia sama sekali tidak terbukti."

---

[43] Mikhail Tulskiy, "The Leaders of Muslim Schism: Talghat Tazdhuddin <http://faces.ng.ru/dossier/2001-06-28/4_split-2.html>

Dikatakannya lagi terkait penentangannya terhadap undang-undang pelarangan wahabi,

> "cara yang paling efektif untuk memberantas gerakan ekstrimis bukan dengan mengeluarkan undang-undang pembatasan aliran dan pemikiran keagamaan, yang tentu menciderai hak beragama kaum muslim yang telah dijamin konstitusi, melainkan dengan menciptakan dan memfasilitasi pendidikan agama yang benar dan memupuk sikap-sikap moderat anak didik agar dapat menerima dan mengerti pentingnya toleransi beragama dan dialog antar agama." [44]

Tetapi sementara dia masih tidak menolak wahabisme di Rusia, pada waktu lainnya dia menyatakan persetujuannya atas tindakan wakil pemerintahan Moskow di Chechnya untuk melarang aliran wahabi di daerah itu.

Terlihat bahwa Tazdhuddin memiliki pandangan liberal dan beraliran kiri sedangkan Gainutdin mengikuti koridor ortodoksi dan tradisional Islam. Sejalan dengan penafsiran Islam mereka tersebut, tampak Tazdhuddin berusaha mendekati Moskow dan tidak segan mengambil jarak dengan umat Islam sementara Gainutdin memilih untuk berdekatan dengan masyarakat umat Islam dan agak independen dari Moskow, namun sambil tetap menjaga sikap non-frontal dan peka dengan arah politik Moskow.

b. Persaingan kepentingan politik dan Keterlibatan Moskow

Selain faktor perbedaan prinsip dan penafsiran Islam, langgengnya perselisihan dua tokoh puncak umat Islam Rusia yang berdampak pada terbentuknya dua kubu dalam masyarakat Islam mainstream adalah disebabkan persaingan kepentingan politik dan dalam merebut perhatian Moskow, yang kemudian diperparah dengan keterlibatan Moskow yang mengambil keuntungan dari kondisi konflik internal umat Islam tersebut. Untuk menciptakan suasana persaingan itu, Moskow terus menggilir dukungannya dan menentukan sendiri siapa yang hendak dipopulerkannya dan dijadikan perpanjangan tangannya dalam permasalahan Islam dan umat Islam Rusia.

---

[44] Semua kutipan merupakan wawancara khusus Hunter, Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 105-106.

Ø *Popularitas Gainutdin*

Hampir sepanjang dekade 90-an Gainutdin yang menikmati dukungan Moskow. Menurut pengamat politik Rusia salah satu penyebabnya karena Tazdhuddin termasuk kelompok yang ikut dalam usaha *coup* terhadap Michael Gorbachev di luar kelompok Yeltsin. Ketika Yeltsin naik dia menyingkirkan kelompok-kelompok pembaharu dan demokrat lainnya yang juga menginginkan kekuasaan dengan kejatuhan Gorbachev. Akibatnya sepanjang dekade 90-an, badan spiritual pusat CSBM pimpinan Tazdhuddin tidak pernah diundang dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah dan pejabat-pejabat politik Rusia maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan negara-negara muslim di dunia. Sebaliknya Gainutdin menghabiskan jadwal melakukan kontak dan kerjasama dengan pejabat pemerintah yang di legislatif dan yudikatif. Dia secara resmi menjadi sumber rujukan berkenaan dengan Islam dan umat Islam Rusia dan secara rutin bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional Rusia. Dapat dipahami sepanjang dekade 1990-an badan spiritual pimpinan Gainutdin mendapat banyak bantuan secara materi dan administrasi.[45] Hal ini terus berlangsung sampai masa pemilihan presiden Maret 2000, di mana Gainutdin mempengaruhi partai-partai Islam untuk memilih presiden Putin dengan berafiliasi ke partai blok Putin (dijelaskan dalam topik mobilisasi politik Islam).

Sebenarnya masyarakat Islam sendiri telah berusaha untuk menjembatani tokoh-tokoh muslim yang berselisih tersebut dengan mengadakan dialog pada acara diskusi 'Peran dan Faktor Islam Dalam Perpolitikan Rusia'. Walaupun tidak mencapai kesepakatan dalam semua detil tetapi kedua pihak secara umum memiliki kesamaan aspirasi dan bersedia menandatangani poin inti yaitu untuk bekerjasama membina sistem pendidikan di seluruh Distrik Volga dengan standar yang seragam. Tetapi Moskow merusak suasana rekonsiliasi ini. Sesaat setelah Putin menjabat dan dia dapat mengontrol jajarannya, dia mulai melakukan manuver politiknya dengan mendekati kubu yang satu, yaitu kubu Tazdhuddin, dan menjauhi kubu yang selama ini telah diakrabinya, Gainutdin.

[45] Aleksei Maximov, "The Leaders of Muslim Schism, Ravil Gainutdin <http://faces.ng.ru/dossier/2001-06-28/7_split-html>

Ø *Popularitas Tazdhuddin*

Setelah dengan berani mendepak Niazov dari partainya 'Unity' dan selanjutnya dari kursi parlemen Rusia (DUMA), seperti dijelaskan sebelumnya, Putin lalu menjauhkan Gainutdin, yang menjadi *backing* Niazov, dari lingkungan Moskow. Putin tidak hendak membiarkan Gainutdin terus populer dan menjadi sangat berpengaruh di jajaran pemerintah dan bahkan masyarakat Islam. Maka dia menarik Tazdhuddin untuk menggantikan kedudukan Gainutdin. Beberapa alasan dikondisikan sebagai penyebab tindakan Putin memilih Tazdhuddin yaitu; tindakan masyarakat Tatar yang semakin berani memprotes kebijakan resentralisasi Putin sementara mereka ini, yang merupakan kelompok etnis muslim yang terbesar jumlahnya, adalah massa utama organisasi RCM pimpinan Gainutdin. Karena merupakan etnis mayoritas, bangsa Tatar ini memang relatif vokal dan independen. Mereka misalnya menentang pemerintah dengan mengganti aksara resmi di republiknya dari Cyrillic ke Latin, yang menimbulkan kekhawatiran Moskow akan fenomena Turkifikasi di Tatarstan. Selain masyarakat Tatar, Gainutdin secara pribadi juga memiliki sikap yang tegas dan independen dibanding Tazdhuddin, mungkin karena merasa pengaruhnya yang sudah kuat dalam masyarakat dan kedekatannya yang telah berlangsung lama dengan personil pemerintahan Putin ditambah hubungannya yang luas dengan negara-negara muslim dunia. Independensinya tersebut terlihat dalam pandangan-pandangannya di atas terkait masalah perang Chechnya dan wahabi. Di atas semua alasan ini, pihak gereja ortodoks memainkan peran besar untuk mempopulerkan Tazdhuddin karena pemahaman agama Tazdhuddin yang liberal dan bersahabat dengan Kristen ortodoks. Maka di tahun-tahun awal pemerintahan Putin, Tazdhuddin lah yang hilir mudik menghadiri undangan Moskow, misalnya pertemuan dewan antar agama Rusia dan konferensi pembentukan gerakan 'Eurasia' atau gerakan sosial politik masyarakat seluruh Rusia dimana ia malah ditunjuk sebagai ketua majlis penasehat pusat lembaga ini. Tetapi tidak lama kemudian Tazdhuddin juga dijauhi dan Moskow kembali mendekati dan mempopulerkan Gainutdin, kali ini momennya adalah peristiwa 11 September 2001.

Ø *Kembalinya Popularitas Gainutdin*

Serangan teroris 11 September 2001 berdampak langsung terhadap keseimbangan kehidupan umat Islam Rusia serta perubahan sikap Moskow terhadap tokoh-tokoh umat Islam tertentu. Hal ini disebabkan arah politik Rusia baru yaitu strategi baru hubungannya dengan Amerika. Dengan latar belakang isu memerangi terorisme global, yang memang telah lama digemborkan Rusia sehubungan konfliknya dengan rakyat muslimnya di Chechnya, Rusia langsung menangkap kesempatan itu untuk bekerjasama dan berdekatan dengan Amerika. Politik internasional ini mempengaruhi kondisi politik dalam negeri dan menggiring tokoh-tokoh muslim kepada struktur aliansi baru dengan Moskow.

Tazdhuddin yang berafiliasi ke gerakan sosial politik 'Eurasia' pimpinan Alexander Dugin tidak bisa merevisi platform organisasi ini yang secara kaku anti-Amerika. Paradigma tentang keutamaan dan superioritas Rusia dan tujuan untuk menciptakan kemandirian dan peradaban khas bangsa Rusia yang memiliki budaya dua benua; Asia dan Eropa, membuat kelompok Eurasia memandang Barat dan Amerika sebagai bangsa dan budaya yang rendah, jahat dan harus dihindari. Maka ketika terjadi pergeseran politik luar negeri Rusia tersebut Tazdhuddin pun tersingkirkan dan sebaliknya Gainutdin masuk ke orbit Moskow. Hal ini karena Gainutdin sebelumnya memilih beraliansi dengan partai Eurasia Rusia. Walaupun bernama sama tetapi organisasi ini berbeda karena yang terakhir menekankan kepada penggalian dan integrasi semua nilai dan tradisi dari semua kelompok etnis di Rusia untuk menjadi unsur peradaban bangsa Rusia, termasuk nilai dan tradisi umat Islam. Konsekwensinya, mereka tidak terlalu sibuk dan transparan dalam mengemukakan kelemahan dan kerendahan Barat. Lantas ketika Rusia merapat ke Amerika, Gainutdin mendapat keuntungan politik dan Moskow juga memanfaatkannya.

Selain dari segi aliansi organisasinya tersebut, diterangkan bahwa posisi Gainutdin diuntungkan karena kedekatannya selama ini dengan Vladimir Zorin, yang baru diangkat menjadi menteri kordinator bidang etnis dan keyakinan. Sebelumnya Zorin adalah deputi perwakilan presiden di Distrik Volga, yang salah satu tugasnya adalah menangani isu-isu hubungan dan kerjasama antar agama dan etnis, hingga

membuatnya melakukan kontak intens dengan Gainutdin sebagai tokoh masyarakat di wilayah ini. Indikasi paling penting dukungan Moskow kepada Gainutdin adalah ketika Putin pada Januari 2002 meminta bertemu Gainutdin—dan bukan Tazdhuddin—untuk membicarakan kondisi dan pandangan masyarakat muslim terhadap pemerintahan Putin. Pada kesempatan itu Putin menugaskan Gainutdin untuk secara reguler memberikan data dan informasi aktual tentang masyarakat muslim serta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan umat Islam Rusia terhadap pemerintah. Pemerintah Putin juga memprogram pendirian majlis tinggi umat Islam yang akan dikordinir Gainutdin dan di dalamnya terdiri dari ketua-ketua badan spiritual atau mufti dari berbagai wilayah, yang tentunya bisa diajak bekerjasama oleh Moskow. Rencananya, Tazdhuddin juga akan diajak menjadi anggota. Akan tetapi, belum lagi kerjasama Gainutdin dengan Moskow benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata kepada umat Islam, dengan tiba-tiba Tazdhuddin muncul lagi ke permukaan. Dalam satu acara resmi yang diorganisir Moskow, Tazdhuddin secara vokal dan terbuka dibiarkan menghujat dan mengkritik Gainutdin.[46]

Ø *Tampilnya kembali Tazdhuddin*

Berpindahnya lagi dukungan Moskow dari Gainutdin ke Tazdhuddin terlihat menjelang konferensi nasional yang direncanakan akan dihadiri oleh tokoh-tokoh muslim seluruh Rusia pada 29 Mei 2002. Konferensi ini adalah atas inisiatif pemerintah ditujukan untuk meminta agar tokoh-tokoh muslim mengeluarkan fatwa larangan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai dalil bagi semua tindakan ekstrimis dan terorisme. Tetapi rencana mendapatkan persetujuan dari seluruh mufti Rusia batal karena tindakan menyengaja dari Tazdhuddin yang mengejek, mengkritik dan menuduh Gainutdin secara terbuka di media massa yang intinya menginginkan Gainutdin tidak diikutkan dalam konferensi tersebut sebab ia adalah pendukung wahabi—tuduhan klasik Tazdhuddin. Seperti yang diinginkan Tazdhuddin, Gainutdin beserta semua badan spiritual yang berafiliasi ke organisasi

[46] Shireen T. Hunter, *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security,* hal. 112

RCM merasa tersinggung dan memboikot konferensi tersebut. Sebagai balasannya kelompok ini mengeluarkan sendiri fatwa mereka, walaupun isinya tidak bertentangan dengan fatwa yang dikehendaki Moskow dari konferensi tersebut. Tanpa kehadiran musuhnya tersebut Tazdhuddin lalu menguasai forum, dan berarti merasa berjasa sendiri dan ingin diakui sendiri telah menyukseskan program Moskow. Tetapi keberhasilan Tazdhuddin merebut perhatian Moskow hanya berjalan hitungan bulan karena Moskow kembali mendatangi Gainutdin, kali ini momennya adalah peristiwa perang Iraq-Amerika.[47]

Ø *Tenggelamnya lagi Tazdhuddin dan berkibarnya Gainutdin*

Perang Iraq-Amerika dikatakan pengamat Rusia sebagai peristiwa yang paling memperparah konflik di antara tokoh-tokoh dan masyarakat Islam Rusia. Dalam suasana yang menegangkan dan sensitif tersebut ternyata Gainutdin yang berhasil menjadi kepercayaan Moskow sementara Tazdhuddin benar-benar mengalami kejatuhan pamor.

Sebagaimana diketahui, sikap pemerintah Rusia menentang invasi Amerika atas Iraq didukung oleh semua penduduknya—baik Kristen apalagi kaum muslim. Penduduk Rusia menuntut pemerintah mereka untuk aktif terlibat menyelesaikan krisis Iraq dengan cara damai, dan untuk mendesak penghentian secepatnya ketika akhirnya perang pecah. Tetapi di tengah keseragaman suara penentangan tersebut, di kalangan kaum muslim terus terdapat perbedaan pandangan dalam strategi dan usaha untuk mencegah kemudian menghentikan Amerika tersebut. Sementara banyak yang sudah puas dengan usaha Putin menegosiasi Amerika, banyak juga yang menyatakan Putin terlalu lembek dan tidak menampilkan posisi tawar yang seimbang. Sehingga ada yang mengambil tindakan memboikot produk-produk Amerika sementara yang lainnya tidak setuju dan menyatakan hal itu tidak akan berpengaruh. Yang lainnya ada pula yang meneriakkan jihad fisik dan senjata dengan menurunkan bantuan pasukan militer ke Iraq. Yang justru menjadi perhatian pemerintah adalah bahwa Tazdhuddin ikut menyetujui dan mendesak jihad fisik tersebut—sebab dia dipandang dari kelompok masyarakat muslim mainstream atau bukan kelompok

[47] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 113

radikal walaupun memang beraliansi ke partai politik anti-Amerika. Pernyataan jihadnya tersebut dengan lantang dia kemukakan, yang sangat menggemparkan dan disebarkan oleh berbagai media di Rusia, misalnya pada 3 April 2003,

> "...Amerika dan Inggris sebenarnya ingin memasuki Iran, Azerbaijan dan Armenia melalui Iraq. Dan dengan bantuan sekutu mereka Shevardnadze mereka pun sampai ke tepi batas negara Rusia...invasi Amerika atas Iraq merupakan strategi jangka panjang untuk berkuasa di wilayah ini, dan akan mengancam keamanan Rusia karenanya tidak ada tawaran lain untuk menghentikannya kecuali membantu Iraq dengan jihad...".[48]

Tetapi alih-alih mendapatkan pujian dan simpati Moskow, Tazdhuddin langsung mendapat peringatan keras dan ancaman terkena UU 'tindakan dan kegiatan ekstrimisme'. Bahkan, pengadilan Rusia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa organisasi pimpinan Tazdhuddin, CSBM, kemungkinan akan dilikuidasi atau dibubarkan. Namun sampai Desember 2003 organisasi ini masih terus berjalan. Dalam kondisi struktur kemasyarakatan umat Islam yang sudah terpilah, kecerobohan Tazdhuddin ini dengan segera dimanfaatkan lawan-lawannya untuk semakin mendiskreditkan dirinya. Gainutdin pun hunjuk diri sebagai pengayom dan pembela umat dengan pernyataannya,

> "...saya menyayangkan tindakan tokoh-tokoh masyarakat muslim yang membuat resah dan menghidup-hidupkan kemarahan dan emosi umat. Tokoh-tokoh tersebut bukannya mencari cara damai dalam menyelesaikan persoalan di Iraq tetapi malah menginginkan perang dunia ke III."[49]

Gainutdin pun meraih simpati Moskow dengan pernyataannya selanjutnya bahwa ia mendukung kebijakan dan strategi Putin dalam menghadapi persoalan Iraq. Pengakuan atas kepemimpinan Gainutdin diperkuat dengan mandat yang diberikan untuk mengorganisir pertemuan mufti seluruh Rusia, untuk mendeklarasikan secara resmi bahwa tindakan Tazdhuddin menyerukan jihad fisik dan mengerahkan pasukan ke Iraq adalah tindakan yang tidak dibenarkan agama dan

---

[48] Dikutip dalam Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 115
[49] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 116

mengkhianati aspirasi umat Islam Rusia selain juga telah merugikan kepentingan politik luar negeri Rusia. Dan Tazdhuddin diputuskan tidak layak menyandang kedudukan pemimpin umat dan harus menon-aktifkan diri dari organisasinya CSBM. Dengan demikian Gainutdin mengokohkan dirinya sebagai tokoh muslim yang patut diperhitungkan dan dijadikan tangan kanan pemerintahan Rusia, setidaknya oleh orang-orang kepresidenan Rusia.

Akhirnya, tentu saja Gainutdin tidak akan menikmati kedudukannya tersebut berlama-lama karena dia masih terus diincar oleh saingannya. Permainan saling menjatuhkan antara Gainutdin dan Tazdhuddin, artinya permusuhan dalam tubuh umat Islam Rusia, belum akan berhenti karena, di luar kepentingan politik individu mereka, Moskow jelas menginginkan kondisi tersebut untuk kepentingannya tersendiri. Ketika Tazdhuddin yang sedang dekat-dekatnya dengan Moskow tiba-tiba menyerukan jihad, dan lalu pihak Moskow mengajukan seruan Tazdhuddin sebagai salah satu alasan kenapa pemerintah Rusia menentang kebijakan Amerika memerangi Iraq—artinya, pemerintah menghadapi posisi sulit menghadapi tuntutan rakyat muslimnya—hal ini menunjukkan satu bukti saja dari skenario-skenario Moskow tersebut. Lebih dari itu, sebegitu cepatnya peralihan popularitas dari satu tokoh ke tokoh lainnya sementara perdebatan antara kedua tokoh tersebut terlihat sangat sepele dan tidak relevan memperlihatkan juga bukan hanya keterlibatan Moskow menciptakan kondisi perselisihan tersebut tetapi terjadinya keterbelahan dan persaingan dalam tubuh pemerintahan Rusia yang masing-masing memanfaatkan salah satu kedua tokoh muslim dimaksud.

C. Bayang-Bayang Ekstrimis Dan Militansi Islam di Rusia

Pengamat politik Rusia mengemukakan ekstrimisme Islam adalah satu-satunya kekuatan penantang yang tinggal seiring keberhasilan Putin memangkas dan mengontrol kekuatan-kekuatan alternatif di semua lini dan sektor.[50] Artinya, sekarang hanya ada 2 pemain utama dalam perpolitikan Rusia yaitu presiden Putin dan militansi Islam.

[50] Georgi N. Engelhardt, "Militan Islam in Russia-Potential for Conflict" Moscow Institut of Religion and Policy <http://mdb.cast.ru/mdb/1-2005/wap/militant_Islam/>

Gerakan militan Islam di Rusia dengan cepat berkembang, keluar dari gerakan separatis Chechen dan memasuki organisasi-organisasi masyarakat muslim Rusia, yang sejak keruntuhan Soviet jumlahnya seketika meledak dan aktifitasnya sangat beragam. Walhasil di Rusia Federal sekarang selain bentuk-bentuk perlawanan separatis dan kekerasan, militansi Islam semakin eksis dan menyebar melalui penerimaan meluas akan ajaran-ajaran Islam ekstrim dan kesadaran akan hak-hak kekuasaan yang telah dimonopoli Moskow. Terlihat bahwa gerakan militan non-separatis ini yang justru paling merepotkan pemerintahan Rusia dan malah menjadi penyangga sehingga kelompok militan separatis dapat *survive*. Mereka ini menyalurkan aspirasi dan tujuan-tujuan anti pemerintah di bawah perlindungan hak kewarnegaraan mereka.

Maka ketika dimunculkan pertanyaan apa dan siapakah yang dimaksud sebagai ekstrimis di negara federal Rusia, jawabannya dapat diberikan dalam dua segi atau aspek yaitu aspek ideologi dan aspek organisasional.

Sebagai satu ideologi, ekstrimisme adalah doktrin yang menjustifikasi tindakan-tindakan perlawanan dan kekerasan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan baru atau negara merdeka yang didasarkan pada nilai-nilai Islam puritan yaitu pemikiran wahabisme-salafiah. Jadi secara ideologis, kelompok ekstrimisme di Rusia adalah mengacu kepada ideologi kelompok jihadisme dan syahidisme. Mereka ini, dalam mencapai tujuannya membentuk pemerintahan baru tersebut, menciptakan langkah-langkah tahapan. Sebagai langkah pertama kelompok ini membentuk komunitas ekslusif yang disebut dengan jamaat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam tafsiran mereka. Ketika keadaan memungkinkan mereka membangun masyarakat terbatas dalam teritori tertentu seperti yang terbentuk di desa Karamachi dan Dagestan, yang diketahui sebagai desa ektrimis.[51] Tetapi, selain bentuk-bentuk komunitas terbatas di berbagai tempat di Rusia, nama jamaat Islamiah juga dipakai oleh gerakan berskala nasional lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka seperti yang di Chechnya dan juga Dagestan.

[51] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 87; Georgi N. Engelhardt. *Ibid*.

Secara struktural dan organisasional militansi Islam sebelumnya selalu mengacu kepada kelompok separatis di Chechnya, yang mereka ini berasal atau setidaknya memiliki jaringan dengan organisasi Islam radikal internasional seperti al-Qaeda ataupun pihak-pihak asing yang ikut memusuhi atau menentang pemerintahan Federal di Chechnya. Tetapi sekarang ini bermunculan kelompok militansi Islam dari dalam negeri Rusia dan bahkan oleh penduduk etnis Rusia asli yang masuk Islam. Menurut sejumlah sumber, militansi Islam dalam negeri Rusia ini jumlahnya jauh melebihi jumlah massa atau anggota aktif organisasi teroris di Chechnya yang hanya mencapai 1000-2000 orang. Jamaat di dalam negeri Rusia yang tersebar di semua wilayah Rusia dikatakan dapat memobilisasi massa sampai lebih dari 10.000 personil perang. Dari jumlah tersebut 4000 orang berasal dari wilayah-wilayah Volga dan sekitarnya serta dari Rusia bagian Tengah.[52]

Selain dari kelompok-kelompok jamaat ini, yang terdiri dari etnis-etnis muslim Rusia, yang menarik perhatian dan mencengangkan adalah pertumbuhan kelompok-kelompok radikal di kalangan etnis Rusia asli yang memeluk Islam. Satu sumber menyebutkan warga etnis Rusia yang telah memeluk Islam berkisar antara 10.000 dan 30.000 orang. Masyarakat muslim etnis Rusia mulai berani menyatakan keberadaan mereka melalui pembentukan perkumpulan etnis Rusia pertama kali di tahun 2000 yang dinamakan 'Pryamoy Put' (Jalan Lurus) dan diketuai oleh pendiri pertamanya seorang bekas pendeta Kristen ortodox, Ali Polosin. Tetapi beberapa waktu kemudian dari perkumpulan ini berkembang sekelompok orang yang tidak puas dengan pandangan agama kebanyakan yang mereka anggap terlalu moderat dan menghalangi terjun ke bidang politik. Tahun 2004, mereka lalu membentuk kelompok sendiri yang disebut dengan organisasi nasional muslim etnis Rusia (NORM) dan mengklaim telah mendapatkan pengikut sebanyak 2500 orang sementara sumber pemerintah mencurigai jumlah mereka mencapai 12.000 orang.[53]

Berbeda dengan masyarakat muslim dari etnis Turki di wilayah Volga-Ural atau etnis-etnis muslim di Kaukasus Utara, muslim etnis Rusia

[52] Georgi N. Engelhardt, *Ibid.*
[53] Georgi N. Engelhardt, *Ibid.*

tidak memiliki akar tradisi keIslaman sendiri atau warisan budaya Islam lokal. Mereka seperti orang terlahir baru dan akan memulai proses pembentukan budaya mereka yang baru. Karena mereka terlepas atau tidak memiliki keterikatan dengan pengalaman budaya kelompok sosial tertentu maka secara sosiologis mereka ini justru lebih mudah untuk dimasuki dan ditarik oleh pendakwah-pendakwah Islam puritan yang telah menyebar di sekeliling mereka. Terbukti, adalah muslim etnis Rusia asli yang pertama kali menjadi pelaku bom bunuh diri di Chechnya pada tahun 2000. Begitu juga adanya kasus tentang gadis-gadis suku Muscovit yang berhasil direkrut Shamil Basaev, pemimpin teroris Chechnya, untuk melakukan bom bunuh diri di mesjid Agung Moskow tahun 2003.

Untuk keperluan makalah ini penelitian akan diarahkan kepada kelompok-kelompok militan dalam negeri Rusia dimaksud. Bagaimana mereka tumbuh dan berkembang dan prospek keberadaan mereka terkait dengan kebijakan pemerintahan Federal Rusia.

1. Faktor-Faktor Berkembangnya Militansi Islam Di Rusia

Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dibagi kepada tiga kategori : a. Faktor Infrastruktural-Institusional, b. Faktor Sosial-Ekonomi, c. Faktor Ethnokultural-Politik.[54]

a. Faktor Kelemahan Infrastruktur-Institusional

Rezim Tsar dan Soviet secara substansial telah menghancurkan infrastruktur fisik dan intelektual keagamaan umat Islam Rusia. Kehancuran bangunan-bangunan fisik pendidikan Islam mematikan generasi orang-orang yang ahli agama. Ketika Rusia memasuki era keterbukaan yang juga membuka pintu bagi kebangkitan kehidupan keagamaan, umat Islam Rusia dihadapkan pada kondisi ketiadaan tenaga-tenaga imam, pendakwah, pendidik, ilmuwan dan ulama yang notabene merupakan roda dari kehidupan keagamaan itu sendiri. Kesadaran keberagamaan yang tumbuh akhirnya memaksa umat Islam Rusia mengadopsi Islam dan tenaga-tenaga agama dari luar melalui proses mengundang kedatangan sejumlah besar tenaga agama dan pengiriman pelajar-pelajar Islam, terutama, dari dan ke negara-negara teluk dan Arab.

---

[54] Shireen T. Hunter, *Ibid,* hal. 85-87; Georgi N. Engelhardt, *Ibid.*

Melalui dua jalur ini pemikiran keIslaman yang beraneka ragam pun termasuk ideologi ekstrimis memasuki negara Rusia. Dipastikan bahwa setidaknya ada beberapa orang pelajar Islam tersebut yang mendapatkan selain pendidikan agama juga pendidikan politik ekstrim dan pelatihan perang. Serangan teroris pertama kali di luar republik Chechnya yaitu pemboman di kompleks pengerjaan gas alam di daerah Kirov disebutkan dilakukan oleh seorang warga Rusia Tatar lulusan dari madrasah di Tatarstan dan sedang menimba ilmu di institut Islam Amir al-Khattab Kavkaz, yang merupakan pusat pelatihan kelompok ekstrimis di Chechnya. Adapun yang datang dari luar misalnya anggota-anggota organisasi Hizbut Tahrir yang berpusat di London, yang masuk ke Rusia melalui Uzbekistan, negara di mana mereka telah memiliki basis yang kuat. Kini mereka melancarkan operasi di Rusia setelah terlebih dahulu berhasil bekerjasama dengan militan Chechnya. Eksistensi mereka di dalam negeri Rusia dan keberhasilannya merekrut warga Rusia terindikasi ketika pada 11 November 2004 seorang warga Rusia Yusuf Kasimahunov, anggota Hizbut Tahrir Moskow, tertangkap atas tuduhan melakukan terorisme dan merekrut orang untuk melakukan aksi-aksi terror.

Akan tetapi hal ini tidak untuk menyatakan bahwa pengaruh asing dan pelajar-pelajar inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyebaran ideologi dan merebaknya fenomena radikalisme di Rusia karena selain tidak rasional dan tidak memiliki fakta, faktor sosial ekonomi yang justru diciptakan pemerintah lebih nyata lagi membentuk sikap dan budaya radikal pada masyarakat muslim Rusia.

b. Faktor Sosial-Ekonomi

Latar belakang berkembangnya militan Islam juga terkait dengan krisis sosial pasca keruntuhan komunisme di mana terjadi kekacauan identitas kebangsaan, yang hal ini ke atas menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah dan kesamping menghancurkan ikatan sosial dan menimbulkan frustasi sosial. Terutama bagi umat Islam yang sudah berabad-abad mengalami status sebagai warga kelas dua, sikap dan kebijakan personal penguasa Rusia yang menyudutkan Islam membuat krisis kepercayaan kepada pemerintah terus berlanjut meski secara formal konstitusional Rusia sudah membuka diri dalam bentuk pemerintahan Republik Federal-nya. Perbedaannya kini, yang

merupakan konsekwensi dari demokratisasi Rusia tersebut, jurang keterpisahan dan keterasingan masyarakat muslim dengan pemerintah mereka terkompensasi dengan hadirnya agen-agen asing baik bersifat organisasi maupun figur-figur individu yang merespon kebutuhan infrastruktur pendidikan bahkan perekonomian mereka serta mengisi kekosongan akan figur pemimpin keagamaan yang memihak kepada mereka dan bukan kepada pemerintah, sesuatu yang tidak terjadi dalam sejarah Rusia sebelumnya. Karena kepercayaan kepada pemerintah sebagai pengayom telah hilang sementara rasa hormat terhadap tokoh-tokoh agama mainstream yang terus menerus berselisih dan berebut perhatian pemerintah semakin menurun mengakibatkan terus bertambahnya orang Islam Rusia yang menarik diri dari kelompok umat Islam mainstream. Tetapi ternyata perhatian yang diberikan pihak asing tersebut tidak menyelesaikan masalah dan malah memperumit problema sosial mereka.

Kedatangan agen-agen dan tokoh-tokoh asing ini serta penerimaan mereka di tengah-tengah masyarakat dihadapkan pada penentangan dari tokoh-tokoh Islam mainstream—yang mereka ini loyal kepada pemerintah—yang mengklaim diri sebagai otoritas dan pengatur kehidupan keagamaan umat Islam dan fasilitas-fasilitas keagamaan Islam di Rusia seperti mesjid dan lainnya. Karena terkondisi dengan konflik dan keterasingan dari mesjid-mesjid umum maka tak ayal kalau radikalisasi pun berkembang secara alamiah di kalangan kelompok masyarakat muslim yang menerima kehadiran dan otoritas keagamaan ulama-ulama, terutama, dari negara-negara Arab tersebut.

Konflik segitiga yaitu; antara umat Islam non-mainstream dengan umat Islam mainstream dan dengan pemerintah; antara umat Islam mainstream sendiri; dan di antara unsur pemerintahan dengan kelompok tertentu dari umat Islam mainstream, akhirnya mewarnai struktur masyarakat Islam Rusia secara keseluruhan, dengan ketajaman berbeda di sana sini dan di berbagai tempat. Dimulai dari yang paling ekstrim di Chechnya di mana konfrontasi dengan kelompok militan memaksa kelompok Islam tradisional yang dipimpin Ahmad Kadyrov meminta perlindungan dan bantuan dari pemerintah di Moskow. Kemudian daerah konflik ekstrim tetapi tidak menimbulkan bentrok sebab kelompok militan sangat mendominasi sehingga tidak mendapatkan perlawanan dari kalangan tradisional seperti di tempat-

tempat di wilayah Tatarstan dan Saratov. Lalu daerah konflik moderat seperti Bashkir, Tyumen dan Perm di mana terdapat kelompok militan yang tidak terlalu ekstrim sehingga dapat tumbuh berdampingan dengan kelompok tradisional. Peneliti Islam Rusia mengemukakan bahwa umat Islam Rusia tradisional kini bergerak kearah militansi moderat tersebut, sementara tarikan tradisional terus mengendur kelompok militansi moderat tersebut akan mengklaim diri mereka sebagai kelompok Islam tradisional atau mainstream.

Proses radikalisme ini tidak berhenti sampai di sini karena kelompok tertentu masyarakat muslim dihadapkan lagi pada kebuntuan mobilisasi sosial ke atas, setelah kebuntuan sosialisasi linear yang diterangkan di atas. Sejumlah individu umat Islam Rusia sama sekali tidak diberikan *channel* (jalan) untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, walaupun peluang kebebasan dan keterbukaan singgah di Rusia mulai awal 1990-an tetapi ruang gerak untuk menaiki tangga kekuasaan dimonopoli oleh birokrat lokal dan elit-elit politik sehingga individu atau tokoh-tokoh yang berpotensi, aktif dan ambisius tetapi tidak direstui Kremlin akan benar-benar kehilangan prospek dan merasa frustasi. Alienasi sosial yang dihadapi umat Islam di Rusia telah mengkonsentrasikan mereka dalam ruang gerak yang sempit, dan pergesekan yang terjadi secara konstan dan intens di antara mereka yang senasib akhirnya memantik api radikalisme dan militansi dan membakar semakin banyak jiwa umat Islam Rusia. Dalam konteks inilah dipahami kenapa mayoritas umat Islam Rusia memiliki pandangan yang campur aduk antara tidak setuju dan setuju, benci tetapi senang, atau menentang dan juga mendukung terhadap tindakan pemberontakan bangsa Chechnya.

Ketika teroris internasional berhasil melancarkan aksi mereka pada peristiwa teroris dunia September 2001, sebagaimana al-Qaeda semakin bertambah pengikutnya kelompok militan Rusia juga semakin naik pamornya dan semakin mendapatkan dukungan. Keadaan ini juga berimbas kepada misi dakwah agama Islam dengan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bukti kekuatan dan kekuasaan Allah dan kemenangan orang yang berjuang demi ajaran agama dan sebaliknya, kekalahan nilai-nilai materi dan ulama-ulama yang bekerja demi materi dan kekuasaan. Sayangnya, kegiatan dakwah ini tidak dijalankan kepada kaum non-muslim malah secara khusus difokuskan kepada kalangan

internal masyarakat muslim, dan ini dilakukan oleh kelompok wahabi yang menjanjikan bahwa kejayaan umat Islam akan bisa tercapai dengan mendirikan pemerintahan baru yang didasarkan pada ajaran syari'ah. Pesona kelompok militan ini juga disebarkan melalui pengkultusan dan penobatan karakter kharismatik pemimpin mereka. Seperti yang dilakukan terhadap Shamil Basaev, pemimpin pemberontak Chechnya, beliau diberitakan luas sebagai tokoh yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan kecerdasan strategi menghadapi tentara Rusia. Keyakinan bahwa Basaev berada di jalan jihad dan akan memenangkan pertarungan disebarluaskan melalui video, internet dan media lainnya.

Akhirnya, faktor sosial tersebut di atas diperumit dengan faktor ekonomi yang muncul berjalin berkelindan. Pertama, karena kebutuhan tenaga asing non-profesional Rusia membuka pintu bagi hadirnya tenaga kerja asing dari negara tetangga, di mana yang terdekat dan termurah berasal dari negara-negara Asia Tengah terutama orang-orang Tajikistan dan Uzbekistan. Sementara mayoritas orang-orang Tajikistan dan Uzbekistan yang berimigran ke Rusia untuk mengubah nasib ternyata orang-orang pelarian dari tekanan pemerintah mereka yang sangat kejam dalam membantai aktifis keagamaan, terutama presiden Uzbekistan Islam Karimov. Kedatangan mereka yang disiksa di negaranya tersebut mendapat simpati dan membangkitkan fanatisme umat Islam Rusia terutama tempat yang mereka datangi di Rusia bagian Eropa dan daerah Ural. Sementara itu, kesulitan ekonomi di sejumlah wilayah muslim lainnya memunculkan pula radikalisme dalam bentuk yang berbeda-beda, ada yang dalam bentuk krisis moral dan psikologis yang membawa kepada perbuatan-perbuatan kriminal dan anarkis dan ada dalam bentuk gerakan primordial yang mengajarkan eksklusifisme dan menjalankan kehidupan yang a-sosial dan tidak realistis.

Kondisi sosial ini secara merata terjadi di wilayah umat Islam yang paling terpuruk perekonomiannya yaitu republik-republik muslim di Kaukasus Utara, Dagestan dan Ingushetia. Diterangkan oleh seorang pengamat, "...kebijakan kacau yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu pembaharuan setengah-setengah, telah menghantarkan Kaukasus Utara berada dalam kesulitan ekonomi yang parah. Industri-industri jatuh bangkrut dan usaha pertanian macet hingga terjadi pengangguran di luar toleransi (80 % dari angkatan tenaga kerja yang ada) dan kemiskinan yang drastis (4 x lebih rendah di bawah

kualitas kemiskinan wilayah lain)." Naifnya, terdapat juga gejala kesenjangan sosial di daerah-daerah sangat miskin ini. Seperti di Dagestan, 200 keluarga (yaitu elit-elit politik dan birokrat yang sebagian besar adalah pendatang) menguasai 85 % hasil bumi dan kekayaan ekonomi republik Dagestan. Di republik Ingushetia, keterbelakangan ekonomi ini diperparah dengan adanya problem pengungsi dari Chechnya. Di akhir 2002 saja Ingushetia telah kedatangan 160.000 pengungsi warga Chechen. Yang terjadi akhirnya dan telah menjadi pemandangan umum sekaligus rahasia umum di Kaukasus Utara adalah pelaku-pelaku kriminal ikut bermain dan menguasai lapangan ekonomi dan politik. Kesenjangan sosial dan kesulitan hidup di luar batas menggiring masyarakat untuk mengacuhkan aturan-aturan moral dan sensitifitas kemanusiaan demi mendapatkan harta dan menikmati kekuasaan. Sementara pemandangan lainnya, terutama di Ingushetia, adalah suburnya gerakan-gerakan eksklusifisme yang menjauhkan diri dari aktifitas duniawiah dan mencela kemewahan materi yang menciptakan sikap kepasrahan dan mematikan upaya kreatif dan rasional untuk keluar dari kesulitan. Yang ditumbuhkan hanya persatuan, persaudaraan, solidaritas dan pengorbanan terhadap anggota kelompok. Siapapun akan menyaksikan dan merasakan kalau masyarakat Kaukasus Utara dan sekitarnya telah berada pada titik frustasi dan kekosongan jiwa seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik-detiknya untuk meledak menjadi kekacauan sosial dan kehancuran akibat perang saudara.

c. Faktor Kultural-Politik

Sementara faktor sosial ekonomi membentuk radikalisme dan militansi di kalangan umat Islam bawah dan miskin, alasan-alasan budaya dan politik menghinggapi pemikiran dan menarik kelompok muslim intelektual bahkan dari kalangan ekonomi mapan. Ide-ide ekstrimis diterima karena mengargumentasikan perlindungan tradisi Islam dari gusuran dan pengaruh negatif budaya Rusia dan Barat. Kelompok ini menerima logika ancaman lenyapnya tradisi dan budaya Islam akibat gempuran revolusi informasi dan kedigdayaan media Barat. Karena ketidakberdayaan menghadapi propaganda budaya luar, kelompok etnis ataupun tokoh-tokoh muslim yang peduli dan menyimpan aspirasi politik bagi eksistensi dan identitas diri jelas tertarik

dengan *channel* yang dibukakan kelompok ekstrimis agar memperjuangkan pemerintahan Islam di mana mereka nantinya menjadi pemegang kekuasaan dan menikmati jaminan eksistensi tradisi dan budaya kelslaman mereka. Pengakuan seorang tokoh masyarakat muslim mainstream mufti Ravil Gainutdin semakin mengindikasikan mendasarnya faktor kultural-politis tersebut bagi penerimaan ide-ide ekstrimis oleh kalangan mapan, yaitu bahwa," ...kaum muslim bahkan dari generasi anak muda menghadapi kesulitan beradaptasi dengan perkembangan globalisasi. Mereka mengalami kegoncangan nilai karena gaya hidup tradisional mereka tergugat sementara gaya hidup baru Barat belum bisa mereka terima dan serap."

2. Prospek Ekstrimisme Rusia *vis a vis* Respon dan Kebijakan Federal Pusat.

Sejauh ini, pemerintah Rusia memang telah melakukan tindakan-tindakan memperketat keamanan sehubungan semakin gencarnya terorisme di negeri itu. Hal ini misalnya penyiagaan 24 jam kepolisian sampai ke pelosok-pelosok negeri, inspeksi mendadak ke tempat-tempat yang dicurigai dipakai sebagai persembunyian, maupun intensifitas pengamanan aset-aset kunci negara dan pusat-pusat kegiatan umum. Akan tetapi, mendukung kesimpulan pengamat politik Rusia,[55] semua tindakan pemerintah Rusia tersebut masih bersifat formalitas dan reaktif dan Putin belumlah memiliki konsep yang jelas atau malah ideologi yang benar untuk menangani terorisme bersandarkan agama dimaksud. Tidak adanya konsep dan visi yang jelas yang mendasari kebijakan keamanan nasional Rusia ini menjadi faktor utama ketidakmampuan Putin menghambat laju penyebaran ideologi dan menghentikan persoalan ekstrimisme di negeri itu. Faktor lainnya seperti faktor geografis dan luasnya ukuran negara Rusia juga akan dapat diatasi dan memerlukan solusi kebijakan yang koheren dan partisipatif selain tentunya keseriusan.

Kondisi batas tepi negara Rusia yang terbuka dan masih kosong, terutama di bagian selatan, memang menjadi satu kelemahan dan selalu dimanfaatkan oleh ekstrimis luar untuk menyelundup masuk. Akan tetapi hal ini akan teratasi dengan keseriusan menciptakan keamanan

[55] Georgi N. Engelhardt, *Ibid.*

dan perdamaian di wilayah-wilayah perbatasan Rusia dan terutama sekali penyelesaian damai persoalan Chechnya, yang menjadi jalan masuk utama dan tempat pembiakan paling subur bagi ekstrimis Rusia. Kenyataannya, kebijakan dan politik personal Putin memperlihatkan ketidakseriusannya untuk menciptakan perdamaian yang hakiki di wilayah ini. Janji Putin di awal jabatannya akan menciptakan keamanan dan ketentraman malah langsung dilanggarnya sendiri dengan serangan berkelanjutan ke Chechnya. Keputusan Putin untuk menggunakan kekuatan militer sebagai satu-satunya cara menyelesaikan persoalan Chechnya dan mengerahkan serangan membabi-buta telah mencuatkan reputasi dan imej Putin sebagai seorang yang sangar dan keras kepala.

Putin kini seperti terjebak dalam lingkaran rumit untuk dapat menyelesaikan persoalan ekstrimis di negerinya tersebut, yang telah menyeret sejumlah wilayah Rusia ke dalam kubang kekacauan dan kekerasan. Ketidakmampuan Putin untuk merumuskan konsep, kebijakan dan strategi yang jelas, koheren dan sistematis terkait dengan sebab yang dimunculkan sejarah budaya politik Rusia dan juga politik personal Putin sendiri yaitu kondisi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya, pemerintah terhadap rakyatnya. Kondisi ini berakar dari masa Rusia Soviet dan berlanjut ketika masuknya era pemerintahan Federal sampai masa Putin menjabat, yang kesemuanya menciptakan jarak dan tidak membangun sistem kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Politik totaliter masa Soviet dan kemudian politik sentralisme presiden masa Federal telah membentuk mentalitas masyarakat yang tidak acuh, *a priori* dan pasrah terhadap perlakuan tekanan yang diterima maupun peristiwa-peristiwa kekerasan dan kekacauan di sekelilingnya. Pihak keamanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat terutama kepolisian sarat dengan korupsi, premanisme dan kekacauan manajemen, yang hanya mengokohkan persepsi masyarakat tentang pemerintah yang tidak melindungi dan memberi keamanan. Tidak berfungsinya pengawasan sosial dan tidak terbangunnya sistem sosial dalam hal keamanan masyarakat seperti kepedulian sosial, sikap tolong menolong dan seterusnya akhirnya menciptakan dilema lain yaitu tindakan pemerintah memberlakukan teknik-teknik pengamanan yang mekanis dan prosedur pengamanan yang ketat dan kaku, salah satunya generalisasi kecurigaan terhadap kelompok etnis tertentu.

Di tingkat internasional, Putin memang sepertinya telah memiliki agenda tertentu dalam penanganan terorisme melihat dukungannya terhadap kebijakan Amerika "Perang Terhadap Terorisme Dunia." Akan tetapi komitmen dukungannya tersebut tidak ditindaklanjuti dan diadaptasikan pada konteks domestik Rusia padahal negara ini lebih mendesak untuk dilakukan tindakan karena lebih rentan pada serangan teroris ketimbang negara Amerika sendiri. Dan malah kemudian terlihat pula kalau Putin tidak sepenuhnya mendukung Amerika atau tepatnya tidak sepenuhnya yakin bahwa strategi Barat tersebut akan efektif dan menguntungkan Rusia. Dikatakan demikian karena mulai 2002 Rusia menempuh cara baru dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan negara-negara Islam guna mendapatkan dukungan dalam tindakannya terhadap umat Islam Rusia dan agar dapat memahami pemikiran dan isu-isu yang berkembang berkenaan dengan Islam dan umat Islam. Pada Maret 2003 pihak liga Arab dan organisasi negara-negara Islam telah diundang untuk memonitor pemilihan umum percobaan untuk memilih presiden, anggota parlemen dan konstitusi Chechnya. Hubungan Putin semakin mesra ketika pada Agustus 2003 dia menegaskan niatnya untuk terlibat lebih jauh dan mendapatkan status sebagai pengamat dalam organisasi konferensi negara Islam (OKI).

Lantas kenapa usahanya tersebut sejauh ini tidak juga menghasilkan kebijakan yang terarah dan membuahkan hasil ? Dengan membaca visi nasionalisme Putin dan konsep kebijakan luar negerinya—seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya—maka langsung akan dipahami bahwa visi pragmatisme Putin adalah yang lebih mendasari tindakan kerjasama tersebut ketimbang upaya mencari solusi bagi penciptaan keamanan dan kedamaian umat Islam di Rusia. Putin melihat dunia Arab sebagai pasar potensial bagi industri-industri Rusia dan sebagai investor yang menjanjikan. Baru saja Putin mengadakan pendekatan dengan dunia Arab, Rusia langsung mendapat tawaran investasi yang sangat besar dari Arab Saudi—mencapai 200 juta dolar—yang disampaikan melalui pangeran Turki, Feysal, yang mengunjungi Moskow Oktober 2002. Selanjutnya, aliran bantuan pun deras memasuki negara Rusia termasuk, tentunya mengikut, funding bagi infrastruktur keagamaan dan pendidikan Islam. Putin tentu tidak bisa mencegah dan terpaksa merelakan, setelah pernah menghentikan sejenak, dana-dana keagamaan dari dunia Arab tersebut masuk

bergandengan dengan dana-dana ekonomi dan perdagangannya. Tetapi setidaknya kalau Putin memiliki perhatian untuk membenahi kehidupan sosial perekonomian dan pendidikan umat Islam, dia seharusnya bisa mengontrol dana-dana keagamaan tersebut berjalan secara terprogram agar berdaya-guna dan berhasil guna secara merata dan bukan malah menciptakan keresahan dan memecah-belah umat Islam dalam negeri.

Ini pula hasilnya ketika Putin mulai merubah pendekatannya dengan umat Islam dalam negeri. Sebagaimana terlihat, mengiringi rencana strategi luar negerinya tersebut, Putin juga membenahi hubungannya dengan rakyat Islamnya dengan merangkul ulama-ulama muslim *mainstream,* utamanya Talghat Tajhuddin dan Ravil Gainutdin, ke lingkungan Kremlin dan menempatkan mereka sebagai informan dan konsultan dalam hal penanganan permasalahan umat Islam dalam negeri. Yang terjadi, pihak Kremlin menciptakan kondisi pilih kasih dan kecemburuan dan menggiring tokoh-tokoh umat Islam tersebut untuk berebut perhatian Moskow. Dibiarkannya konflik terus menerus dan berkepanjangan di antara tokoh-tokoh umat Islam tersebut, yang akhirnya berdampak pada keterbelahan umat Islam secara organisasional dan ritual sampai ke tingkat paling bawah atau awam, menguatkan indikasi bahwa Kremlin tidak peduli atau memang menginginkan atau malah sengaja dan ikut terlibat dalam penciptaan konflik di kalangan umat Islam Rusia.

3. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa sampai beberapa waktu ke depan, Rusia masih menjadi sasaran empuk bagi para ekstrimis. Kelompok ekstrimis Islam, walaupun belum masuk ke ranah politik praktis secara nasional, tetapi akan semakin mengokohkan basis sosialnya dan mengefektifkan struktur dan keorganisasiannya sampai pada level nasional.

Upaya-upaya keamanan yang telah dilakukan pemerintah utamanya yaitu : melakukan tekanan terhadap pemberontak Chechnya untuk mengikuti skenario Moskow dalam melaksanakan kehidupan politik di negeri itu. Kemudian, mencari dukungan ke dunia internasional yang hal ini baru didapatkan Rusia setelah Amerika menyatakan program perang terhadap teroris, sebagai reaksi dari kesuksesan insiden terorisme dunia 11 September 2001. Sebelumnya Rusia berteriak ke

mana-mana tentang terorisme di Chechnya dan tidak ditanggapi oleh Amerika. Bahkan, setelah mendukung Amerika pun Rusia tidak sepenuhnya juga didukung Amerika dalam isu Chechnya. Faktor ini pula salah satunya kenapa Putin kemudian tidak begitu komitmen dengan dukungan yang telah diberikannya dan lalu membangun hubungan dengan dunia Islam sebagai cara lain menangani terorisme di negerinya. Setelah dengan dunia Islam, Putin juga membenahi hubungannya dengan masyarakat muslim dalam negeri. Akan tetapi, melihat hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan dan kondisi radikalisasi di negeri Rusia terus menguat maka muncul pertanyaan dan kritik tentang kerangka dasar dan ideologi yang mendasari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tersebut.

Pengamat politik Rusia, Engelhardt, menganalisis bahwa upaya-upaya keamanan yang dilakukan pemerintah Rusia pada dasarnya bersifat reaktif dan insidentil. Satu sama lainnya merupakan strategi yang terpisah tanpa diikat kesatuan kerangka ideologis dan karenanya, tidak mampu menyelesaikan masalah keamanan Rusia saat ini apalagi mengantisipasi tantangan yang lebih rumit di masa depan. Ketiadaan visi yang jelas tersebut berkonsekwensi pada tidak terumusnya konsep dan kebijakan yang tegas, koheren dan terpadu, dan ketiadaan rumusan kebijakan dimaksud pada gilirannya membuat pemerintah tidak berhasil mensosialisasikan motivasi dan cita-cita yang kuat serta tujuan dan arah tindakan yang jelas kepada seluruh unsur dan unit keamanan dan juga masyarakat.[56]

Akhirnya, semua problem visi dan ideologi di atas dikatakan Engelhardt bermuara pada masalah mendasar yang sedang dihadapi Rusia yaitu krisis identitas nasional dan ketiadaan platform untuk kerjasama guna kepentingan bersama antara pemerintah, unsur keamanan dan rakyat. Karena itulah maka keresahan bersama rakyat dan bangsa Rusia terhadap terorisme tidak menjelma menjadi sebuah konsern dan rasa berkepentingan terhadap upaya-upaya pemerintah memerangi militansi Islam, apalagi memiliki dorongan untuk terlibat dan membantu.

❖❖❖

[56] Georgi N. Engelhardt, *Ibid.*

BAB VI

KESIMPULAN

BAB VI
KESIMPULAN

Terlihat bahwa pembahasan Islam dan politik di Rusia tidak bisa disajikan secara singkat dan sederhana karena kita dipaksa menelusuri terlebih dahulu konstruk perpolitikan dan visi serta identitas kebangsaan negara Rusia Federal yang, naasnya, masih juga dalam wacana, proses transisi dan reformulasi. Sementara analisis terhadap suatu wacana dan proses transisi menghendaki untuk membaca keseluruhannya dan mengkaitkannya dengan ide dan masa-masa sebelumnya.

Penelitian terhadap kehidupan politik keagamaan umat Islam di Rusia Federal saat ini memperlihatkan dukungannya terhadap asumsi-asumsi yang diajukan di bab pendahuluan. Adapun kesimpulan pokok yang dicapai terkait dengan masalah dan tesis utama penelitian ini adalah :

1. Bahwa Putin pada dasarnya melestarikan pola interaksi yang telah menyejarah yang dimainkan pemerintahan Rusia terhadap rakyat muslimnya yaitu pola hubungan, yang dalam istilah Hunter, "*imperialis the conquerer*" (penakluk yang menang) dengan "*the conquested*" (yang ditaklukkan). Pada pemerintahan Federal masa Putin hal ini terekspresi dalam konsepsi nasionalisme Putin dan identitas kebangsaan Rusia yang ingin ditegakkan Putin, di mana Islam dan umat Islam tidak menjadi bagian atau unsurnya dan bukan merupakan kepentingan yang dipertimbangkan. Konsep nasionalisme liberal reformis yang dihasilkan dari identitas kebangsaan Putin meletakkan Barat sebagai acuan intelektual dan kultural bagi kemajuan negara Rusia walaupun kejayaan sejarah masa lalu Rusia sebagai bangsa tetap menjadi motivasi dan landasan moral bagi cita-cita kejayaan dan kekhasan Rusia sebagai bangsa.
2. Pola interaksi yang diwarisi Putin tersebut membuktikan ketidakmampuan dan ketidakmauan Rusia untuk bergerak dari sistem totalitarianisme ke sistem demokrasi, di mana identitas kebangsaan akan merangkul secara adil unsur agama, etnis dan budaya semua rakyat Rusia sehingga dan melalui mana konflik kepentingan antara tuntutan rakyat muslim untuk diakui dan

menentukan nasib sendiri—mulai dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrim di Chechnya—dengan kondisi integritas dan keamanan negara dapat dicarikan jalan keluarnya dan tidak menjadi dilema. Kenyataannya Putin tidak mampu mendamaikan kepentingan tersebut sehingga harus menerapkan politik sentralisme untuk tujuan keamanan dan integrasi negara dengan menekan kebebasan dan menutup ruang mobilisasi umat Islam yang tidak memberontak sementara membantai mereka yang melakukan pemberontakan. Dan untuk hubungan keluar Putin menerapkan politik pragmatisme, yaitu mencari dukungan dan mendapatkan bantuan bagi kebijakan-kebijakan politiknya dan pengukuhan kekuasaannya.

3. Sementara penguasa Rusia selalu berusaha menyingkirkan eksistensi dan meredam gerak politik umat Islam akan tetapi, ketahanan umat Islam untuk memelihara identitas mereka, resistensi mereka dari paksaan berasimilasi serta gejolak perlawanan yang mereka lakukan di setiap ada kesempatan, mau tidak mau dan diakui atau tidak sangat mewarnai bahkan menjadi variabel utama dalam hal bagaimana bangsa Rusia membentuk identitas kelompok mereka, dalam merumuskan pandangan hidup mereka, sampai pada cara mereka mengkonsepsi dan mempersepsi keamanan diri dan kelompok mereka, pembentukan negara, sistem pemerintahan dan akhirnya kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negerinya. Ini yang terus berlangsung sejak awal berdirinya sampai fase pemerintahan Federal di bawah kekuasaan Putin. Tetapi harus digarisbawahi bahwa bagaimanapun seluruh umat Islam Rusia menuntut kebebasan dan penentuan nasib sendiri hanya umat Islam di wilayah-wilayah yang ditundukkan belakangan yaitu negeri-negeri di belahan Asia Tengah yang berjuang untuk memisahkan diri dan menuntut kemerdekaan penuh. Adapun umat Islam yang sejak awal berdirinya negara Rusia sudah diintegrasikan—mereka ini berada justru di teritori pusat dan strategis pemerintahan negara Rusia—tidak demikian. Kecuali Chechnya yang sekarang mengambil tindakan memberontak untuk memisahkan diri, mayoritas umat Islam Rusia hanya berjuang untuk diakui sebagai bagian dari bangsa Rusia sepenuhnya. Artinya, mereka diberikan kebebasan mengekspresikan dan mengembangkan identitas budaya dan kepercayaan mereka,

kesempatan mobilisasi politik ke atas dan keadilan politik dan ekonomi.

4. Tetapi karena struktur dan proses politik Rusia dikomandoi dengan kultur otoriterisme, supremasi presiden dan dominasi para elit kelompok bukannya budaya pluralisme, partisipasif dan kompetisi terbuka maka walaupun pemerintahan Putin secara formal sudah membuka kran bagi politik partai, hanya segelintir umat Islam yang berusaha dan mencoba menyalurkan aspirasi politik mereka melalui prosedur partai. Dan seperti dapat diduga, bagaimanapun gigihnya para aktifis muslim tersebut pihak Kremlin pada akhirnya menumpas habis usaha dan cita-cita mereka untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik umat Islam Rusia yang secara khusus menjadi corong bagi kepentingan Islam dan umat Islam seluruh Rusia. Selain melalui perangkap-perangkap formal seperti peraturan-peraturan hukum pemerintahan Yeltsin dan Putin tidak malu-malu mengerahkan kekuatan kekuasaannya untuk mencegah soliditas dan berkembangnya partai-partai Islam serta menjegal masuknya pemimpin-pemimpin muslim yang sukses—yaitu menyingkirkan rintangan-rintangan budaya dan sosial ekonomi dan menyiasati perangkap-perangkap hukum yang didesain—ke jenjang pemilihan nasional. Walhasil, mayoritas kelompok umat Islam dari berbagai aliran dan ideologi menggunakan cara-cara informal bahkan illegal untuk menyalurkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan politik mereka.
5. Maka dapat dipahami kalau umat Islam Rusia mengalami radikalisasi dan mengembangkan ideologi-ideologi ekstrim, dengan kondisi mereka yang dibantai secara ekonomi dan politik, dan hidup di tengah kultur, sistem dan institusi sosial kemasyarakatan yang masih saja berkarakter homogen dan dominasi etnis mayoritas. Sebagaimana data yang didapat bahwa kondisi radikalisasi dan perkembangan organisasi dan kelompok-kelompok ekstrimis di negara Rusia lebih banyak dibentuk oleh faktor-faktor internal kebijakan politik penguasa Rusia ketimbang sumbangan atau yang dipasok oleh aktor-aktor luar Rusia.

REFERENSI

Sumber Internet

1. Http://www.rand.org/publications/IP/IP229.pdf
2. Http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
3. Http://www.danielpipes.org/blog_trackback.php/495
4. Http://www.voanews.com/english/archive/2006-02
5. Http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia.07112005
6. Http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia.19072005
7. Http://www.iea.ras.ru/lib/neotl/07112002061822.htm
8. Ajay Goyal, "*Democracy Irreversible, Putin says*"<http://www.2.russiajournal.com/weekly/article.shtml?ad=3650>
10. Michael McFaul, "*Putin Shows His Colors*" <www.hoover.stanford.edu/publications/digest—mcfaul.html>
11. Denis Petrov, "*News from Rusia*" <www.fordinstitute.org/news.petrov/newsdp012601.htm>
12. A.B. Yunusova dan M.G. Valeeva, "The All-Russia Congresses of Muslims," dalam *The Muslim Dictionary of the Bashkir State University* <http://www.bdxc.ru/encikl/s/siezd_mus.htm>
13. Central Election Commission of the Russian Federation <www.fci.ru/zakon/zakon95/95fz.htm>
14. RIA News Agency, "*Russian Islamic Organization Becomes Party*" <http://www.monitor.bbc.co.uk>
15. Cameron Ross, "Political Parties and Regional Democracy in Russia," *Fiftieth Annual Conference of the Political Studies Association,* 10-13 April 2000 <http://www.psa.ac.uk/cps/2000/Ross%20Cameron.pdf>

16. R.A Utyabai Karimi dan D.D azamatov, "The Central Spiritual Board of Muslim of Russia and The Europian Countries of CIS," dalam *The Muslim Dictionary of the Bashkir State University* <http://www.bdxc.ru/encikl/s/siezd_mus.htm>

18. Official Website of the Russian Council of Muftis <http://www.muslim.ru>

19. Mikhail Tulskiy, "*The Leaders of Muslim Schism: Talghat Tazdhuddin*" <http://faces.ng.ru/dossier/2001-06-28/4_split-2.html>

20. Aleksei Maximov, "*The Leaders of Muslim Schism, Ravil Gainutdin*" <http://faces.ng.ru/dossier/2001-06-28/7_split-html>

21. Georgi N. Engelhardt, "*Militan Islam in Russia:Potential for Conflict*" Moscow Institut of Religion and Policy <http://mdb.cast.ru/mdb/1-2005/wap/militant_Islam>

Sumber Buku

1. Anthony D. Smith. *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Basil BlacBlackwell, 1986).

2. Ernest Gellner. *Nations and Nationalism* (Oxford: Blackwell, 1990).

3. J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 1999).

4. John L. Esposito (Ketua Editor). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islam* (New York: Oxford University, 1995).

5. John M. Thompson. *Russia and the Soviet Union: An Historical Introduction from the Kievan State to the Present.* 3rd Edition (Boulder, CO : Westview Press, 1994).

6. Lilia Shevtsova. "From Yeltsin to Putin: The Evolution of Presidential Power" dalam *Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership in Rusia's Transition,* ed. Archie Brown dan Lilia Shevtsova (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2001).

7. Muhammad Sidiq Hasan Kiab. *The Pure and Undefiled Religion by Nawab Bhopal (1832-1890)* (Kairo: Maktabat dar al-'Urubah, 1960).

8. Prof. Dr. Taufik Abdullah (Ketua Editor). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

9. Rafael Khakimov. "Russia and Tatarstan at a Crossroad of History," dalam jurnal *Anthropology and Archeology of Eurasia* 37 no. 1 (Summer 1998)

9. Serge A. Zenkovsky. *Pan Turkism and Islam in Russia,* Russian Research Center studies, no. 36 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960).

10. Shireen T. Hunter, *Islam in Russia : The Politics of Identity and Security* (London: M.E. Sharpe, 2004).

11. Teresa Rakowska-Harmstone. "The Study of Ethnic Politics in the USSR" dalam *Nationalism in the USSR and Eastern Europe in the Era of Breznev and Kosygin,* ed. George Simmons (Detroit: University of Detroit Press, 1970).

12. Uri Ra'anan. "The Nation-State Fallacy," dalam *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies,* ed. Joseph V. Montville (Lexington, MA: Lexington Books, 1991).

13. Wan Jamaluddin Z. "Dinamika Perkembangan Islam di Rusia Modern", *Jurnal Analisis* (Pusat Penelitian IAIN Raden Lampung), vol. 4 no. 1 (Juli 2004).

14. Wayne Allensworth. *The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post Communist Rusia* (Lanham, MD : Rowman and Littlefield, 1998).

❧ ❖❖❖ ☙